



PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

**RKPD
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022**



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, serta untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I .

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2

Penjelasan mengenai RKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan:

- a. renja Perangkat Daerah;
- b. kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 4

Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Kepala BAPPELITBANGDA setiap triwulan.

Pasal 6

Kepala BAPPELITBANGDA bertanggungjawab dalam pelaksanaan Peraturan Bupati dengan kewajiban melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD yang tertuang dalam renja Perangkat Daerah serta menghimpun dan menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

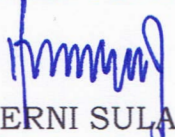
Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDG's) serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tujuannya adalah untuk memberi panduan dalam pembangunan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua dalam pentahapan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Tahun kedua pelaksanaan RPJMD menjadi tahapan keberlanjutan dari tahun 2021 untuk dapat memberi landasan dalam pelaksanaan upaya pencapaian target lima tahun RPJMD 2021-2026. Secara teknis, pedoman yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 antara lain adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah direvisi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. **Secara substansial**, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah; rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator

- kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran dan lokasi kegiatan; serta prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab;
2. **Secara normatif**, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
 3. **Secara operasional**, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan masing-masing Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah;
 4. **Secara faktual**, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, proses penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dilakukan melalui pendekatan perencanaan sebagai berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
2. Pendekatan Partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat;
3. Pendekatan Politis, yaitu dilaksanakan dengan mengakomodir kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional serta pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Sedangkan secara substansif, penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dilaksanakan melalui pendekatan :

1. Holistik-Tematik, yaitu proses dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor yang meliputi potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Integratif, yaitu proses yang dilaksanakan dengan menyatukan wewenang dan sumber pendanaan dari seluruh pihak kedalam satu proses terpadu dengan fokus yang jelas;

3. Spasial, yaitu proses perencanaan dan pengendalian berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah.

Selanjutnya RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Secara lebih rinci, penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

- 1). Persiapan Penyusunan RKPD;
- 2). Penyusunan Rancangan Awal;
- 3). Penyusunan Rancangan;
- 4). Forum Perangkat Daerah;
- 5). Pelaksanaan Musrenbang;
- 6). Perumusan Rancangan Akhir; dan
- 7). Penetapan.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

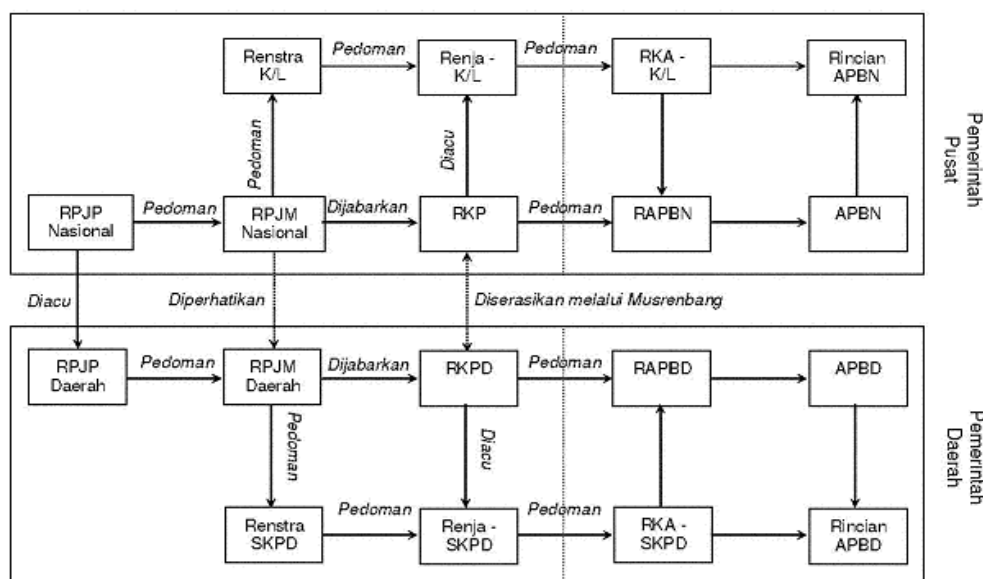
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (5-69/2019));
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah : (5-167/2021));
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

1.3. Hubungan Antar dokumen Perencanaan

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.1. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah.



Gambar 1.1.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Untuk mewujudkan keterkaitan dan keselarasan antar dokumen perencanaan dari tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan penelaahan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan di wilayah yang tertuang dalam RKP dan RKPD Provinsi sebagai bagian analisis dalam penyusunan RKPD. Dengan demikian dapat diwujudkan keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga untuk mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2023.

Hubungan antara RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran visi dan misi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 serta berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
2. RKPD Tahun 2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
3. RKPD Tahun 2023 telah disinergikan dengan dokumen perencanaan tingkat kabupaten lainnya yang masih berlaku dan sedang dilaksanakan diantaranya: Dokumen rencana aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (*Sustainable Development Goals/SDG's*), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Road Map Reformasi Birokrasi (RB), RAD percepatan penanggulangan stunting daerah, Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) 2021-2033, serta pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM.
4. RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Renja Perangkat Daerah. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah;

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah untuk :

1. Memberikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2023;
2. Menjabarkan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
3. Mewujudkan sinergitas rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023;
4. Menyediakan tolok ukur dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan pemerintahan, menggunakan indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan.

1.5. Sistematika RKPD

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan penyusunan RKPD; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat tentang kondisi umum daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; evaluasi pelaksanaan

RKPD tahun 2021 dan realisasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021; permasalahan pembangunan daerah; isu strategis pembangunan daerah; dan inovasi daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah sampai tahun 2021 dan perkiraan tahun 2023, yang antara lain mencakup tantangan serta prospek perekonomian daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2023; arah kebijakan keuangan yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian samapai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah; Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah; dan Kebijakan serta Strategi Pembangunan Kabupaten Purbalingga.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini secara eksplisit memuat Rencana Program prioritas daerah tahun 2023 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, dengan mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah yang didalamnya juga terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

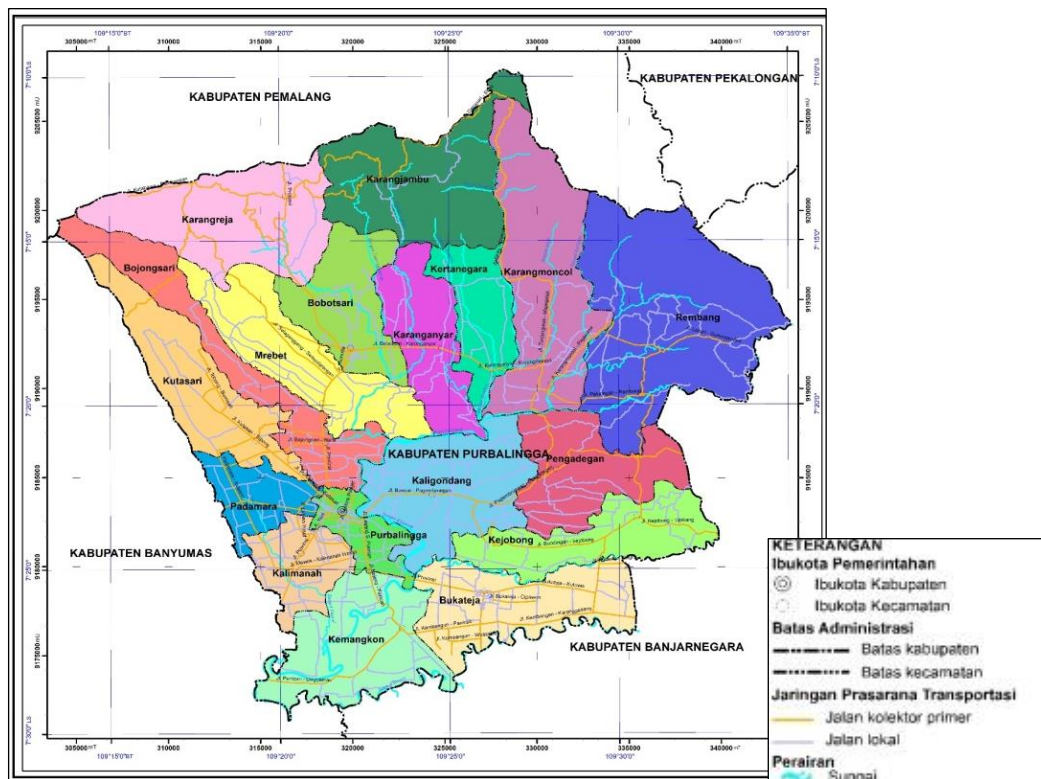
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak antara $101^{\circ} 11''$ BT - $109^{\circ} 35''$ BT dan $7^{\circ} 10''$ LS - $7^{\circ} 29''$ LS". Berdasarkan data BPS, Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas kurang lebih 77.764,122 Ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (\pm 3.254 ribu Ha). Sedangkan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031 Kabupaten Purbalingga memiliki luas kurang lebih 80.576 Ha.

Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan, 996 dusun, 1.558 RW dan 5.092 RT. Rata-rata setiap desa/kelurahan memiliki 6 rukun warga dan 21 rukun tetangga. Berdasarkan batasnya, Kabupaten Purbalingga di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Jarak ibu kota Kabupaten Purbalingga dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yaitu sejauh 191 km.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2.1. Peta Administratif Kabupaten Purbalingga

B. Kondisi Morfologi dan Topografi

Fisiografi Kabupaten Purbalingga terletak pada daerah perbatasan antara zona Serayu Utara dan zona Vulkanik Kwarter. Karakteristik morfologi wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 0 – 1.500 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kabupaten Purbalingga masing-masing mempunyai sifat-sifat khusus seperti diuraikan sebagai berikut:

- Daerah Ketinggian 7 – 25 meter dpl
Merupakan daerah potensi persawahan dengan pengairan yang memadai.
- Daerah Ketinggian 25 – 100 meter dpl
Daerah dengan sebagian wilayah masih berpotensi untuk tanah persawahan. Sebagian wilayah ketinggiannya antara 50 – 100 meter dpl berpotensi untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi yang lebih besar.
- Daerah Ketinggian 100 – 500 meter dpl
Daerah berpotensi utama untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi wilayah bergelombang dan berbukit-bukit.
- Daerah Ketinggian 500 – 1.000 meter dpl
Daerah berpotensi untuk wilayah perkebunan dan baik untuk dikembangkan budidaya tanaman sayur-sayuran, mengingat wilayah tersebut cukup dingin.
- Daerah Ketinggian diatas 1.000 meter dpl
Daerah yang terbatas untuk usaha pertanian karena topografi wilayah bergelombang. Daerah dengan topografi demikian berpotensi sebagai wilayah non budidaya atau kawasan hutan lindung.

Dataran tinggi di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Rembang, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara dan sebagian Kecamatan Kutasari, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Bobotsari. Sedangkan dataran rendah di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kejobong, sebagian Kecamatan Kutasari, Kecamatan Padamara dan Kecamatan Kemangkon.

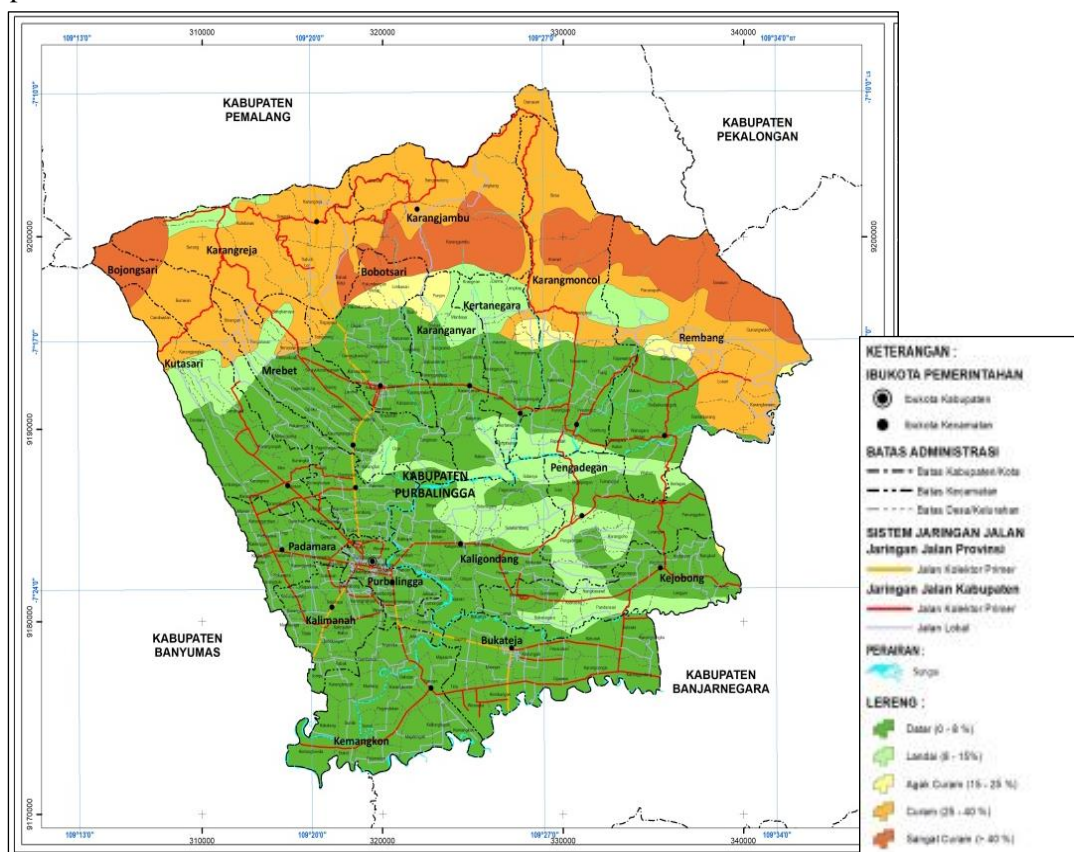
Sedangkan dilihat dari karakteristik topografinya, Kabupaten Purbalingga memiliki topografi yang beragam, dari dataran rendah, daerah perbukitan hingga daerah pegunungan. Karakteristik wilayah berdasarkan kondisi permukaan tanah menunjukkan sebaran sebagai berikut:

- a. Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan kelerengan > 40%. Daerah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar,

Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

- b. Bagian tengah merupakan daerah dengan kelerengan 25%-40%. Daerah ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Bojongsari.
- c. Bagian selatan merupakan daerah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 - 25%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Gambaran kondisi topografi Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini:



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Purbalingga

C. Kondisi Geologi

Dilihat dari jenis tanahnya, Kabupaten Purbalingga memiliki komposisi litologi batuan yang terdiri atas:

- Alluvium endapan rawa dan danau, terutama tersusun oleh lempung, umumnya bersifat kedap air.
- Endapan alluvium gunung api, terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi.

- Lava andesit berongga asal Gunung Slamet dengan kelulusan terhadap air tinggi sampai sedang.
- Endapan vulkanik tua yang terdiri dari aliran lava yang bersifat andesit sampai basalt dan breksi. Kelulusan terhadap air rendah sampai sedang.
- Batu pasir tufaan, batupasir, konglomerat, tufa, breksi dan lempung dengan kelulusan terhadap air rendah.
- Napal, napal lempungan dan napal globigerina dengan sisipan tipis tufa pasiran, batu gamping pasiran, batu pasir, batu lempung dan lempung tufaan dengan kelulusan terhadap air rendah

D. Jenis Tanah

Kabupaten Purbalingga memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai dari perbukitan sampai pegunungan. Berikut ini adalah jenis tanah yang terdapat di daerah Kabupaten Purbalingga dan penyebarannya:

1. Tanah Alluvial

Tanah ini biasanya berwarna kelabu, coklat, dan hitam, bersifat peka terhadap erosi, karena merupakan endapan tanah liat dan pasir, maka terdapat di sepanjang sungai yang cukup besar, seperti Sungai Gintung bagian tengah dan hilir, Sungai Klawing, Sungai Pekacangan dan Sungai Serayu bagian tengah dan hilir.

2. Tanah Latosol

Di Kabupaten Purbalingga tanah latosol dirinci menjadi:

- Tanah Latosol coklat yang berasosiasi dengan negosol coklat
- Tanah Latosol coklat dari bahan induk vulkanik
- Tanah latosol merah kuning, dan
- Tanah Latosol coklat tua

3. Tanah Andosol

Jenis tanah ini berbentuk dari batuan bekuan dan intermedior, mempunyai sifat peka terhadap erosi, berwarna coklat atau hitam kelabu. Terdapat disekitar puncak Gunung Slamet.

4. Tanah Gromosol

Tanah ini berbentuk dari endapan liat dan bekuan. Berwarna kelabu sampai hitam, bersifat peka terhadap erosi, dapat dijadikan tanah pertanian dan perkebunan.

5. Tanah Regosol

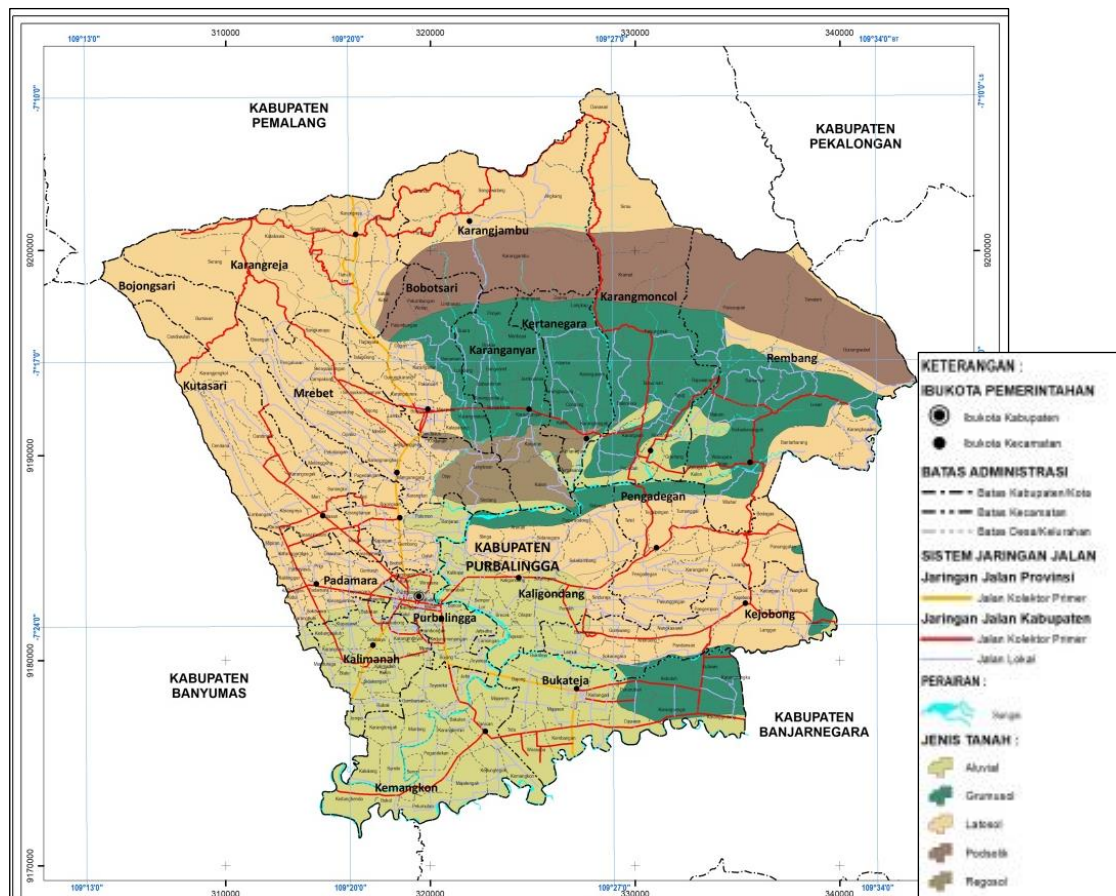
Tanah ini berbentuk dari batuan endapan dan bekuan, sangat peka terhadap erosi, kurang baik untuk pertanian.

Tabel II.1. Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

Kelas	Jenis Tanah	Deskripsi Terhadap Erosi	Lokasi
I	Alluvial , tanah clay, planosol, hidromorf kelabu, laterit air tanah	Rendah/ Tidak Peka	Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Bojongsari, Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang
II	Latosol	Sedang/ Agak Peka	Kecamatan Pengadegan, Kejobong, Kaligondang, Padamara, Bojongsari, Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, karangjambu, Karangmoncol, Rembang
III	Kambisol, mediteran, brown forest soil, non calcic brown, mediteran.	Tinggi/ Kurang Peka	-
IV	Andosol, laterit, grumosol , podosol, podsolc .	Sangat Tinggi/ Peka	Kecamatan Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Rembang, Kaligondang, Pengadegan, Kejobong, Bukateja, Karangreja, Karangjambu
V	Regosol , litosol, organosol, renzina.	Amat Sangat Tinggi/ Sangat peka	Kecamatan Mrebet, Karanganyar, Kertanegara, Bobotsari

Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambaran kondisi jenis tanah di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dalam gambar peta berikut ini:

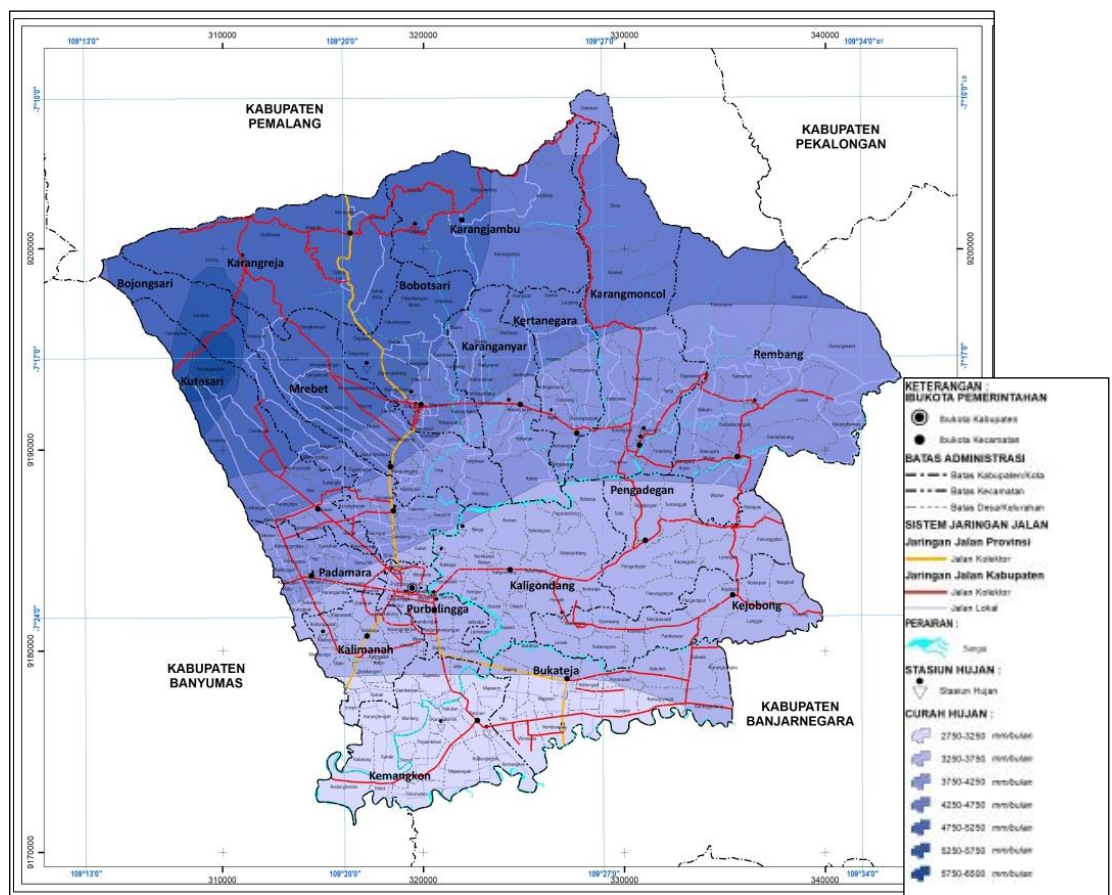


Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Purbalingga

E. Kondisi Klimatologi

Tipe iklim di Purbalingga tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia, yaitu beriklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan silih berganti setiap setengah tahun. Berdasarkan klasifikasi dari Oldeman adalah beriklim A1 yang lima hingga sepuluh bulan secara berurutan ialah bulan basah. Tipe A1 merupakan tipe iklim yang menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat ditanami padi satu kali dan ditanami palawija sebanyak dua kali. Tanaman yang sebaiknya banyak dikembangkan dan dibudidayakan adalah tanaman palawija. Wilayah Kabupaten Purbalingga sebagian wilayahnya terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet dengan rata-rata curah hujan 2.502 mm/tahun dan suhu udara berkisar antara 22°C - 33°C.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

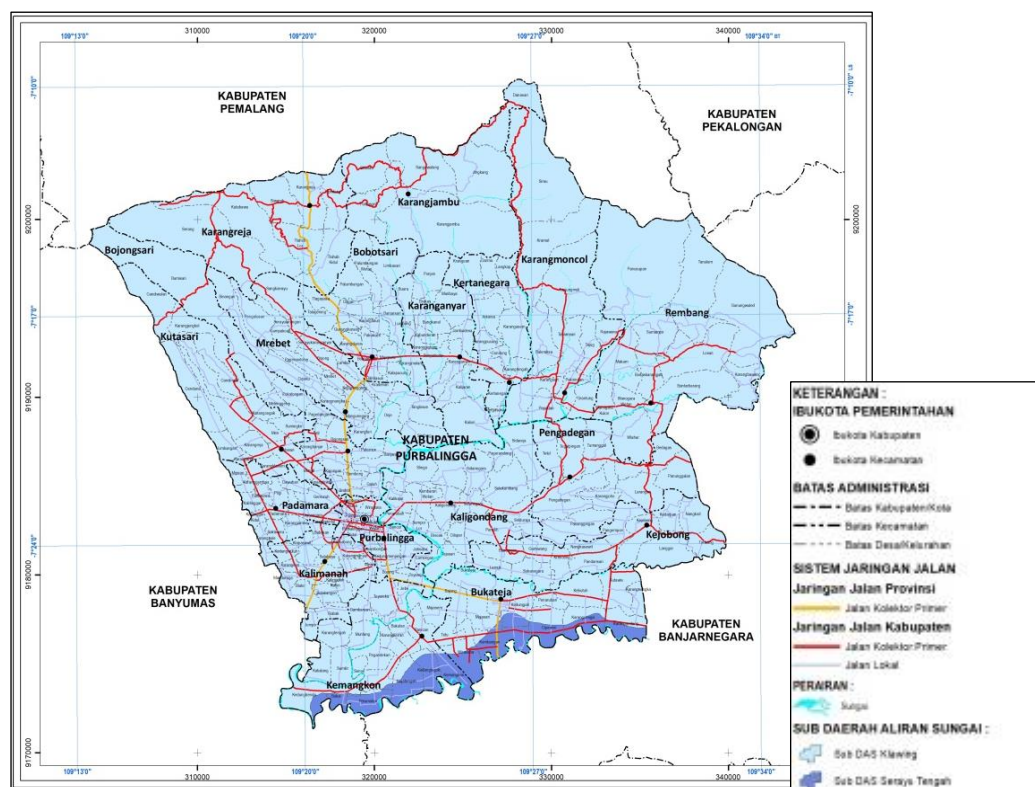
Gambar 2.4. Peta Curah Hujan Bulanan Kabupaten Purbalingga

F. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya, sungai-sungai di Kabupaten Purbalingga belum dimanfaatkan secara optimal, baik untuk pengairan tanah pertanian maupun untuk kebutuhan lainnya. Tetapi sungai yang memungkinkan untuk dibuat bendungan, dam dan waduk-waduk kecil lainnya yang tidak banyak mengeluarkan dana, telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk pengairan sawah, perikanan dan sebagainya. Debit air sungai itu sendiri dalam setahunnya tidak tetap, karena debit air

sungai dipengaruhi oleh curah hujan di daerah hulu. Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 2 macam aliran, yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya serta sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga saja. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, yaitu sungai Pekacangan, sungai Serayu dan sungai Klawing. Sedangkan sungai yang hanya mengalir di Kabupaten Purbalingga yaitu:

- Sungai Ponggawa
- Sungai Tungtung Gunung
- Sungai Gemuruh
- Sungai Laban
- Sungai Kajar
- Sungai Kuning
- Sungai Lembereng
- Sungai Wotan
- Sungai Tlahap
- Sungai Gintung
- Sungai Soso
- Sungai Tambra
- Sungai Lebak
- Sungai Muli



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Purbalingga

G. Kondisi Penggunaan Lahan

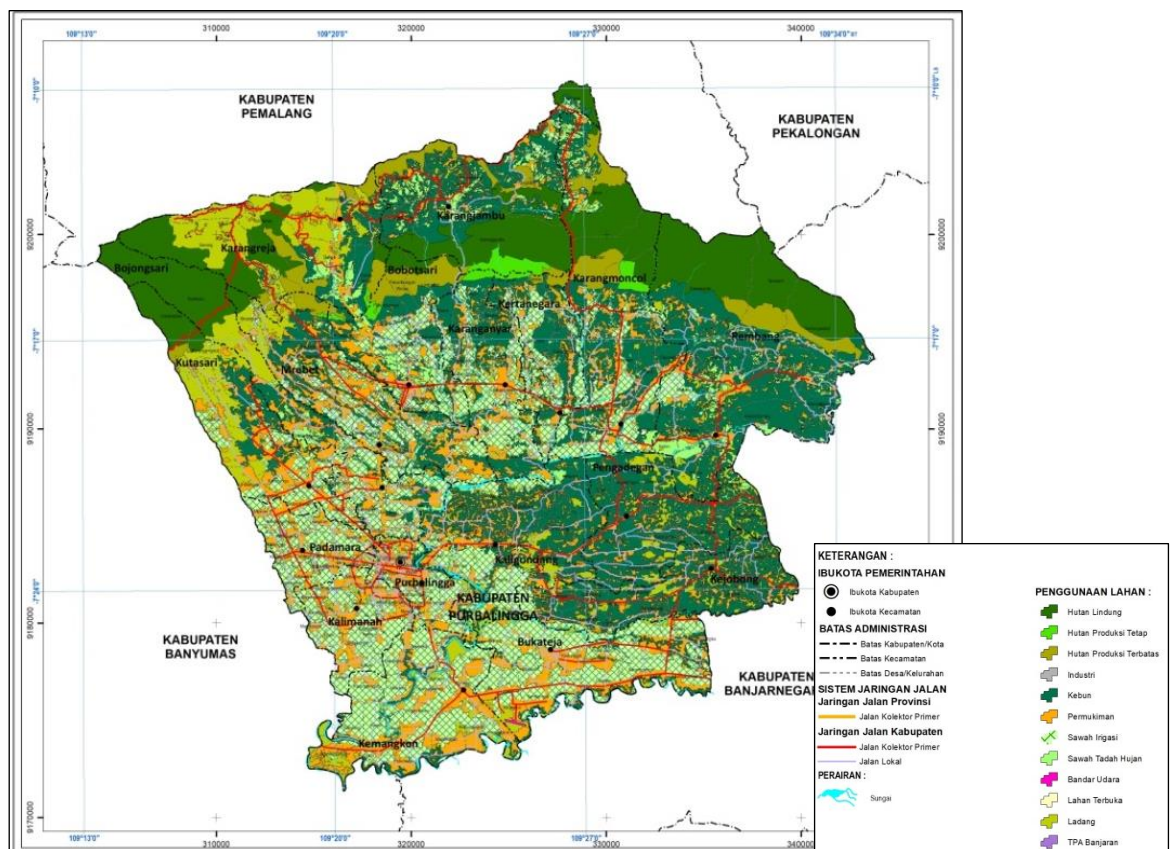
Penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga berupa lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan bukan lahan pertanian. Luas penggunaan lahan sawah mencapai 18.730,60 ha yang tersebar di seluruh wilayah. Luas lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Purbalingga mencapai 39.529,10 ha yang tersebar di seluruh wilayah. Sedangkan luas bukan lahan pertanian mencapai 19.504,30 ha yang tersebar di seluruh wilayah. Penggunaan lahan pertanian bukan sawah dan bukan lahan pertanian di Kabupaten Purbalingga berupa tegal/kebun, perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, tambak/kolam/ empang serta jalan, perkim, perkantoran, sungai dan lainnya.

Tabel II.2. Penggunaan Lahan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Kecamatan	Pertanian		Bukan Lahan Pertanian	Jumlah
		Lahan Sawah	Bukan Sawah		
1	Kemangkon	2.296,60	471,90	1.744,50	4.513,00
2	Bukateja	2.380,10	226,00	1.633,90	4.240,00
3	Kejobong	220,00	1.875,00	1.904,00	3.999,00
4	Pengadegan	88,20	2.565,30	1.521,50	4.175,00
5	Kaligondang	1.065,50	3.813,50	175,00	5.054,00
6	Purbalingga	565,40	66,50	840,10	1.472,00
7	Kalimanah	1.277,70	3,00	967,30	2.251,00
8	Padamara	1.120,20	67,50	539,30	1.727,00
9	Kutasari	980,40	3.238,00	1.143,60	5.290,00
10	Bojongsari	979,00	1.595,00	351,00	2.925,00
11	Mrebet	1.277,00	1.894,90	1.617,10	4.789,00
12	Bobotsari	1.042,90	1.588,30	596,80	3.228,00
13	Karangreja	470,50	5.515,50	1.463,00	7.449,00
14	Karangjambu	669,50	3.256,50	683,00	4.609,00
15	Karanganyar	1.151,50	1.189,50	714,00	3.055,00
16	Kertanegara	872,50	1.633,30	1.296,20	3.802,00
17	Karangmoncol	1.430,70	3.254,30	1.342,00	6.027,00
18	Rembang	914,90	7.275,10	969,00	9.159,00
	Jumlah	18.730,60	39.529,10	19.504,30	77.764,00

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2022

Luas lahan jalan, perkim, perkantoran, sungai dan lainnya mencapai 24,29% atau seluas 19.504,30 ha. 50,83% penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga berupa lahan pertanian bukan sawah, dan 24,88% berupa lahan pertanian sawah.



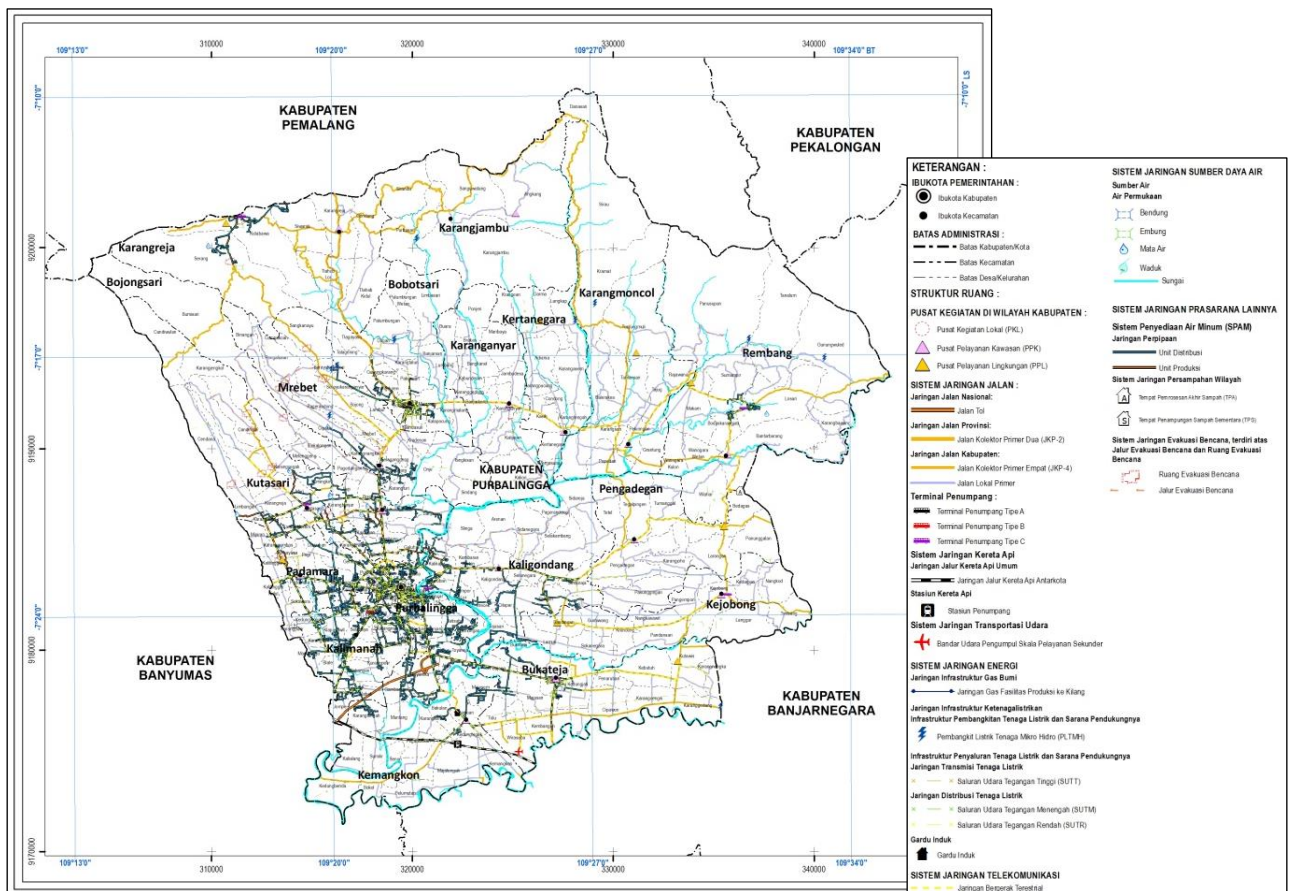
Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 6. Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Purbalingga

H. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031, sistem perkotaan di Kabupaten Purbalingga terdiri atas struktur perkotaan; dan sistem wilayah. Struktur perkotaan terdiri atas PKL; dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten. Dalam rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari PKL dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten yaitu PPK dan PPL. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Purbalingga meliputi Perkotaan Purbalingga dan Perkotaan Bobotsari.

Pusat perkotaan Purbalingga didorong sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sedangkan Kecamatan Bukateja, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Karangreja didorong sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Hirarki pertama dalam rencana sistem perkotaan Kabupaten Purbalingga adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2.7. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung seluas 13.959 Ha terdiri dari:

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

Di Kabupaten Purbalingga kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Sesuai SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004, luas hutan lindung di Kabupaten Purbalingga adalah 10.385 Ha meliputi Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Rembang. Sedangkan untuk kawasan resapan air seluas kurang lebih 42.083 Ha.

- (2) Kawasan perlindungan setempat;

Berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar waduk dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. Sempadan sungai di Kabupaten Purbalingga meliputi seluruh wilayah yang dilalui oleh Sungai Pekacangan, Sungai Serayu, Sungai Klawing, Sungai Ponggawa,

Sungai Gemuruh, Sungai Kajar, Sungai Lembereng, Sungai Tlahab, Sungai Soso, Sungai Lebak, Sungai Tungtunggunung, Sungai Laban, Sungai Karang, Sungai Kuning, Sungai Wotan, Sungai Gintung, Sungai Tambra, Sungai Gringsing, dan Sungai Muli. Sedangkan untuk Rencana pembangunan waduk terdapat di Kecamatan Rembang. Begitu pula untuk kawasan lindung spiritual dan kearifan local berada di Petilasan Ardi Lawet yang berada di Desa Panusupan Kecamatan Rembang dan Masjid Sayid Kuning yang berada di Desa Onje Kecamatan Mrebet. Kemudian untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, termasuk didalamnya hutan kota, seluas 30% dari luas kawasan perkotaan yang tersebar di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan lindung geologi;

Kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, meliputi kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air. Kawasan imbuhan air tanah di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Purwokerto – Purbalingga seluas kurang lebih 40.298 (empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan) hektar. Sedangkan kawasan sempadan mata air terdapat di kawasan sekitar mata air di Kecamatan Kutasari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja dan Padamara.

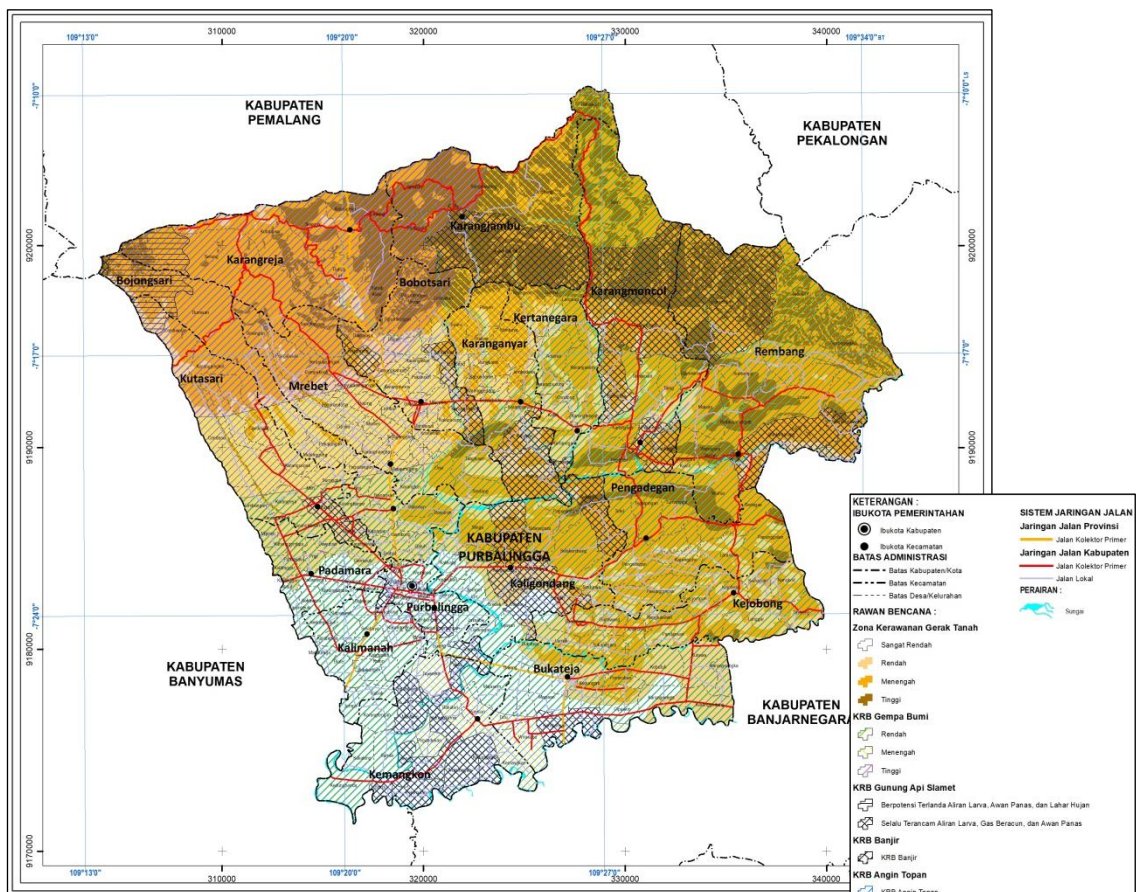
(4) Kawasan rawan bencana alam;

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet, kawasan rawan bencana angin topan, dan kawasan rawan bencana banjir. Pada kawasan-kawasan seperti ini perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana yang ada tersebut.

Kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah/longsor yang terdapat di Kabupaten Purbalingga, terdiri atas zona kerentanan tingkat menengah yang memiliki kelerengan 30 – 50 %, sedangkan zona tingkat kerentanan tinggi memiliki kelerengan sekitar 50 - 70 % sampai > 70 %. Beberapa diantaranya desa-desa di Kecamatan Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Mrebet.

Sedangkan kawasan rawan bencana gunungapi di Kabupaten Purbalingga sebagian wilayah kabupaten termasuk dalam KRB Gunung Api Slamet. Beberapa diantaranya desa - desa di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Kutasari.

Kawasan rawan bencana angin topan di Kabupaten Purbalingga meliputi seluruh wilayah kabupaten. Sementara itu, kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Purbalingga meliputi sebagian Kecamatan Kemangkon; sebagian Kecamatan Bukateja; sebagian Kecamatan Kaligondang; sebagian Kecamatan Purbalingga; sebagian Kecamatan Kutasari; sebagian Kecamatan Bobotsari; sebagian Kecamatan Karanganyar; sebagian Kecamatan Karangmoncol; sebagian Kecamatan Rembang; sebagian Kecamatan Karangjambu; dan sebagian Kecamatan Kertanegara.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031

Gambar 2. 8. Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Purbalingga

(5) Kawasan cagar budaya.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan SK Bupati Purbalingga Nomor 432/226 Tahun 2018 tentang Penetapan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga

Sedangkan kawasan budidaya di Kabupaten Purbalingga seluas 66.617 Ha terdiri atas:

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi;

Sesuai hasil analisis luasan berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2015 dan data shp hutan yang diberikan Kementerian LHK, luas hutan produksi di Kabupaten Purbalingga kurang lebih 3.926,83 hektar meliputi: Hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 641,74 hektar dan Hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 3.285,09 hektar.

(2) Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas tanaman pertanian pangan lahan basah dan lahan kering. Potensi pertanian lahan basah di Kabupaten Purbalingga seluas \pm 15.694 ha yang terdiri dari lahan sawah beririgasi dan lahan sawah tadah hujan yang berada di seluruh wilayah kabupaten. Sedangkan potensi kawasan pertanian lahan kering seluas \pm 6.603 Ha terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 18.583 Ha yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten.

Lokasi kawasan hortikultura di Kabupaten Purbalingga terdapat di seluruh wilayah kabupaten. Luas kawasan hortikultura di Kabupaten Purbalingga mencapai 1.453 ha. Kawasan dengan peruntukan perkebunan di Kabupaten Purbalingga berupa kebun campur (agroforestri) seluas \pm 17.564 ha yang berada di seluruh wilayah kabupaten.

(3) Kawasan perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Purbalingga berupa kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya perikanan darat, baik berupa kegiatan budidaya perikanan secara khusus maupun kegiatan budidaya perikanan secara tumpang sari dengan pertanian lahan basah beririgasi. Kawasan budidaya perikanan darat meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, dan pemasaran yang berada di Kecamatan Purbalingga; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Bojongsari; dan Kecamatan Padamara.

(4) Kawasan peruntukan pertambangan;

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan panas bumi. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi seluruh wilayah

kecamatan yang teridentifikasi memiliki potensi pertambangan. Sedangkan Wilayah Kabupaten Purbalingga yang masuk Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Baturraden meliputi :

- sebagian wilayah Kecamatan Bojongsari;
- sebagian wilayah Kecamatan Karangreja; dan
- sebagian wilayah Kecamatan Kutasari.

(5) Kawasan peruntukan industri;

Luas kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga mencapai 875 ha. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga berada di Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, kalimanah, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, Kejobong, Kemangkon, Kutasari, Padamara dan Purbalingga. Untuk kegiatan industri kecil dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi. Rencana pembangunan kawasan industri harus berada di kawasan peruntukan industri.

(6) Kawasan peruntukan pariwisata;

Kawasan pariwisata di Kabupaten Purbalingga meliputi :

- Pariwisata alam meliputi :
 - a. Pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Karangreja;
 - b. Goa Lawa (GOLAGA) di Kecamatan Karangreja;
 - c. Agrowisata Serang di Kecamatan Karangreja;
 - d. Bumi Purba di Kecamatan Kutasari;
 - e. Leren View di Kecamatan Karangreja;
 - f. Klawing Riverside di Kecamatan Purbalingga;
 - g. Sirau The Lost Paradise di Kecamatan Karangmoncol; dan
 - h. pengembangan potensi pariwisata alam lainnya di seluruh kecamatan.
- Pariwisata budaya meliputi :
 - a. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang;
 - b. Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja yang berada di Kecamatan Purbalingga;
 - c. Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga;
 - d. Situs cagar budaya yang berada di seluruh wilayah kabupaten;
 - e. Desa Wisata yang berbasis budaya; dan
 - f. pengembangan potensi pariwisata budaya lainnya di seluruh kecamatan.
- Pariwisata buatan meliputi :
 - a. Kolam Renang Tirto Asri Walik di Kecamatan Kutasari;
 - b. Obyek Wisata Air Bojongsari (OWABONG) di Kecamatan

- Bojongsari;
- c. Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas di Kecamatan Padamara;
 - d. Sanggaluri Park di Kecamatan Kutasari;
 - e. Bumi Perkemahan Munjul Luhur di Kecamatan Kutasari;
 - f. Pancuran Ciblon di Kecamatan Bobotsari;
 - g. Soedirman Point di Kecamatan Rembang;
 - h. Purbalingga City Park (Taman Usman Janatin) di Kecamatan Purbalingga; dan
 - i. pengembangan potensi pariwisata buatan lainnya di seluruh kecamatan.

(7) Kawasan peruntukan permukiman;

Kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga seluas kurang lebih 20.379 hektar. Kawasan permukiman dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 6.102 (enam ribu seratus dua) hektar meliputi Kecamatan Kemangkon; Kecamatan Bukateja; Kecamatan Kejobong; Kecamatan Pengadegan; Kecamatan Kaligondang; Kecamatan Purbalingga; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Padamara; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Bojongsari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Kerangreja; Kecamatan Karangjambu; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kertanegara; Kecamatan Karangmoncol; dan Kecamatan Rembang.

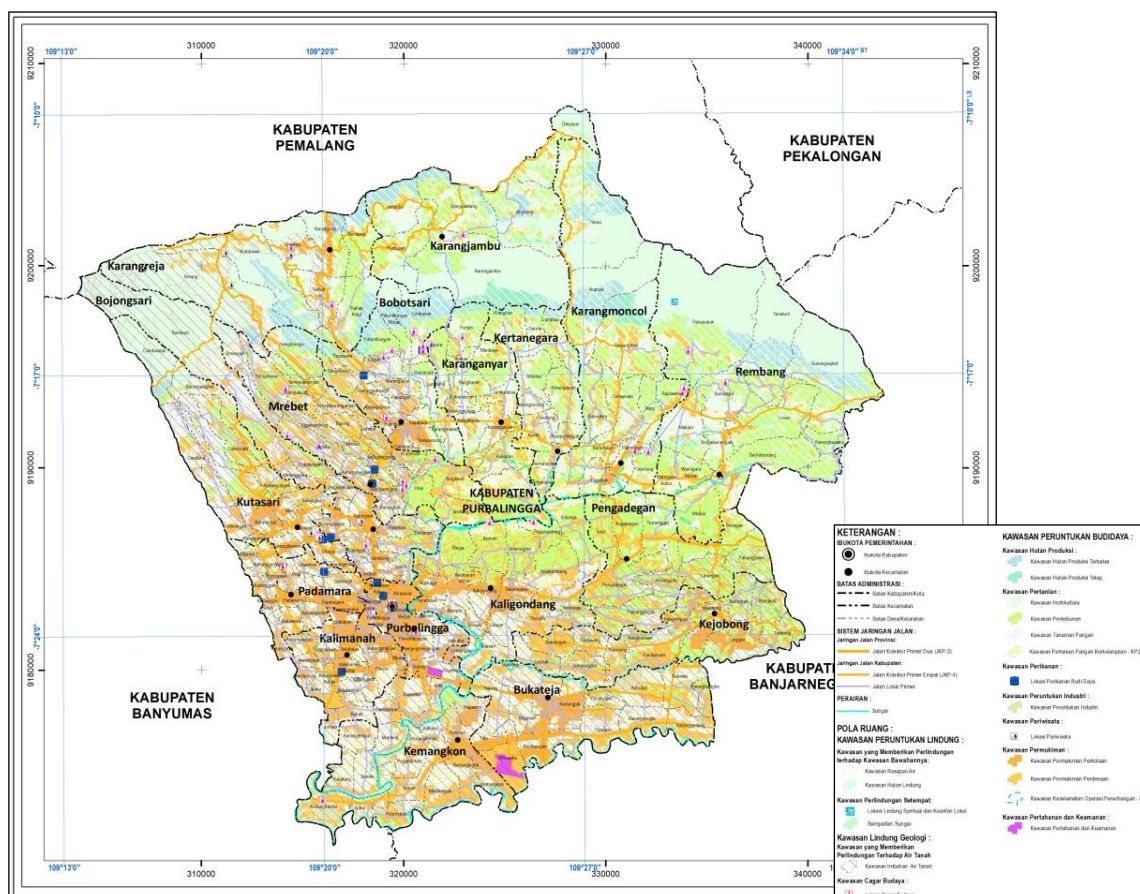
Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 14.277 (empat belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Kemangkon; Kecamatan Bukateja; Kecamatan Kejobong; Kecamatan Pengadegan; Kecamatan Kaligondang; Kecamatan Purbalingga; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Padamara; Kecamatan Kutasari; Kecamatan Bojongsari; Kecamatan Mrebet; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Kerangreja; Kecamatan Karangjambu; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kertanegara; Kecamatan Karangmoncol; dan Kecamatan Rembang.

(8) Kawasan pertahanan dan keamanan

Luas kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Purbalingga mencapai 122 ha. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

- Komando Distrik Militer (Kodim 0702/Purbalingga) berada di Kecamatan Purbalingga;
- Batalyon Infanteri (Yonif 406/Candra Kusuma) berada di Kecamatan Purbalingga;
- Daerah Latihan Militer berada di Kecamatan Kutasari;

- Gudmulap-A 04-23-01 berada di Kecamatan Bojongsari;
- Pangkalan TNI Angkatan Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba Purbalingga berada di Kecamatan Bukateja; dan
- Komando Rayon Militer yang tersebar di wilayah kabupaten.



Sumber : Revisi RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031
Gambar 2. 9. Peta Pola Ruang Kabupaten Purbalingga

2.1.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan tren yang selalu naik. Berdasarkan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2021 (semester II) tercatat jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.021.920 jiwa yang terdiri dari 518.293 jiwa penduduk laki-laki (50,72%) dan 503.627 jiwa penduduk perempuan (49,28%).

Sedangkan berdasarkan proyeksi penduduk BPS bahwa jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebanyak 1.007.794 jiwa dengan komposisi 509.854 jiwa penduduk laki-laki dan 497.940 jiwa penduduk perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga per kecamatan pada tahun 2017 - 2021 sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel II.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan
Tahun 2017 – 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kemangkon	60.989	63.589	64.680	64.574	65.191
2.	Bukateja	75.212	77.789	78.920	79.441	80.154
3.	Kejobong	49.028	50.683	51.520	51.873	52.503
4.	Kaligondang	62.706	65.146	66.340	66.870	67.460
5.	Purbalingga	56.923	58.479	59.190	58.371	58.529
6.	Kalimanah	53.700	55.906	57.180	56.834	57.427
7.	Kutasari	61.101	63.238	64.490	65.762	66.821
8.	Mrebet	74.147	75.877	78.060	78.855	80.011
9.	Bobotsari	52.559	54.270	55.070	54.725	54.977
10.	Karangreja	43.758	44.625	45.060	46.470	47.228
11.	Karanganyar	39.053	40.335	41.120	41.596	41.931
12.	Karangmoncol	57.047	57.663	58.570	59.369	60.064
13.	Rembang	66.495	67.841	68.820	69.628	70.245
14.	Bojongsari	58.751	60.961	62.570	63.409	64.189
15.	Padamara	43.282	44.877	45.510	45.637	46.002
16.	Pengadegan	38.959	40.566	41.230	41.668	42.029
17.	Karangjambu	26.298	26.768	27.290	28.333	28.712
18.	Kertanegara	35.857	36.930	37.650	38.010	39.447
	Jumlah	955.865	985.543	1.003.246	1.011.425	1.021.920

Sumber: Dindikcapil Kab. Purbalingga, 2018-2022

**Tabel II.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021**

No	Kecamatan	Data Dindikcapil			Data BPS		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kemangkon	32.725	32.466	65.191	32.305	32.115	64.420
2.	Bukateja	40.456	39.698	80.154	39.634	39.316	78.950
3.	Kejobong	26.447	26.056	52.503	25.772	25.536	51.308
4.	Pengadegan	34.031	33.429	67.460	20.693	20.689	41.382
5.	Kaligondang	29.019	29.510	58.529	33.307	32.887	66.194
6.	Purbalingga	28.928	28.499	57.427	28.482	28.913	57.395
7.	Kalimanah	34.020	32.801	66.821	29.255	28.905	58.160
8.	Padamara	40.754	39.257	80.011	23.673	23.387	47.060
9.	Kutasari	27.814	27.163	54.977	33.595	32.376	65.971
10.	Bojongsari	24.103	23.125	47.228	32.330	31.204	63.534
11.	Mrebet	21.592	20.339	41.931	39.990	38.728	78.718
12.	Bobotsari	30.822	29.242	60.064	27.079	26.586	53.665
13.	Karangreja	36.096	34.152	70.245	23.965	23.168	47.133
14.	Karangjambu	32.721	31.468	64.189	14.657	13.731	28.388
15.	Karanganyar	23.129	22.873	46.002	20.735	19.714	40.448
16.	Kertanegara	21.137	20.892	42.029	19.091	18.317	37.408
17.	Karangmoncol	14.877	13.835	28.712	30.319	28.759	59.078
18.	Rembang	19.625	18.822	39.447	34.319	33.609	68.581
	Jumlah	518.293	503.627	1.021.920	509.854	497.940	1.007.794

Sumber: BPS Kab. Purbalingga dan Dindikcapil Kab. Purbalingga, 2022

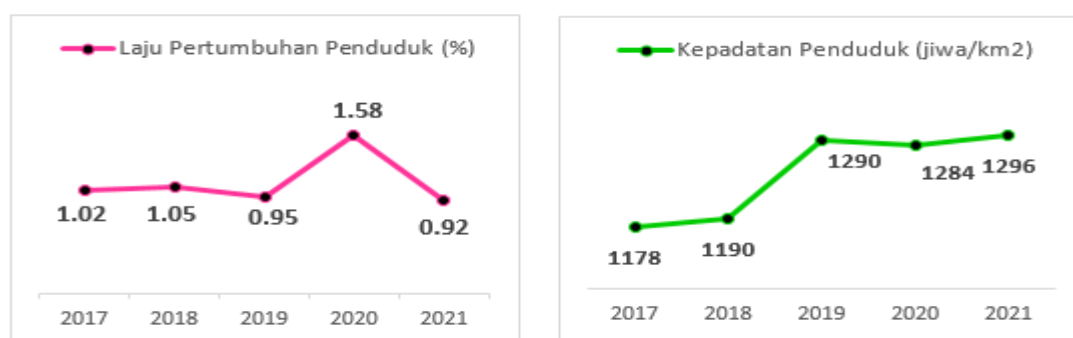
Untuk penduduk berdasarkan pendidikan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan								
		Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diplo ma I/II	Akade mi/Dipl oma III/Sarj ana Muda	Diploma IV/S-I	S-II/ S-III
1	Kemangkon	259	171	11.216	4.820	4.687	95	272	848	30
2	Bukateja	869	780	12.263	5.958	5.314	131	276	877	41
3	Kejobong	996	68	9.878	3.682	2.493	86	133	469	10
4	Kaligondang	354	1203	11.447	4.749	4.225	91	208	713	28
5	Purbalingga	135	187	6.109	3.965	7.124	152	653	1947	154
6	Kalimanah	144	274	6.646	4.573	5.936	132	467	1431	99
7	Kutasari	696	642	12.532	4.315	2.929	59	117	434	19
8	Mrebet	460	1756	15.547	4.882	3.519	122	158	621	24
9	Bobotsari	225	295	9.669	3.467	3.587	103	213	752	16
10	Karangreja	442	233	10.435	2.416	1.381	27	53	224	7
11	Karanganyar	256	123	8.708	2.550	1.780	40	89	321	12
12	Karangmoncol	637	432	9.922	4.466	2.870	78	125	562	22
13	Rembang	743	361	13.709	4.627	2.482	73	119	529	27
14	Bojongsari	378	367	11.323	4.521	3.619	93	170	561	21
15	Padamara	96	115	6.774	3.531	3.553	69	295	943	59
16	Pengadegan	241	123	8.741	2.855	1.700	53	79	313	7
17	Karangjambu	2278	104	4.718	1.219	578	25	30	140	3
18	Kertanegara	298	168	7.016	2.735	1.756	45	62	308	8
	Jumlah	9.507	7.420	176.653	69.331	59.533	1.474	3.519	11.993	587

Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2022

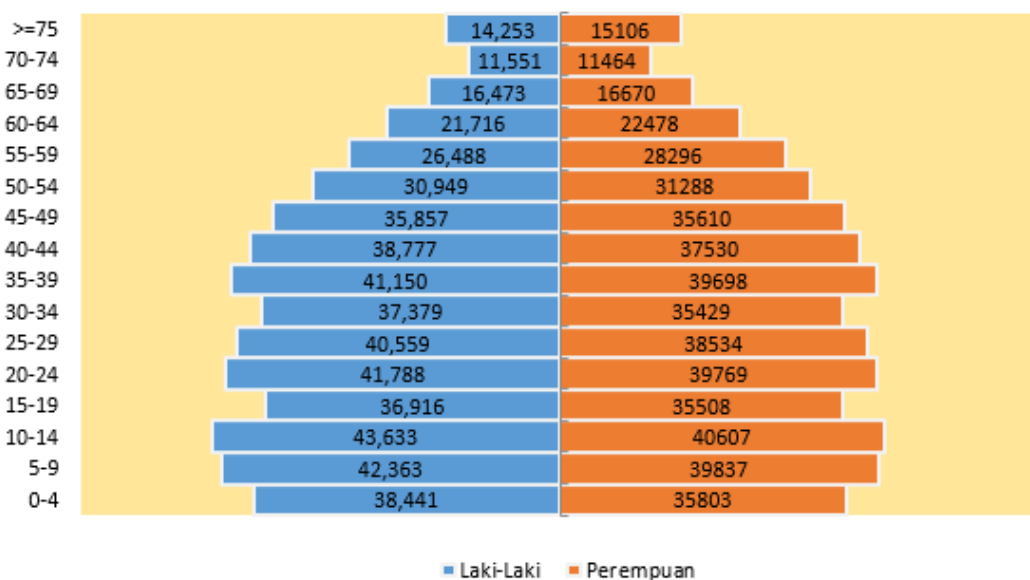
Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 1,02 pada tahun 2017 menjadi 1,58 pada tahun 2020, namun menurun kembali menjadi 0,92 pada tahun 2021. Sedangkan kepadatan penduduk juga meningkat dari 1.178 jiwa/km² pada tahun 2017 menjadi 1.296 jiwa/km² pada tahun 2021. Pada dasarnya peningkatan laju pertumbuhan penduduk dikarenakan dua hal yaitu pertama karena tingginya angka kelahiran dan kedua karena tingginya angka migrasi masuk. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

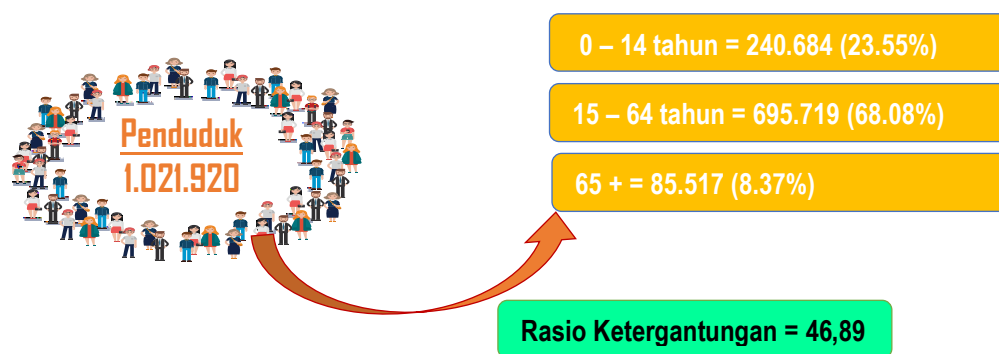
Sementara itu jika dilihat dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 untuk kelompok umur 10-14 dan 5-9 tahun yang mendominasi dibanding kelompok umur lainnya. Kemudian diikuti dengan kelompok 20-24 tahun, umur 35-39 tahun, 25-29 tahun, 15-19 tahun dan 40-44 tahun. Rentang kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga mempunyai stok (persediaan) penduduk atau tenaga yang siap untuk di gunakan nantinya. Sedangkan pada kelompok usia lanjut komposisinya semakin mengecil. Kondisi tersebut termasuk ciri dari piramida *expansive* yang biasa di miliki oleh negara negara berkembang, dimana sebagian besar berada pada kelompok muda dan sedikit jumlahnya pada kelompok tua. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2020 sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Sumber : Dinudkcapil Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 11. Piramida Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

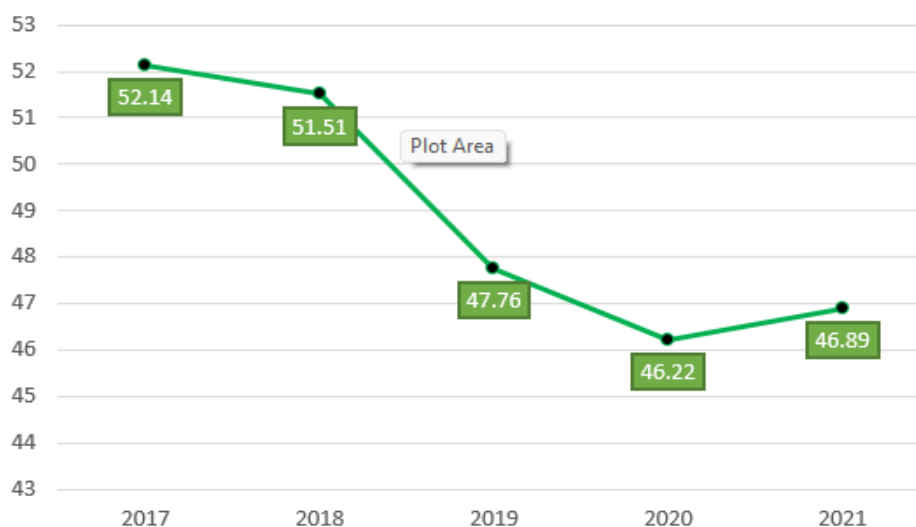
Angka rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 46,22 naik menjadi 46,89 pada tahun 2021. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai sebesar 46,89. Hal ini berarti diantara 100 orang penduduk produktif di Kabupaten Purbalingga harus menanggung 47 orang penduduk yang tidak produktif.



Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 12. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan hal yang baik karena beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi semakin menurun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2022

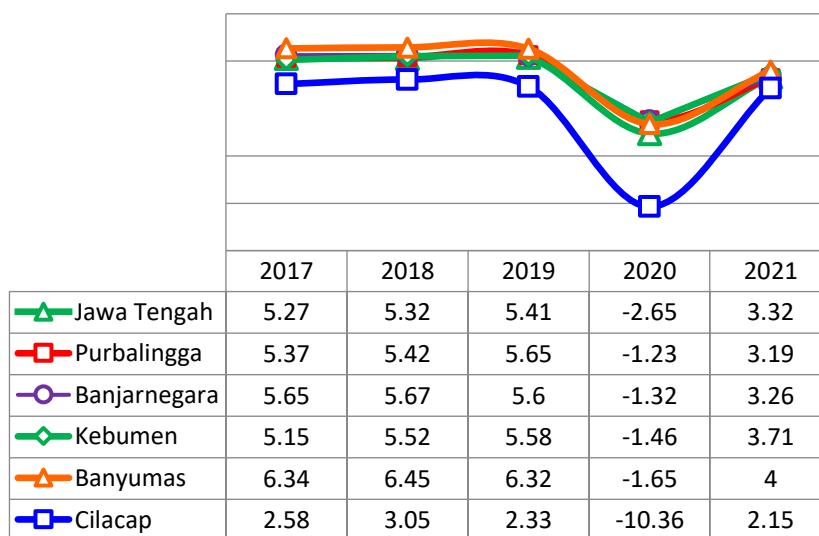
Gambar 2. 13. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Namun perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19 dimana mengalami kontraksi

minus 1,23 persen. Kemudian di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mulai kembali merangkak naik ke angka 3.19. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2. 14. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jateng dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2017-2019, pertumbuhan tiga besar lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga yakni Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar 11,65 %, Jasa Perusahaan sebesar 10,95 %, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,06 %. Di tahun 2020, dampak pandemic Covid-19 menyebabkan beberapa lapangan usaha mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga terutama pada sektor lapangan usaha: Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan. Namun, pada tahun 2021 beberapa sektor lapangan usaha tersebut mulai mengalami peningkatan terutama untuk sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan.

Secara rinci pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan seperti pada tabel berikut.

Tabel II.6. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,43	4,05	1,54	1,91	1,20
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,01	4,80	4,52	0,71	4,64
C.	Industri Pengolahan	5,99	5,13	7,33	-0,24	3,80
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,63	4,79	5,62	3,24	5,98
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,80	6,73	5,38	0,81	4,39
F.	Konstruksi	9,35	5,82	6,25	-2,91	6,95
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,44	5,56	6,50	-4,08	5,68
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,31	5,08	9,12	-30,09	2,69
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	6,46	8,51	10,06	-1,81	4,44
J.	Informasi dan Komunikasi	15,95	12,80	11,65	10,11	5,76
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,27	3,50	3,63	1,62	2,24
L.	Real Estate	6,08	5,92	5,69	-0,01	2,21
M.N.	Jasa Perusahaan	9,13	9,77	10,95	-2,83	3,05
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,97	3,54	3,74	-0,23	-0,38
P.	Jasa Pendidikan	7,31	7,80	7,64	-0,22	0,21
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,29	8,76	6,99	6,15	0,12
R.S.T.U.	Jasa lainnya	9,25	9,61	9,23	-6,16	0,67
PDRB (ADHK)		5,37	5,42	5,65	-1,23	3,19

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

2.1.2.2 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian menurut lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Dimana kategori lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 menggeser peranan Pertanian yaitu dengan angka 28,07 %. Sedangkan lapangan usaha pertanian di angka 26,51 %. Peranan terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya memberikan peran sebesar 0,05 %. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.7. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,50	27,25	26,22	27,04	26,51
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,71	4,62	4,54	4,55	4,57
C.	Industri Pengolahan	26,78	26,81	27,24	27,59	28,07
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
F.	Konstruksi	5,99	6,13	6,24	6,10	6,38
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,55	12,58	12,74	12,36	12,58
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,14	3,08	3,19	2,28	2,28
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,30	2,39	2,36	2,38
J.	Informasi dan Komunikasi	1,70	1,78	1,87	2,04	2,06
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,29	2,28	2,23	2,24	2,26
L.	Real Estate	1,06	1,07	1,06	1,06	1,04
M.N.	Jasa Perusahaan	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20
O.	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,77	2,68	2,63	2,64	2,47
P.	Jasa Pendidikan	5,89	6,01	6,18	6,29	6,05
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,10	1,12	1,21	1,15
R.S.T.U.	Jasa lainnya	1,92	1,96	2,01	1,90	1,84
PDRB (ADHB)		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 – 2022

Pandemi covid 19 ternyata berpengaruh terhadap proporsi sektor-sektor dominan PDRB. Hal ini dapat dilihatnya pada sektor pertanian setelah selama 4 tahun berturut-turut (2016-2019) cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sektor Pertanian cenderung memiliki daya tahan yang bagus dalam menghadapi pandemi covid 19. Namun pada tahun 2021 sektor tersebut kembali mengalami penurunan dengan jumlah yang tidak terlalu signifikan.

Hal sebaliknya terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran. Setelah selama 4 tahun berturut-turut (2016-2019) proporsinya cenderung mengalami kenaikan, namun maka pada tahun 2020 di era pandemi covid mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sehingga menunjukkan adanya upaya-upaya yang mendongkrak perdagangan yang ada. Sedangkan sektor ekonomi terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan, dimana sampai dengan tahun 2021 masih meneruskan trend kenaikan meski kenaikan. Sektor industri pengolahan secara umum masih dapat bertahan, namun mengalami tekanan yang cukup kuat.

2.1.2.3 PDRB

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu tahun 2017-2021, PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari Rp. 21.439,65 milyar pada tahun 2017 menjadi Rp. 26.393,81 milyar pada tahun 2021. Sedangkan dilihat dari perkembangan nilai rupiah, PDRB Kabupaten Purbalingga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha mengalami peningkatan dari Rp. 15.612,29 milyar pada tahun 2017 menjadi Rp. 17.731,44 milyar. Secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.8. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.895,98	6.319,89	6.533,31	6.781,61	6.997,82
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.010,45	1.071,64	1.130,71	1.141,34	1.205,93
C.	Industri Pengolahan	5.741,52	6.216,69	6.787,11	6.919,91	7.408,95
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	11,01	11,90	12,58	12,88	13,58
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,69	23,33	25,03	25,59	27,15
F.	Konstruksi	1.284,44	1.420,64	1.555,10	1.529,49	1.683,03
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.691,52	2.918,11	3.174,30	3.099,09	3.320,85
H.	Transportasi dan Pergudangan	674,14	715,16	794,54	569,38	601,23
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	486,67	534,05	596,49	591,09	628,74
J.	Informasi dan Komunikasi	365,28	411,97	464,82	512,57	543,69
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	492,02	528,06	555,51	561,97	597,64
L.	Real Estate	277,60	247,15	264,47	265,69	274,25
M.	Jasa Perusahaan	39,25	44,37	50,66	50,42	52,66
N.						
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	594,23	622,48	654,74	662,60	653,00
P.	Jasa Pendidikan	1.261,77	1.393,66	1.538,75	1.577,35	1.595,66
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	231,18	255,64	278,88	302,95	304,82
R.S.	Jasa lainnya	410,89	455,60	501,08	477,66	484,80
T.U.						
PDRB (ADHB)		21.439,65	23.190,33	24.918,08	25.081,59	26.393,81

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Pada tahun 2021 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 26.190.000, sedangkan PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 17.595.000. Apabila diperhitungkan dengan harga konstan (ADHK Tahun 2010) dari tahun 2017 - 2021 pertumbuhan PDRB diatas 5 persen. Hal ini berarti pada kenyataannya masyarakat Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatannya meningkat rata-rata kurang dari 5 persen setiap tahun. Berbeda pada perhitungan atas dasar harga berlaku (ADHB), rata-rata setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatan perkapita bertambah sekitar 6 hingga 9 %.

Tabel II.9. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.091,16	4.257,06	4.322,80	4.405,20	4.458,13
B.	Pertambangan dan Penggalian	643,43	674,32	704,79	709,83	742,76
C.	Industri Pengolahan	4.056,01	4.264,06	4.576,62	4.565,71	4.745,58
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9,79	10,26	10,84	11,19	11,86
E.	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	19,33	20,63	21,74	21,92	22,88
F.	Konstruksi	978,44	1035,41	1100,16	1.076,08	1.150,83
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.158,81	2.278,74	2.426,91	2.328,01	2.460,15
H.	Transportasi dan Pergudangan	572,92	602,02	656,94	459,29	473,71
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	391,68	425,02	467,79	459,35	479,73
J.	Informasi dan Komunikasi	381,56	430,39	480,52	529,11	559,58
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	350,49	362,77	375,94	382,04	390,61
L.	Real Estate	194,18	205,68	217,37	217,36	222,17
M.N.	Jasa Perusahaan	28,49	31,27	34,70	33,72	34,74
O.	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	419,77	434,62	450,86	449,83	448,12
P.	Jasa Pendidikan	821,16	885,25	952,92	950,80	952,76
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	169,50	184,35	197,24	209,37	209,62
R.S.T.U.	Jasa lainnya	325,58	356,86	389,78	365,76	368,21
PDRB (ADHK)		15.612,29	16.458,71	17.387,94	17.174,55	17.731,44

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 – 2022

Tabel II.10. PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga 2017 – 2021

Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	21.439,65	23.190,33	24.918,08	25.081,59	26.393,81
- ADHK Tahun 2010	15.612,29	16.458,71	17.387,94	17.174,55	17.731,44
PDRB Perkapita (Rp)					
- ADHB	23.395.000	25.065.000	26.679.000	25.118.000	26.190.000
- ADHK Tahun 2010	17.036.000	17.789.000	18.617.000	17.199.000	17.595.000
Jumlah Penduduk	916.427	925.193	933.989	998.561	1.007.794

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2021

Dilihat dari Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga, secara struktur ekonomi peranan konsumsi rumah tangga merupakan komposisi yang paling besar. Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai Rp. 26.393,81 miliar yang sebagian besar digerakkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Sayangnya ekonomi Purbalingga masih tergerus dengan tingginya impor sampai dengan tahun 2021. Net ekspor yang bernilai negatif menandakan bahwa nilai impor lebih banyak daripada ekspor. Sedangkan komponen pengeluaran konsumsi LNPRT dalam lima tahun terakhir masih merupakan komponen yang berkontribusi paling kecil dalam struktur PDRB.

Tabel II.11. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15.493,64	16.662,51	17.894,28	17.828,88	18.530,02
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	319,36	351,48	398,70	393,52	410,00
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.678,90	1.757,35	1.840,94	1.696,23	1.745,42
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.339,16	4.953,74	5.408,96	5.124,22	5.480,25
5.	Perubahan Inventori	736,83	879,10	746,29	855,86	806,93
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-1.128,26	-1.413,86	-1.371,10	- 817,12	-578,82
PDRB (ADHB)		21.439,65	23.190,33	24.918,08	25.081,59	26.393,81

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

Selama kurun waktu 2017–2021, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh harga ditiadakan.

Tabel II.12. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021 (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	11.474,39	12.004,26	12.552,03	12.380,51	12.587,73
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	21,35	228,51	253,38	246,41	249,37
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.061,14	1.092,42	1.135,57	1.049,71	1.057,70
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.111,37	3.382,69	3.551,38	3.364,21	3.578,70
5.	Perubahan Inventori	722,11	724,38	721,64	1.181,49	849,21
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-969,07	-973,56	-826,05	-1.047,78	-591,28
PDRB (ADHB)		15.612,29	16.458,71	17.387,94	17.174,55	17.731,44

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 – 2022

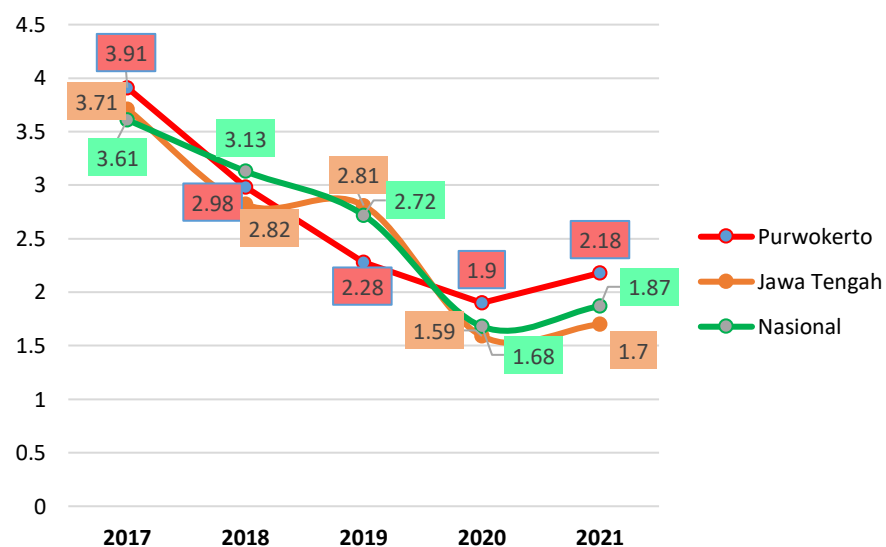
2.1.2.4 Laju Inflasi

Inflasi pada tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga mengikuti inflasi 6 kota di Jawa Tengah, dimana yang paling dekat adalah Kota Purwokerto dengan nilai inflasi (YoY) sebesar 2,18 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 1,9. Bila dilihat dari perkembangannya, inflasi di Kabupaten Purbalingga mengalami tren perubahan setiap tahunnya dimana menunjukkan kenaikan dan penurunan. Tingkat inflasi di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2017-2021 relatif terkendali cukup

baik di angka rata-rata 1% - 3%. Inflasi di Kabupaten Purbalingga mengikuti inflasi 6 kota di Jawa Tengah, dimana yang paling dekat adalah Kota Purwokerto. Pada tahun 2017 inflasi Kabupaten Purbalingga sebesar 3,91, kemudian turun menjadi 2,98 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 turun lagi sebesar 2,28 dan semakin menurun menjadi 1,9 pada tahun 2020 akibat pandemic covid-19. Di tahun 2021 laju inflasi kembali naik ke angka 2,18 yang menunjukkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

Tren yang sama juga terjadi pada laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2017 pada angka 3,71 yang semakin menurun sampai dengan angka 1,59 pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar 1,70. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.

Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Purwokerto termasuk Kabupaten Purbalingga antara lain gula pasir, emas perhiasan, telur ayam ras, rokok kretek filter dan rokok kretek. Sedangkan komoditas utama yang menahan inflasi antara lain cabai merah, minyak goreng, cabai rawit, bawang putih dan daging ayam ras.



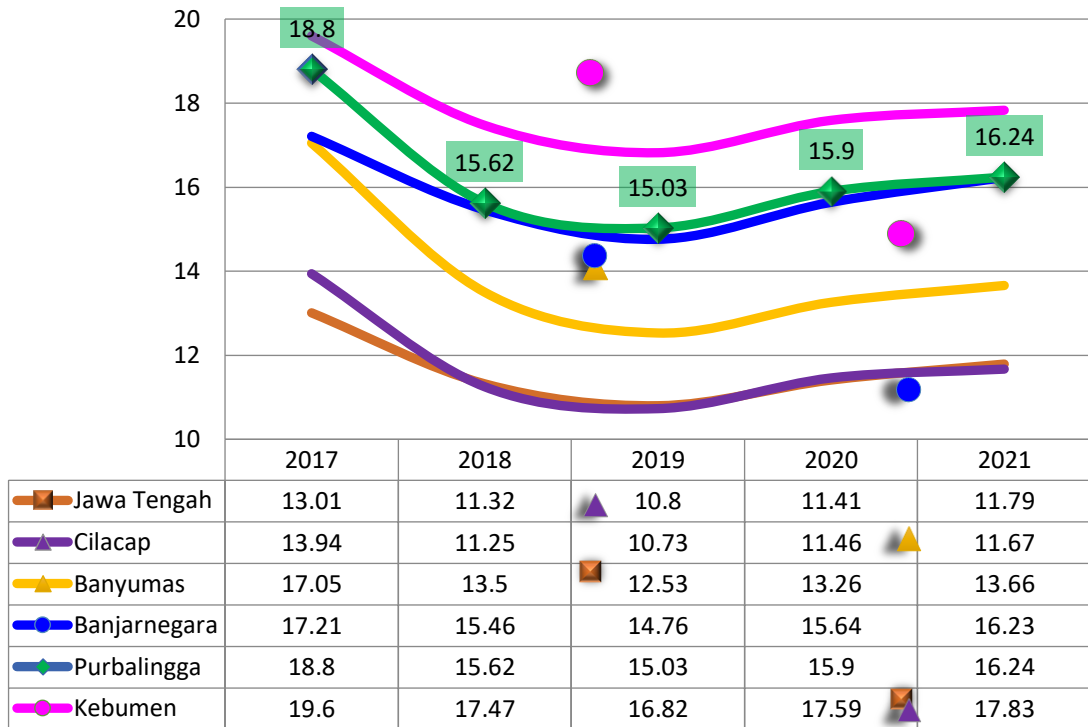
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2. 15. Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

2.1.2.5 Kemiskinan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 - 2021 menunjukkan fluktuasi. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dari 18,80 menjadi 15,03. Namun kemudian pada tahun 2020 naik lagi menjadi 15,90. Dan tahun 2021 kembali naik menjadi 16,24 persen. Salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun.

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga tersebut masih menempati peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Brebes dan Pemaslang.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2.15. Angka Kemiskinan Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jateng dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Begitupula dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga, sepuluh tahun terakhir memiliki jumlah yang fluktuatif. Dari tahun 2011 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan dari 196.000 jiwa menjadi 140.100 jiwa di tahun 2019. Namun pada masa pandemic covid mengalami kenaikan, dimana tahun 2020 penduduk miskin meningkat sebesar 9.400 jiwa atau naik menjadi 149.500 jiwa. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 3.600 jiwa atau naik menjadi 153,100 jiwa.

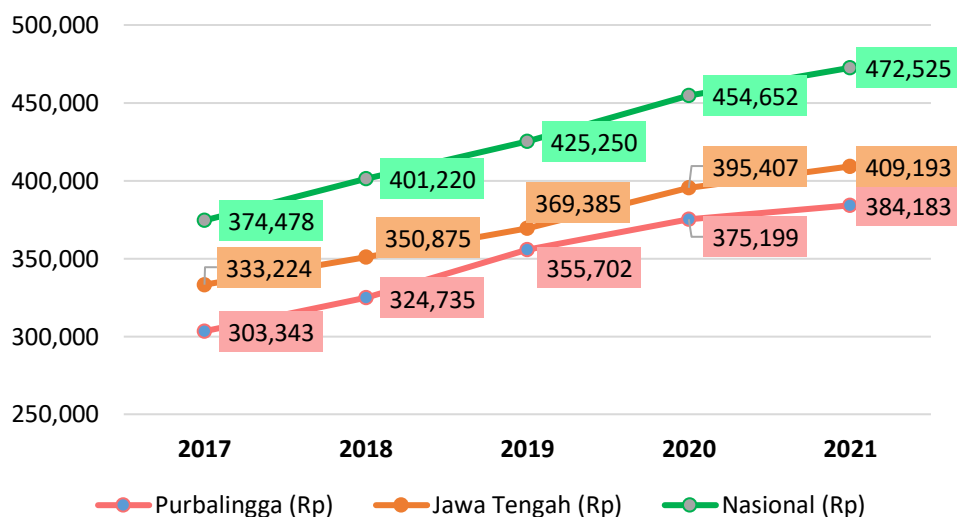
Untuk melihat komposisi garis kemiskinan, penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada penjelasan berikut.

1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya. Garis Kemiskinan (GK) dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk yang

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Dengan batas Garis Kemiskinan (GK) 2.100 kkal/kapita/hari ditambah pengeluaran paling dasar non makanan, GK di Kabupaten Purbalingga pada Maret 2021 sebesar Rp. 384.183 perkapita perbulan (atau naik sebesar Rp.8.984) dari GK Maret tahun 2020 yaitu Rp 375.199/ kapita/bulan. Hal ini bermakna mereka yang berada di bawah garis tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup paling dasar. Angka tersebut masih berada di bawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.472.525 dan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 409.193, sehingga Kabupaten Purbalingga dikelompokkan ke dalam garis kemiskinan rendah dimana garis kemiskinan Kabupaten/Kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi dan nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, GK Purbalingga pada Maret 2021 lebih tinggi dibandingkan GK Cilacap (Rp. 383.367) dan GK Banjarnegara (Rp. 328.679) namun masih dibawah GK Banyumas (Rp. 409.193).



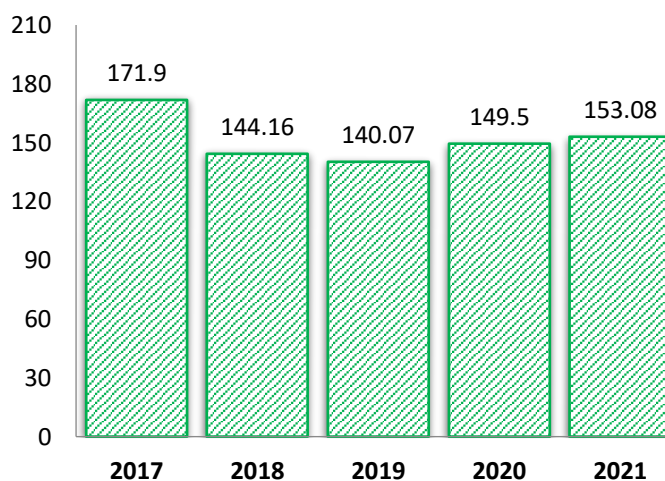
Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2. 16. Garis Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

2. Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga adalah penduduk yang rata-rata pengeluarannya masih di bawah Rp 375.199/ kapita/bulan. Dalam kurun waktu tiga tahun (2017-2019) penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada dasarnya menunjukkan penurunan dari 171,78 (ribu orang) menjadi 140.07 (ribu orang). Namun pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin kembali naik menjadi 149,50 (ribu orang) dan pada tahun 2021

menjadi 153,08 (ribu orang). Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan penduduk miskin.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2. 17. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

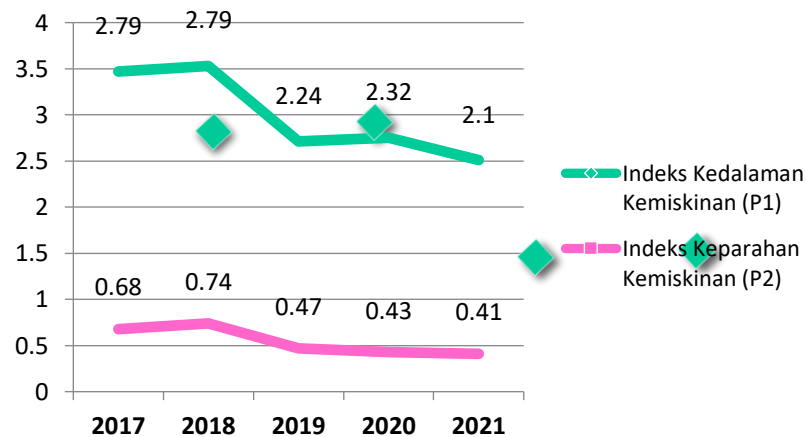
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya (*Poverty Severity Index – P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kedua indeks tersebut merupakan publikasi BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Pada tahun 2021 pergerakan indeks Kedalaman dan Indeks Keparahannya Kabupaten Purbalingga agak melandai dan mengalami penurunan dengan P1 sebesar 2,10 dan P2 sebesar 0,41 dibandingkan kondisi tahun 2020 dengan P1 sebesar 2,32 dan P2 sebesar 0,44 (P1 turun 0,22 poin sedangkan P2 turun 0,03 poin). Kondisi sebaliknya terjadi pada Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahannya Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan yaitu P1 sebesar 1,91 dan P2 sebesar 0,45. Sehingga pada tahun 2021, P2 Purbalingga berada di bawah P2 Provinsi.

Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin Kabupaten Purbalingga meningkat pada tahun 2021 namun rata-rata pengeluaran

penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, dan kesenjangan rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil.



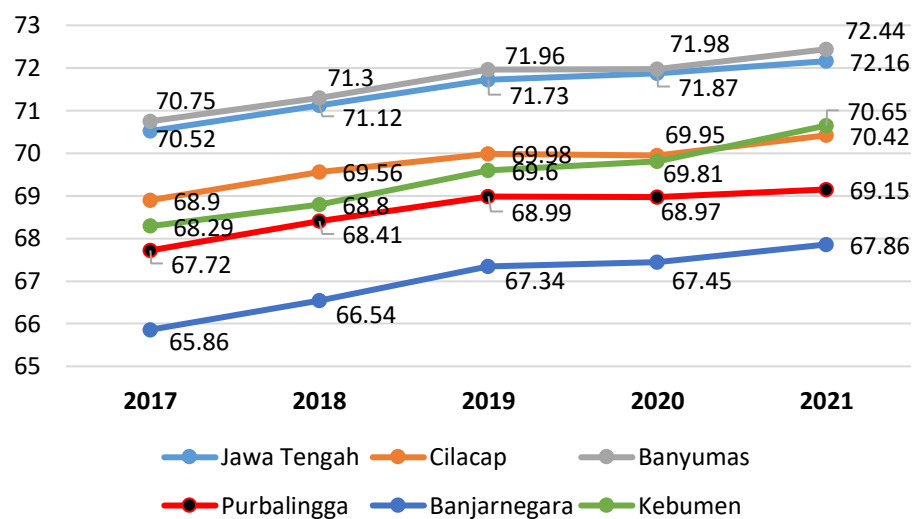
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2. 18. ndeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu komponen pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Komponen kesehatan diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH), komponen pendidikan diwakili dua indikator yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta komponen standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Selama lima tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 67,72 di tahun 2017 menjadi 69,15 pada tahun 2021. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori dimana IPM Purbalingga pada rentang 60 hingga 70 berada pada klasifikasi sedang, dan masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 72,86 pada tahun 2021.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2.19. IPM Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2017-2021

IPM Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebesar 69,15 atau mengalami kenaikan sebesar 0,18 point dibanding tahun 2020 yang sebesar 68,97, dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPM Kabupaten Purbalingga masih berada di atas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih di bawah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap.

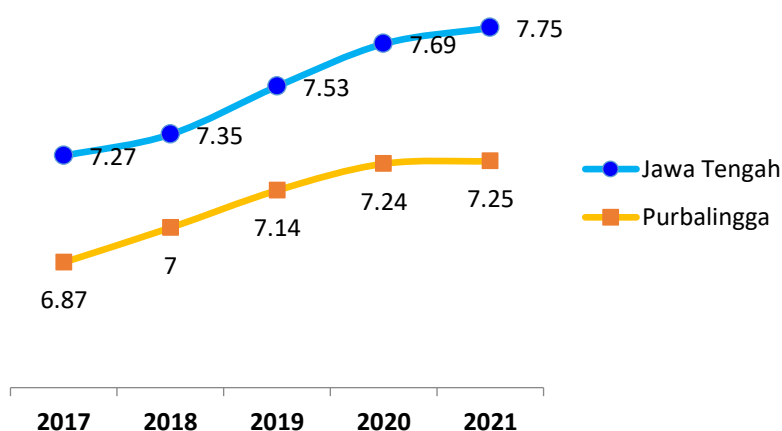
Perkembangan indikator komposit IPM Kabupaten Purbalingga secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Awal perhitungan RLS dilakukan dengan menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas, baru selanjutnya menghitung lamanya sekolah. Apabila dalam partisipasi sekolah seseorang tidak/belum pernah bersekolah, maka skor lama sekolahnya 0 (nol). Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka perhitungan lama sekolah disesuaikan dengan cara konversi ijazah ke dalam tahun lama sekolah. Untuk yang tidak mempunyai ijazah, maka skor konversi tahun lama sekolahnya 0 tahun, SD sederajat 6 tahun, SMP sederajat 9 tahun, SMA sederajat 9 tahun, D1/D2 sederajat 14 tahun, D3 sederajat 15 tahun, dan S2/S3 sederajat 18 tahun.

RLS di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2017 – 2021 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah hanya 6,87 tahun, meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 7,25 tahun. Nilai pada tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Purbalingga bersekolah rata-rata hampir tujuh tahun atau sampai kelas 1 SMP. Capaian nilai RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7,75 tahun.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

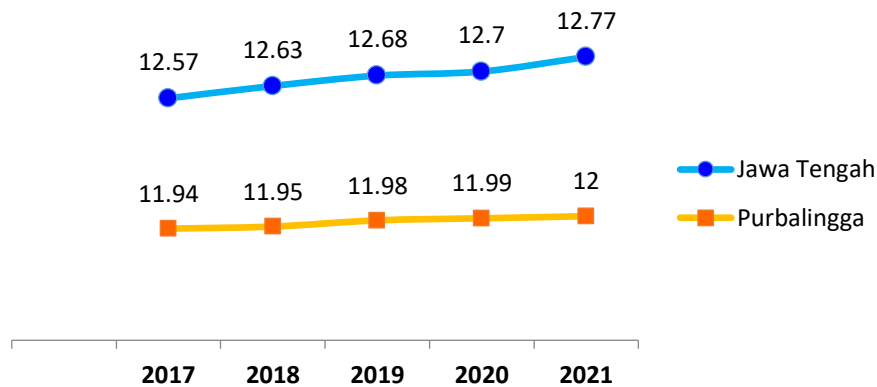
Gambar 2. 20. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsinya adalah bahwa kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan kinerja pembangunan pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan dan mulai dihitung pada anak usia 7 tahun mengikuti kebijakan program wajib belajar.

HLS di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 11,94 tahun pada tahun 2017 menjadi 11,95 tahun pada tahun 2018 dan terus naik pada tahun 2021 menjadi 12 tahun. Nilai HLS tersebut artinya diharapkan anak usia 7 tahun saat ini dapat merasakan pendidikan selama hampir 12 tahun atau kira-kira setara kelas 3 SLTA. Walaupun memiliki tren yang positif, namun nilai HLS Kabupaten Purbalingga masih dibawah rata-rata HLS Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 12,77 tahun sehingga perlu usaha lebih keras bagi Purbalingga untuk mengejar ketertinggalan.



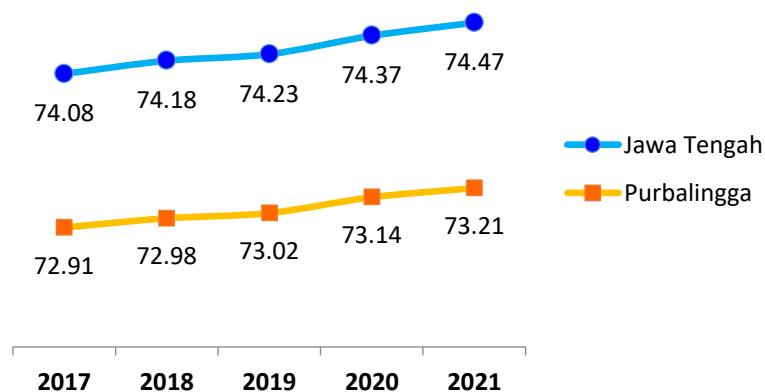
Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2. 21. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

3. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan lama kehidupan yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia harapan hidup tinggi merupakan indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan, asupan gizi yang baik dan perilaku bersih dan sehat. Kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada bayi dan ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan diharapkan taraf kesehatan akan semakin baik, dan harapan hidup panjang dan sehat akan lebih terwujud.

UHH di Kabupaten Purbalingga terus mengalami kenaikan dari 72,91 pada tahun 2017 menjadi 73,21 pada tahun 2021. Ini berarti bahwa bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 73,21 tahun. Namun demikian, capaian UHH ini masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 74,47 pada tahun 2021.



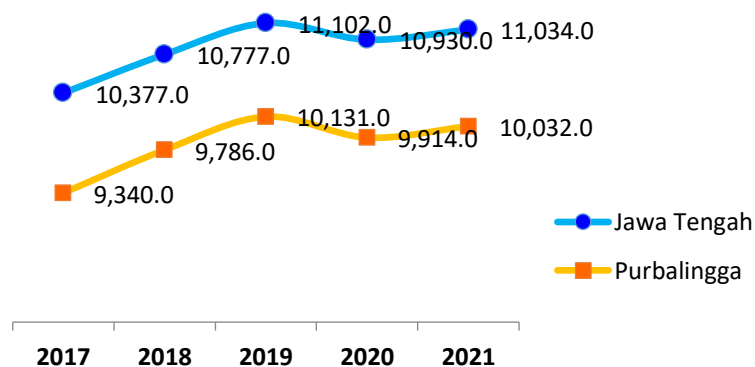
Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

Gambar 2. 22. Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

4. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan standar hidup layak. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan dengan tahun dasar 2010 yang kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan paritas daya beli disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Capaian pengeluaran per kapita Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sebesar Rp. 9.340.000,- kemudian meningkat terus sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 10.131.000, namun pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 9.914.000, dan naik kembali menjadi 10.032.000,-. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 11.034.000 pada tahun 2021.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

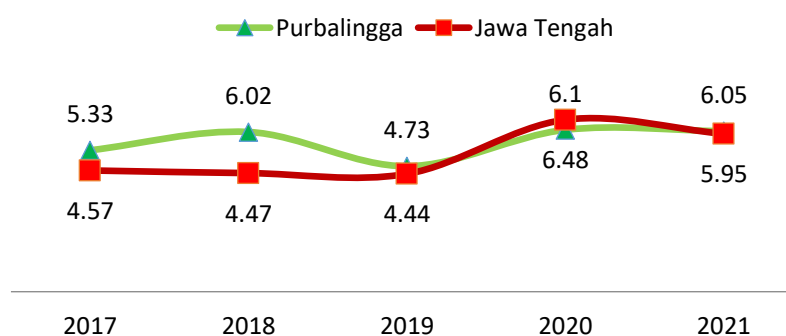
Gambar 2. 23. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

2.1.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Indikator TPT digunakan sebagai acuan pemerintah dalam upaya pembukaan lapangan kerja baru. Perkembangannya TPT juga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian selain angka kemiskinan.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 - 2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 5,33, mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 6,02 dan turun menjadi 4,73 di Tahun 2019 namun

kembali naik di tahun 2020 menjadi 6,1. Kenaikan yang cukup signifikan ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19, di mana banyak usaha ekonomi produktif yang terhambat bahkan terhenti karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan pada tahun 2021, Tingkat pengangguran Terbuka mengalami sedikit perbaikan menjadi 6,05 persen.



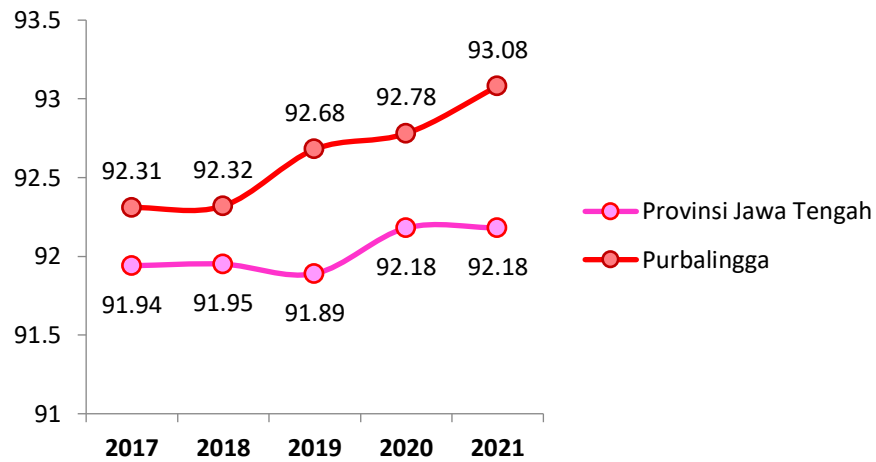
Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2017 - 2021

Gambar 2. 24. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

2.1.2.8 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. IPM sebagai ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi selanjutnya digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan sosial ekonomi, dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi.

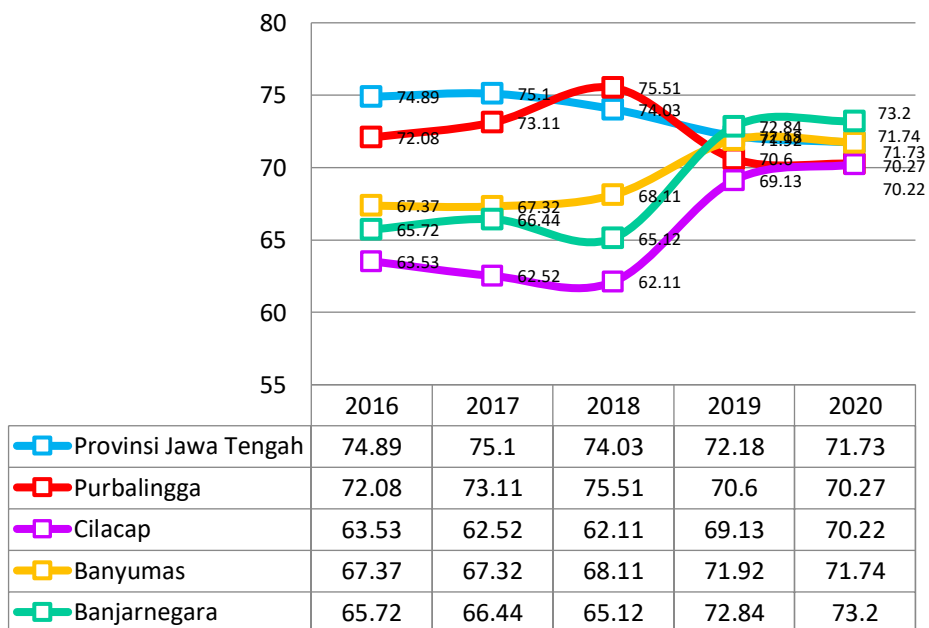
Capaian IPG di Kabupaten Purbalingga kurun waktu 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang meningkat. Tercatat posisi IPG Kabupaten Purbalingga di tahun 2017 yaitu 92,31 yang semakin naik sampai tahun 2021 menjadi 93,08.



Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, 2018-2022

Gambar 2. 25. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Pada aspek pemberdayaan perempuan yang dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dilihat bahwa capaian angka untuk Kabupaten Purbalingga periode 2016 - 2019 menunjukkan tren meningkat dan menurun yaitu dari sebesar 72,08 pada tahun 2016 naik menjadi 73,11 pada tahun 2017 dan menjadi 74,03 pada tahun 2018. Namun kemudian menurun menjadi 70,6 pada tahun 2019 dan kembali menurun menjadi 70,27 pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Purbalingga dalam kesetaraan peran gender cenderung fluktuatif. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten di Eks Karesidenan Banyumas sepanjang tahun 2016-2020 nilai IDG dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinsosdaldup3A Kab. Purbalingga, 2021

Gambar 2. 26. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Sekitar Tahun 2016-2020

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

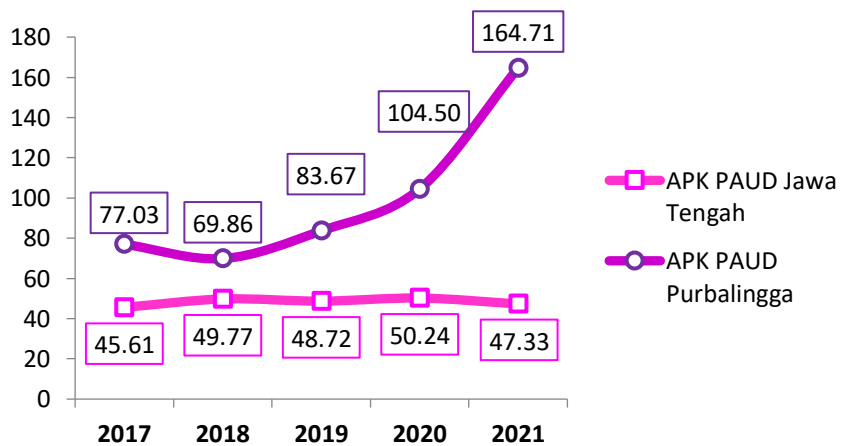
A. Pendidikan

Sebagaimana pembagian kewenangan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar (Dikdas). Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Purbalingga dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sesuai Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, PAUD dapat meliputi pendidikan formal, non formal, dan/atau informal, baik dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.

Cakupan penduduk usia 3 - 6 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah dapat digambarkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, sebagaimana gambar berikut :



Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 27. APK PAUD Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Capaian APK PAUD Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu dari 58,32 persen menjadi 104,50 persen.

Jumlah penyelenggaraan PAUD negeri atau swasta di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebanyak 511 buah, dimana 4,11 persen atau 21 PAUD diantaranya sudah berakreditasi A. Sedangkan dari sisi pendidik, jumlah PAUD yang sudah berkualifikasi S1/D4 sebanyak 973 orang atau 76,08 persen dari 1.279 orang pendidik.

Tabel II.13. Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah TK/RA	Unit	510	510	515	511	511
2	Jumlah TK/RA Berakreditasi A	Unit	19	19	26	21	21
3	Persentase TK/RA Berakreditasi A	Persen	3.73	3.73	5.05	4.11	4.11
4	Jumlah Pendidik TK/RA	Orang	1407	2937	1364	1279	1279
5	Jumlah Pendidik TK/RA Berkualifikasi S1/D4	Orang	991	1726	1072	973	973
6	Persentase Pendidik TK/RA Berkualifikasi S1/D4	Persen	70.43	58.77	78.59	76.08	76.08

Sumber :BPS Kab. Purbalingga, 2018-2022 dan Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

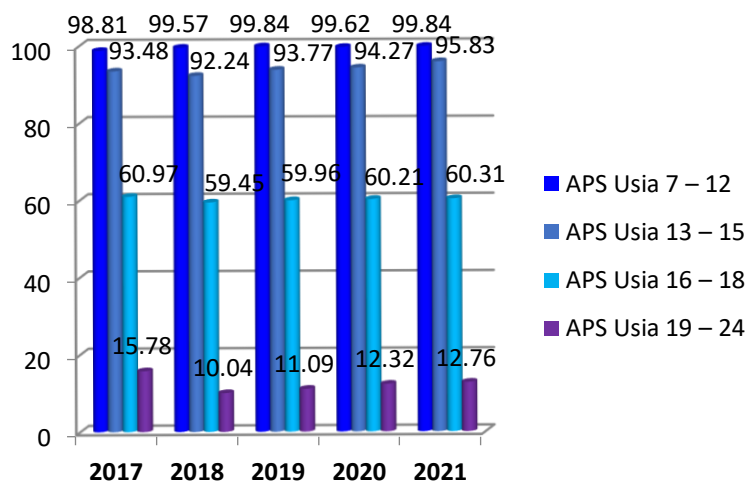
2. Pendidikan Dasar

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang digunakan untuk menghitung peluang dalam mengakses pendidikan secara umum dan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan. APS Kab Purbalingga pada tahun 2021 untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,84 persen. Nilai tersebut menunjukkan 99,84 persen penduduk usia 7-12 tahun sudah bersekolah.

Sedangkan APS kelompok umur 13-15 tahun pada tahun 2020 sebesar 95,83 persen, yang artinya masih ada 4,17 persen anak berumur 13-15 tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Sedangkan APS kelompok umur 16-18 tahun pada tahun 2020 sebesar 60,31 persen atau masih ada 39,69 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA / sederajat.

APS usia 19-24 tahun dalam 5 tahun terakhir masih rendah. APS tahun 2021 sebesar 12,76 persen menggambarkan bahwa proporsi penduduk usia 19-24 tahun untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi masih sangat kecil. Secara rinci APS menurut kelompok umur dapat dilihat pada gambar berikut.

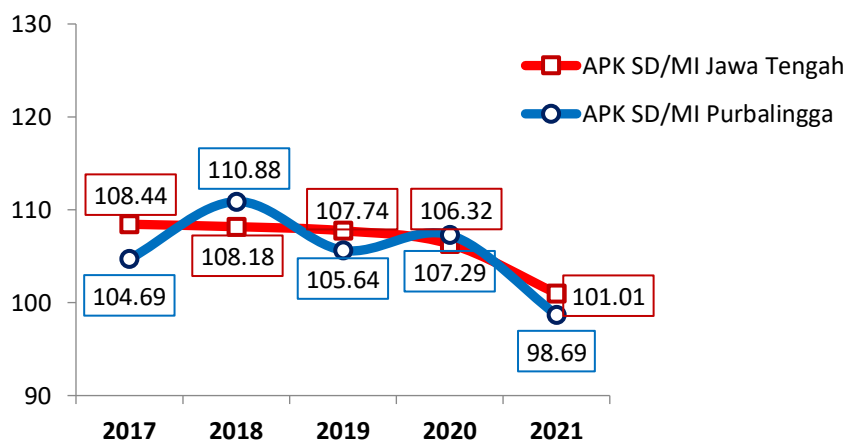


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018-2022
Gambar 2. 28. APS Kabupaten Purbalingga Menurut Kelompok Umur Tahun 2017-2021

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

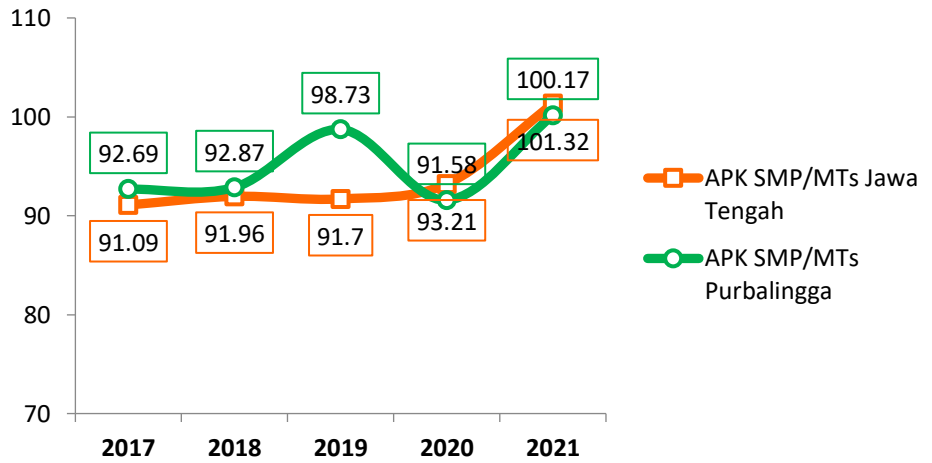
Untuk mengetahui tingkat partisipasi penduduk sesuai jenjang pendidikannya, dihitung menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan perbandingan jumlah anak yang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibagi jumlah anak usia pendidikan tersebut.

APK SD/MI Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sebesar 104.69 persen dan tahun 2021 menjadi 98.69 persen. Rata-rata APK SD/MI berada diatas 100 persen artinya jumlah penduduk yang bersekolah di tingkat SD lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kelompok umur 7 - 12 tahun. Hal ini bisa disebabkan adanya anak berumur diatas 12 tahun masih bersekolah di tingkat SD dan anak berusia kurang dari 7 tahun sudah bersekolah di tingkat SD, serta adanya siswa yang berasal dari kabupaten lain



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018-2022 dan Kemendikbud, 2022
Gambar 2. 29. APK SD/MI Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Sedangkan untuk APK SMP dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2017 sebesar 92,69 persen mengalami kenaikan menjadi menjadi 100,17 persen pada tahun 2021.

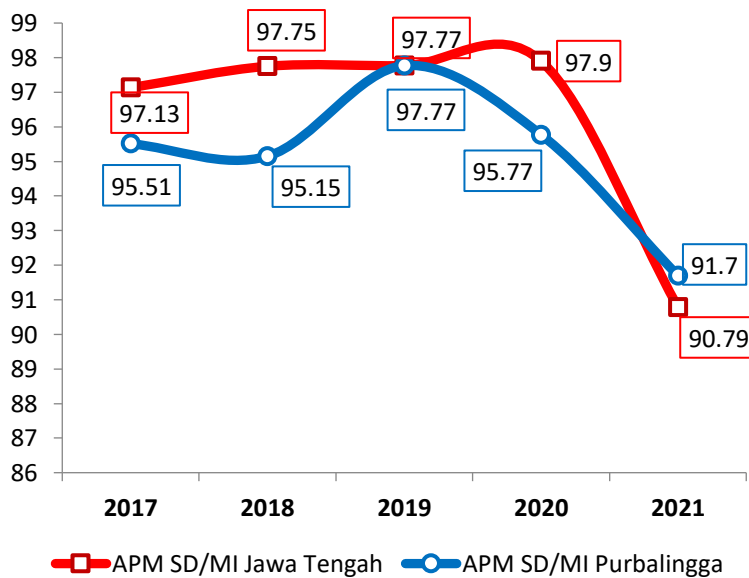


Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018-2022 dan Kemendikbud, 2022

Gambar 2. 30. APK SMP/MTs Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

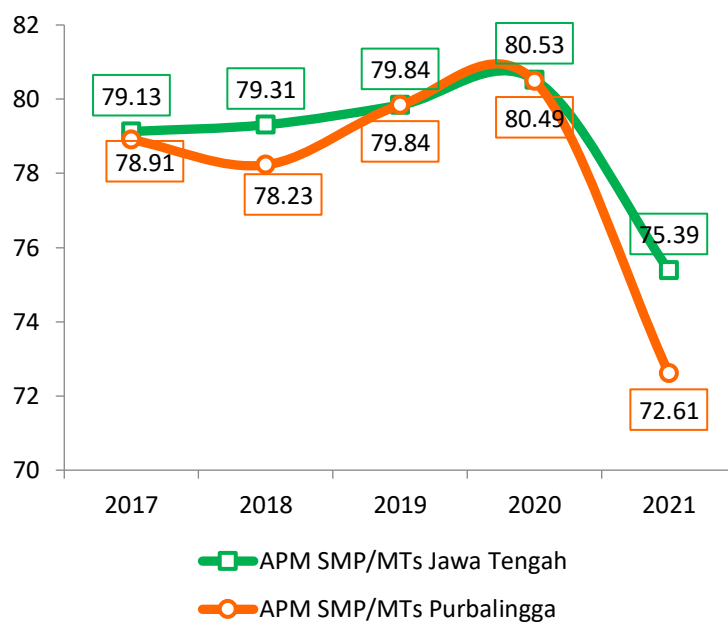
c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan proporsi anak kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan umurnya. APM SD/MI Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 91,7 persen. Sedangkan APM SMP/MTs tahun 2021 sebesar 80,49 persen.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018-2022 dan Kemendikbud, 2022

Gambar 2. 31. APM SD/MI Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018-2022 dan Kemendikbud, 2022

Gambar 2. 32. APM SMP/MTs Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

d. Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Pada jenjang SD/MI pada tahun 2017 tersedia sebanyak 650 unit SD / MI dan pada tahun 2021 menjadi berjumlah 652 unit. Sedangkan pada jenjang SMP / MTs pada tahun 2017 terdapat 117 unit dan pada tahun 2021 naik menjadi 118 unit.

Tabel II.14. Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SD/MI	650	650	649	644	652
4	Jumlah SMP/MTs	117	117	117	117	118

Sumber :Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

e. Ketersediaan Guru

Rasio guru terhadap siswa adalah jumlah siswa yang diampu oleh setiap guru berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Untuk Jenjang SD, pada tahun 2021 rasio guru dan siswa sebesar 15, artinya setiap guru mengampu 15 siswa. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs rasio guru terhadap siswa adalah sebesar 17. Secara lebih lengkap, jumlah guru dan siswa pada jenjang pendidikan dasar Kabupaten Purbalingga selama 5 tahun sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel II.15. Ketersediaan Guru Kabupaten Purbalingga
Tahun 2017 – 2021**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	SD/MI					
	Jumlah guru	5.291	6.309	6.435	6.132	6.273
	Jumlah siswa	99.292	99.997	98.929	98.564	94.590
	Rasio	18,77	15,85	15,37	16,07	15
II	SMP/MTs					
	Jumlah guru	2.263	2.511	2.511	2.530	2.676
	Jumlah siswa	44.487	44.724	43.047	44.566	45.237
	Rasio	19,66	17,81	17,14	17,62	17

Sumber :Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

Dilihat secara jumlah, ketersediaan guru terlihat sudah memadai, namun secara belum terdistribusi secara merata pada setiap sekolah dan setiap mata pelajaran. Namun demikian dalam kenyataannya ada sekolah yang masih kekurangan guru kelas dan guru mata pelajaran tertentu. Permasalahan lain adalah hampir separuh guru tersebut adalah guru non ASN.

f. Kondisi Ruang Kelas

Jumlah kelas Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga menurut data dapodik 2021 adalah sebanyak 3.226 kelas. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun, maka daya tampung rata-rata per kelas adalah 26 orang. Jika mengacu pada standat Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 dimana jumlah murid SD dalam satu kelas paling sedikit 20 orang dan paling banyak 28 orang, maka jumlah kelas yang ada di Kabupaten Purbalingga sudah mencukupi. Namun demikian, saat ini ada sekolah yang jumlah muridnya melebihi kapasitas kelas dan ada sekolah yang jumlah muridnya jauh dibawah kapasitas kelas semestinya. Dari 3.226 ruang kelas yang ada, pada tahun 2021 jumlah kelas dengan kondisi baik baru mencapai 36,30 persen, sedangkan ruang kelas dalam kondisi rusak berat sebanyak 10,28 persen.

**Tabel II.16. Kondisi Ruang Kelas SD / MI di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2017 – 2021**

Tahun	Ruang Kelas SD			
	Baik (%)	RR (%)	RS (%)	RB (%)
2017	26,3	62,89	5,54	5,27
2018	24,32	62,1	6,55	7,03
2019	9,53	69,78	14,33	6,36

Tahun	Ruang Kelas SD			
	Baik (%)	RR (%)	RS (%)	RB (%)
2020	36,3	35,24	18,18	10,28
2021	21,83	18,93	8,81	50,42

Sumber : Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

Pada jenjang SMP, rata-rata jumlah murid per kelas mencapai 40,7 atau setiap kelas saat ini menampung 40 siswa SMP, sehingga dapat dikatakan jumlah kelas tingkat SMP yang ada saat ini masih kurang. Dari seluruh ruang kelas yang ada, pada tahun 2020 jumlah kelas SMP dengan kondisi baik baru mencapai 43 persen, sedangkan ruang kelas dalam kondisi rusak berat sebanyak 6,31 persen.

Tabel II.17. Kondisi Ruang Kelas SMP / MTs di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

Tahun	Ruang Kelas SMP			
	Baik (%)	RR (%)	RS (%)	RB (%)
2017	34,28	58,68	4,19	2,85
2018	33,55	51,82	6,09	8,55
2019	18,26	64,55	13,07	4,12
2020	43,00	37,51	13,17	6,31
2021	64,49	23,03	8,60	3,88

Sumber : Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

Selain ruang kelas, setiap SMP juga harus mempunyai ruang lain yaitu perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, toilet, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain/olahraga. Data Dapodik tahun 2021 menunjukkan sebanyak 97,4 persen SMP sudah memiliki ruang perpustakaan, 95 persen memiliki Lab Komputer, seluruhnya memiliki Lab IPA, 97,4 persen memiliki ruang kepala sekolah seluruhnya memiliki ruang guru, 85 persen memiliki tempat ibadah dan 90,9 persen memiliki ruang TU.

g. Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

Kualitas penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Penyelenggaraan pendidikan berakreditasi A yang ada di Kabupaten Purbalingga pada jenjang SD/MI masih tergolong kecil, dimana pada tahun 2021 dari 652 SD/MI hanya 208 yang berakreditasi A. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, dari 118 SMP/MTs sebanyak 71 yang berakreditasi A.

Tabel II.18. Penyelenggara Pendidikan Berakreditasi A Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SD/MI	Unit	647	650	644	644	652
2	SD / MI Berakreditasi A	Unit	99	99	203	203	208
		Persen	15,3	15,23	31,52	31,52	31,90
3	Jumlah SMP/MTs	Unit	115	117	117	117	118
4	SMP / MTs Berakreditasi A	Unit	50	50	71	71	71
		Persen	43,48	42,74	60,68	60,68	60,17

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

h. Kualifikasi Guru

Kualitas pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh kualitas pendidik yang antara lain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Pada tahun 2021, persentase Guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik adalah sebanyak 98 persen. Sedangkan persentase Guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2021 adalah sebanyak 98,80 persen.

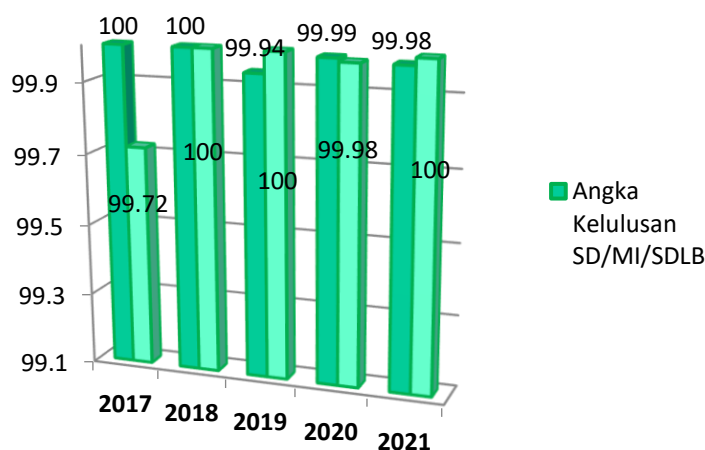
Tabel II.19. Kualifikasi Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pendidik SD/MI	Orang	5.926	6.309	6.435	5.986	6.237
2	Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/D4	Orang	5.624	6.148	6.162	6.132	6.112
		Persen	94,90	97,45	95,76	97,62	98,00
3	Jumlah Pendidik SMP/MTs	Orang	2.514	2.511	2.561	2.530	2.676
4	Pendidik SMP/ MTs Berkualifikasi S1/D4	Orang	2.384	2.451	2.489	2.496	2.644
		Persen	94,83	97,61	97,19	98,66	98,80

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

i. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Angka kelulusan jenjang pendidikan dasar SD/SMP sederajat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 – 2021 mencapai 99% s.d 100%. Begitu pula indeks integritas Ujian Nasional di Purbalingga mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh peserta UN mempunyai tingkat kejujuran dalam mengerjakan soal UN. Selengkapnya capaian angka kelulusan disajikan dalam gambar.

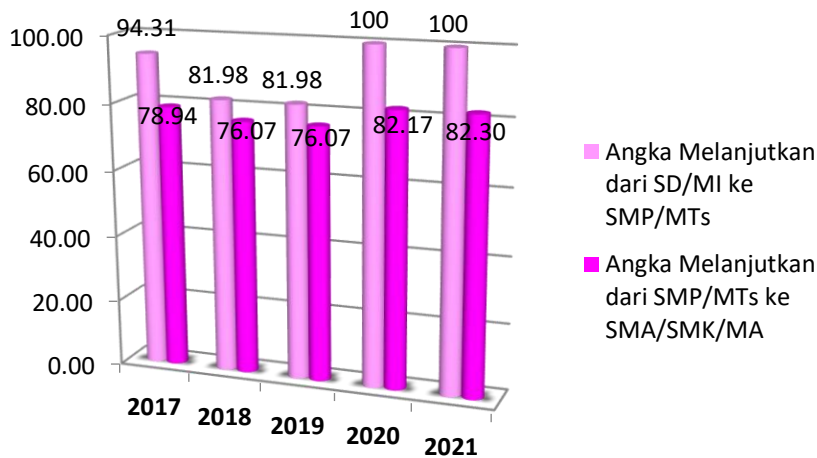


Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 33. Angka Kelulusan Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

j. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke jenjang SMP pada tahun 2017 sebesar 94,31 persen, menurun sampai dengan tahun 2019 menjadi 81.98 persen dan kemudian mencapai 100 persen pada Tahun 2021. Sedangkan angka melanjutkan dari jenjang SMP ke SMA tahun 2017 sebesar 78,94 persen dan tahun 2021 sebesar 82,3 persen.



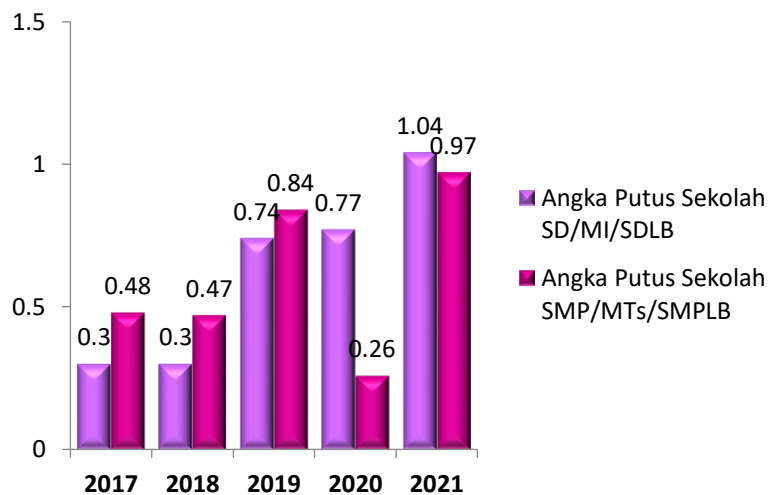
Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 34. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

k. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan banyaknya anak sekolah yang tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan sekolahnya. Angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Purbalingga pada tahun 2017 - 2021 cenderung meningkat. Angka putus sekolah SD/MI tahun 2017 sebesar 0,3 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 1,04 persen. Sedangkan

untuk jenjang SMP/MTs, pada tahun 2017 sebesar 0,48 persen dan pada tahun 2020 menurun menjadi 0,26 persen namun naik lagi di tahun 2021 menjadi 0,97 persen.

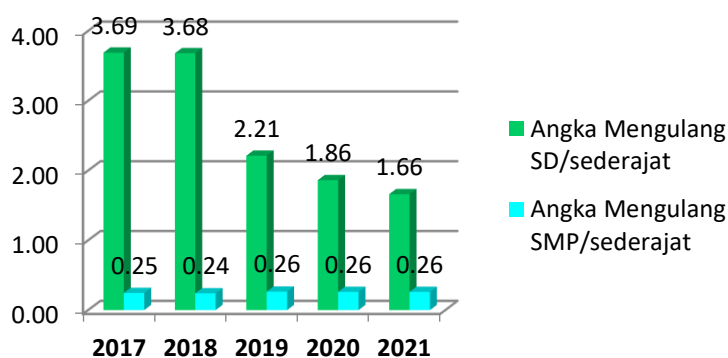


Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 35. Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

I. Angka Mengulang

Angka mengulang menggambarkan seberapa banyak siswa yang tinggal kelas pada suatu jenjang pendidikan. Angka mengulang jenjang SD/MI sederajat menunjukkan penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu dari angka 3,69 persen menjadi 1,66 persen. Sedangkan angka mengulang SMP/MTS sederajat cenderung menunjukkan kenaikan dimana pada tahun 2017 sebesar 0,25 persen kemudian naik menjadi 0,26 persen pada tahun 2021.



Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 36. Angka Mengulang Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

3. Pendidikan Non Formal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pendidikan nonformal yang ada di Purbalingga meliputi pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus dan lembaga pelatihan.

Jumlah peserta didik PKBM di Purbalingga terus menunjukkan kenaikan, dengan mayoritas peserta didik ada pada pembelajaran Kejar Paket C setara SMA/MA. Melihat APS usia 16-18 yang masih rendah dan peserta didik Kejar Paket C yang cukup besar, dapat diartikan bahwa pelayanan pendidikan jenjang SMA/MA masih harus di tingkatkan.

Tabel II.20. Jumlah Warga Belajar PKBM Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Paket A	244	116	52	80	56
Paket B	659	661	610	753	661
Paket C	1.703	1.906	2.110	2.363	2.183
Jumlah	2.606	2.683	2.772	3.196	2.900

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

Gambaran mengenai penyelenggaraan pendidikan non formal yang diselenggarakan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.21. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi	Unit	10	13	18	18	18
		Persen	50	65	90	90	90
2	PKBM yang Terakreditasi	Unit	3	7	13	13	13
		Persen	16,67	38,9	72,22	72,22	72,22

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

4. Cakupan Pelayanan Bidang Pendidikan (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Dari 3 indikator SPM Bidang Pendidikan tersebut, pada tahun 2019 yang sudah mencapai target 100% yaitu sebanyak 1 indikator sedangkan 2 indikator lainnya belum dapat tercapai. Namun pada tahun 2020 sudah tercapai semua. Secara rinci indikator SPM Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019-2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.22. Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 – 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	83.68	110,99	124,93
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	105.70	107,45	100,03
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	83.82	100	100

Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga, 2022

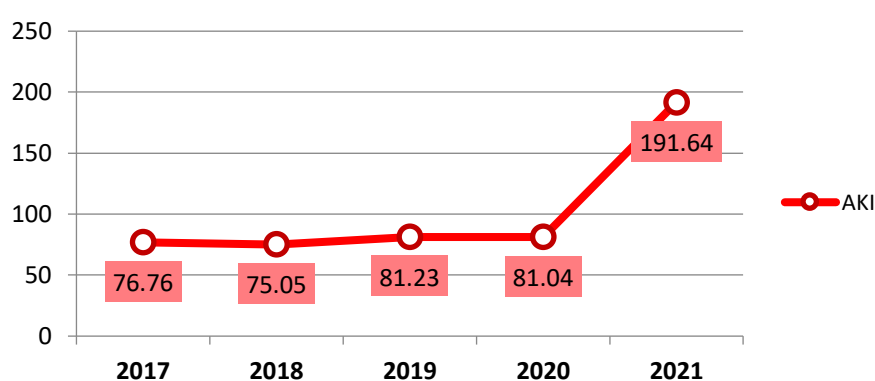
B. Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinan setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI bukan hanya merupakan indikator kesehatan dan status gizi ibu, tetapi dapat juga menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tingkat efektifitas pengelolaan program kesehatan serta mencerminkan risiko yang dihadapi selama kehamilan dan persalinan.

Angka Kematian Ibu Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan, yaitu dari angka 76,76 menjadi 75,05. Namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami

kenaikan dari 81,23 di tahun 2019 kemudian menjadi 81 di tahun 2020 dengan 12 kasus dan meningkat lagi menjadi 191,64 dengan 27 kasus. Jika dilihat dari penyebabnya, kasus terbanyak kematian ibu adalah akibat adanya pendarahan dan eklamsia. Pada Tahun 2020 Covid-19 jadi menyumbang penyebab 2 kasus kematian ibu, termasuk penyakit degeneratif jantung kembali menjadi penyebab kematian ibu sebanyak 3 kasus setelah sebelumnya nir kasus di tahun 2020. Penyebab lainnya masih didominasi oleh perdarahan dan eklamsi, walaupun tren kedua penyebab tersebut mengalami penurunan.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 37. Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

2. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita

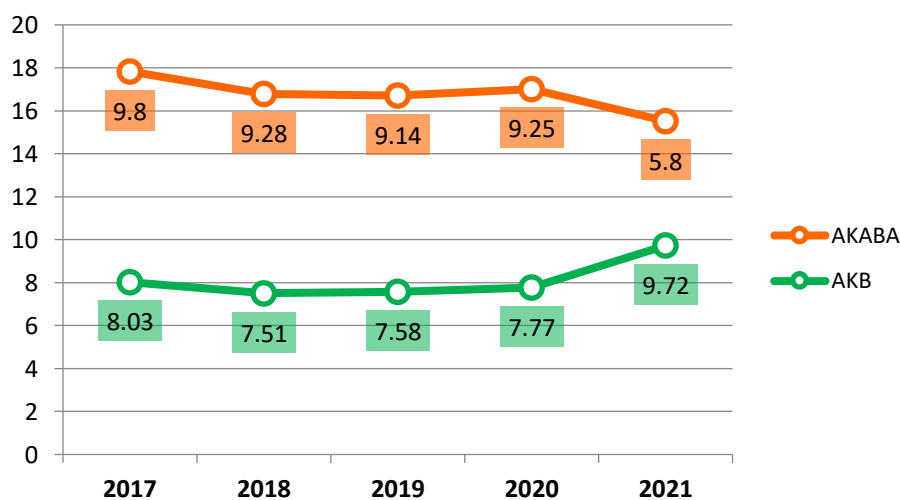
Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan banyaknya kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. AKB di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 adalah sebesar 8,03 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian menurun cukup banyak pada tahun tahun 2020 menjadi 7,77 per 1.000 kelahiran hidup dengan 115 jumlah kasus kematian bayi. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 9,72 per 1.000 kelahiran hidup dengan 137 jumlah kasus kematian bayi .

Kematian bayi dilatar belakangi oleh tata laksana terhadap ibu hamil dengan resiko tinggi yang kurang optimal, seperti indikasi kurangnya asupan gizi yang berakibat pada BBLR, serta adanya kelainan kongenital, asfiksia, kelahiran premature, sepsis, ikterus dan penyakit penyertaan lain yang diderita ibu hamil.

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah banyaknya kematian anak sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKABA dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan

kesehatan pada balita, serta gambaran kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.

AKABA di Purbalingga mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dimana pada tahun 2017 sebesar 9,8 per 1.000 kelahiran hidup dan pada akhir tahun 2021 turun menjadi 5,8 per 1.000 kelahiran hidup dengan 82 jumlah kasus kematian balita.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 38. Tren Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Tahun 2017 – 2021

3. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah banyaknya kematian bayi umur kurang dari 28 hari (0-28 hari) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKN menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk *antenatal care*, pertolongan persalinan dan *postnatal* ibu hamil. Semakin tinggi angka kematian neonatal berarti semakin rendah tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

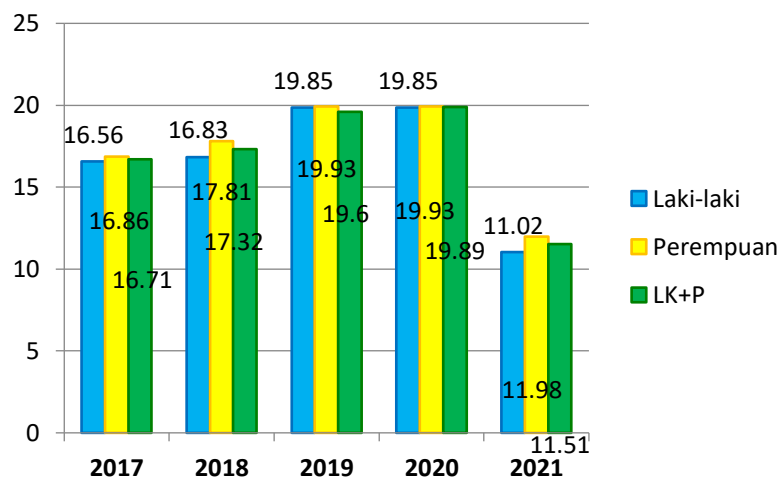
AKN Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 s.d tahun 2019 mengalami kenaikan dari 80 kasus menjadi 61 kasus. Namun kemudian pada tahun 2020 ada kenaikan jumlah kasus kematian neonatal menjadi 74 kasus dengan AKN sebesar 5 per 1.000 kelahiran hidup. Di tahun 2021, kembali naik menjadi 5,82 dengan 82 kasus.

4. Angka Kesakitan dan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan

Potret kondisi kesehatan penduduk pada saat tertentu, dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk secara umum. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberikan pengaruh pada tingkat produktivitas. Tingkat

kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tingkat keluhan kesehatan atau angka kesakitan yang dialami penduduk. Seseorang dikatakan sakit jika keluhan kesehatan yang dialami menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari sehingga tidak dapat melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Banyaknya penduduk yang sakit disebut dengan angka kesakitan.

Angka kesakitan penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 mencapai 11,51 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2020 dengan angka 19,89. Angka kesakitan pada perempuan 11,98 persen sedikit lebih tinggi dari pada laki-laki 11,02 persen. Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi angka kesakitan, yaitu gaya hidup, kondisi lingkungan, pelayanan kesehatan dan faktor genetik. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi mempengaruhi status kesehatan seseorang.



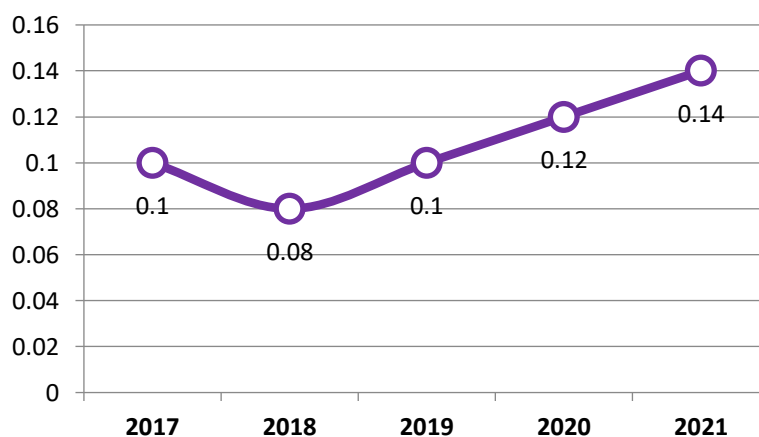
Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2. 39. Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021

5. Persentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Stunting

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Persentase balita gizi buruk adalah perbandingan jumlah balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita.

Jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Purbalingga pada tahun 2021 sebanyak 56 kasus, sedangkan jumlah balita gizi kurang sebanyak 1.865. Secara umum, trend prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2017 – 2018 mengalami penurunan, yaitu dari 0,10 persen pada tahun 2017 menjadi 0,08 pada tahun 2018. Namun kemudian mengalami kenaikan di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu menjadi 0,1 di tahun 2018, naik menjadi 0,12 di tahun 2020 dan naik lagi menjadi 0,14 pada tahun 2021.

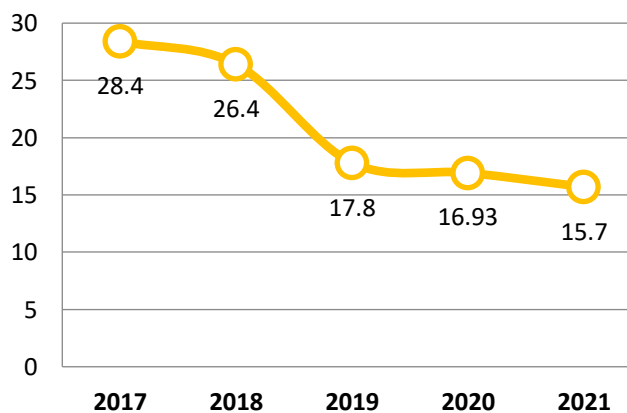


Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2021

Gambar 2. 40. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

Kekurangan gizi masa anak sering dihubungkan dengan kekurangan vitamin dan mineral yang spesifik dan berhubungan dengan mikronutrien maupun makronutrien tertentu. Kekurangan gizi secara kronis salah satunya ditunjukkan dengan kondisi stunting, yaitu gangguan pertumbuhan fisik yang ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi.

Prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga masih cukup tinggi. Pada tahun 2017 sebesar 28,4 persen, turun menjadi 26,4 persen pada tahun 2018, kemudian perlahan menurun lagi sampai dengan 16,93 persen pada tahun 2020 dan 15,7 persen pada tahun 2021.



Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 41. Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

6. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Dengan pertambahan jumlah penduduk dan jumlah puskesmas yang tetap, maka rasio Puskesmas dengan penduduk di Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 menjadi semakin kecil. Dengan demikian, beban pelayanan puskesmas menjadi semakin berat dan dapat berpengaruh pada kualitas

pelayanan. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sesuai standar Kementerian Kesehatan RI adalah satu Puskesmas maksimal melayani 30.000 penduduk.

Tabel II.23. Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Penduduk (orang)	Rasio
2017	22	955.865	1:43.448
2018	22	985.543	1:44.797
2019	22	1.003.246	1:45.602
2020	22	1.011.425	1:45.974
2021	22	1.021.920	1:46.451

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2022

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 - 2021 baik berupa rumah sakit maupun puskesmas, mempunyai jumlah yang mampu memadai pelayanan kesehatan bagi penduduk di Kabupaten Purbalingga. Secara rinci ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.24. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

Indikator	Realisasi Kinerja				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Puskesmas Perawatan	11	11	11	11	11
Jumlah Puskesmas Mampu Bersalin	14	14	16	16	17
Jumlah Puskesmas Poned	6	7	7	7	5
Jumlah RS Poned	1	2	3	3	3
Jumlah Puskesmas Terakreditasi	15	22	22	22	22
Jumlah RS Terakreditasi	3	6	6	6	6

Sumber: Dinkes Kab. Purbalingga, 2022

7. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Purbalingga secara umum berdasarkan standar rasio ideal kebutuhan tenaga medis masih membutuhkan penambahan jumlah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Secara rinci capaian ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.25. Perkembangan Rasio Dokter Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Perawat		Bidan	
	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio
2017	157	15,7	69	6,9	1088	108,8	582	58,2
2018	158	15,8	127	12,7	1095	109,5	562	56,2
2019	182	18,2	125	12,5	1371	137,1	566	56,6
2020	156	15,6	95	9,5	1056	105,6	604	60,4
2021	194	19,25	101	10,02	1243	123,3	712	70,65

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2022

8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar (SPM)

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Berbagai pelayanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan indikator SPM berdasarkan Permenkes No.4 Tahun 20019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan meliputi: Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, ODGJ berat, tuberkulosis dan HIV yang dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel II.26. Cakupan Pelayanan Bidang Kesehatan (SPM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No	Indikator SPM (Permenkes No.4 Tahun 20019)	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95,71	95,83	100	100	79,42
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99,71	99,75	99,86	99,88	88,33
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,84	99,77	99,88	99,95	87,54
4	Pelayanan Kesehatan Balita	97,91	98,5	94,44	81,04	86,94
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia DikDas	85,58	93,16	97,81	93,45	64,99
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	7,52	6,12	12,34	31,47	24,08
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	52,43	54,77	52,95	60,14	70,19
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5,52	13,65	17,48	11,12	10
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	14,35	28,28	134,5	100	107
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100,00	100,00	69,42	73,5	78,11
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	100,00	63,18	79,68	39,76	57,09
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	26,92	97,85	134,7	80,79	86,10

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2022

9. Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pelayanan kesehatan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit dan/atau gangguan kesehatan. Beberapa capaian pelayanan kesehatan lingkungan di

Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.27. Cakupan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	78,24	78,24
2	Cakupan kepemilikan jamban	71,53	73,91	76,4	78,62	79,55
3	Cakupan akses jamban keluarga	84,34	87,59	89	92,53	92,6
4	Cakupan desa memenuhi syarat kesehatan lingkungan	86,6	87	62,30	61,92	61,92
5	Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan	75,1	75,1	52,3	63,6	90,9
6	Cakupan desa ODF	78	44,77	61,90	64,02	64,9
7	Cakupan rumah tangga ber PHBS	75,6	85	81	86,8	86,8
8	Cakupan Posyandu Mandiri	65	87	69,90	71,5	71,5
9	Cakupan kepesertaan KB aktif	81,3	79,91	81,00	80,90	79,3
10	Cakupan rumah sehat	86,6	71,3	76,55	76,50	61,15
11	Cakupan desa/kelurahan melakukan STBM	92	95,82	94,1	100	100
12	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	65,5	100	100	61	61
13	Proporsi TUPM memenuhi syarat	75,3	75,3	56,30	61,7	65,2

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2022

10. Kondisi Penyakit Menular yang Terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kabupaten Purbalingga adalah Malaria, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD), TB dan kusta yang perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.28. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

Tahun	Prevalensi Malaria	Prevalensi HIV/AIDS	IR DBD per 100.000 pddk	CFR DBD (%)	CNR TB per 100.000 penduduk	Penemuan Kasus Baru Kusta
2017	0,03	0,002	21,05	2,1	114,60	18
2018	0,03	0,003 (72)	25,42	1,7	124,18	16
2019	0,01	0,003 (89)	53,2	0,8	135,16	25
2020	0,05	0,003 (109)	20,2	2	101	8
2021	0,02	0,01	9,6	5,2	41	12

Sumber : Dinkes Kab. Purbalingga, 2022

Penyakit menular lainnya di Kabupaten Purbalingga adalah sejak tahun 2020 yaitu terjadinya pandemic Covid-19. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sebelumnya dikenal dengan nama 2019 Novel Corona Virus (2019-nCoV) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS CoV-2) yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya

pada manusia. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Jumlah kasus konfirmasi di Kabupaten Purbalingga sampai dengan 31 Desember 2021 dari puskesmas yang melapor adalah sebanyak 15.365 kasus yang menyebar di seluruh kecamatan, dengan tingkat kematian atau *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 6,55 % dan tingkat kesembuhan atau *Case Recovery Rate* (CRR) sebesar 93,36 %.

11. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) adalah suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni Keluarga Sehat bila nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS 0,5 - 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5. Nilai IKS dapat diketahui berjenjang mulai dari tingkat keluarga, tingkat wilayah yang paling kecil (RT) hingga tingkat nasional.

IKS ini juga dapat menunjukkan nilai tiap-tiap indikator yang terdapat dalam 12 indikator tersebut sehingga intervensi yang akan dilakukan dapat didasarkan pada nilai IKS per indikator atau berdasarkan IKS wilayah.

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 mencapai 0,16 dan pada tahun 2021 naik menjadi 0,17. Indeks tersebut masuk pada kategori keluarga tidak sehat (nilai IKS < 0,5). Nilai IKS tersebut masih lebih rendah dari IKS Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,20 akan tetapi lebih baik jika dibandingkan dengan nilai IKS kabupaten di eks karsidenan Banyumas (Banjarnegara nilai IKS 0,09, Banyumas IKS 0,15, Cilacap 0,12).

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan yang menangani pemenuhan infrastruktur dasar pada suatu daerah. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan jalan dan jembatan, sumber daya air (irigasi), serta penataan ruang.

a) **Jalan dan Jembatan**

Jalan sebagai infrastruktur atau prasarana dasar mempunyai fungsi strategis dalam mendukung aksesibilitas masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga.

Jalan kabupaten di Kabupaten Purbalingga ditetapkan melalui Keputusan Bupati Purbalingga Nomor : 621/329 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dengan panjang 888.087 km dan mengalami penambahan sebesar 76,924 km dari sebelumnya. Sedangkan panjang jalan yang merupakan kewenangan provinsi yang ada di Kabupaten Purbalingga sepanjang 39,02 km yang merupakan penghubung antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Pemalang.

Ruas jalan kewenangan kabupaten yang sudah sesuai dengan standar jalan kabupaten dengan lebar minimal 5,5 m adalah sepanjang 206,13 km atau 23,21%. Untuk perkerasan jalan dalam kondisi baik dan sedang hingga tahun 2021 terlihat fluktuatif. Penurunan kondisi yang cukup besar pada tahun 2020 dari 87,68 % di tahun 2019 menjadi 78,5 % di tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi musim hujan yang terjadi sepanjang tahun serta adanya refocusing anggaran penanganan jalan. Kemudian di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 88,77%. Selengkapny kondisi perkerasan jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel II.29. Kinerja Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang jalan	Km	888,08	888,08	888,08	888,08	888,08
2	Panjang jalan dalam kondisi baik & sedang	%	80,75	85,66	87,68	78,5	86,38
3	Persentase Lajur Jalan Minimal 5,5 m	%	18,33	21,75	23,21	23,21	23,21

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2022

Untuk kondisi jembatan yang ada di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021) mengalami penambahan jumlah jembatan dari 273 menjadi 275 buah. Jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2017 sebesar 95,57 persen menurun menjadi 90,2 persen pada tahun 2021, dikarenakan jembatan yang rusak belum ditindaklanjuti perbaikannya.

Tabel II.30. Kinerja Jembatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah jembatan	buah	273	275	275	275	275
2	Jembatan dalam kondisi baik	%	95,57	89,25	96,16	90,2	90,2

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2021

b) Sumber Daya Air

Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi sumber daya air yang cukup berlimpah. baik sebagai sumber air baku layanan penyediaan air bersih maupun air irigasi pertanian. Dalam 5 tahun terakhir kondisi irigasi cenderung tidak banyak berubah, dimana pada tahun 2016 persentase luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 45 persen sama dengan capaian kondisi tahun 2020.

Tabel II.31. Kinerja Jaringan Irigasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bendung	buah	205	205	207	207	230
2	Jumlah irigasi	buah	256	256	255	255	255
3	Rasio jaringan irigasi	m/ha	17,2	17,29	17,29	17,29	17,29
4	Luas irigasi	m ²	19.207	19.158	19.158	19.158	19.159
5	Luas irigasi kondisi baik	m ²	8.085	8.429	8.621	8.621	8.621
6	Cakupan air irigasi	%	87,5	89,6	89,6	90,5	90,5
7	Bendung dan irigasi kondisi baik	%	42.2	43.9	45	45	56,67

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2022

2. Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Gedung

Kabupaten Purbalingga telah mengalami perkembangan cukup pesat seiring berkembangnya aktivitas di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian. Kegiatan yang diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk adalah industri pengolahan dan perdagangan-jasa, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dilihat dari perencanaan penataan ruang, pada tahun 2011 Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 sebagai strategi dasar kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten untuk periode waktu 20 tahun (2011-2031). Hasil penilaian terhadap tata ruang menunjukkan tingkat ketidaksesuaian sebesar 66,80 persen, sehingga perlu direvisi. Hasil revisi RTRW telah ditetapkan kembali menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.

Sementara itu dokumen perencanaan lainnya yang sudah tersusun untuk kawasan perkotaannya di Kabupaten Purbalingga yaitu materi teknis RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga dan RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari yang masih dalam proses untuk ditetapkan menjadi peraturan

hukum. Diharapkan dokumen tersebut dapat menjadi panduan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih rinci untuk kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan hasil revisi RTRW, tujuan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga adalah: “Mewujudkan Ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah Berbasis Agribisnis, Industri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan”. Dari tujuan tersebut mengandung makna:

a) Pengembangan Pusat Kegiatan

Perkotaan Purbalingga yang tumbuh menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yaitu kawasan yang menjadi hirarki pertama dan memiliki skala pelayanan untuk kegiatan tingkat regional yang berada di bagian Barat-Selatan provinsi Jawa Tengah, yang didukung dengan pengembangan pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan di sekitarnya.

b) Pengembangan Agribisnis

Purbalingga yang tumbuh berbasis usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian, yang meliputi pengusahaan input pertanian dan/atau pengusahaan produksi itu sendiri atau pun juga pengusahaan pengelolaan hasil pertanian, yang didukung dengan sistem pengelolaan pertanian berteknologi tinggi serta sistem pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang handal. Aktivitas pertanian disusun dalam kerangka sistematis dan strategis yang siap bersaing dalam pasar global.

c) Pengembangan Industri dan Pariwisata

Sektor industri sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat didorong untuk lebih mampu menyerap dan memanfaatkan hasil-hasil pertanian. Pariwisata yang tumbuh dan berkembang dari potensi masyarakat Purbalingga baik berupa wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya maupun wisata buatan perlu terintegrasi dengan sistem infrastruktur wilayah. Pengembangan industri dan pariwisata diarahkan untuk mampu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mewujudkan pola pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

d) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks esensial ditujukan untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini (intra generation) serta kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang (inter generation). Sedangkan pembangunan dalam konteks spasial

ditujukan untuk mewujudkan ruang Kabupaten Purbalingga yang serasi, selaras dan seimbang, serta mengurangi dampak negatif dari keterhubungan antar fungsi yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga (intra region) maupun terhadap wilayah kabupaten disekitarnya (inter region).

Kabupaten Purbalingga memiliki 2 PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan yaitu Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Kawasan Perkotaan Bobotsari. Sedangkan untuk PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa tersebar di beberapa kecamatan terdiri dari : PPK Bukateja, Rembang, Karangreja, Kertanegara, Kaligondang, Bojongsari, Karanganyar, Karangmoncol, Kemangkon, Kejobong, Kutasari, Padamara, Mrebet, Pengadegan dan PPK Karangjambu. Sementara untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa meliputi : PPL Kutawis, Makam, Kutabawa, Purbayasa, Picung, Tunjungmuli, Bedagas dan PPL Bandingan.

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, rekomendasi kesesuaian ruang yang telah diterbitkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 capaiannya 75,5 % naik menjadi 80,32 % pada tahun 2019, naik lagi menjadi 87,41% pada tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 92,22 % pada tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang menjadi hal utama yang dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat dan investor sebelum melakukan pembangunan pada suatu ruang.

Dalam pemanfaatan ruang, simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam rencana tata ruang. Berikut ini data kesesuaian tata ruang dalam pemanfaatan ruang kaitannya dengan Perda RTRW Kabupaten Purbalingga berdasarkan jumlah permohonan rekomendasi yang masuk dalam kurun waktu tahun 2018-2021.

Tabel II.32. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 - 2021

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Rekomendasi TKPRD		ITR WIUP	Informasi Tata Rung (ITR)	
			Sesuai	Tidak Sesuai		Sesuai	Tidak Sesuai
1	2018	151	83	34	18	13	3

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Rekomendasi TKPRD		ITR WIUP	Informasi Tata Rung (ITR)	
			Sesuai	Tidak Sesuai		Sesuai	Tidak Sesuai
2	2019	354	294	60	0	0	0
3	2020	184	142	20	22	0	0
4	2021	424	396	19	9	0	0

Sumber : DPUPR Kab. Purbalingga, 2022

Sedangkan untuk penataan bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga setelah tersusunnya Peraturan daerah Bangunan Gedung Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2015, belum ditindaklanjuti lagi dengan produk hukum turunannya berupa Peraturan Bupati Tenaga Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Ijin Mendirikan Bangunan dan Sistem Informasi Bangunan Gedung. Hal tersebut dikarenakan diperlukan inventarisasi terkait kondisi bangunan gedung yang dipersyaratkan dan tim ahli yang ada di Kabupaten Purbalingga sebelum ditindaklanjuti ke dalam implementasi Peraturan Bupati. Namun, dengan munculnya UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka diperlukan penyusunan Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terlebih dahulu kemudian diikuti dengan Perda Bangunan Gedung.

Beberapa capaian dalam penataan ruang dan penataan bangunan gedung di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.33. Kinerja Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah	dok	0	0	0	2	1
2	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan	buah	100	75,5	80,32	87,41	92,22
3	Tersedianya produk hukum penataan bangunan dan lingkungan	dok	0	0	0	0	0
4	Persentase bangunan pemerintah kondisi baik	persen	30	50	50	50	60

Sumber : DPU-PR Kab. Purbalingga, 2022

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Kawasan Kumuh

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dengan kondisi bangunan yang tidak teratur, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak

memenuhi syarat. Penggunaan ruang para permukiman kumuh tersebut seringkali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantong-kantong permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*squatters*).

Keadaan demikian yang menunjukkan bahwa penghuninya kurang mampu untuk membeli dan menyewa rumah di daerah perkotaan dengan harga lahan/bangunan yang tinggi. Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan, keselamatan dan kenyamanan penghuni.

Dilihat dari luasan kawasan kumuh, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Purbalingga No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga dengan luas total 344,28 Ha yang tersebar di 25 kawasan., dengan rincian sebagai berikut.

Tabel II.34. Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Purbalingga

No	Nama Lokasi	Kecamatan	Kelurahan / Desa	RT/RW	Luas (Ha)	Luas Kawasan (Ha)	Tingkat Kumuh
1	Kawasan Kali Gemuruh	Purbalingga	Purbalingga Kulon	04/02	1,80	20,30	Ringan
			Purbalingga Kulon	03/03	0,74		Ringan
			Purbalingga Kulon	03/02	1,25		Ringan
			Purbalingga Lor	02/03	2,22		Ringan
			Purbalingga Lor	03/03	1,53		Ringan
			Purbalingga Lor	02/04	1,05		Ringan
			Purbalingga Lor	03/04	1,35		Ringan
			Purbalingga Lor	04/04	1,71		Ringan
			Kembaran Kulon	04/01	3,08		Ringan
			Wirasana	01/03	5,57		Ringan
2	Kawasan Gringsing	Purbalingga	Purbalingga Wetan	01/01	1,31	26,30	Ringan
			Purbalingga Kidul	01/04	1,78		Ringan
			Purbalingga Kidul	01/06	2,57		Ringan
			Purbalingga Kidul	03/05	1,29		Ringan
			Purbalingga Kidul	02/02	2,49		Ringan
			Purbalingga Kidul	03/03	3,40		Ringan
			Purbalingga Kulon	03/01	3,00		Ringan
			Penambongan	03/03	2,06		Ringan
			Penambongan	01/05	2,55		Ringan
			Penambongan	02/05	1,61		Ringan
			Penambongan	01/06	2,33		Ringan
			Penambongan	02/06	1,91		Ringan
3	Kawasan Kandanggampang	Purbalingga	Kandanggampang	02/05	1,23	9,57	Ringan
			Kandanggampang	01/03	1,97		Ringan

No	Nama Lokasi	Kecamatan	Kelurahan / Desa	RT/RW	Luas (Ha)	Luas Kawasan (Ha)	Tingkat Kumuh
			Kandanggampang	04/05	1,56		Ringan
			Kandanggampang	01/05	1,71		Ringan
			Kandanggampang	03/05	0,81		Ringan
			Kandanggampang	03/03	2,29		Ringan
4	Kawasan Wirasana	Purbalingga	Kembaran Kulon	04/03	2,42	27,98	Ringan
			Wirasana	06/02	2,99		Ringan
			Wirasana	02/01	1,80		Ringan
			Wirasana	03/01	2,74		Ringan
			Wirasana	06/01	4,07		Ringan
			Wirasana	05/01	1,83		Ringan
			Wirasana	01/02	2,04		Ringan
			Wirasana	05/02	2,09		Ringan
			Wirasana	07/02	1,26		Ringan
			Wirasana	02/02	1,11		Ringan
			Wirasana	04/02	4,11		Ringan
			Wirasana	03/02	1,52		Ringan
5	Kawasan Bojong	Purbalingga	Bojong	04/03	2,69	9,53	Ringan
			Bojong	03/03	2,93		Ringan
			Bojong	05/02	1,78		Ringan
			Bojong	04/01	2,13		Ringan
6	Kawasan Toyareja	Purbalingga	Toyareja	01/02	4,79	16,20	Ringan
			Toyareja	03/02	2,01		Ringan
			Toyareja	02/02	2,66		Ringan
			Toyareja	03/03	2,76		Ringan
			Toyareja	02/03	3,98		Ringan
7	Kawasan Kedungmenjangan	Purbalingga	Kedungmenjangan	03/01	2,56	9,63	Ringan
			Kedungmenjangan	01/01	3,92		Ringan
			Kedungmenjangan	05/01	2,01		Ringan
			Kedungmenjangan	04/01	1,14		Ringan
8	Kawasan Jatisaba	Purbalingga	Jatisaba	10/04	1,24	11,90	Ringan
			Jatisaba	09/04	1,25		Ringan
			Jatisaba	11/05	4,42		Ringan
			Jatisaba	06/05	2,75		Ringan
			Jatisaba	04/04	2,24		Ringan
9	Kawasan Bancar	Purbalingga	Bancar	03/06	2,85	7,07	Ringan
			Bancar	01/06	2,05		Ringan
			Bancar	02/06	1,23		Ringan
			Bancar	01/05	0,94		Ringan
10	Kawasan Keramean	Kalimanah	Mewek	02/02	2,19	39,92	Ringan
			Mewek	02/03	2,71		Ringan
			Mewek	01/03	1,52		Ringan
			Mewek	03/03	2,32		Ringan
			Mewek	01/02	1,94		Ringan
			Karangmanyar	01/02	1,45		Ringan
			Karangmanyar	03/01	2,23		Ringan
			Karangmanyar	01/01	2,28		Ringan
			Kalikabong	03/03	1,66		Ringan

No	Nama Lokasi	Kecamatan	Kelurahan / Desa	RT/RW	Luas (Ha)	Luas Kawasan (Ha)	Tingkat Kumuh
			Kalikabong	06/03	1,09		Ringan
			Kalikabong	03/02	1,33		Ringan
			Kalikabong	05/03	1,29		Ringan
			Kalikabong	04/03	1,07		Ringan
			Kalikabong	07/03	1,06		Ringan
			Kalikabong	03/05	0,56		Ringan
			Kalikabong	05/05	0,85		Ringan
			Kalikabong	04/05	1,21		Ringan
			Kalikabong	01/05	1,91		Ringan
			Ds. Grecol	02/04	2,81		Ringan
			Ds. Grecol	04/04	0,84		Ringan
			Ds. Grecol	01/04	1,48		Ringan
			Ds. Grecol	03/03	0,74		Ringan
			Ds. Grecol	04/03	1,66		Ringan
			Ds. Grecol	05/04	1,81		Ringan
			Ds. Grecol	05/03	1,91		Ringan
11	Kawasan Babakan	Kalimanah	Babakan	19/05	1,39	11,97	Ringan
			Babakan	26/07	0,87		Ringan
			Babakan	24/07	0,75		Ringan
			Babakan	25/07	0,77		Ringan
			Babakan	27/07	0,87		Ringan
			Babakan	28/07	1,46		Ringan
			Babakan	06/02	1,61		Ringan
			Babakan	07/02	1,74		Ringan
			Babakan	08/02	2,51		Ringan
12	Kawasan Selabaya	Kalimanah	Selabaya	02/06	1,03	17,88	Ringan
			Selabaya	01/06	1,66		Ringan
			Selabaya	03/06	1,77		Ringan
			Selabaya	01/05	1,54		Ringan
			Selabaya	04/05	2,21		Ringan
			Selabaya	03/05	2,73		Ringan
			Selabaya	02/05	3,36		Ringan
			Selabaya	04/03	1,40		Ringan
			Selabaya	03/03	2,18		Ringan
13	Kawasan Karangsentul	Padamara	Karangsentul	04/02	0,86	7,12	Ringan
			Karangsentul	06/02	2,37		Ringan
			Karangsentul	02/02	1,83		Ringan
			Karangsentul	05/02	2,06		Ringan
14	Kawasan Brobot	Bojongsari	Brobot	07/02	1,31	8,00	Ringan
			Brobot	05/02	1,44		Ringan
			Brobot	06/02	1,06		Ringan
			Brobot	09/03	2,38		Ringan
			Brobot	010/03	0,81		Ringan
			Brobot	012/03	1,00		Ringan
15	Kawasan Kaligondang	Kaligondang	Penaruban	01/07	1,41	37,54	Ringan
			Penaruban	01/09	0,96		Ringan
			Penaruban	03/07	1,21		Ringan

No	Nama Lokasi	Kecamatan	Kelurahan / Desa	RT/RW	Luas (Ha)	Luas Kawasan (Ha)	Tingkat Kumuh
			Penaruban	02/04	1,69		Ringan
			Penaruban	02/02	0,31		Ringan
			Penaruban	03/02	1,37		Ringan
			Kalikajar	03/02	2,60		Ringan
			Kalikajar	03/08	4,26		Ringan
			Kalikajar	02/08	4,51		Ringan
			Kalikajar	01/08	3,26		Ringan
			Kalikajar	03/01	3,66		Ringan
			Kalikajar	02/01	2,20		Ringan
			Kalikajar	01/01	4,36		Ringan
			Kalikajar	01/02	2,10		Ringan
			Kalikajar	02/02	3,64		Ringan
16	Kawasan Bobotsari	Bobotsari	Bobotsari	02/13	2,57	2,57	Ringan
17	Kawasan Majapura	Bobotsari	Majapura	03/08	0,67	2,10	Ringan
			Majapura	02/08	0,95		Ringan
			Majapura	04/08	0,48		Ringan
18	Kawasan Dukuh Jawi	Bobotsari	Gandasuli	01/05	0,84	4,31	Ringan
			Gandasuli	02/05	1,48		Ringan
			Gandasuli	03/05	0,84		Ringan
			Kalapacung	02/04	1,15		Sedang
19	Kawasan Karangduren	Bobotsari	Karangduren	02/06	2,18	6,08	Sedang
			Karangduren	01/06	1,69		Sedang
			Karangduren	03/06	2,21		Sedang
20	Kawasan Pakuncen	Bobotsari	Pakuncen	04/01	1,07	5,29	Ringan
			Pakuncen	01/02	1,81		Ringan
			Pakuncen	03/02	0,73		Ringan
			Pakuncen	01/01	0,51		Ringan
			Pakuncen	03/01	0,81		Ringan
			Pakuncen	02/01	0,36		Ringan
21	Kawasan Bukamaja	Bukateja	Bukateja	01/05	3,08	28,85	Sedang
			Bukateja	05/05	1,10		Sedang
			Bukateja	04/05	1,66		Sedang
			Bukateja	04/06	2,18		Sedang
			Bukateja	01/06	2,66		Sedang
			Bukateja	02/06	2,94		Sedang
			Bukateja	03/06	2,61		Sedang
			Majasari	02/04	3,52		Sedang
			Majasari	01/04	4,92		Sedang
			Majasari	01/01	2,43		Sedang
			Majasari	02/01	1,75		Sedang
22	Kawasan Kedungjati	Bukateja	Kedungjati	04/09	3,16	14,65	Sedang
			Kedungjati	02/08	2,99		Sedang
			Kedungjati	02/09	2,38		Sedang
			Kedungjati	03/09	3,14		Sedang
			Kedungjati	03/08	2,98		Sedang
23	Kawasan Losari	Rembang	Losari	02/02	1,36	5,12	Ringan

No	Nama Lokasi	Kecamatan	Kelurahan / Desa	RT/RW	Luas (Ha)	Luas Kawasan (Ha)	Tingkat Kumuh
			Losari	02/01	1,48		Ringan
			Losari	05/01	1,07		Ringan
			Losari	01/02	1,21		Ringan
24	Kawasan Sumampir	Rembang	Sumampir	13/02	1,43	10,39	Sedang
			Sumampir	01/02	1,32		Ringan
			Sumampir	01/03	0,57		Sedang
			Sumampir	03/03	0,42		Sedang
			Sumampir	06/03	0,96		Ringan
			Sumampir	07/03	0,63		Sedang
			Sumampir	08/03	0,98		Sedang
			Sumampir	03/02	0,74		Sedang
			Sumampir	02/02	1,24		Sedang
			Sumampir	06/01	0,71		Ringan
			Sumampir	05/01	1,39		Sedang
25	Kawasan Bodas Karangjati	Rembang	Bodaskarangjati	04/02	0,57	4,01	Ringan
			Bodaskarangjati	01/01	1,28		Ringan
			Bodaskarangjati	02/01	0,68		Ringan
			Bodaskarangjati	03/01	0,96		Ringan
			Bodaskarangjati	02/02	0,52		Ringan
Total					344,28	344,28	

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2022

Penanganan kumuh dilakukan berdasarkan luasan kumuh (Pusat > 15 Ha, Propinsi 10 -15 Ha) melalui pendekatan keterpaduan program dan pendanaan dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Propinsi. Sedangkan penanganan kumuh (< 10 Ha) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau memanfaatkan peluang dan skema program yang telah ada.

2. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari rumah dan rumah susun. Jumlah rumah di Kabupaten Purbalingga sebanyak 235.647 unit rumah. Jumlah terbanyak di Kecamatan Mrebet yaitu sebanyak 18.847 unit rumah. Sedangkan jumlah rumah paling sedikit berada di Kecamatan Karangjambu yaitu sebanyak 6.460 unit rumah. Sedangkan jumlah rumah susun (rusun) MBR di Kabupaten Purbalingga sebanyak 1 unit rumah yang berada di Kecamatan Purbalingga.

Tabel II.35. Jumlah Rumah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah Rusun
1	Bobotsari	12.967	-
2	Bojongsari	15.054	-
3	Bukateja	16.947	-
4	Kaligondang	17.027	-
5	Kalimanah	9.068	-
6	Karangjambu	6.460	-

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah Rusun
7	Karangmoncol	13.838	-
8	Karanganyar	10.810	-
9	Karangreja	11.861	-
10	Kejobong	13.027	-
11	Kemangkon	17.271	-
12	Kertanegara	8.811	-
13	Kutasari	13.740	-
14	Mrebet	18.847	-
15	Padamara	12.329	-
16	Pengadegan	10.375	-
17	Purbalingga	10.435	1
18	Rembang	16.780	-
Jumlah		235.647	1

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2022

Kebutuhan rumah di Kabupaten Purbalingga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan rumah ini dapat dipenuhi secara swadaya maupun oleh developer/pengembang. Seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah maka jumlah pengembang perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga juga meningkat. Jumlah perumahan developer yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 78 perumahan. Namun hanya 58 perumahan yang sudah diserahterimakan aset PSUnya.

Tabel II.36. Perumahan Developer di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Perumahan	Jumlah yang sudah Diserahterimakan Set PSU
1	Bobotsari	2	2
2	Bojongsari	4	3
3	Bukateja	2	2
4	Kaligondang	5	4
5	Kalimanah	20	14
6	Karangjambu	0	0
7	Karangmoncol	0	0
8	Karanganyar	0	0
9	Karangreja	0	0
10	Kejobong	0	0
11	Kemangkon	1	0
12	Kertanegara	0	0
13	Kutasari	2	1
14	Mrebet	1	1
15	Padamara	19	16
16	Pengadegan	0	0
17	Purbalingga	22	15
18	Rembang	0	0
Jumlah		78	58

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2022

Dilihat dari backlog di Kabupaten Purbalingga dimana backlog dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat maka dari perspektif kependhunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal: 1 keluarga menghuni 1 rumah. Dengan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa backlog perumahan adalah kuantitas rumah yang belum atau tidak tertangani. Adapun penyebab tingginya angka back log perumahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti semakin banyaknya populasi, sehingga kebutuhan terhadap perumahan juga ikut bertambah. Secara rinci backlog perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.37. Backlog Perumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Backlog
1	Bobotsari	18.441	12.967	5.474
2	Bojongsari	21.183	15.054	6.129
3	Bukateja	26.710	16.947	9.763
4	Kaligondang	23.119	17.027	6.092
5	Kalimanah	19.817	9.068	10.749
6	Karangjambu	9.193	6.460	2.733
7	Karangmoncol	19.305	13.838	5.467
8	Karanganyar	13.971	10.810	3.161
9	Karangreja	15.327	11.861	3.466
10	Kejobong	17.977	13.027	4.950
11	Kemangkon	22.590	17.271	5.319
12	Kertanegara	12.483	8.811	3.672
13	Kutasari	21.870	13.740	8.130
14	Mrebet	27.255	18.847	8.408
15	Padamara	15.522	12.329	3.193
16	Pengadegan	14.196	10.375	3.821
17	Purbalingga	20.552	10.435	10.117
18	Rembang	22.925	16.780	6.145
Jumlah		342,436	235.647	106.789

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2022

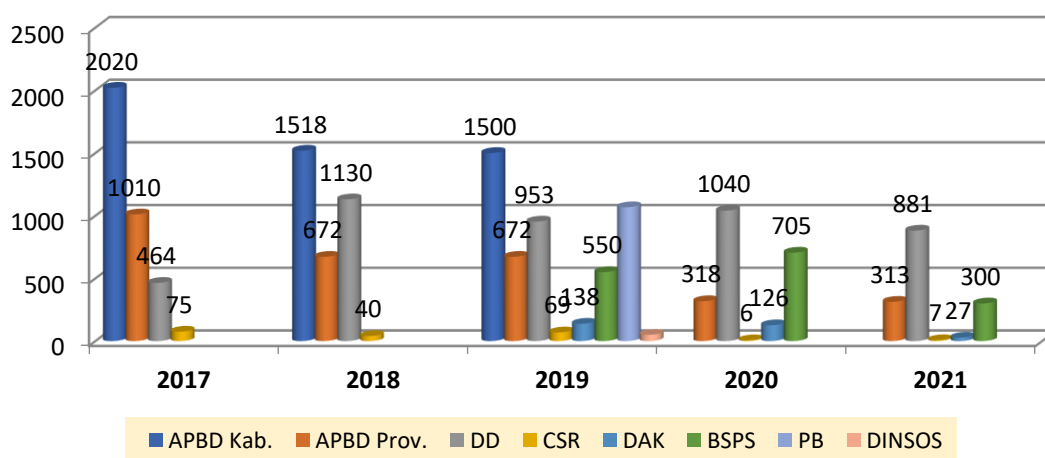
Dilihat dari adanya rumah tidak layak huni (RTLH), jumlah RTLH pada masing-masing kecamatan berdasarkan verifikasi data PBDT yang dilakukan pada tahun 2020, dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II.38. Jumlah / Sebaran Rumah Tidak Layak Tahun 2021

No	Kecamatan	KK	Rumah	PBDT 2015	Verivali Layak	Sisa PBDT	RTLH Non PBDT	Jumlah RTLH	Kurang Rumah
1	Bobotsari	18.441	12.967	4.626	2.391	2.235	515	2.750	5.474
2	Bojongsari	21.183	15.054	4.404	2.431	1.973	473	2.446	6.129
3	Bukateja	26.710	16.947	4.181	1.995	2.186	773	2.959	9.763
4	Kaligondang	23.119	17.027	3.979	1.694	2.285	603	2.888	6.092
5	Kalimanah	19.817	9.068	1.995	930	1.065	921	1.986	10.749
6	Karangjambu	9.193	6.460	2.966	1.616	1.350	217	1.567	2.733
7	Karangmoncol	19.305	13.838	3.999	1.044	2.955	120	3.075	5.467
8	Karanganyar	13.971	10.810	3.763	2.012	1.751	873	2.624	3.161
9	Karangreja	15.327	11.861	5.700	4.681	1.019	223	1.242	3.466
10	Kejobong	17.977	13.027	3.369	1.780	1.589	635	2.224	4.905
11	Kemangkon	22.590	17.271	4.325	1.962	2.363	490	2.853	5.319
12	Kertanegara	12.483	8.811	3.346	2.588	758	758	1.516	3.672
13	Kutasari	21.870	13.740	5.932	3.278	2.654	894	3.548	8.130
14	Mrebet	27.255	18.847	6.140	2.793	3.347	1.037	4.384	8.408
15	Padamara	15.522	12.329	2.480	1.398	1.082	607	1.689	3.193
16	Pengadegan	14.196	10.375	2.639	704	1.935	757	2.692	3.821
17	Purbalingga	20.552	10.435	1.603	890	713	566	1.279	10.117
18	Rembang	22.925	16.780	4.157	1.174	2.983	283	3.266	6.190
Jumlah		342.436	235.647	69.604	35.361	34.243	10.745	44.988	106.789

Sumber : Dinrunkim Kab. Purbalingga, 2022

Dalam penanganan RTLH pada tahun 2017 tercatat dilakukan rehab sebanyak 3.569 unit, pada tahun 2018 3.360 unit, tahun 2019 sebanyak 4.999 unit dan pada tahun 2020 menurun menjadi hanya 2.195 unit dikarenakan refokusing anggaran untuk penanganan dampak Covid-19. Begitu pula pada tahun 2021 menurun menjadi 1.528 unit. Secara rinci data penanganan RLTH di Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 dapat dilihat dari tabel



Sumber : Dinrunkim Kab. Purbalingga, 2021

Gambar 2.42. Penanganan RLTH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi pencapaian SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Purbalingga tidak ada dikarenakan kegiatan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni hanya dianggarkan bagi warga masyarakat desa/kelurahan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masing-masing Kepala Desa/Kelurahan sesuai dengan data yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga penyediaan rumah yang layak huni bagi korban bencana maupun yang terkena relokasi tidak ada.

3. Air Bersih dan Sanitasi

Cakupan rumah tangga menggunakan air bersih terus meningkat, yaitu dari 87,6 persen di tahun 2017 hingga mencapai 93,01 persen di tahun 2021. Walaupun demikian, upaya peningkatan akses air minum harus terus ditingkatkan, utamanya pada wilayah kekeringan sehingga agar akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik menuju *universal access* 100-0-100.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai akses 100% adalah ketersediaan air baku. Secara umum semua desa/kelurahan telah mendapatkan alokasi air minum baik melalui PDAM, Pamsimas, maupun SPAM yang dikelola desa. Namun demikian masih terdapat di beberapa desa yang belum 100%. Kendala yang dihadapi antara lain topografi yang tidak memungkinkan serta ketiadaan sumber air baku yang memadai. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses air minum melalui perluasan akses layanan PDAM, pembangunan SPAM regional kecamatan untuk mengatasi beberapa wilayah desa yang tidak memiliki sumber air baku.

Cakupan rumah tangga bersanitasi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 84,35 persen, dan pada tahun 2020 mencapai 92,26 persen. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 62,28 persen. Akses sanitasi yang paling besar yaitu berupa Jamban Sehat Permanen, kemudian diikuti dengan Jamban Sehat Semi Permanen dan Jamban Sharing. Saat ini kondisi di

Kabupaten Purbalingga masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan.

Permasalahan sanitasi biasanya berkaitan dengan drainase lingkungan, system pembuangan limbah domestik, maupun persampahan. Keterbatasan lahan khususnya di perkotaan menyebabkan problem sanitasi akan menimbulkan kawasan permukiman kumuh baru. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses sanitasi layak melalui penanganan kumuh, pembangunan drainase lingkungan serta upaya penanganan sampah skala permukiman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Dari 2 indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum tersebut, belum ada yang sudah mencapai target 100%. Secara rinci kondisi capaian air bersih dan sanitasi di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Tabel II.39. Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan penanganan prasarana air bersih (Indikator SPM: Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari)	87,6	90,43	91,01	92,05	93,01
2	Cakupan penanganan prasarana sanitasi (Indikator SPM : Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik)	84,35	87,48	90,77	92,26	93,18

Sumber : Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2022

E. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum; Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serta Penanggulangan Bencana.

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum

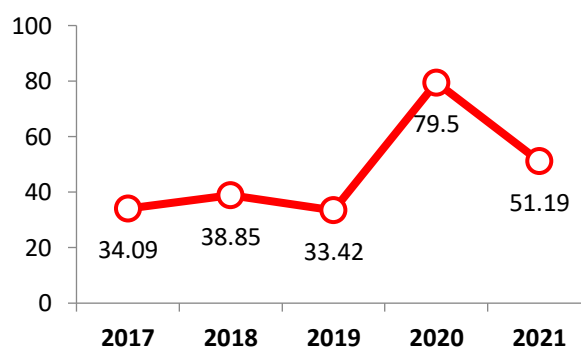
Dilihat dari kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum, selama kurun waktu 5 tahun beberapa pelanggaran Perda/Perkada didominasi oleh Pelanggaran Reklame, PKL Razia Anak Sekolah Miras, DBHCHT dan PGOT. Secara rinci jumlah pelanggaran perda/perkada yang tercatat selama kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.40. Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada tentang Prokes dan Tibum di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	PGOT	213	396	272	198	104
2	PKL	2.117	1.654	436	211	942
3	RAS	52	100	122	72	919
4	Razia PSK	5	6	11	0	12
5	Razia Miras	7	6	12	6	17
6	DBHCHT	16	0	0	0	32
7	Razia Reklame	714	1.127	2.500	4.611	1.670
8	Protokol Kesehatan	0	0	0	2.910	2.498
Jumlah		3.124	3.289	3.353	8.008	5.231

Sumber : Satpol PP Kab. Purbalingga, 2022

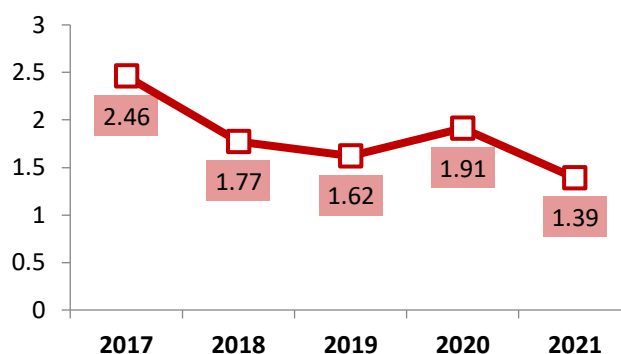
Dari data jumlah pelanggaran perda/perkada di atas, didapatkan angka pelanggaran ketertiban umum per 10.000 penduduk yang semakin meningkat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir namun di tahun 2021 dapat menurun dengan angka 51,19 persen. Peningkatan terjadi karena semakin banyaknya pendataan yang dilakukan dalam menghimpun jumlah pelanggaran yang terjadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya khususnya untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dan pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan.



Sumber : Satpol PP Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 43. Angka Pelanggaran Ketertiban Umum per 10.000 penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Sedangkan dilihat dari angka kriminalitas di Kabupaten Purbalingga secara umum dalam waktu 5 tahun terakhir semakin menurun. Pada tahun 2017 angka kriminalitas mencapai angka 2,46 kemudian turun menjadi 1,77 di tahun 2018. Pada tahun 2019 turun lagi menjadi 1,62 dengan 163 kasus namun pada tahun 2020 naik di angka 1,91 dengan 192 kasus dimana kasus kriminal yang paling banyak didominasi oleh kasus narkoba. Kemudian pada tahun 2021 angka kriminalitas mengalami penurunan menjadi 1,39 dengan jumlah kasus sebanyak 142 kasus.



Sumber : Satpol PP Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 44. Angka Kriminalitas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

2. Penanganan Kebakaran

Terkait dengan upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dalam kurun waktu 5 jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 36 kejadian meningkat menjadi 97 kejadian. Sementara itu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 54 kejadian. Secara rinci jumlah kejadian kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.41. Jumlah Kejadian Kebakaran Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Jumlah Kejadian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Purbalingga	4	9	9	6	12
2	Kalimanah	3	3	8	10	5
3	Kutasari	2		3	2	3
4	Kemangkon	2	5	5	3	0
5	Kaligondang	5	2	7	3	4
6	Bojongsari	3	1	5	1	7
7	Padamara	3	1	2	3	1
8	Bobotsari	2	1	9	9	5
9	Mrebet	2	4	8	-	3
10	Karangreja		2	9	2	1
11	Karanganyar		1	1	1	2
12	Karangjambu	3	1	2	-	2
13	Kertanegara			3	1	2
14	Bukateja	1	3	4	4	1
15	Kejobong	1	2	2	1	1
16	Rembang	2	2	7	1	3
17	Karangmoncol	3	4	8	4	1
18	Pengadegan	2	1	5	1	1
Jumlah		36	38	42	97	54

Sumber: Satpol PP Kab. Purbalingga, 2022

Dari beberapa kejadian kebakaran tersebut, rata-rata pelayanan bencana kebakaran dapat tertangani, walaupun dengan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) yang belum mencapai standart pelayanan minimal. Sedangkan daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang ada di Kabupaten Purbalingga ada 3 Pos yaitu Pos Damkar Purbalingga, Pos Damkar Bobotsari dan Pos Damkar Rembang. Layanan pemadaman dilakukan oleh Satpol PP maupun oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Satpol PP.

Beberapa capaian terkait penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.42. Kinerja Terkait Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100	100	100	100	91,67
2	Tingkat waktu tanggap	11,46	11,46	11,46	17,19	57,33
3	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	16,67	16,67	16,67	16,67	28,57
4	Persentase jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 liter pada WMK	100	83,33	83,33	83,33	83,33

Sumber: Satpol PP Kab. Purbalingga, 2022

3. Penanggulangan Bencana

Nilai Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori tinggi yaitu dengan nilai IRB 159,2. Secara nasional nilai tersebut menempati urutan ke 173 diantara kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten Purbalingga berdasarkan laporan kejadian bencana paling banyak adalah kebakaran, diikuti dengan angin ribut, tanah longsor dan banjir.

Beberapa capaian terkait penanggulangan bencana dalam waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.43. Kinerja Terkait Penanggulangan Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan pelayanan korban bencana	100	100	100	100	100
2	Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kab. Purbalingga, 2022

4. Cakupan Pelayanan Bidang Trantibumlinmas (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota meliputi :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dari 5 indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat tersebut, semuanya sudah mencapai target 100%. Secara rinci indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019-2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.44. Cakupan Pelayanan Bidang Trantibumlinmas (SPM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Purbalingga, 2022

F. Urusan Sosial

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa negara menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi rakyatnya, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah

upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan, yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Akurasi data menjadi isu dalam penanganan pemerlu kesejahteraan sosial di Kabupaten Purbalingga. Untuk itu telah dana kan terus dilakukan verifikasi dan validasi terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Diharapkan hasil verval DTKS dapat untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial di Kabupaten Purbalingga.

Tabel II.45. ART dan Ruta Miskin dalam DTKS Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

No	Tahun	Penduduk Miskin DTKS		TOTAL DTKS	
		ART	RUTA	ART	RUTA
1	2017	318.898	74.191	533.399	137.170
2	2018	318.898	74.191	533.399	137.170
3	2019	318.298	73.534	531.939	136.270
4	2020	302.556	72.633	523.719	138.825
5	2021			742.985	272.634

Sumber : DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2022

Kabupaten Purbalingga sudah memiliki Rumah Singgah Dharma Perwira Purbalingga yang diresmikan pada tanggal 8 April 2019 dengan kapasitas 11 shelter, 4 shelter untuk ruang isolasi dan dapat menampung 25 orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Persoalan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Purbalingga adalah jumlah PPKS yang jumlahnya cukup banyak yaitu sebesar 167.317 jiwa. Dari 26 jenis PPKS, 83,10 persennya didominasi oleh fakir miskin dengan angka absolut 153.100 jiwa. Berikut disajikan data jumlah PPKS tahun 2021 yang sudah mendapatkan bantuan maupun yang belum menerima bantuan.

Tabel II.46. Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

NO	Jenis PPKS	Jumlah Tahun 2021					
		Yang seharusnya menerima bantuan	Yang diberikan bantuan				Yang belum menerima bantuan
			Kab	Prov	APBN	Jumlah	
1.	Anak Balita Terlantar	23	23	-	-	23	-
2.	Anak Terlantar	1,285	1,285	-	-	1,285	-
3.	Anak yang mengalami Masalah Hukum (AMJ)	18	18	-	-	18	
4.	Anak Jalanan (AJ)	41	41	-	-	41	0
5.	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	424					
a	Anak Disabilitas Fisik	263					

NO	Jenis PPKS	Jumlah Tahun 2021					
		Yang seharusnya menerima bantuan	Yang diberikan bantuan			Yang belum menerima bantuan	
			Kab	Prov	APBN		Jumlah
	a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	147	29	-	-	29	118
	b.2. Mata Tuna Netra (TN)	15	-	-	-	-	15
	a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	101	3	-	-	3	98
b	Disabilitas Mental	106					
	b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	104	-	-	-	-	104
	b.2. Mental Exs Psikotik (Tuna Laras)	2	-	-	-	-	2
c	Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	55	-	-	-	-	55
6.	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	43	19	-	-	19	24
7.	Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	-	-	-	-	-	-
8.	Lanjut Usia Terlantar	2024	1557			1557	467
9.	Penyandang Disabilitas	8470					
	Penyandang Disabilitas Fisik	4610					
a	a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	2727	110	-	9	119	2,608
	a.2. Mata Tuna Netra (TN)	1144	16	-	-	16	1128
	a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	739	144	-	-	144	595
	Penyandang Disabilitas Mental	3035					
b	b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	1859	13	-	-	13	1846
	b.2. Mental Exs Psikotik (Tuna Laras)	1176	25	-	-	25	1,151
c	Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	825	315	-	-	315	510
10.	Tuna Susila (TS)	1	1	-	-	1	
11.	Gelandangan	6	6	-	-	6	-
12.	Pengemis	41	41	-	-	41	0
13.	Pemulung	25	-	-	-	-	25
14.	Kelompok Minoritas/Waria	-	-	-	-	-	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	124	124	-	-	124	0
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	40	40	-	-	40	0
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	79	-	-	79	79	-
18.	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	43	19	-	-	19	24
20.	Pekerja Migran Bermasalah	-	-	-	-	-	-
21.	Korban Bencana Alam	59	-	-	59	59	0
22.	Korban Bencana Sosial	37	-	-	37	37	-

NO	Jenis PPKS	Jumlah Tahun 2021					
		Yang seharusnya menerima bantuan	Yang diberikan bantuan				Yang belum menerima bantuan
			Kab	Prov	APBN	Jumlah	
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1416	-	-			1416
24.	Fakir Miskin	153,100	-	-	144,430	144,430	8,670
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	18	-	-	-	18	0
26.	Komoditas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-
Jumlah		167,317	3.829	-	144,614	148,461	18,856

Sumber : DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2022

Dari 167.317 jiwa PPKS, yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah sebanyak 148.461 jiwa atau sebesar 80,59 persen. Dan masih terdapat 18.856 jiwa (10,24 persen) yang belum menerima bantuan, diantaranya mereka merupakan fakir miskin, pemulung, disabilitas, korban bencana alam, perempuan rawan sosial ekonomi dan keluarga bermasalah sosial psikologis.

Dalam upaya percepatan penanganan PPKS, keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan, diantaranya dengan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik perseorangan, keluarga, kelompok/lembaga yang dapat berperan untuk menjaga, menangani dan mencegah timbul/berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, serta terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Purbalingga terdapat 12 jenis PSKS, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.47. Jenis dan Jumlah PSKS Tahun 2021

No	Jenis PSKS	Laki-Laki	Perempuan	Lembaga/ Keluarga
1	Pekerja Sosial Profesional	121	73	
2	Pekerja Sosial Masyarakat	1260	608	
3	Taruna Siaga Bencana	31	0	
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial			91
5	Karang Taruna			400
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga			0
7	Keluarga Pioner			14
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat			0
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial		136	
10	Penyuluh Sosial	26	57	
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	10	8	
12	Dunia Usaha			84
Jumlah		1448	882	589

Sumber : DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2022

PSKS yang berasal dari perseorangan seperti pekerja sosial profesional (PSP) dan pekerja sosial masyarakat (PSM) jumlahnya cukup banyak dibanding PSKS yang lain. Untuk PSP 194 orang dengan rincian 121 laki-laki dan 73 perempuan, sedangkan PSM sebanyak 1868 orang, dengan rincian 1260 laki-laki dan 608 perempuan.

Beberapa kondisi urusan sosial yang terkait dengan Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

Tabel II.48. Kinerja Terkait Urusan Sosial Tahun 2017-2021

No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan PPKS yang terlayani	68,56	85,58	75,97	77,09	88,73
2	Cakupan penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	100	100	100	100	100
3	Cakupan LKS yang dibina	100	100	100	100	100
4	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	100	100	100	100	56,3
5	Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100
6	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	92,85	100

Sumber: DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga, 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Dari 5 indikator SPM Bidang Sosial tersebut, semuanya sudah mencapai target 100%. Secara rinci indikator SPM Bidang Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosia Pengendalian Penduduk, KB dan P3A Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.49. Cakupan Pelayanan Bidang Sosial (SPM) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap &npaska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korbanbencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100

Sumber: DinsosdaldukKBP3A Kab. Purbalingga,2022

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

1. Rasio Kesempatan Kerja

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun ke atas cenderung fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana tahun 2017 sebesar 67,85 persen turun menjadi 64,64 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 65,63 dan naik lagi menjadi 69,52 pada tahun 2021. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.50. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

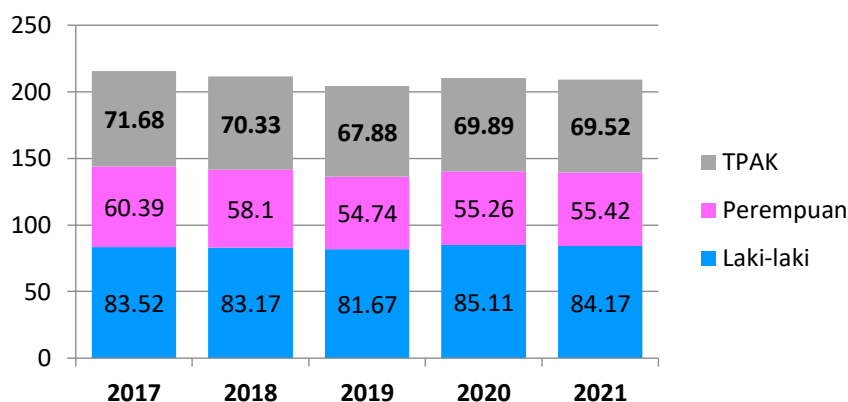
No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2017	463.809	683.554	67,85
2	2018	457.918	693.034	66,07
3	2019	454.098	702.533	64,64
4	2020	469.748	715.759	65,63
5	2021	503.682	724.470	69,52

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2022

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja (jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan) terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut jenis

kelamin pada tahun 2017 hingga tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga sebagaimana gambar berikut ini.



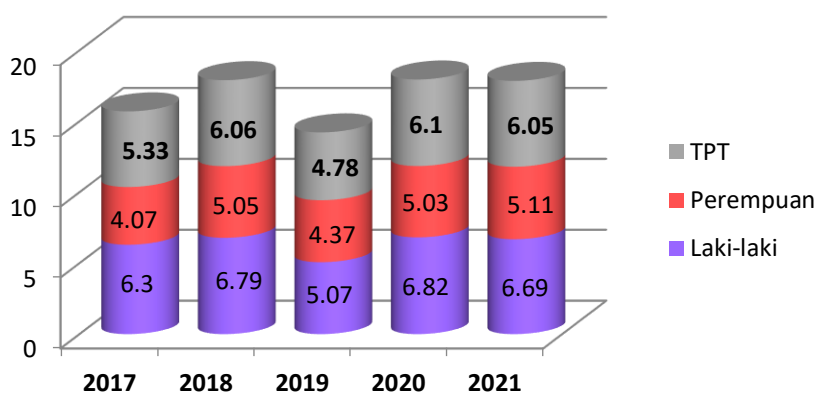
Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2. 45. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin Tahun 2017– 2021

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Menurut Pengangguran mencakup mereka yang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa sudah berkali-kali mencari pekerjaan namun belum berhasil.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Purbalingga menurut jenis kelamin pada tahun 2017 – 2021 cenderung naik dimana pada tahun 2017 sebesar 5,33 persen, menjadi angka 6,1 persen pada tahun 2020 dan menurun menjadi 6,05 pada tahun 2021. Proporsi pengangguran terbuka laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.



Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2. 46. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

4. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja yang terdaftar dalam kurun waktu tahun 2017 - 2021 mengalami peningkatan dari 47,15 persen menjadi 55,33 persen pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 19,82 persen dan kemudian kembali naik menjadi 45,55 persen pada tahun 2021.

Tabel II.51. Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2017-2021

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Pencari Kerja Ditempatkan	Persentase
2017	13.048	6.152	47,15
2018	16.132	7.599	47,11
2019	15.587	8.625	55,33
2020	14.121	2.799	19,82
2021	14.560	6.632	45,55

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018 – 2022

Dari data pencari kerja terdaftar pada tahun 2021, apabila di pilah berdasarkan tingkat pendidikannya adalah : 166 orang tamat SD, 1.638 orang tamat SMP, 4.805 orang tamat SLTA, dan 22 orang luasan Diploma I/II/Sarjana Muda / Sarjana. Masih besarnya penduduk bekerja dengan pendidikan SMA ke bawah menggambarkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga sebagian besar adalah tenaga kerja terampil yang tidak mengharuskan pendidikan tinggi. Dilihat dari jenis kelaminnya jumlah pencari kerja perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.52. Jumlah Pencari Kerja yang diTempatkan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

NO	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat SD	2	164	166
2	Tamat SLTP	118	1.520	1.638
3	Tamat SLTA	395	4.410	4.805
4	DI/DII	4	12	16
5	Tamat Sarjana Muda	1	5	6
	Jumlah	520	6.111	6.631

Sumber : BPS Kab. Purbalingga. 2022

Selanjutnya penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebagian besar didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sejumlah 179.005 orang, yang terdiri dari laki-laki 90.222 orang dan perempuan 88.783 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.53. Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2021

NO	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha sendiri	61.195	35.099	96.294
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	52.698	26.615	79.313
3	Berusaha dibantu buruh tetap	15.471	2.673	18.144
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	90.222	88.783	179.005
5	Pekerja Bebas di Pertanian	17.405	5.986	23.391
6	Pekerja Bebas di Non Pertanian	26.436	2.348	28.784
7	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	15.712	32.589	48.301
	Jumlah	279.139	194.993	473.232

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2022

Nilai Upah Minimum regional (UMR) di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.988.000,-. Rasio tenaga kerja yang mendapatkan upah sesuai UMK di Kabupaten Purbalingga pun cenderung mengalami kenaikan. Untuk melihat kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.54. Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

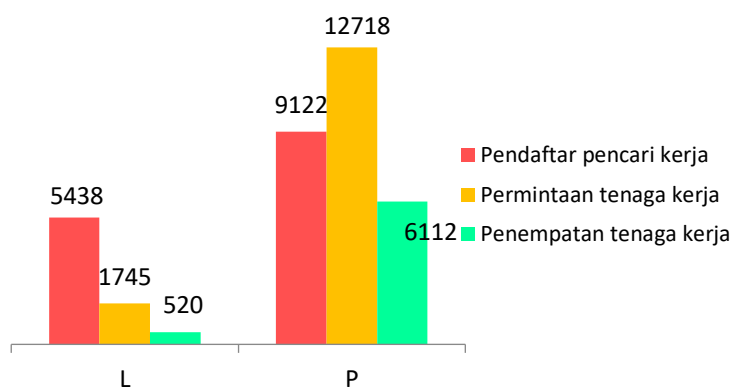
No	Indikator	Realisasi Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio tenaga mendapat upah sesuai UMK	93,5	94,88	98,12	98,2	96,40
2	Rasio penyelesaian perselisihan HI melalui perjanjian bersama	100	100	100	100	100
3	Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial	81	81,07	85,98	88,87	85,33

Sumber : Dinnaker Kab. Purbalingga, 2022

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah angkatan kerja perempuan masih lebih sedikit dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 sebesar 55,42 persen. Bila dilihat dari kumulatif pencari kerja di Kabupaten Purbalingga, lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pula dengan permintaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja lebih banyak perempuan. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar perusahaan bulu mata dan rambut palsu yang membuka lowongan pekerjaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

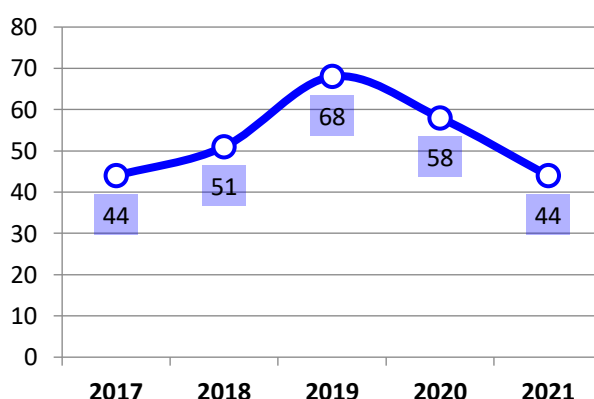


Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2. 47. Penempatan Tenaga Kerja Perempuan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

2. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Purbalingga selama 5 tahun terakhir (2017-2021) masih dikategorikan tinggi. Pada tahun 2017 terdapat 44 kasus kemudian pada tahun 2018 naik sebesar 51 kasus dan kembali naik menjadi 68 kasus pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kasus kekerasan dapat turun menjadi 58 kasus dan pada tahun 2021 turun menjadi 44 kasus.



Sumber: DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 48. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

3. Partisipasi Perempuan dalam Lembaga

Dalam mewujudkan adanya kesetaraan gender di Kabupaten Purbalingga, partisipasi perempuan sangat diperlukan dalam setiap kelembagaan. Beberapa kondisi yang menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam kelembagaan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

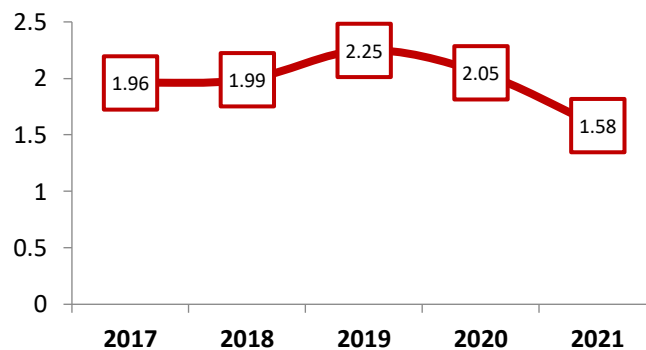
Tabel II.55. Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat partisipasi di lembaga pemerintah	Orang	2.232	5.054	3.945	3.768	3.881
2	Tingkat partisipasi di lembaga swasta	Orang	14.797	35.521	34.523	33.339	33.339
3	Tingkat partisipasi di lembaga politik	Orang	12	20	20	10	10

Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2022

C. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk yang drastis menjadi permasalahan yang cukup serius di negara berkembang seperti Indonesia. Dilihat dari angka TFR (*Total Fertility Rate*) atau Rata-rata Angka Kelahiran Total yang menunjukkan jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2017-2019 terus mengalami tren kenaikan, dan mulai menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,05 dan pada tahun 2021 menjadi 1,58, seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Sumber: DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 49. TFR (*Total Fertility Rate*) Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Keluarga Berencana (KB) masih dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Selama tahun 2017-2021, kinerja *unmet need* KB cenderung membaik, namun pada tahun 2021 masih terdapat 10,66 persen PUS yang belum terpenuhi keinginan ber KB nya. Begitupula dengan *drop out* KB, di tahun 2021 masih terdapat 7,9 persen PUS yang mengalami *drop out* KB. Disamping itu, masih belum optimalnya kepesertaan BKB, BKR dan BKL di Kabupaten Purbalingga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa atau kelurahan sudah baik begitu pula dengan cakupan kelompok PIK remaja dan kelompok priyo utomo yang dibina, sudah mencapai 100 persen. Beberapa kondisi urusan pengendalian

penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.56. Kinerja Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan <i>unmet need</i> KB	Persen	10,03	12,19	10,26	9,93	10,66
2	Drop Out KB	Persen	18,18	10	11,83	9,90	7,79
3	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
4	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB	Kasus	11	11	11	11	1
5	Jumlah peserta KB aktif pria	Orang	6.418	6.120	7.398	5.309	5.192
6	Persentase kelompok PIK remaja yang dibina	Persen	100	100	100	100	117
7	Rasio petugas lapangan keluarga berencana atau penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) dibanding jumlah desa/kelurahan	Rasio	1:6	1:1	1:6	1:6	1:6
8	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) dibanding jumlah desa/kelurahan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
9	Rasio sub PPKBD dibanding jumlah desa/kelurahan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
10	Persentase kelompok Prio Utomo yang dibina	Persen	100	100	100	100	100
11	Jumlah NKKBS	Poin	3,13	4	3,26	4	4
12	Cakupan keluarga mengikuti UPPKS	Persen	9,73	5,17	15,66	5	10,7
13	Cakupan anggota UPPKS yang mengikuti KB	Persen	78,26	61,93	79,56	79,94	81,72
14	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa / kel	Persen	100	100	100	100	100
15	Bina keluarga balita	Persen	34,87	28,63	60,3	28	27,82
16	Bina keluarga remaja	Persen	25,32	20,30	70,4	21	27,37
17	Bina keluarga lansia	Persen	27,55	22,85	73,4	23	90,61
18	Cakupan anggota BKB ber KB	Persen	87,74	67,34	76,11	82	81,72

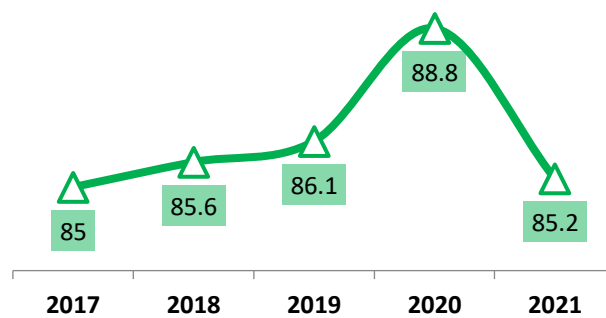
Sumber : DinsosdaldukKB dan P3A Kab. Purbalingga, 2022

D. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan. (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi. pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan. Kondisi pangan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada beberapa hal. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor PPH, konsumsi

pangan semakin beragam dan bergizi seimbang.

Tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2017 sebesar 85 meningkat terus menjadi 88,8 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 menurun menjadi 85,2. Kenaikkan skor PPH tersebut tidak terlalu signifikan. Hal tersebut dikarenakan mengatur pola konsumsi masyarakat cukup sulit. Berbagai upaya peningkatan akses pangan dengan pemberian bantuan bahan pangan beras dan ikan lele serta pemberian makanan siap santap bagi warga lanjut usia mampu memperatahkan skor PPH Purbalingga untuk tetap naik. Untuk lebih jelasnya perkembangan skor PPH di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DKPP Kab. Purbalingga. 2022

Gambar 2. 50. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Sementara itu, jumlah lumbung pangan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sejumlah 118 unit dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 114 unit. Penurunan ini disebabkan karena adanya kemacetan pada usaha simpan pinjam di beberapa lumbung, sehingga mengakibatkan tutup. Selain itu adanya kevakuman kepengurusan lumbung serta terbatasnya regenerasi pengurus. Beberapa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel II.57. Kinerja Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021

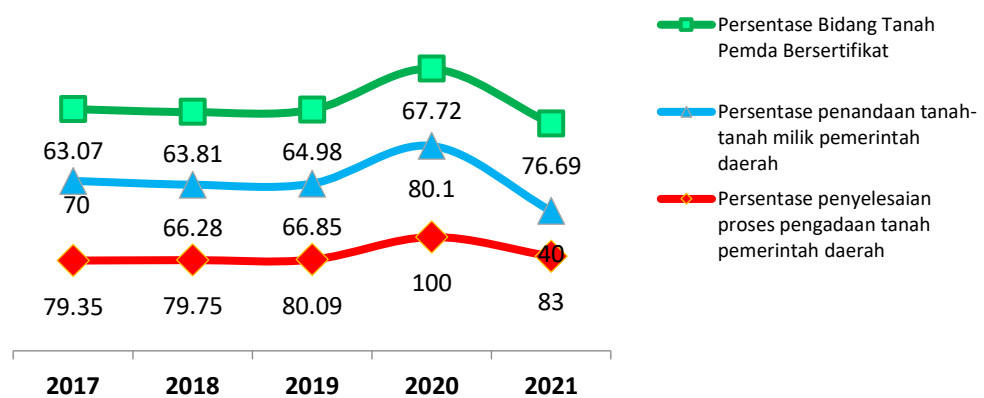
No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/th	167	152	93,5	93,5	93,5
2	Koefisien Variasi Harga Pangan Pokok dan Strategis Tk. Konsumen (Stabilisasi Harga)	angka	4	4	3	2	2
3	Angka konsumsi energi	kcal/cap/hari	2.050	2.125	2.150	2.150	1.957
4	Angka konsumsi protein	g/cap/hari	52	55	57	55	53,89

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
5	Persentase pangan segar bersertifikat aman	%	85	87	90	90	90
6	Jumlah sertifikasi Prima 3 (PSAT)	Komoditas	3	5	5	5	5
7	Jumlah lumbung pangan	unit	118	109	117	113	114
8	Cakupan lumbung pangan masyarakat desa	persen	49,37	45,61	48,95	48,95	48,95
9	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	ton sb	12	12	23,4	41,0	41,0

Sumber: DKPP Kab. Purbalingga, 2022

E. Pertanahan

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanahan yaitu mengelola aset daerah yang dimiliki. Aset daerah merupakan sumber daya penting yang dimiliki pemerintah daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola aset. Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki 1.366 bidang dengan jumlah 8.685.713 m² yang sudah bersertifikat sebesar 688 bidang dengan luas 3.948.770 m² atau sebesar 45%, sedangkan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang belum bersertifikat sebesar 561 bidang dengan luas 4.001.618 m² atau sebesar 46%.



Sumber: Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2021

Gambar 2. 51. Kondisi Urusan Pertanahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Proses pensertifikatan tanah Pemda terus dilakukan sampai dengan tahun 2020. Persentase bidang tanah pemda bersertifikat meningkat setiap tahunnya. Disamping itu tanah-tanah pemda yang ada juga dimanfaatkan untuk beberapa sarana, seperti sarana pendidikan untuk memfasilitasi kebutuhan yang ada. Terkait dengan sertifikasi tanah masyarakat, sesuai data terdapat 590.120 bidang

tanah terdiri dari 292.350 bidang tanah telah terdaftar dan 297.770 belum terdaftar. Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan program prioritas berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan output berupa sertifikat tanah, selengkapnya sebagaimana gambar berikut :

Tabel II.58. Jumlah Sertifikat Tanah Program PTSL di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	PTSL	Bidang	20.092	26.227	30.619	27.467	27.412
2	Persentase	%	3,4	4,44	5,19	4,65	4,65

Sumber: Dinrumkim Kab. Purbalingga, 2022

F. Lingkungan Hidup

Untuk menilai kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga dapat melihat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal untuk memberikan kesimpulan dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah :

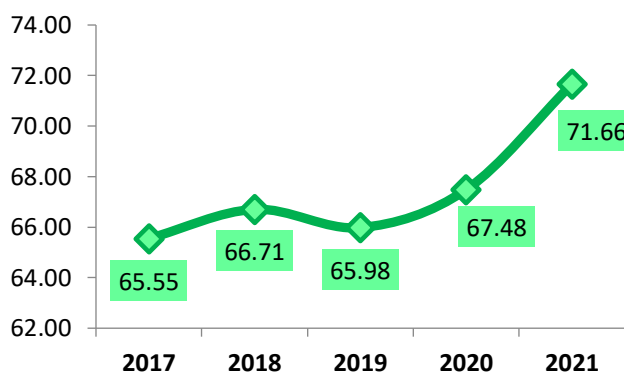
- 1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform.
- 2) Kualitas Udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter S02 dan N02;
- 3) Kualitas Tutupan Lahan, yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Proporsi pembobotan untuk IKLH terdiri dari 30% IKU, 30% IKA dan 40% IKTL. Namun dalam perkembangannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan perubahan format perhitungan didasarkan diskusi di antara 27 pakar. Dengan pertimbangan bahwa kualitas udara dan kualitas air sangat berpengaruh secara riil pada kualitas lingkungan, maka mulai tahun 2020 disepakati rumus baru IKLH sebagai berikut:

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$$

Perhitungan IKLH di Kabupaten Purbalingga dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dimana pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, IKLH mengalami kenaikan dan penurunan signifikan dari tahun ke tahun. IKLH tahun 2017 senilai 65,55 naik menjadi 66,71 pada tahun 2018, kemudian turun pada tahun 2019 senilai 65,98 dan kembali naik mencapai 67,48 pada tahun 2020 dan 71,66 pada tahun 2021. IKLH tahun 2018-2019

menggunakan rumus lama, sedangkan tahun 2020-2021 sudah menggunakan pembobotan rumus baru. Secara umum, IKLH dengan nilai > 60 dan < 70 mempunyai predikat cukup baik.



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 52. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Beberapa penjelasan komponen IKLH di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut:

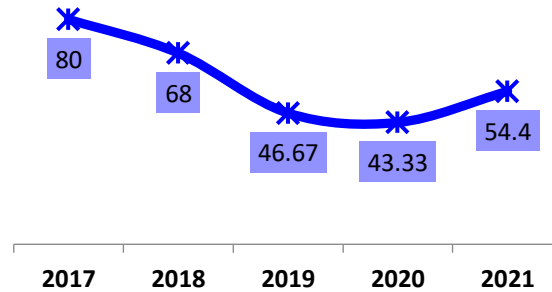
1. Kualitas Air

Pengukuran kualitas air yang dilakukan di wilayah Kabupaten Purbalingga hanya pada kualitas air sungai. Sampel sungai yang diukur telah mewakili sungai yang melintas di bagian utara, timur, selatan dan barat di Kabupaten Purbalingga yang diambil di bagian hulu, menengah dan hilir. Adapun sampel air yang diukur antara lain di musim dan sungai sebagai berikut: musim kemarau (Sungai Gintung, Sungai Gemuruh) dan musim penghujan (Sungai Klawing dan Sungai Gringsing).

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sungai Kabupaten Purbalingga terus mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. IKA tahun 2017 di angka 80 menurun menjadi 68 pada tahun 2018, lalu menurun menjadi 46,67 di tahun 2019 dan terus menurun di tahun 2020 menjadi 43,33. Turunnya IKA dipengaruhi oleh kondisi status air sungai di Kabupaten Purbalingga. Total terdapat 6 titik sungai yang memiliki status sungai cemar berat yaitu Sungai Gemuruh Hulu, Sungai Gemuruh Tengah, Sungai Gemuruh Hilir, Sungai Gintung Hulu, Sungai Gintung Tengah dan sungai hulu gringsing. Pengambilan sampel sungai Gemuruh dan Gintung dilakukan pada saat musim kemarau, sementara sungai Gringsing dan Klawing dilakukan pada saat musim penghujan.

Namun pada tahun 2021 IKA dapat meningkat menjadi 54,4. Parameter yang melebihi baku mutu pada sungai dengan status cemar berat adalah parameter zat padat tersuspensi, COD, BOD, DO, Fosfat, Total Coliform, Total Fecal Coli. Berdasarkan parameter tersebut ada 2 faktor utama yang mempengaruhi kondisi status sungai yaitu kegiatan pemukiman (feses, urin dan detergen) dan pertanian (pestisida dan pupuk kimia).

Potensi sumber pencemar lainnya berasal dari kegiatan perindustrian dan fasilitas kesehatan.

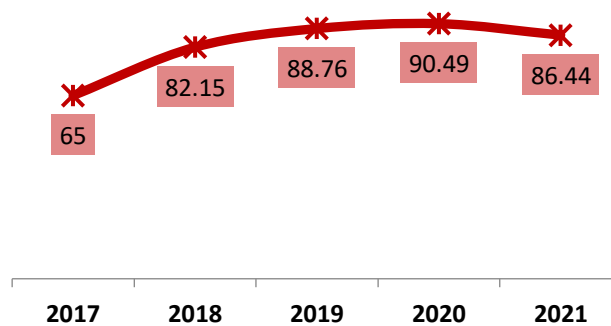


Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 53. Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

2. Kualitas Udara

Berdasarkan perhitungan Indeks Pencemaran Udara pada tahun 2017-2020 mengalami kenaikan, yaitu di angka 65 menjadi 90,49. Namun pada tahun 2021 sedikit menurun menjadi 86,44. IKU Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori baik hingga sangat baik pada setiap titik sampling Wilayah Kabupaten Purbalingga yang telah berkembang dinamis, menghasilkan inspirasi pada warganya untuk mengadakan berbagai macam aktivitas guna memenuhi kebutuhan manusia. Aktivitas tersebut antara lain adanya industri pengolahan kayu, pengolahan rambut palsu dan transportasi yang di satu sisi mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan perputaran roda ekonomi masyarakat, dan perluasan penggunaan sumberdaya. Di sisi lain, berbagai aktivitas tersebut juga berpengaruh pada kualitas udara.



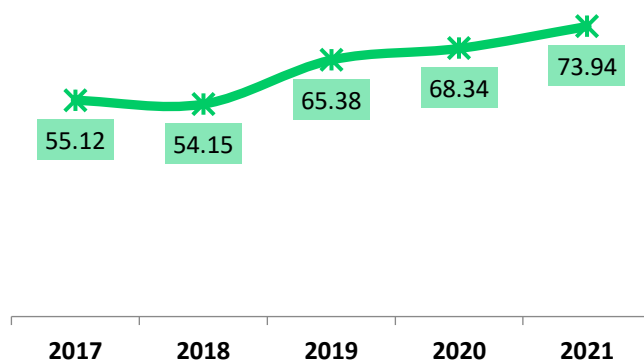
Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 54. Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dari hasil passive sampler dilakukan di 4 lokasi yang mewakili industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran. Berdasarkan data hasil passive sampler di empat lokasi, diketahui bahwa hasil di seluruh titik menunjukkan masih berada di bawah standar EU.

3. Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. IKTL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot dengan rumus yaitu: $IKTL = 0,23 \text{ Indeks Tutupan Lahan (ITH)} + 0,24 \text{ Indeks Performance Hutan (IPH)} + 0,30 \text{ Indeks Kondisi Tutupan Lahan (IKT)} + 0,15 \text{ Indeks Konservasi Badan Air (IKBA)} + 0,08 \text{ Indeks Kondisi Habitat (IKH)}$. Nilai IKTL di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 yaitu sebesar 73,94 kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai IKTL tahun 2020 sebesar 68,34.



Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 55. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Saat ini, TPA yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah TPA Kalipancur yang didesain sistem *sanitary landfill*, hanya saja dalam prakteknya masih menggunakan *open dumping*. Data timbulan sampah TPA Kalipancur secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.59. Timbulan Sampah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

No.	Data Persampahan	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Timbulan Sampah	Kg/jiwa/hr	445.677	454.959	464.244	473.527	505.712
2	Jumlah	Unit	43	43	28	28	28
3	Kapasitas TPS	m3/hari	3	3	3	3	3
4	Jumlah TPA	Unit	1	1	1	1	1
5	Sampah Masuk TPA	m3/hari	303.058	300.273	302.799	308.503	336.000
6	Luas TPA	Ha	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Keterangan :

- Peraturan Menteri PUPR No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2022

Dalam sistem manajemen pengelolaan sampah secara *sanitary landfill* idealnya diperlukan manajemen mulai dari pengumpulan, pemilahan dan pengolahan dari sumbernya baik itu dari TPS, pegiat rongsok, TPS 3R/TPST dan bank sampah. Kemudian dilakukan pengangkutan menuju TPS untuk pemrosesan akhir sampah. Namun belum ada manajemen persampahan yang jelas dalam pengelolaan persampahan menuju TPA Kalipancur secara *sanitary landfill* di Kabupaten Purbalingga, sehingga saat ini masih dilakukan seperti masih *open dumping* yaitu dengan menumpuk sampah terus hingga tinggi tanpa dilapisi dengan lapisan geotekstil dan saluran lindi.

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga ada beberapa armada sampah yang masih beroperasi untuk mendukung sistem pengangkutan sampah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.60. Armada Sampah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Jenis Kendaraan	Kondisi	Jumlah
1	Dump Truck	Rusak berat	4
2	Dump Truck	Baik	9
3	Arm Roll	Rusak berat	2
4	Arm Roll	Rusak ringan	1
5	Arm Roll	Baik	2
6	Truck Tanki Air	Baik	1
7	Bulldozer	Rusak berat	1
8	Bulldozer	Rusak sedang	1
9	Eskavator	Baik	2

Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2022

Sedangkan rincian bank sampah yang masih aktif di Kabupaten Purbalingga sebagai sumber dalam pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah, diantaranya sebagai berikut:

Tabel II.61. Daftar Bank Sampah Tahun 2021

No	Nama Bank Sampah	Tahun Berdiri	Alamat	Ket
1	Bank Sampah Sami Bangga	2016	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga	Aktif
2	Bank Sampah Bakar	2016	Desa Karangtalun	Aktif
3	Bank Sampah Bercahaya	2016	Desa Lamuk	
4	Bank Sampah Berdikari	2016	SMA Negeri 1 Rembang	Aktif
5	Bank Sampah Berkah Limbah	2016	Kembaran Kulon	
6	Bank Sampah Gringsing Djoyo	2016	Kelurahan Penambongan	
7	Bank Sampah Jelita	2016	Desa Jetis	Aktif
8	Bank Sampah Karya Nyata	2016	Kelurahan Bancar	
9	Bank Sampah Maju Jaya	2016	Desa Karanglewas	Aktif
10	Bank Sampah Mitra Sejahtera	2016	Kelurahan Wirasana	
11	Bank Sampah Resik Mandiri	2016	Desa Sumampir	Aktif
12	Bank Sampah Runtah Kencana	2016	Kel Purbalingga Wetan	

No	Nama Bank Sampah	Tahun Berdiri	Alamat	Ket
13	Bank Sampah Sahabatku	2016	Desa Muntang	Aktif
14	Bank Sampah Sami Maju	2016	Kel Purbalingga Kidul	
15	Bank Sampah Sehat Mandiri	2016	Desa Karangbanjar	
16	BS Sejahtera Mandiri	2016	Kel Purbalingga Lor	
17	BS Yonif 406 ChandraKusuma	2016	Kelurahan Bojong	
18	Bank Sampah Asri Jaya	2017	Desa Prigi	
19	Bank Sampah Baresbin	2017	SMK Negeri 1 Kutasari	Aktif
20	Bank Sampah Bersih Itu Sehat	2017	Desa Gandasuli	
21	Bank Sampah Bersih Lestari	2017	Desa Majapura	
22	Bank Sampah Bersih Lestari	2017	Desa Pakuncen	
23	Bank Sampah Bestari	2017	Desa Selabaya	Aktif
24	Bank Sampah Bharata	2017	Desa Tamansari	
25	Bank Sampah Binar	2017	SMP Negeri 1 Kemangkon	Aktif
26	Bank Sampah Cahyana	2017	Desa Grantung	Aktif
27	Bank Sampah Cendana Resik	2017	Desa Cendana	Aktif
28	Bank Sampah Ceria	2017	SMP N 2 Karangreja	Aktif
29	Bank Sampah Cikal Harapan	2017	SD Negeri 3 Makam	
30	Bank Sampah Cinta Bumi	2017	SMA Negeri 1 Kutasari	
31	BS Cipta Wulan Indah	2017	Desa Candiulan	Aktif
32	Bank Sampah Elok	2017	Desa Kalapacung	Aktif
33	Bs Ganesha Reka Asri	2017	SMA 1 Purbalingga	Aktif
34	Bank Sampah Karya Gemilang	2017	Desa Wanogara Wetan	
35	Bank Sampah Kulina Resik	2017	SD Negeri 1 Majapura	
36	Bank Sampah Majatengah	2017	Desa Majatengah	
37	Bank Sampah Ngudi Resik	2017	Desa Bobotsari	
38	Bank Sampah Nurul Hikmah	2017	Desa Karangpule	Aktif
39	Bank Sampah Resikan	2017	Desa Onje	
40	Bank Sampah Sekar Bersih	2017	Ds Serayu Karanganyar	
41	Bank Sampah Spensaku	2017	SMP Negeri 1 Kutasari	Aktif
42	Bank Sampah Teratai	2017	SMA N1 Kemangkon	
43	Bank Sampah Amsa Lestari	2018	SMK N 1 Kaligondang	Aktif
44	Bank Sampah Anindya Guna	2018	SMP N1 Kalimanah	Aktif
45	Bank Sampah Berkah Mandiri	2018	Desa Kutawis	
46	Bank Sampah Berlian	2018	Desa Selaganggeng	Aktif
47	Bank Sampah Bersinar	2018	SMP N 1 Karangmoncol	Aktif
48	Bank Sampah Bonjes Jaya	2018	SMK N 1 Bojongsari	Aktif
49	Bank Sampah Braling	2018	SMP Negeri 1 Mrebet	Aktif
50	Bank Sampah Cakra Beriman	2018	Desa Kradenan	
51	Bank Sampah Jatibersih	2018	Desa Kalimanah Wetan	Aktif
52	Bank Sampah Lestari	2018	SMP N 1 Kaligondang	Aktif
53	Bank Sampah Migunani	2018	Desa Babakan	Aktif
54	Bank Sampah Mugi Barokah	2018	Desa Sokawera	Aktif
55	Bank Sampah Ngangeni	2018	Desa Sidakangen	Aktif
56	BS Permata Spensapada	2018	SMP Negeri 1 Padamara	Aktif
57	Bank Sampah Sinar Sehati	2018	Desa Gumiwang	Aktif

No	Nama Bank Sampah	Tahun Berdiri	Alamat	Ket
58	BS Suka Bersih Suka	2018	Desa Pakuncen	Aktif
59	Bank Sampah As-syifa	2019	Desa Karangtengah	Aktif
60	Bank Sampah Barokah	2019	Desa Ponjen	
61	Bank Sampah Bestari Indah	2019	Desa Selabaya RW 5	Aktif
62	Bank Sampah Bestari Jaya	2019	Desa Selabaya RW 1	Aktif
63	Bank Sampah Bestari Makmur	2019	Desa Selabaya RW 4	Aktif
64	Bank Sampah Bestari Sadar	2019	Desa Selabaya RW 6	Aktif
65	Bank Sampah Emut Bestari	2019	Desa Selabaya RW 3	Aktif
66	Bank Sampah Jati Kusuma	2019	Desa Bojanegara	Aktif
67	BS Karya Lestari Bumi	2019	Desa Jetis	Aktif
68	Bank Sampah Koplak	2019	Desa Bantarbarang	
69	Bank Sampah Semangate Por	2019	Desa Sempor Lor	Aktif
70	Bank Sampah Sumringah	2019	Desa Bantarbarang	Aktif

Sumber: DLH Kab. Purbalingga, 2022

Beberapa kondisi lingkungan hidup terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan persampahan dan limbah B3 dan penegakan hukum lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.62. Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL	Perusahaan	10	20	34	10	8
2	Cakupan pengelolaan air limbah rumah tangga	Persen	84,35	87,48	90,77	92,26	92,26
3	Cakupan industri yang memiliki TPS B3	Persen	73,05	73,05	73,05	73,05	40
4	Pengurangan timbulan sampah bank sampah	Persen	0	1,25	4,8	4,81	2
5	Cakupan aduan kasus lingkungan tertangani	Persen	90	100	100	100	100
6	Cakupan penanggung jawab usaha diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan	Persen	0	5	88	50	97,58

Sumber: DLH Kab. Purbalingga. 2022

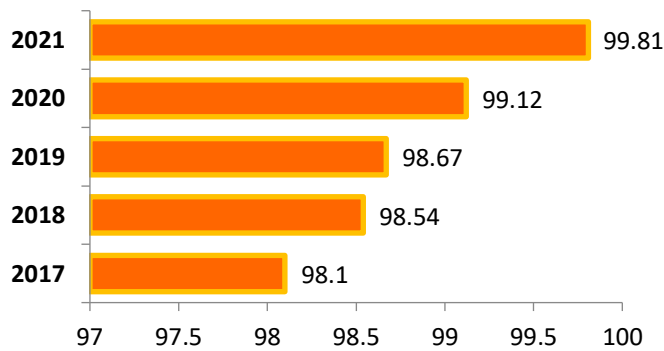
G. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen Kependudukan

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan terdiri dari kepemilikan KTP, kepemilikan KK dan kepemilikan KIA.

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. KK merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 5 tahun persentase kepemilikan KK. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar perlunya kepemilikan KK sebagai dokumen kependudukan.



Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 56. Persentase Kepemilikan KK di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Tabel II.63. Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kecamatan 2021

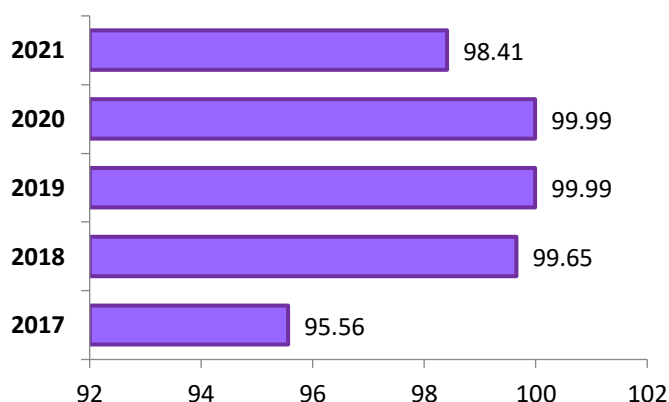
No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepemilikan KK	%
1	Kemangkon	22.590	22,398	99,15
2	Bukateja	26.710	26,509	99,25
3	Kejobong	17.977	17,833	99,20
4	Kaligondang	23.119	23,018	99,56
5	Purbalingga	20.552	20,426	99,39
6	Kalimanah	19.817	19,702	99,42
7	Kutasari	21.870	21,743	99,42
8	Mrebet	27.255	27,089	99,39
9	Bobotsari	18.441	18,327	99,38
10	Karangreja	15.327	15,218	99,29
11	Karanganyar	13.971	13,879	99,34
12	Karangmoncol	19.305	19,114	99,01
13	Rembang	22.925	22,670	98,89
14	Bojongsari	21.183	21,053	99,39
15	Padamara	15.522	15,435	99,44
16	Pengadegan	14.196	14,112	99,41
17	Karangjambu	9.193	9,095	98,93
18	Kertanegara	12.483	12,396	99,30
Jumlah		342.436	340.017	99,29

Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga. 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 342.436 kepala keluarga di Kabupaten Purbalingga yang sudah memiliki Kartu Keluarga sampai akhir 2021 sebanyak 340.017 kepala keluarga atau sebesar 99,29%. Jika menurut wilayah kecamatan, dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan Kaligondang merupakan wilayah dengan kepemilikan KK tertinggi sebanyak 23.018 KK yang diikuti wilayah Kecamatan Padamara yakni 15.435 KK. Sedangkan persentase kepemilikan kartu keluarga terendah terdapat di wilayah Kecamatan Karangjambu sebanyak 9.095 KK.

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Sama seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk hampir selalu menjadi persyaratan publik lainnya di Kabupaten Purbalingga sehingga hampir semua Penduduk (legal) memiliki KTP-el. Hampir setiap kecamatan persentase kepemilikan KTP-el yaitu telah mencakup wajib KTP. Persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat. Sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki KTP dan telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 733.158 jiwa dari wajib KTP sebanyak 740.037 jiwa.



Sumber: Dindikcapil Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 57. Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

c. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak atau KIA merupakan kartu yang diberikan kepada anak-anak yang berumur 0-17 tahun dengan bentuk seperti KTP. Kartu ini sebagai bentuk solusi bagi anak-anak untuk mendapatkan pelayanan publik terbaik sesuai dengan yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan Nasional (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang sesuai kebutuhan anak, untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam membuat akta kelahiran bagi anaknya, untuk

memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak. Cakupan kepemilikan KIA di Kabupaten Purbalingga masih sangat kecil tercatat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 22,16%, pada tahun 2020 sebanyak 33,08% dan pada tahun 2021 sebanyak 46%.

2. Dokumen Catatan Sipil

Dokumen pencatatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil. Dokumen pencatatan sipil terdiri dari kepemilikan akta lahir, kepemilikan akta usia 0-18 tahun dan kepemilikan akta perkawinan.

a. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya. Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta kematian merupakan dokumen untuk dapat dibukanya pembagian waris, pensiun, asuransi dan lain-lain. Akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusanya sebuah perkawinan. Akta pengakuan anak merupakan dokumen legal yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan ayah biologis. Kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat.

b. Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Dalam kurun waktu 5 tahun persentase kepemilikan akta perkawinan di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif.

Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.64. Persentase kepemilikan dokumen catatan sipil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kepemilikan Akta Kelahiran	28,57	37,68	40,82	44,97	48,76
2.	Kepemilikan Akta Usia 0-18	77,42	82,10	88,12	90,34	88,73
3.	Kepemilikan Akta Perkawinan	72,92	77,78	73,68	88,89	100

Sumber: Dindukcapil Kab. Purbalingga. 2022

Dari data-data kependudukan dan pencatatan sipil di atas, dapat dilihat bahwa masih ada penduduk yang belum terdaftar baik dalam

kepemilikan dokumen kependudukan maupun kepemilikan dokumen catatan sipil. Salah satu hal yang mempengaruhinya yaitu dikarenakan akses pelayanan yang belum merata ke semua kecamatan. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Purbalingga, akses pelayanan yang saat ini ada hanya di 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Karangjambu, Karanganyar, Bukateja dan Kemangkon, yang memiliki saluran VPN dari pusat.

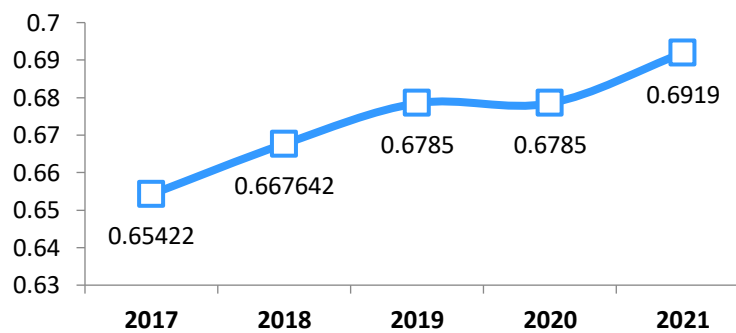
H. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan. Masing-masing desa tersebut memiliki status dan potensi desa yang berbeda-beda. Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Untuk mengetahui pengembangan kawasan pedesaan salah satunya dengan melihat nilai Indeks Desa Membangun (IDM). IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM yaitu berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Nilai IDM di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 mempunyai angka sebesar 0,65422 kemudin naik menjadi 0,667642 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 dan 2020 naik menjadi 0,6785. Pada tahun 2021, kembali naik di angka 0,6919.



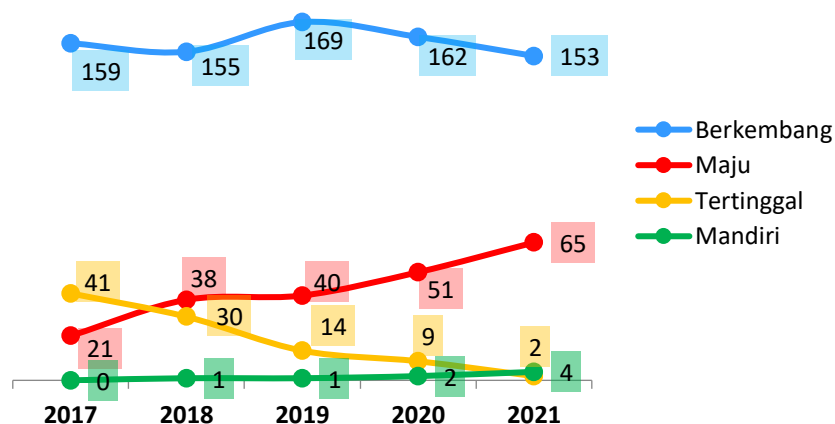
Sumber: Kemendes PDTT, 2022

Gambar 2. 58. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Secara rinci status desa di Kabupaten Purbalingga paling tinggi adalah desa mandiri, kemudian diikuti oleh desa maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Untuk desa sangat tertinggal yang dulu di tahun 2016 ada 2 desa, saat ini sudah naik statusnya menjadi desa tertinggal. Desa tertinggal jumlahnya semakin turun, pada tahun 2016 yang berjumlah 50 kemudian turun menjadi 41 di tahun 2017, 30 desa di tahun 2018, 14 desa di tahun 2019, 9 desa di tahun 2020 dan menjadi 2 desa di tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa desa tertinggal sudah naik statusnya menjadi desa berkembang.

Untuk desa mandiri selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017-2021 semakin meningkat yaitu dari 0 dan saat ini terdapat 4 desa mandiri yang terdiri dari: Bojongsari, Kaligondang, Karanganyar dan Karangreja. Sedangkan desa berkembang jumlahnya semakin naik, pada tahun 2017 berjumlah 159 desa dalam kurun waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2021 menjadi 153 desa. Untuk desa maju, pada tahun 2017 terdapat sebanyak 21 desa, kemudian bertambah jumlahnya pada tahun 2018 menjadi 38 desa, pada tahun 2019 menjadi 40 desa, pada tahun 2020 menjadi 51 desa dan pada tahun 2021 menjadi 153 desa.

Dilihat dari komponen IDM pada dasarnya IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Diantara beberapa desa tertinggal yang ada di Kabupaten Purbalingga, apabila dilihat dari nilai masing-masing indeksnya, rata-rata nilai IDM untuk desa tertinggal yaitu rendahnya nilai Indeks Ketahanan Ekonomi yang terdiri dari komponen: Keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit dan keterbukaan wilayah. Disamping itu juga dari nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang terdiri dari komponen: Kualitas lingkungan, bencana alam dan tanggap bencana. Oleh karena itu pengembangan kawasan pedesaan khususnya untuk desa tertinggal menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ke depannya.



Sumber: Kemendes PDDT, 2022

Gambar 2. 59. Status Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Untuk desa mandiri pada tahun 2016 dan 2017 belum ada desa mandiri di Kabupaten Purbalingga, kemudian tahun 2018 dan 2019 Desa Bojongsari naik statusnya menjadi desa mandiri, dan di tahun 2020 ditambah Desa Kaligondang sehingga ada 2 desa mandiri saat ini.

Untuk meningkatkan kawasan desa telah dilakukan beberapa kerjasama antar desa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada. Berikut ini daftar kerjasama antar desa untuk pengembangan kawasan desa di Kabupaten Purbalingga.

Tabel II.65. Daftar Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2021

No	Program Kerjasama	2019	2020	2021
1.	Kawasan Saroja (Agrobisnis dan Pariwisata)	4 desa	4 desa	4 desa
2.	Kawasan Agrobisnis, Usaha Tani, dan Wisata Tani	4 desa	4 desa	4 desa
3.	Kawasan Perdesaan Air Bersih Mitra Sejahtera	14 desa	13 desa	15 desa
4.	Kawasan Perdesaan	-	3 desa	3 desa
Jumlah		22 desa	35 desa	37 desa

Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2022

Dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan meliputi: proses dan penetapan kawasan perdesaan, proses penentuan batas desa dan kawasan berbasis drone desa, rencana tata ruang kawasan perdesaan, pusat pertumbuhan terpadu antar desa, perencanaan dan perancangan infrastruktur antar desa, penyusunan tim pengelola kawasan perdesaan, penguatan kapasitas masyarakat dan kemitraan, advokasi dan penyusunan berbasis sistem perdesaan.

Adapun proses pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan ini diawali dengan musyawarah desa, musyawarah antar desa, dan kesepakatan bersama antar desa dalam pembentukan kawasan dan memetakan potensi yang ada yang akan dikembangkan bersama oleh desa-desa yang sepakat bergabung dalam satu kawasan perdesaan. Dalam pengembangan kawasan perdesaan

dilakukan melalui pendekatan pembangunan partisipatif yaitu pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mengandung upaya-upaya advokasi bagi masyarakat desa, pengorganisasian komunikasi desa, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan perdesaan, membangun jejaring sosial dan kelembagaan serta membangun proses pendidikan, informasi, dan komunikasi dalam kawasan perdesaan.

Proses dalam pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa dilakukan secara bertahap. Pertama, membangun kesepahaman tentang kawasan perdesaan, untuk itu diperlukan adanya penyamaan pandangan, persepsi dan pola pikir pembangunan kawasan perdesaan sebagai instrumen dalam percepatan pembangunan perdesaan. Kedua, memfasilitasi keterlibatan dan kewenangan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan tata ruang kawasan perdesaan. Ketiga, mendorong semangat pembangunan desa dalam sebuah kawasan dalam arti menghubungkan kerjasama antar desa dengan mempertimbangkan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, pengembangan teknologi tepat guna maupun pelayanan masyarakat. Keempat, dalam penguatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan adanya kemitraan. Kelima, merumuskan rencana aksi dalam kawasan perdesaan. Dalam fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa yang menjadi salah satu program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada saat ini, di tahun 2020 melaksanakan fasilitasi lanjutan pada kawasan perdesaan yang sudah terbentuk yang mencakup 4 wilayah kawasan sebagai berikut :

1. Kawasan Seroja merupakan pengembangan kawasan perdesaan di wilayah Karangreja yang pada saat ini ada 4 desa yang tergabung dalam kawasan seroja, yaitu Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Karangreja dan Desa Kutabawa. Dari hasil musyawarah desa yang telah disepakati, untuk kawasan seroja ini potensi yang akan dikembangkan adalah agrobisnis dan pariwisata. Pengembangan di tahun 2020 untuk kawasan seroja ini mengoptimalkan dan memetakan potensi yang ada untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga memunculkan daya tarik kawasan yang semakin kuat. Adanya fasilitasi bantuan kawasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2021.
2. Kawasan Kagem Bopotani Kecamatan Bojongsari merupakan kawasan yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah di daerah aliran sungai Serayu (DAS Serayu Opak) yang terbentuk di tahun 2018, meliputi Desa Kajongan, Desa Gembong, Desa Bojongsari, dan Desa Patemon. Potensi yang dikembangkan bersama dalam kawasan Kagem Bopotani adalah Agrobisnis, usaha tani, dan wisata tani. Pengembangan untuk kawasan Kagem Bopotani di tahun 2020 dengan dibangunnya objek wisata

tani Lembah silangit di Desa Patemon yang sudah di *launching* oleh Ibu Bupati di tahun 2019 yaitu terbangunnya Embung seluas 3 hektar yang menampung dan pengembangan berbagai jenis ikan. Dan pengembangan embrio wisata mina padi di Desa Gembong.

3. Kawasan Perdesaan Air Bersih Mitra Sejahtera Kecamatan Karanganyar yang mencakup seluruh desa di Kecamatan Karanganyar, meliputi 13 desa yaitu Desa Karanganyar, Desa Kalijaran, Desa Maribaya, Desa Kaliori, Desa Buara, Desa Lumpang, Desa Kabunderan, Desa Jambudesa, Desa Banjarkerta, Desa Brakas, Desa Bungkanel, Desa Ponjen, dan Desa Karanggedang. Perkembangan pembangunan kawasan perdesaan di tahun 2020 mulai terbangunnya jalur pipanisasi dari sumber air di Sungai Royom desa Ponjen dengan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00,- (Tiga Miliar Rupiah), dan rencananya di tahun 2021 mendapatkan bantuan dari Kegiatan TMMD reguler sebesar Rp 1.500.000.000,00,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
4. Kawasan Perdesaan Kecamatan Kutasari meliputi 14 Desa yang ada di wilayah kecamatan Kutasari yaitu desa Candinata, Desa Candiwulan, Desa Cendana, Desa Karangaren, Desa Karangcegak, Desa Karangjengkol, Desa Karangluwas, Desa Karangklesem, Desa Karangreja, Desa Kutasari, Desa Limbangan, Desa Meri, Desa Munjul, dan Desa Sumingkir. Adapun untuk kawasan perdesaan Kutasari bergerak dalam bidang Agribisnis, wisata dan pendidikan. Perkembangan di tahun 2019 adalah pengembangan wisata trabas dan *off road* di Desa Cendana dan Desa Karangjengkol dan sudah mulai operasional di tahun 2019.
5. Disamping fasilitasi kepada kawasan yang sudah ada, pada tahun 2019 menginisiasi pembentukan kawasan perdesaan baru yaitu kawasan perdesaan Karangmoncol, yang diarahkan untuk mengolah potensi sumber daya air di desa Tunjungmuli untuk mencukupi kebutuhan air baku di 2 kecamatan yakni Kecamatan Karangmoncol meliputi desa Tunjungmuli, Desa Baleraksa, Desa kramat, dan Desa Tamansari. Untuk Kecamatan Kertanegara sumber air baku berasal dari Teping Desa Baleraksa yang rencananya akan disalurkan kepada seluruh desa di Kecamatan Kertanegara.
6. Pengembangan selanjutnya di tahun 2020 yaitu penggalian potensi kawasan air bersih di Kecamatan Kertanegara (Desa Langkap) dan Kecamatan Pengadegan (Desa Panunggalan, Desa Larangan, Desa Bedagas, Desa Karangjoho, dan desa Tumanggal);
7. Pada tahun 2021 dilakukan fasilitasi kerjasama di Desa Tertinggal, yaitu :

- Desa Cendana Kecamatan Kutasari bekerjasama dengan Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari untuk kerjasama pemenuhan air bersih.
- Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari dengan desa-desa di sekitarnya untuk kerjasama pengembangan wisata trabas dan offroad

Berdasar perkembangannya, desa terbagi menjadi 4 kelompok yakni Desa Tradisional, Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada. Adapun Desa Swasembada adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa Swasembada seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan warga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki pendidikan tinggi serta pekerjaan yang beragam dan pola berpikir yang udah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun, dimana pada tahun 2017 berjumlah 5 kemudian meningkat menjadi 25 desa pada tahun 2021. Begitu pula dengan desa swakarya di Kabupaten Purbalingga juga mengalami peningkatan, data terakhir tercatat pada tahun 2021 berjumlah 161 desa. Namun untuk desa swadaya di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan yaitu 208 desa di tahun 2017 kemudian menjadi 53 desa pada tahun 2021.

Beberapa kondisi desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021 yang dapat terpotret yaitu sebagai berikut:

Tabel II.66. Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Swasembada	Desa	5	8	8	25	25
2	Jumlah Desa Swakarya	Desa	15	12	91	161	161
3	Jumlah Desa Swadaya	Desa	208	207	125	53	53
4	Jumlah Swadaya Masya	(Milyar Rp)	2,17	2,60	4,07	24,91	24,91
5	Jumlah Desa dengan BUMDes Sehat	Desa	50	50	105	158	158
7	Desa yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	Persen	100	100	80	85	100
8	Desa/kel menyusun profil desa secara tepat waktu	Persen	100	100	89,12	99	100
9	Rasio lembaga rukun tetangga (RT) yang aktif	RT	5.081	5.069	5.113	5.118	5.122
10	Jumlah pasar desa yang dibina	Pasar	34	36	38	44	44

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
11	Desa menyusun dokumen perencanaan dan anggaran tepat waktu	Persen	100	100	100	100	1000
12	Jumlah Posyandu Aktif	Unit	1.213	1.215	1.223	1.235	1.230
13	Jumlah Lumbung Desa Sejahtera	Unit	12	50	45	50	12
14	Jumlah BP-SPAM aktif	Kelompok	10	14	156	145	125
15	Jumlah KPP sanitasi lingkungan aktif	Kelompok	60	66	66	66	66

Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2022

I. Perhubungan

1. Kondisi Terminal

Dalam rangka menunjang kegiatan transportasi di Kabupaten Purbalingga terdapat 4 buah terminal. Dua terminal tipe C yaitu Terminal Bukateja dan Kejobong, satu terminal Tipe B yaitu Terminal Purbalingga dan satu terminal Tipe A yaitu terminal Bobotsari. Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal dan jumlah penumpang terlayani angkutan mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini karena adanya perubahan status dan pengelolaan terminal-terminal yang ada. Terminal Kutasari telah dialih fungsi menjadi Puskesmas Kutasari.

Terminal Purbalingga saat ini menjadi terminal Tipe B yang dikelola Pemerintah Provinsi. Sementara Terminal Bobotsari menjadi terminal Tipe A yang dikelola Pemerintah Pusat. Sehingga persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal dan jumlah penumpang terlayani angkutan hanya didasarkan yang terdata di Terminal Bukateja dan Terminal Kejobong yang masih Tipe C dengan pengelolaan oleh Pemkab Purbalingga. Sesuai dengan revisi RTRW, kebutuhan terminal Tipe C untuk pengembangan sistem jaringan transportasi darat terdiri dari 6 buah terminal. Masih dibutuhkan penyediaan terminal baru mengingat capaian penyediaan terminal hanya 33,33%.

Tabel II.67. Kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Purbalingga

Kecamatan	Nama Terminal	Kondisi	Asset
1. Bukateja	Bukateja	Layak operasi	Milik Pemkab
2. Karangreja	Kutabawa	Tidak layak	Milik Pemkab
3. Rembang	Rembang	Tidak layak	Milik Desa
4. Kutasari	Kutasari	Belum ada	-
5. Kejobong	Kejobong	Layak operasi	Milik Pemkab
6. Kaligondang	Penaruban	Tidak layak	Milik Pemkab

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2022

2. Fasilitas Keselamatan Jalan

Peningkatan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas prasarana jalan. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan darat agar kenyamanan

layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas juga ikut meningkat. Penyelenggaraan perhubungan perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang barang dan jasa yang dinamis.

Berkaitan dengan prasarana dan perlengkapan jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Secara rinci fasilitas perlengkapan jalan yang telah terealisasi di Kabupaten Purbalingga yaitu sebagai berikut.

Tabel II.68. Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Kebutuhan	Realisasi Kinerja				
				2017	2018	2019	2020	2021
Prasarana								
1	Trafic light	unit	10	2	1	3	2	2
2	Warning light	unit	28	2	5	7	6	7
Perlengkapan Jalan								
3	Rambu pendahulu penunjuk jalan	buah	4	8	13	3	2	14
4	Rambu standar	buah	320	150	44	50	110	50
5	Guardraill	M2	1.450	140	200	180	268	0
6	Paku marka	buah	100	0	559	100	100	0
7	Trafic cone	buah		149	100	0	0	131

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2022

3. Tingkat Kecelakaan

Terkait dengan aspek peningkatan keselamatan jalan, kondisi tahun 2021 setidaknya terdapat 4 titik lokasi daerah rawan kecelakaan (DRK) yang semuanya berada di ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi yaitu ruas jalan Purbalingga – Bobotsari, Ruas Jalan Bobotsari – Pemalang, Purbalingga – Sokaraja dan Purbalingga – Klampok. Pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan kewenangan kabupaten merupakan salah satu perhatian penanganan sektor perhubungan di Purbalingga. Meskipun tingkat pemenuhannya cukup baik tetapi perlu terus ditingkatkan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan perhitungan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan dilaksanakan sebelum beroperasinya Bandara JB Soedirman serta adanya pintu tol Pemalang yang menyebabkan arus lalu lintas meningkat.

Data kecelakaan lalu lintas di Purbalingga cenderung menurun dari tahun 2017 terjadi 574 kejadian sampai dengan tahun 2021 sebanyak 439 kejadian. Selengkapnya sesuai tabel berikut:

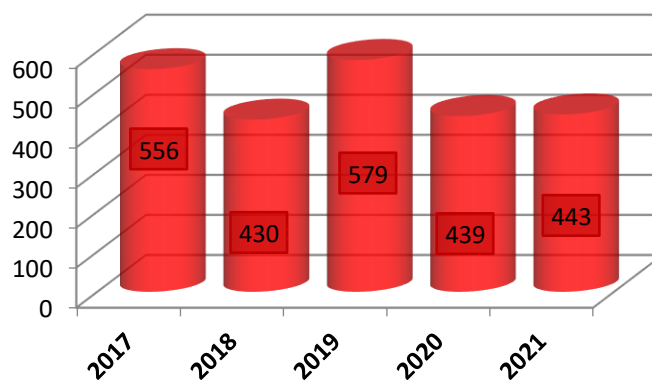
Tabel II.69. Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Laka Lantas	Kejadian	556	498	579	439	443

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
2.	Jumlah Meninggal	Jiwa	93	104	79	77	56
3.	Jumlah Luka Berat	Orang	4	1	0	0	0
4.	Jumlah Luka Ringan	Orang	826	633	712	495	508
5.	Kerugian Materiil	Rp. (000,-)	309.650	280.700	344.300	239.100	187.500

Sumber: Polres Kab. Purbalingga, 2022

Dengan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Di Kabupaten Purbalingga angka kecelakaan lalu lintas cenderung menurun. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Polres Kab. Purbalingga, 2021

Gambar 2. 60. Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 -2021

4. Uji Laik Kendaraan

Terkait dengan data Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) menunjukkan jumlah kendaraan di Kabupaten Purbalingga yang wajib melaksanakan pengujian sebagai salah satu faktor peningkatan keselamatan lalu lintas. Dari tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah KBWU cenderung fluktuatif. Kemungkinan yang terjadi adalah adanya mutasi keluar daerah, perubahan status menjadi kendaraan pribadi atau sudah tidak beroperasi lagi.

Tabel II.70. Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Purbalingga

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah KBWU	kendaraan	6.274	6.250	5.545	6.890	9.476

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2022

5. Angkutan Umum

Terkait dengan transportasi umum yang ada di Kabupaten Purbalingga, salah satunya yaitu sudah adanya BRT (*Bus Rapid Transit*) Purwokero-Purbalingga yang melewati koridor Kalimanah sampai dengan Bukateja.

Selain BRT, transportasi massal yang ada di Kabupaten Purbalingga masih membutuhkan beberapa perbaikan agar dapat memudahkan masyarakat dalam mobilitasnya sehingga tercipta keamanan, kenyamanan dan saling terintegrasi.

Terkait dengan konektivitas angkutan jalan berdasarkan data terakhir tahun 2021 baru mencapai 90% berdasarkan data ijin trayek yang dikeluarkan. Ijin trayek yang ada di Kabupaten Purbalingga dibedakan menjadi angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.71. Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Desa

No.	Jalur	Unit	Jalur Trayek
Angkutan Kota			
1	1	50	Bobotsari
2	2	32	Gembrungan
3	3	6	Lamongan
4	4	18	Bukateja
5	5	19	Kemangkon
6	6	3	Terminal Purbalingga-Sumilir
7	7	11	Terminal Purbalingga-Karangtengah
8	8	8	Padamara
9	9	34	Kutasari
10	10	6	Kalimanah-Padamara-Kutasari
11	11	TA	Gemuruh-Padamara
12	12	11	Slinga-Sidanegara
13	13	5	RSU-Wirasana
14	14	TA	Karangpule
Jumlah		203	
Angkutan Pedesaan			
1	A	13	Bobotsari-Pagutan-Bumisari-Bakung-Karangjengkol-PP
2	B	19	Bobotsari-Kradenan-Tangkisan-Sindang-PP
3	C		Bobotsari-Pakuncen-Palumbungan-Limbahari-PP
4	D	16	Bobotsari-Banjarkerta-Kabunderan-Bungkanel-Ponjen-PP
5	E	20	Bobotsari-Karanganyar-Lampegan-Krangean (Picung)-PP
6	F	15	Bobotsari-Karanganyar-Jambudesa-Maribaya (Batur)-PP
7	G	15	Bobotsari-Karanganyar-Kertanegara-Langkap-PP
8	H	5	Kutasari-Walik-Karangklesem-Purbayasa-Padamara-PP
9	I	15	Penaruban-Kalikajar-Kembaran Wetan-Kaligondang-Selanegara-Selakambang-Penolih-Bandingan-Gumiwang-Krenceng-Nangkasawit-Panempon-Kejobong-PP
10	J	6	Bukateja-Kembangan-Tidu-Kemangkon-Penican-Karangkemiri-Senon-Palumutan-Bokol-Kedungbenda-PP
11	K	31	Bukateja-Kutawis-Kejobong-PP
12	L	8	Bukateja-Rakit-Klampok-PP
13	M	81	Bobotsari-Karanganyar-Karangmoncol-Rembang-PP
14	N	65	Bobotsari-Karangreja-Gualawa-Karangjambu -PP
15	O	27	Bobotsari-Karnganyar-Tunjungmuli-PP
16	P	5	Bobotsari-Selaganggeng-Srayu-Prati-Kutabawa-PP
17	Q	7	Bobotsari-Selaganggeng-Mrebet-Pagerandong-Pengalusan-Binangun-Cipaku-Karangnangka-PP
18	R	15	Bobotsari-Pagutan-Pagedangan-Pekalongan-Karangjengkol-Bumisari-Candinata-Karangcegak-Candiwulan-tobong-PP
19	S	14	Pasar Klagung-Gembrungan-Pengadegan-Ps Paing-Ps Pon-PP

No.	Jalur	Unit	Jalur Trayek
20	T	10	Kejobong-Timbang-Badamita-Tapen-Binorong-PP
21	U	12	Limbangan-Karangreja-Meri-Pasar Tobong-Karangcegak-Metenggeng-Pekalongan-Pagedangan-Beji-Ps Bojongsari-PP
22	V	2	Pagutan-Metenggeng-Tobong-Kutasari-Karangreja-Karangk lesem-Dawuhan-Bojanegara-Babakan- (Pasar Hewan)-PP
23	X	0	Dukuh Kebogohan-Cendana-Limbangan-Karangaren-Karangreja-Kutasari-Munjulluhur-Carangmanggung-Pasar beji-Karangbanjar-Kajongan-Pasar Banjarsari-PP
24	Y	2	Sub Terminal Penaruban-Sempor Lor-Brecek-Kaligondang-Cilapar-Selanegara (Kaseman)-Selakambang-Sidareja-Pagerandong-Sidanegara-Arenan-Slinga-PP
25	Z	35	Terminal Purbalingga-Kaligondang-Pengadegan-Rembang-PP
26	G1	19	Bobotsari-Karanganyar-Kertanegara-Langkap-PP
Jumlah		457	

Sumber : Dinhub Kab. Purbalingga, 2022

Selain transportasi darat, di Kabupaten Purbalingga saat ini sudah terdapat transformasi udara dengan dibukanya Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman. Lokasi Bandara JBS di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan mobilitas di bagian barat-selatan Provinsi Jawa Tengah. Perlunya mengintegrasikan jaringan transportasi darat dan udara melalui integrasi BRT, angkutan kota, dan angkutan perdesaan agar pelayanan menjadi lebih optimal.

Beberapa kondisi sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.72. Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luasan Marka di jalan kolektor primer	M2	2.106	6.635	3.391	2.657	2.325
2	Jumlah kendaraan angkutan umum layak operasi	angka	8.315	8.735	11.698	7.241	8.456
3	Jumlah kendaraan angkutan umum masuk terminal	angka	117.128	12.700	47.886	32.438	22.364

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2022

6. Pengelolaan Parkir

Selanjutnya terkait dengan pengelolaan parkir di tepi jalan, sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah terus mengalami peningkatan dari 294 titik parkir menjadi 387 titik parkir. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya pendapatan dari parkir. Namun demikian hal tersebut juga meningkatkan potensi kemacetan serta kecelakaan lalu lintas. Perlu upaya untuk meminimalisir kemacetan dan resiko kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya data pengelolaan parkir sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.73. Jumlah Titik Parkir Tepi Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	Titik Parkir	345	360	360	387	452

Sumber: Dinhub Kab. Purbalingga, 2022

J. Komunikasi dan Informasi

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Sampai dengan tahun 2021 jumlah lembaga pemerintahan yang memiliki website sebanyak 1 web bupati, 1 web wakil bupati, 27 OPD, 18 Kecamatan, 115 Desa, 15 Kelurahan, 1 web PKK dan 1 web puskesmas. Kesemuanya dengan intensitas *updating* setiap hari kerja. Sementara itu jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebanyak 43 unit.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka salah satu konsekuensinya adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Secara keseluruhan jumlah PPID yang ada yaitu 59 PPID terdiri dari 1 PPID Utama, 28 PPID Pembantu, 18 PPID Kec. 12 PPID Desa.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dengan nilai 1,94 pada tahun 2019 menjadi 3,04 pada tahun 2020, namun kemudian turun menjadi 2,23 pada tahun 2021.

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemkab Purbalingga. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemkab Purbalingga, sudah dapat menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemkab Purbalingga adalah pada penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yaitu pada Layanan pengaduan pelayanan publik yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu aplikasi " MATUR BUPATI ", yang memberikan layanan informasi terkait pengaduan pelayanan publik. Kemudian pada layanan Publik Sektor 2 yaitu sektor perizinan yang digunakan oleh Pemerintah

Kabupaten Purbalingga adalah Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK Cloud). Merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek kebijakan internal, Perencanaan Strategis SPBE, TIK, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK. Perencanaan Strategis SPBE belum tersedia kecuali pada peta rencana SPBE, dan Rencana dan Anggaran SPBE. Dikarenakan perencanaan strategisnya belum tersedia serta Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa perencanaan dan Kegiatan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur dilaksanakan tanpa pedoman maka berimplikasi pada aspek penerapan Manajemen SPBE yang sama sekali belum diterapkan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

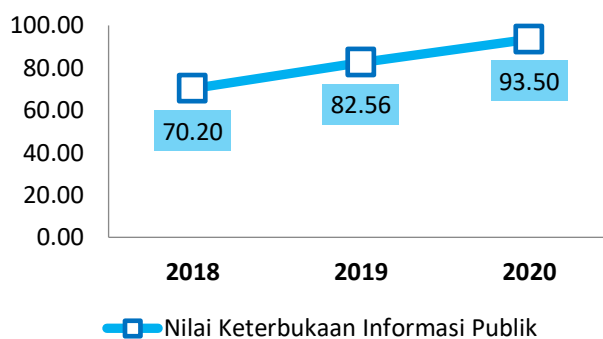
Pada Aspek Kebijakan internal, Perencanaan Strategis SPBE, TIK, Penerapan Manajemen SPBE, dan Audit TIK sangat perlu menjadi perhatian Pemkab Purbalingga. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Tabel II.74. Indeks SPBE Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 – 2021

No.	Nilai Indeks, Domain dan Aspek SPBE	2019	2020	Nilai Indeks, Domain dan Aspek SPBE	2021
1	Domain Kebijakan SPBE	1,47	2,88	Domain Kebijakan SPBE	1,90
	Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,00	2,71	Kebijakan Internal terkait SPBE	1,90
	Kebijakan Layanan SPBE	1,80	3,00		
2	Domain Tata Kelola	1,29	2,43	Domain Tata Kelola	1,90
	Kelembagaan	1,00	1,5	Perencanaan Strategis SPBE	1,50
	Strategi dan Perencanaan	1,50	3,00	TIK	2,00
	TIK	1,33	2,67	Penyelenggaraan SPBE	2,50
3	Domain Layanan SPBE	2,42	3,39	Domain Layanan SPBE	2,89
	Administrasi Pemerintahan	2,29	3,43	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,60
	Pelayanan Publik	2,67	3,33	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33
4				Domain Manajemen SPBE	1,18
				Penerapan Manajemen SPBE	1
				Audit TIK	1,67
NILAI INDEKS SPBE		1,94	3,04	NILAI INDEKS SPBE	2,23
PREDIKAT SPBE		CUKUP	BAIK	PREDIKAT SPBE	CUKUP

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2022

Sedangkan untuk Nilai Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menuju informatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga berupaya untuk mengoptimalkan penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2021

Gambar 2. 61. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 – 2020

Beberapa kondisi terkait urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.75. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

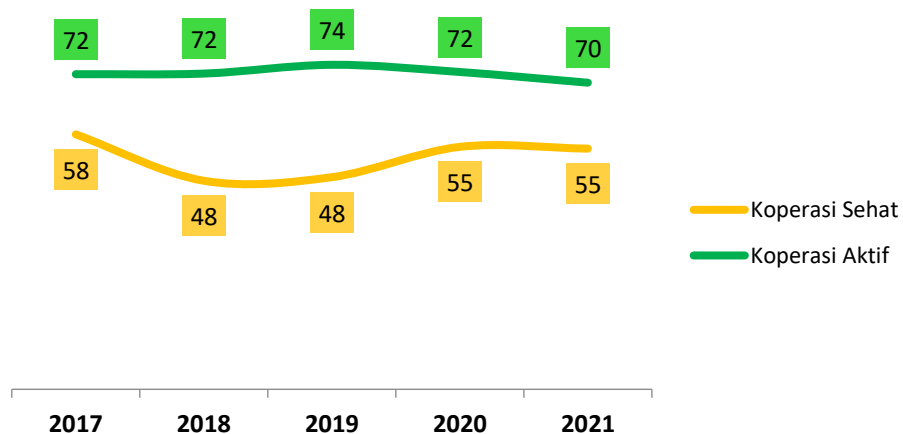
No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SKPD yang memiliki website	angka	31	34	179	296	133
2	Intensitas updating informasi pada website Pemkab	Hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari
3	Jumlah SIM pemerintahan daerah yang berfungsi dan aktif	Angka	32	34	34	43	43
4	Jumlah pelayanan publik online	Web	3	6	12	12	224
5	Jumlah kegiatan pemerintahan dan pembangunan terpublikasi	angka	1645	800	1456	800	1.636
6	Jumlah kecamatan yang terjangkau siaran radio Pemda	angka	18	18	18	18	18
7	Jumlah KIM ditingkat kecamatan	angka	11	12	13	14	17
8	Jumlah penyebaran informasi dan dialog melalui TV / Radio	angka	11	12	11	12	11
9	Jumlah kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal	angka	2	2	20	2	0
10	Jumlah komunikasi dan kerjasama dengan media massa	angka	32	30	30	30	30
11	Jumlah diseminasi informasi ke masyarakat melalui media	angka	23	23	20	20	51

Sumber: Dinkominfo Kab. Purbalingga, 2022

K. Koperasi dan UKM

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi.

Jumlah koperasi di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif. Jumlah koperasi sehat dalam kurun waktu 5 tahun pada tahun 2016 berjumlah 115 unit, kemudian meningkat menjadi 143 unit pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 kembali turun menjadi 117 unit dan kemudian naik lagi menjadi 119 unit pada tahun 2019 dan 136 unit pada tahun 2020. Persentase koperasi sehat dan koperasi aktif di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: DinkopUKM Kab. Purbalingga, 2021

Gambar 2. 62. Persentase Koperasi Sehat dan Koperasi Aktif di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 -2021

Beberapa jumlah koperasi berdasarkan jenis usahanya di Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi:

Tabel II.76. Jumlah Koperasi Berdasarkan Usahanya di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Jenis Koperasi	Jumlah
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	16
3	KPRI	52
4	KOPKAR	13
5	KOPPAS	2
6	Lainnya	162
Total		245

Sumber: DinkopUKM Kab. Purbalingga, 2022

Beberapa kondisi terkait urusan koperasi dan UMKM di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

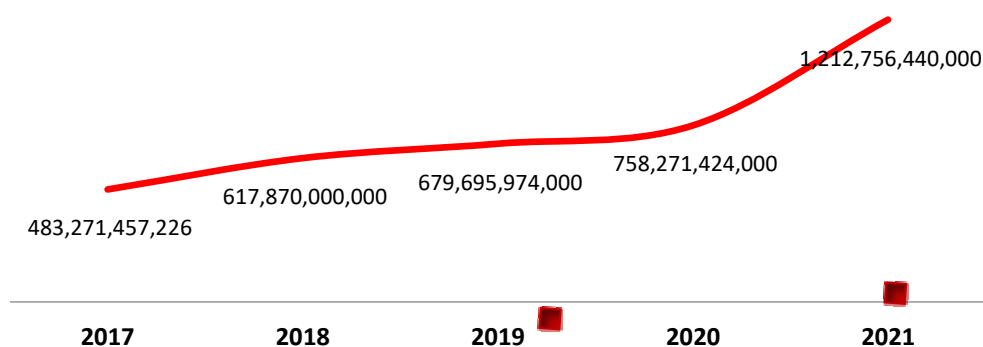
Tabel II.77. Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anggota koperasi	Unit	52.510	54.871	61.331	55.956	54.044
2	Persentase koperasi sehat	Unit	58	48	48	55	55
3	Persentase koperasi aktif	Unit	72	72	74	72	70
4	Jumlah UMKM	Unit	86.877	86.877	96.592	96.780	97.537
5	Usaha mikro menjadi usaha kecil	Unit	20	22	23	24	24
6	Usaha mikro bersertifikat / berijin	Unit	456	496	536	1.800	2.873
7	Jumlah produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI	Jenis	456	496	536	561	561
8	Persentase usaha mikro dan kecil terhadap UMKM	Persen	99.71	89	89	90	90
9	Cakupan UMKM yang difasilitasi promosi pemasaran	unit	185	278	315	255	300
10	Cakupan UMKM yang difasilitasi melalui internet	Unit	119	424	245	213	295

Sumber: DinkopUKM Kab. Purbalingga, 2022

L. Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Dilihat dari realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir menunjukkan trend yang meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 63. Realisasi Investasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

Sedangkan pertumbuhan jumlah perusahaan dan nilai investasinya di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir menunjukkan data dimana jumlah PMDN semakin meningkat begitu pula pertumbuhan nilai investasinya, namun PMA semakin menurun begitu pula dengan pertumbuhan nilai investasinya. Salah satu hal yang menyebabkan investasi yang masuk ke Kabupaten Purbalingga masih belum optimal dikarenakan kurangnya minat investor khususnya dalam berinvestasi dalam bidang industri. Sebagai salah satu kabupaten yang bertujuan untuk mewujudkan ruang berbasis agrobisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan, maka industri menjadi salah satu fokus untuk

menarik investasi.

Berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga No. 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-203, Kawasan Peruntukan Industri yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu seluas 875 ha. Meskipun luasan Kawasan Peruntukan Industri sudah luas, akan tetapi masih tersebar di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga dan tidak terhampar dalam satu hamparan. Kondisi terkait penanaman modal di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.78. Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMDN	unit	808	619	705	968	3.288
2	Pertumbuhan jumlah perusahaan PMA	unit	1	1	2	0	6
3	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	Juta Rp.	388.038	502.675	660.236	739.279	722.436
4	Pertumbuhan nilai investasi PMA	Juta Rp.	159.423	120.194	19.459	18.991	490.320

Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga. 2022

Dilihat dari perizinannya, jumlah ijin yang dilayani DPMPTSP selama 5 tahun terakhir selalu meningkat. Hal tersebut dikarenakan dinamika perubahan regulasi perizinan menuju pelayanan perizinan satu pintu. Secara rinci kondisi terkait pelayanan perizinan satu pintu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.79. Kinerja Urusan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perijinan	Poin	81,9	82,38	81,39	82,5	87,08
2	Rata-rata jangka waktu proses perijinan	Hari	5,2	5	4,3	3,5	4,1
3	Jumlah ijin yang dilayani di PTSP (jenis)	Jenis	27	27	35	50	50

Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga. 2022

Sedangkan dilihat dari jumlah ijin yang diterbitkan DPMPTSP pada tahun 2017 yaitu sebanyak 4.650 ijin kemudian turun menjadi 3.963 ijin pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 3.586 ijin, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 8.200 ijin. Hal ini dikarenakan tambahan perpindahan kewenangan dalam pelayanan perijinan. Jenis ijin yang

diterbitkan paling banyak adalah Izin Lokasi karena saat ini diterapkan OSS dalam pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2021 jumlah ijin menurun menjadi 5.686 ijin. Secara rinci jenis ijin dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.80. Jumlah Ijin yang Diterbitkan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No	Jenis Izin	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	11	10	380	2517	0
2	Izin Gangguan (HO)	619	0	0	0	0
3	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	922	633	655	780	322
4	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	1.036	644	442	698	444
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1.046	657	694	2.517	2.302
6	IUI/TDI	42	50	38	72	45
7	Izin Reklame	512	390	463	285	1026
8	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	87	90	67	466	196
9	Izin Mendirikan Perush. Pengangkutan	7	2	1	6	0
10	Izin Pertambangan Daerah (Gol. C)	11	10	16	0	0
11	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	36	14	10	7	10
12	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	1	0	0	14	8
13	Izin Bidang Kesehatan	320	1334	797	838	1.333
	Jumlah	4.650	3.963	3.586	8.200	5.686

Sumber: DPMPSTSP Kab. Purbalingga. 2022

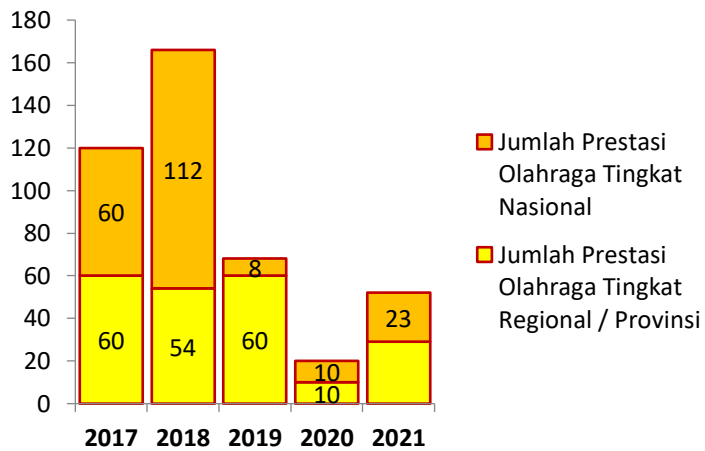
M. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu pendukung upaya pembangunan manusia. Salah satu tujuan dari pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga adalah memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan, patriotism, nasionalisme serta mengembangkan jiwa sportifitas disamping juga dalam rangka meningkatkan kualitas jasmani generasi muda. Dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat bidang olah raga sekaligus upaya peningkatan olah raga prestasi, pemerintah daerah terus berupaya melakukan peningkatan prasarana dan sarana pendukung olah raga, antara lain dengan dilakukannya revitalisasi GOR Goentoer Darjono dan pembangunan fasilitas lapangan olah raga *indoor*.

Cakupan kelompok/organisasi olahraga yang difasilitasi pada tahun 2020 jauh berkurang dibanding tahun 2018, namun untuk fasilitasi kegiatan olahraga masih bisa berjalan meskipun jumlah fasilitasnya sedikit berkurang pada tahun 2020. Fasilitasi yang diberikan tidak hanya pelaksanaan event olahraga tetapi juga pemberian sarana dan prasarana olahraga seperti bola untuk sepak bola, voli dan meja untuk cabor tenis meja.

Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Purbalingga masih perlu untuk ditingkatkan. Pada tingkat regional, terdapat 60 medali/piagam pada tahun 2017 namun jumlahnya semakin menurun pada tahun berikutnya. Pada tahun 2020 akibat dampak covid-19 tidak diselenggarakan event tingkat

regional sehingga tidak ada pengiriman kepemudaan dan olahraga dalam perlombaan. Begitu pula pada tingkat nasional, pada tahun 2017 sampai dengan 2018 jumlah prestasinya meningkat, namun pada tahun 2019 dan 2020 semakin menurun dan meningkat lagi di tahun 2021. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga. 2022

Gambar 2. 64. Jumlah Prestasi Olahraga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

Dilihat dari jumlah kompetisi olahraga yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga, pada dasarnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 semakin banyak, diharapkan dengan banyaknya kompetisi olahraga maka prestasi-prestasi olah raga juga akan semakin baik. Namun pada tahun 2020 dan 2021 ketika terjadi pandemi covid-19 dan kewajiban mematuhi prokes untuk tidak berkerumun dan tetap menjaga jarak, membuat kompetisi olahraga yang dilaksanakan menjadi sangat berkurang dari tahun sebelumnya yang semula 39 kompetisi olahraga menjadi hanya 13 event/kompetisi olahraga saja.

Selain kompetisi yang dilaksanakan, faktor sarana dan prasarana olahraga juga akan sangat mempengaruhi prestasi olahraga yang akan diraih. Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 memiliki 233 lapangan sepak bola atau bisa dikatakan hampir di setiap desa di Kabupaten Purbalingga memiliki lapangan sepakbola. Selain lapangan sepakbola juga terdapat 164 lapangan bola voli, 30 lapangan bulutangkis dan 22 lapangan futsal.

Hal yang serupa juga terjadi pada sektor kepemudaan, pada setiap tahunnya dari tahun 2017 jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi relatif stabil, hanya saja pada tahun 2020 dan 2021 ketika terjadi pandemi jumlah kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan yang difasilitasi menurun sangat drastis. Adanya protokol kesehatan dalam menghadapi covid dan refocussing anggaran untuk menangani pandemi membuat jumlah kegiatan kepemudaan berkurang dan organisasi kepemudaan yang terlibat dalam kegiatan kepemudaan juga berkurang.

Beberapa kondisi terkait dengan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten

Purbalingga selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.81. Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	Unit	6	11	13	3	7
2	Jumlah kegiatan kepemudaan difasilitasi	klp/org	23	24	24	2	9
3	Jumlah kelompok olahraga difasilitasi	Unit	25	30	3	2	6
4	Jumlah kegiatan olahraga difasilitasi	kegiatan	26	48	26	21	14
5	Jumlah kompetisi olahraga	even	6	34	39	13	14

Sumber: *Dinporapar Kab. Purbalingga. 2022*

N. Statistik

Statistik memiliki peranan sebagai penyedia bahan maupun keterangan dalam berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Statistik juga sebagai peralatan analisis dan interpretasi data kuantitatif guna memperoleh suatu kesimpulan yang nantinya dijadikan bahan rumusan kebijakan. Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 realisasi kinerja statistik sudah mencapai 100% dimana kegiatan statistik berisikan penyediaan data dasar pembangunan daerah yang bekerja sama dengan BPS Kabupaten Purbalingga dengan output tersedianya publikasi buku Purbalingga Dalam Angka, (PDA) Kecamatan Dalam Angka (KDA) dimana terdapat 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga, serta buku saku PDA dan KDA. Data statistik dimaksud dimanfaatkan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2021, sesuai dengan amanat dalam Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Kabupaten Purbalingga telah menyusun Perbup No. 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga. Dalam proses penyelenggaraannya, saat ini masih dalam proses perencanaan data untuk menyusun daftar data prioritas yang akan dipakai dalam perencanaan pembangunan. Diharapkan daftar data nantinya dapat memenuhi 4 prinsip SDI (Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, dan Kode Referensi) dengan penyeragaman pola antara tingkat Provinsidan Kab/Kota agar pembangunan basis data semakin berkualitas.

O. Persandian

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan persandian meliputi: penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan persandian di Kabupaten Purbalingga secara

umum telah berjalan dengan baik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dimana informasi pemerintah daerah melalui santel tersampaikan dengan baik kepada pihak terkait walaupun sebatas pada penerimaan surat masuk dan pendistribusian suratnya. Realisasi kinerjanya sudah mencapai 100%. Kemampuan petugas dalam penggunaan peralatan santel perlu ditingkatkan guna mengantisipasi kebocoran atau penyadapan informasi pemerintah daerah oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

P. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya merupakan salah satu upaya pembangunan karakter bangsa. Seni budaya khususnya seni budaya nasional merupakan wahana internalisasi nilai-nilai luhur yang perlu untuk terus ditanamkan dan dikembangkan untuk memperkuat karakter dan integritas bangsa. Disamping itu seni budaya secara umum dapat menjadi media untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.

Di tengah kehidupan yang semakin materialistis dan semakin menguatnya gelombang globalisasi, ada kecenderungan semakin menurunnya apresiasi terhadap seni budaya bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan program yang nyata dalam rangka peningkatan apresiasi terhadap seni budaya khususnya yang bersifat tradisional, intensitas kegiatan kajian, fasilitasi, pementasan serta pengiriman duta seni maupun pembinaan organisasi dan kelompok kesenian yang ada perlu terus ditingkatkan. Demikian juga berbagai kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya yang sangat banyak di Kabupaten Purbalingga perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya.

Jumlah pementasan seni budaya daerah dari tahun 2017 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2020 meningkat hingga 25 kali. Pementasan pada tahun 2020 menjadi lebih banyak untuk membantu pelaku seni yang pada masa pandemi covid-19 mengalami kesulitan untuk melakukan pementasan sehingga pemerintah daerah membantu pementasan tersebut dalam format pementasan yang berbeda dalam konsep virtual. Dalam pementasan diperlukan juga gedung pementasan kesenian, dari tahun 2017 jumlah gedung pementasan kesenian jumlahnya semakin berkurang hingga hanya berjumlah 11 buah gedung pementasan kesenian pada tahun 2021. Untuk mendukung pengembangan dan peningkatan kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan diperlukan gedung pementasan kesenian yang representatif baik secara kuantitas maupun kualitas.

Cakupan kajian seni juga menunjukkan penurunan pada tahun 2020, begitu juga dengan cakupan fasilitasi seni dan cakupan sumber daya kesenian karena hal ini memang saling berhubungan. Kajian seni meliputi kegiatan kesenian dan kebudayaan diluar pementasan seperti bengkel seni, workshop seni, seminar-

seminar kebudayaan dan lainnya. Penurunan ini dikarenakan refocusing anggaran yang harus dilakukan untuk membiayai anggaran yang muncul akibat covid-19. Pengurangan anggaran kegiatan kesenian dan kebudayaan akan berpengaruh pada jumlah cakupan fasilitasi seni sehingga sdm kesenian yang aktif juga berkurang karena sangat sedikitnya kegiatan kesenian dan kebudayaan pada musim pandemi.

Pandemi juga berpengaruh pada kegiatan-kegiatan cagar budaya dan museum baik itu jumlah cagar budaya yang dikonservasi dan jumlah pengunjung museum yang sangat berkurang. Dari hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa pandemi covid 19 sangat berdampak kinerja sektor kebudayaan secara langsung maupun tidak langsung. Anggaran yang harus disesuaikan karena covid-19 membuat kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan yang dilakukan sangat terbatas, ditambah lagi dengan adanya protokol kesehatan yang mengharuskan penjagaan jarak dan melarang adanya kerumunan, membuat banyak kegiatan kesenian lainnya yang tidak bersumber dari APBD/APBN harus ditunda sehingga membuat para pelaku seni harus beralih profesi untuk menjaga keberlangsungan hidupnya.

Beberapa kondisi terkait dengan urusan kebudayaan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.82. Kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pementasan seni budaya daerah	kali	5	8	8	25	
2	Jumlah Gedung Pementasan Kesenian	unit	11	17	10	10	11
3	Cakupan kajian seni	persen	47,06	55,56	22	16,67	0
4	Cakupan fasilitasi seni	persen	21,73	66,45	34,50	27,16	10
5	Cakupan gelar seni	persen	100	77	69	92	28
6	Cakupan misi kesenian	persen	20	11	16	0	0
7	Cakupan sumber daya manusia kesenian	persen	26,10	33,33	36,84	19,52	89
8	Cakupan tempat gelar seni	persen	27.5	42.5	25	10	11
9	Cakupan organisasi kesenian yang aktif	Org	260	333	313	319	319
10	Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya	Jupel	40	45	45	45	45
11	Jumlah kunjungan museum & monumen	orang	16.773	203.406	259.115	21.938	901
12	Jumlah cagar budaya	buah	298	287	295	288	292
13	Cakupan cagar budaya yang dikonservasi	situs	1	1	6	0	0

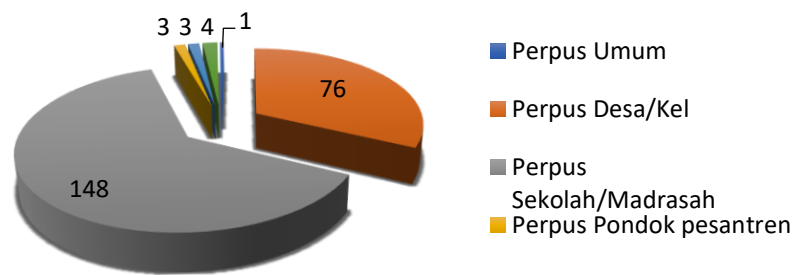
Sumber: Dindikbud Kab. Purbalingga. 2022

Q. Perpustakaan

Peningkatan kualitas manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik di bangku pendidikan sangatlah terbatas dan lebih bersifat sebagai bekal dasar dan stimulasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu dikembangkan semangat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan pengetahuan lainnya dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak dan generasi muda antara lain melalui pengembangan budaya membaca.

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebanyak 1020 unit yang terdiri dari 1 unit perpustakaan umum, 156 perpustakaan Desa/Kel, 811 perpustakaan Sekolah/Madrasah, 15 perpustakaan Pondok Pesantren, 27 perpustakaan Rumah Ibadah dan 10 Perpustakaan Khusus.

Dari beberapa perpustakaan yang ada tersebut beberapa perpustakaan dibangun untuk dapat terus mendorong dan mendukung pengembangan budaya membaca. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga. 2022

Gambar 2. 65. Jumlah Perpustakaan yang Dibina di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Beberapa kondisi terkait dengan urusan perpustakaan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.83. Kinerja Urusan Perpustakaan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

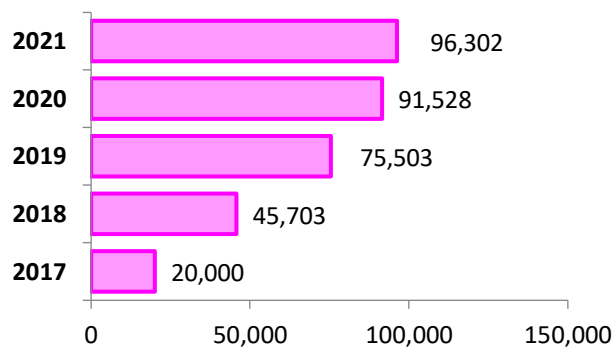
No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio perpustakaan per jumlah penduduk	persen	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
2	Rasio pengunjung perpustakaan per jumlah penduduk	persen	0,05	0,05	0,12	0,02	0,02
3	Jumlah koleksi buku perpustakaan	buah	57.046	80.121	81.619	85.734	85.734
4	Jumlah judul buku perpustakaan	buah	30.281	41.665	42.748	43.053	43.053
5	Jumlah anggota perpustakaan berkartu	orang	20.000	2.451	30.722	31.766	31.766
6	Jumlah layanan perpustakaan keliling	buah	400	471	537	171	171
7	Jumlah SDM perpustakaan mengikuti bintek perpustakaan	orang	540	540	700	760	760
8	Jumlah perpustakaan bersertifikat kompetensi perpustakaan	orang	3	0	0	0	2

Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga. 2022

R. Kearsipan

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Cakupan OPD/ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 yaitu sebanyak 627 unit dan jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik sebanyak 96.302 berkas. Jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga. 2022

Gambar 2. 66. Jumlah Arsip Daerah yang telah Didokumentasikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

SIDOMAS merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan kearsipan. dengan Alih Media Sistem Informasi Dokumentasi Masyarakat (SIDOMAS) mampu melayani kearsipan sebanyak 40.616 KK. Beberapa kondisi terkait dengan urusan kearsipan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.84. Kinerja Urusan Kearsipan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan SKPD/ ormas/ BUMD/lembaga desa menerapkan pengelolaan arsip secara baku	unit	262	181	577	629	627
2	Alih media Sistem Informasi Dokumen Masyarakat (SIDOMAS)	Kk	59.659	40.616	66.610	40.641	40.641

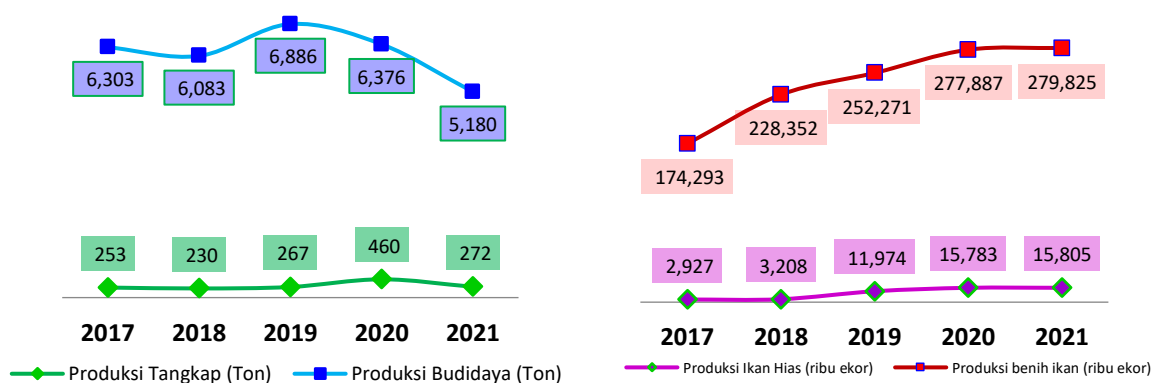
Sumber: Dinarpus Kab. Purbalingga. 2022

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Perikanan

Kinerja pembangunan perikanan salah satunya dapat dilihat dari produksi perikanan budidaya. Angka produksi budidaya ikan di Kabupaten Purbalingga masih rendah dikarenakan pembudidaya ikan masih menggunakan cara-cara tradisional dalam proses budidayanya yakni hanya kolam diisi ikan tanpa pemeliharaan yang intensif sehingga produksi tidak maksimal. Harga pakan pabrikan yang cukup tinggi pun juga mempengaruhi jumlah pembudidaya dari segi budidaya dan pemberian pakan. Apabila harga pakan mahal maka pembudidaya mengurangi jumlah pemeliharaan di kolam serta mengurangi jumlah pakan yang diberikan ke ikan dengan mengganti pakan buatan sendiri dengan kualitas pakan yang jauh lebih rendah dari kualitas pakan pabrik. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi hasil produksi ikan secara bobot dan kualitas.

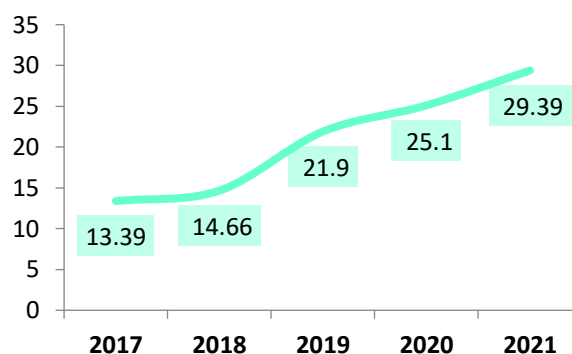
Disamping itu pembudidaya ikan di Kabupaten Purbalingga juga masih rendah dalam hal menjaga kualitas air. Ke depannya kualitas air apabila tidak dijaga akan semakin rendah karena angka pencemaran air semakin tinggi sehingga mempengaruhi hasil perikanan. Kemudian faktor penyakit ikan yang melanda Kabupaten Purbalingga juga semakin banyak. Kejadian tahun 2019 adanya penyakit ikan yang menyerang ikan gurame cukup membuat angka produksi ikan menurun dan semakin banyak ikan mati yang disebabkan virus penyakit tersebut. Beberapa jumlah produksi perikanan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: DKPP Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 67. Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Sedangkan tingkat konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 sebesar 13,39 kg/kapita/tahun kemudian mengalami kenaikan terus menerus mencapai 29,39 pada tahun 2021.



Sumber: DKPP Kab. Purbalingga. 2022

Gambar 2. 68. Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Namun nilai tersebut masih jauh dengan tingkat konsumsi ikan nasional yang berada di angka 55,37 kg/kapita pada tahun 2021. Berikut ini perbandingan angka konsumsi ikan nasional dan Kabupaten Purbalingga.

Tabel II.85. Perbandingan Angka Konsumsi Ikan Nasional dan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Tahun	Angka Konsumsi Ikan Nasional (Kg/ Kapita/Tahun)	Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Purbalingga (Kg/Kapita/Tahun)
2017	46,49	13,39
2018	50,69	14,66
2019	54,49	21,90
2020	56,39	25,11
2021	55,37	29,39

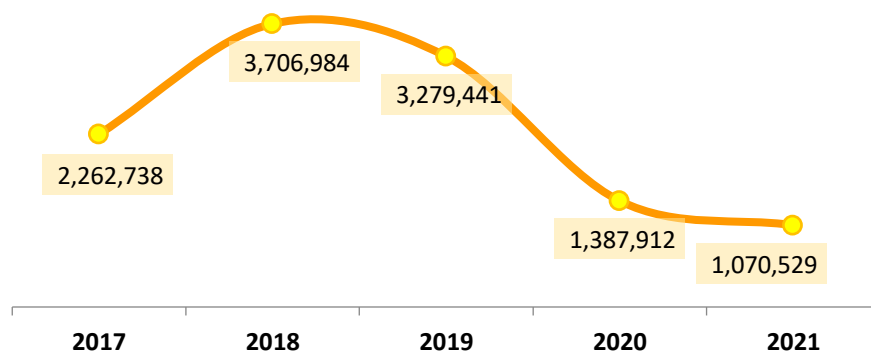
Sumber: DKPP Kab. Purbalingga. 2022

Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Purbalingga karena ketersediaan ikan di masyarakat belum maksimal. Salah satunya mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan ikan di pasar. Jumlah pasar ikan yang ada di Kabupaten Purbalingga sampai saat ini yaitu hanya berjumlah 12 unit. Disamping itu juga dikarenakan masih rendahnya daya beli masyarakat baik karena faktor ekonomi ataupun karakter masyarakat yang kurang dalam mengkonsumsi ikan. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi gerakan makan ikan yang masif agar angka konsumsi ikan semakin meningkat.

B. Pariwisata

Sektor pariwisata saat ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Sektor pariwisata dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata untuk menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi. Keberhasilan dalam bidang pariwisata dicerminkan dengan semakin

meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata. Namun pada tahun 2021 jumlah pengunjung masih menurun akibat adanya pandemic, tercatat jumlah pengunjung di seluruh objek wisata sebanyak 1.070.529 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 1.387.912 orang.



Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga. 2022

Gambar 2. 69. Angka Kunjungan Wisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Berdasarkan seluruh kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Purbalingga mampu memberikan pendapatan ke kas pemerintah daerah sebesar 44.781.457.446 rupiah pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 pendapatan menurun mencapai 15.958.823.805 rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 11.179.948.019 rupiah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.86. Pendapatan dari Obyek Wisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan (Rupiah)
2017	33,846,965,238
2018	46,317,676,181
2019	44,781,457,446
2020	15,958,823,805
2021	11,179,948,019

Sumber : Dinporapar Kab. Purbalingga 2022

Pariwisata tumbuh dari upaya memanfaatkan potensi alam maupun dengan membuat obyek wisata buatan yang memiliki kekhasan dan keunggulan suatu daerah. Rincian daerah wisata di Kabupaten Purbalingga terdiri dari wisata alam (Gua Lawa, Pendakian Gunung Slamet), wisata budaya (MTL Jend. Soedirman, Petilasan Ardi Lawet), wisata buatan (Owabong, Sanggaluri Park, Kolam Renang Tirto Asri Walik, TWP Purbasari Pancuran Mas, Buper Munjulluhur, Taman

Usman Janatin Purbalingga, Kolam Renang Ciblon Bobotsari, Kutabawa Flower Garden, Rainbow Garden Kutabawa, Kampung Warna Bobotsari, Rest Area RM Siregol, Wisata Edukasi Kampung Marketer, Kampung Duku Kembaran Wetan, Rest Area Berkah Mulia/Cheng Hoo) dan desa wisata/rintisan desa wisata sebanyak 28 desa.

Disamping itu juga terdapat beberapa obyek wisata unggulan yaitu 5 (lima) obyek wisata unggulan yaitu Owabong, Gua Lawa, Sanggaluri Park, Pancuran Mas Purbayasa dan Desa Wisata Serang. Perkembangan kondisi urusan pariwisata di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.87. Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	12	12	10	10	10
2	Jumlah kelompok sadar wisata / pemandu wisata	klp	15	15	30	30	30
3	Rata-rata tingkat hunian hotel	%	35,21	35,21	21,84	21,84	21,84
4	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,32	1,32	1,38	1,35	1,35
5	Jumlah restoran	Unit	25	40	69	75	75
6	Jumlah penginapan/ hotel	Unit	11	14	14	14	14
7	Jumlah Destinasi Wisata yang difasilitasi/dikembangkan	Desa	0	5	7	19	13
8	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa	4	4	7	29	27
9	Jumlah /event pameran pariwisata yang diikuti	event	0	0	10	1	5

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2022

C. Pertanian

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan sarana pertanian; pengembangan prasarana pertanian; pemeliharaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; serta pemberian perizinan usaha pertanian. Sektor pertanian masih memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dimana kategori lapangan usaha pertanian menempati urutan kedua dalam PDRB setelah lapangan usaha industri yaitu sebesar 27,04%. Produksi pertanian dalam kurun waktu 5 tahun mengalami peningkatan dan penurunan.

Untuk potensi pertanian tanaman pangan meliputi padi, jagung, ubi kayu dan kedelai. Produksi pertanian pangan selalu meningkat, namun di tahun 2021 produksi jagung cenderung menurun. Produksi padi mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 ke 2021 karena angka profitas (produktivitas) menurun menjadi 0,4 ton/ha. Beberapa penyebabnya dikarenakan adanya penurunan luas lahan sawah, serangan WBC (Wereng Batang Coklat),

serta serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) seperti tikus.

Sedangkan potensi pertanian hortikultura komoditas utama yang ada di Kabupaten Purbalingga yaitu meliputi ubi kayu, kentang dan kobis. Kemudian untuk perkebunan potensinya berupa buah-buahan seperti duku, nanas dan kelapa. Untuk potensi peternakan yang utama adalah sapi potong, kambing, ayam ras petelur, ayam buras, dan ayam ras potong. Secara rinci perkembangan produksi pertanian dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel II.88. Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

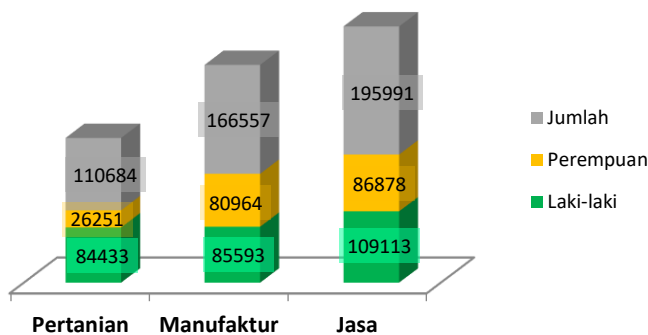
No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan							
Produksi pangan (ton) :							
1	Padi	Ton	237.887	261.140	205.172	189.122	192.469
2	Jagung	Ton	52.151	39.674	48.153	68.271	40.300
3	Kedelai	Ton	126	10.474	3.152	173,50	444
Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura							
4	Ubi Kayu	Ton	64.303	17.141	49.874	50.482	33.256
5	Kentang	Ton	4.908	4.599	4423	4.463	6.155
6	Kobis	Ton	4.578	4.315	4.403	4.635	12.499
7	Wortel	Ton	1.695	1.847	2.276	2.586	8.667
8	Stroberi	Ton	211	228	237	282	871
9	Cabai besar	Ton	2.847,8	2987,1	467	1.250	1.547
10	Cabai rawit	Ton	1.983,6	1.125	463	1.100,70	1.183
Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan							
11	Duku	Ton	8.150	10.049	95250	8.041,62	4.204
12	Durian	Ton	661	5.356	2.662,60	4.634,50	4.669
13	Pisang	Ton	12.461	10.489	9.718,20	12.475,20	15.831
14	Nanas	Ton	25.552,19	123.759,5	83.451,10	193.695,40	266.471
15	Pepaya	Ton	3.220	2.552	2.298,10	2.353,80	2.461
16	Manggis	Ton	855	586,6	567,00	685,30	1.272
17	Kapulaga	Ton	271	228	184,70	231	2.887
18	Kopi	Ton	165,48	283,3	315,52	322	291
19	Lada	Ton	154,1	288	232,10	197	191
20	Kelapa Dalam	Ton	12.641	14.709	15.212	11.514	13.518
21	Kelapa Deres	Ton	55.140	70.206	69.888	55.600	69.444
22	Cengkeh	Ton	32,46	31,3	56,75	48,24	28
23	Glagah Arjuna	Ton	372,84	377	436,71	35875	415
24	Nilam	Ton	574,72	465,6	1277,14	405	277
25	Tebu	Ton	1490,17	1674,41	500,06	345,33	362
26	Karet	Ton	132,01	157,18	254,91	132	73
Cakupan fasilitasi penanganan pasca panen produk pertanian tanaman							
27	Power Thresher	Unit	515	1.010	1.036	765	1.071
28	Pemipil Jagung	Unit	74	74	80	69	127
29	Rice Mill Unit	Unit	451	451	451	187	451

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
30	Penggunaan Pupuk Organik	Ton	351,8	351,8	798	725	91.101
Pengembangan Budidaya Peternakan							
Populasi ternak siap potong (ton)							
31	Sapi	Ton	1.097,80	1.276,60	1.285,48	1.339,80	90.012
32	Kerbau	Ton	1,5	1,6	1,06	1,02	65
33	Kambing	Ton	724,74	761,1	763,68	312.,50	1.704
34	Domba	Ton	132,56	149,4	140,14	90,70	124
35	Kelinci	Ton	1,46	1,8	1,61	1,00	363
36	Babi	Ton	0	0	0.00	-	0
37	Ayam Layer	Ekor	52.190	52.000	54.777	51.664	1.015.623
38	Ayam Broiler	Ekor	5.848.430	5.888.509	5.352.667	5.202.389	6.690.430
39	Ayam Buras	Ekor	8.465.130	9.643.443	10.084.438	9.559.758	2.403.984
40	Itik	Ekor	19.280	20.237	19.443	20.116	155.656
41	Burung Puyuh	Ekor	11.720	10.907	11.975	10.255	155.924
42	Angsa	Ekor	58	90	99	80	6.164
43	Entog	Ekor	6.957	4.080	5.825	5.514	61.347
44	Merpati	Ekor	1.730	1.804	1.609	1.644	32.361
Produksi hasil peternakan:							
45	Produksi Susu	Liter	287.700	265.279	308.462.64	307.194.30	261.476
46	Produksi Telur	Ton	12.892.08	14.970.90	13.198.42	13.149.10	32.758
Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian							
47	Olahan Daging	Ton	248,3	274,4	339,72	465.40	446
48	Olahan Telur	Ton	94.100	104.500	104.678	100.969	70.798
49	Olahan Susu	Ton	116.800	96.807	119.637	115.848	96.104
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							
50	Prevalensi Penyakit	%	75,96	26,8	22,30	20,8	5
51	Penyakit Zoonosis	%	0	4,7	5,66	3,8	0

Sumber: *Dinpartan Kab. Purbalingga. 2022*

Sementara itu jika dilihat menurut lapangan usaha utama penduduk usia kerja sebagian besar penduduk Kabupaten Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021, dari 473.232 orang jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 195.991 orang bekerja di lapangan usaha jasa, disusul oleh manufaktur sebanyak 166.557 orang dan lapangan usaha pertanian sebanyak 110.684 orang.

Untuk lapangan usaha pertanian lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki sebanyak 84.433 orang dan penduduk perempuan hanya 26.251 orang. Sementara untuk lapangan manufaktur hampir berimbang dilakukan oleh penduduk laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki sebanyak 85.593 orang dan perempuan 80.964 orang. Secara lebih lengkap penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



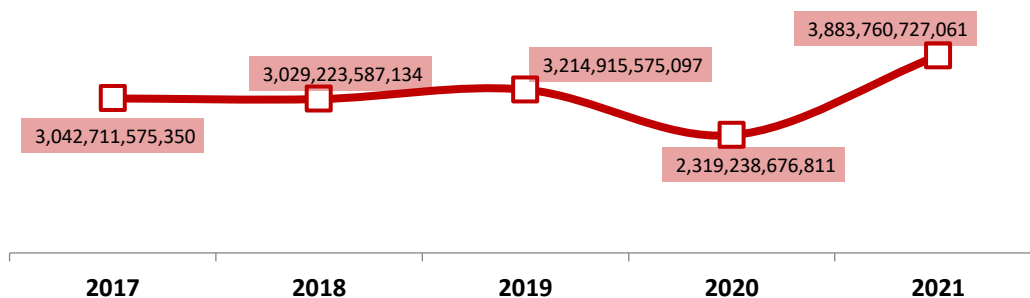
Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2018 - 2022

Gambar 2. 70. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 3 Kategori dan Jenis Kelamin Tahun 2021

D. Perdagangan

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perdagangan mencakup Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Sarana Distribusi Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; serta Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Di Kabupaten Purbalingga kinerja urusan perdagangan menunjukkan perkembangan yang baik. Berkaitan dengan kondisi sarana prasarana, terus dilakukan upaya penataan pasar. Jumlah pasar bersih, sehat dan layak semakin meningkat dari tahun 2017 sebanyak 5 pasar meningkat menjadi 15 pasar pada tahun 2021. Masih terdapat beberapa pasar yang memerlukan perbaikan sehingga kondisinya menjadi layak seperti Pasar Badog Bancar, Pasar Mandiri, Pasar Kutasari serta Pasar Desa Potensial lainnya.

Dilihat dari nilai ekspor, dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat dari Rp 3.042.711.575.350,- pada tahun 2017 menjadi Rp 3.214.915.575.097,- pada tahun 2019 namun kemudian turun menjadi Rp 2.319.238.676.811,46,- pada tahun 2020 dan kemudian naik lagi menjadi Rp 3.883.760.727.061,- pada tahun 2021. Jumlah eksportir sebanyak 29 perusahaan. Sedangkan jumlah IKM pelaku ekspor yaitu sebanyak 5 IKM terdiri dari CV. Rayung Pelangi, CV.Glagah Arjuna Broom, Kub Central Agro Lestari, CV. Bunga Palm dan Abon Cap Koki. Ekspor ini perlu ditingkatkan dengan menambah volume dan jenis produk yang bisa diterima pasar internasional.



Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2022

Gambar 2. 71. Perkembangan Nilai Ekspor di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

Beberapa kondisi terkait dengan urusan perdagangan yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.89. Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pasar rakyat	unit	21	21	21	21	21
2	Jumlah pasar bersih, sehat dan layak	unit	5	11	13	15	15
3	Persentase jumlah pasar bersih dan sehat	Persen	24	52	62	71	71
4	Cakupan PKL ditata dan diberdayakan	PKL	8	10	6	6	6
5	Jumlah Pemantauan distribusi barang penting	Lokasi	3	3	3	3	3
6	Jumlah komoditas yang peredarannya diawasi	Komoditi	24	24	24	5	2
7	Sengketa konsumen diselesaikan oleh BPSK	%	7	15	11	11	0
8	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	UTTP	25.000	24.868	15.504	11.911	5.273
9	Jumlah eksportir	Perus	29	37	38	29	29
10	Jumlah/jenis barang yang diekspor	Produk	40	42	35	121	121

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2022

E. Perindustrian

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perindustrian mencakup Perencanaan Pembangunan Industri; Perizinan; dan Sistem Informasi Industri Nasional. Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun dari sebesar 42.719 unit pada tahun 2017 menjadi sebanyak 43.239 unit pada tahun 2021. Beberapa produk IKM unggulan di Kabupaten Purbalingga yaitu diantaranya: knalpot, batik, sapu glagah dan olahan pangan. Salah satunya yaitu industri kecil knalpot yang sudah terkenal dengan pemasaran ke seluruh Indonesia dan secara online dipasarkan ke luar negeri. Industri knalpot di Kabupaten Purbalingga diawali pada tahun 1970 an dengan industri logam dari bahan seng dan drum untuk pembuatan peralatan rumah tangga yang berlokasi di Dusun Sayangan, Kelurahan Purbalingga Lor. Kemudian mulai menyebar ke kelurahan atau desa sekitarnya di Kabupaten Purbalingga dengan memproduksi knalpot sepeda motor dan mobil. Saat ini jumlah IKM Knalpot yang terdata sebanyak 146 unit dengan tenaga kerja kurang lebih 1000 orang. Beberapa kondisi terkait dengan urusan perindustrian yang ada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

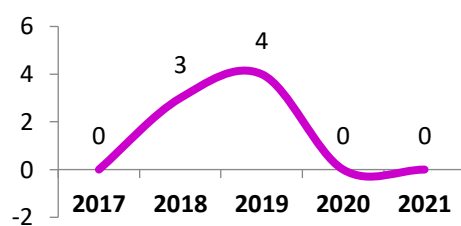
Tabel II.90. Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja
-----	-----------	--------	-------------------

			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah industri	unit	42.719	42.929	43.127	43.239	43.239
2	Jumlah industri menerapkan inovasi teknologi	unit	652	655	656	656	656
3	Jumlah industri menerapkan standarisasi produk industri	unit	8	8	9	9	9
4	Persentase klaster/sentra industri yang berkembang	persen	42	43	43	43	43
5	Cakupan IKM memenuhi standar kelayakan produksi	persen	28,74	28,77	28,8	28,8	28,8

Sumber: Dinperindag Kab. Purbalingga. 2022

F. Transmigrasi



Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk salah satunya dilakukan dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah yang kepadatan penduduknya

tinggi ke daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Tujuan dari transmigrasi yaitu melakukan penempatan penduduk secara merata diseluruh daerah. Realisasi pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Purbalingga terlihat semakin menurun, dimana pada tahun 2018 dan 2019 terdapat pengiriman 3 dan 4 orang kemudian menurun di tahun 2020 dan 2021 tidak ada pengiriman transmigrasi ke luar Purbalingga.

2.1.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kecenderungan praktik pemerintahan dewasa ini menunjukkan kuatnya semangat untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kecenderungan ini didorong oleh semakin derasnya tuntutan demokrasi, transparansi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (termasuk hak memperoleh informasi yang benar). Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan terdapat urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan fungsinya perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu: Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Jangka Pendek.

Perencanaan sebagai salah satu fungsi dari manajemen merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam manajemen pemerintahan. Seluruh aktivitas dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terlebih dahulu melalui proses perencanaan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan keluaran (output) kegiatan pemerintah yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pemerintah. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Sumber daya yang terbatas menyebabkan perlunya dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin. Konsekuensinya adalah pengumpulan dan analisis data serta informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting.

Dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) salah satu komponen yang dinilai adalah perencanaan kinerja yang terdiri dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 30% dari nilai total. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir nilai perencanaan kinerja dalam SAKIP Kabupaten Purbalingga yaitu menunjukkan angka 20,14 pada tahun 2020 dan naik menjadi 21,14 pada tahun 2021.

Sedangkan untuk fungsi penelitian dan pengembangan penelitian merupakan proses yang dipakai untuk mengembangkan program pembangunan atau bahkan menyempurnakan program yang telah ada agar lebih efektif dan relevan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur – unsur kelembangaan, sumber daya, keseluruhan yang utuh dilingkungan Nasional Republik Indonesia.

Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan kegiatan kelitbangan seperti *workshop*, pendampingan metodologi dan lomba – lomba ajang kreatifitas dan inovasi di tingkat Kabupaten Purbalingga. Selain lomba kreatifitas dan inovasi, untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan di Kabupaten Purbalingga, juga diterbitkan beberapa surat ijin/survey penelitian dari berbagai universitas yang ada di wilayah Purbalingga dan sekitarnya, yang akan mengadakan

penelitian di Kabupaten Purbalingga. Tidak hanya rekomendasi penelitian yang dilaksanakan oleh kelitbang tetapi juga kerjasama antar perguruan tinggi dan pemkab seperti yang dilaksanakan belum lama ini oleh Universitas Perwira Purbalingga (Unperba), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), UIN, dan ITB.

Beberapa kondisi realisasi kinerja terkait dengan urusan perencanaan dan litbang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.91. Kinerja Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Presentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persen	96	98	97	97	100
2	Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	Persen	100	100	60	100	100
3	Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang terakomodir dlm dokumen penganggaran	Persen	24,7	23	75	36	77
4	Tingkat pencapaian Target Kinerja sasaran pembangunan	Persen	90	94	86	87,5	75
5	Jaringan kemitraan Pemkab dengan lembaga IPTEK	Lembaga	11	11	15	8	9
6	Frekuensi diseminasi hasil LITBANG	kali	4	3	2	3	0

Sumber: Bappelitbangda Kab. Purbalingga. 2022

B. Pengawasan

Disamping fungsi perencanaan dan litbang terdapat fungsi pengawasan untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Dalam kurun waktu 5 tahun, beberapa fungsi pengawasan mengalami kemajuan dimana untuk level Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menunjukkan kemajuan dimana level kapabilitas APIP berada pada level 3 dari tahun 2018 sampai 2021. Ketika level 3 telah dicapai berarti kemampuan APIP telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Level tersebut juga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk kinerja yang lebih baik.

Dilihat dari tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, nilai maturitas SPIP di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2017 s.d 2021 menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2017 skornya 1,898 kemudian meningkat menjadi 2,725 di tahun 2018.

Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 meningkat menjadi 3,0375. Interval skor tersebut menunjukkan tingkat maturitas “Terdefinisi”, dimana pada tingkat ini, Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian tersebut dapat berdampak bagi pencapaian tujuan organisasi.

Diantara 5 unsur SPIP yang terdiri dari: Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan, yang menjadi kelemahan nilai SPIP di Kabupaten Purbalingga yaitu pada penilaian Unsur Kegiatan Pengendalian khususnya pada komponen pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Hal ini dikarenakan belum adanya bukti pendukung evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasi.

Pada tahun 2020, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, KPK melakukan kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) untuk *Monitoring Center of Prevention* (MCP) salah satunya di Kabupaten Purbalingga. Beberapa hal yang dimonitoring mulai *e-budgeting*, *e-planning* dan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), penangangan aset, termasuk pengadaan barang harus lelang dan lainnya. Pencapaian nilai MCP Korsubgah Kabupaten Purbalingga yaitu 73,35. Beberapa kondisi realisasi kinerja terkait dengan urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.92. Kinerja Urusan Pengawasan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	unit	113	144	120	125	84
2	Persentase penanganan kasus/khusus	persen	100	100	100	100	100
3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	persen	77	74,69	85,75	86,01	87,92
4	Level kapabilitas APIP	tingkat	2	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Kab. Purbalingga. 2022

C. Keuangan

Disamping fungsi pengawasan, fungsi penunjang pemerintahan yaitu keuangan. Dalam hal keuangan, Kabupaten Purbalingga menunjukkan kinerja yang baik dimana opini laporan keuangan sudah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Diharapkan pada masa yang akan datang kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah akan semakin meningkat sehingga dapat terus mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Beberapa kondisi realisasi kinerja terkait dengan urusan keuangan dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.93. Kinerja Urusan Keuangan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	persen	100	100	100	100	100
2	SKPD melaksanakan penata-usahaan aset sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	100
3	Pengiriman Laporan Keuangan sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	100
4	Ketetapan waktu pengiriman Laporan Aset sesuai ketentuan	persen	100	100	100	100	100
5	Persentase PBB yang terbanyak oleh wajib pajak	persen	105	105,95	105,67	100	100
6	Capaian PAD	persen	108	109,3	101,5	187,6	109

Sumber: *Bakeuda Kab. Purbalingga, 2022*

D. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kemudian dilihat dari fungsi kepegawaian sebagai penunjang urusan pemerintahan, dapat dilihat dari Indeks Profesionalisme ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalisme ASN di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2017 s.d 2020 mengalami peningkatan dan penurunan, dimana pada tahun 2017 sebesar 72 kemudian naik menjadi 74 pada tahun 2018. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 75,39 dan kembali turun menjadi 73,78 di tahun 2020. Beberapa rincian dimensi profesionalitas ASN Kabupaten Purbalingga mempunyai nilai sebagai berikut.

Tabel II.94. Indeks Profesionalitas ASN Per Dimensi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 - 2020

No	Dimensi Profesionalitas	2019		2020	
		Kategori	Nilai	Kategori	Nilai
1.	Kualifikasi		12,99		13,12
2	Kompetensi		32,38		30,61
3.	Kinerja		25,04		25,06
4.	Disiplin		4,799		4,99
Total		Sedang	75,39	Sedang	73,78

Sumber : *BKPPD Kab. Purbalingga, 2021*

Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal baik dari kualifikasi yaitu baik dalam hal pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, maupun berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan

memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Dalam pengelolaan data kepegawaian di Kabupaten Purbalingga, pada dasarnya sudah berbasis elektronik. Namun secara komprehensif belum dilakukan dengan sistem yang terintegrasi. Beberapa perkembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang telah dikembangkan di Kabupaten Purbalingga yaitu pada tahun 2016 dilaksanakan persiapan aplikasi Simpeg berbasis web, kemudian di tahun 2017 dilakukan *launching* perubahan Simpeg menjadi E-Kepegawaian. Kemudian pada tahun 2018 dilakukan penambahan sub menu pada E-personal dan di tahun 2019 dilakukan penambahan mednu biodata non PNS. Beberapa kondisi realisasi kinerja terkait dengan urusan kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut.

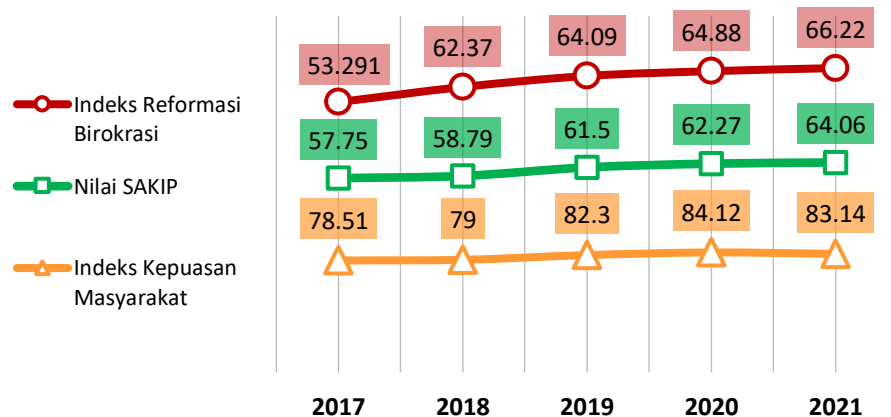
Tabel II.95. Kinerja Urusan Kepegawaian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase ASN mengikuti Diklat sesuai standar	persen	6,56	7,18	38,42	44,47	60
2	Persentase penempatan ASN sesuai formasi dan kompetensi	persen	89,00	96,00	96,00	89,00	99
3	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	persen	97,13	88,53	89,03	88,98	100
4	Persentase administrasi file kepegawaian yang terupdate	persen	65,00	70,00	75,00	80,00	100

Sumber: BKPPD Kab. Purbalingga. 2022

2.1.3.5 Unsur Pendukung Pemerintahan

Kemajuan fungsi penunjang pemerintahan juga dapat dilihat dari indikator lain yang menunjukkan pengelolaan pemerintahan yang profesional yaitu: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan indeks Reformasi Birokrasi (RB). Secara lebih rincinya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Setda Kab. Purbalingga. 2022

Gambar 2. 72. Capaian IKM, SAKIP dan IRB di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

IKM Kabupaten Purbalingga semakin meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 mencapai nilai 84,12, namun pada tahun 2021 sedikit menurun menjadi 83,14. Sedangkan untuk nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2017 nilai SAKIP baru mencapai nilai 57,75 (CC) kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 58,5 walaupun predikatnya masih CC. Kemudian menjadi B dengan nilai 61,50 pada tahun 2019, 62,27 pada tahun 2020 dan 64,06 pada tahun 2021. Nilai SAKIP B yang diperoleh Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai baik. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah menunjukkan hasil yang baik, namun masih memerlukan perbaikan.

Tabel II.96. Rincian Penilaian SAKIP Kab. Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30	18,88	19,15	20,02	20,14	21,14
2	Pengukuran Kinerja	25	12,24	12,39	13,26	14,10	14,57
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,32	10,60	9,95	10,10
4	Evaluasi Internal	10	5,27	6,06	6,21	6,37	6,53
5	Capaian Kinerja	20	11,31	10,86	11,41	11,37	11,72
Nilai Hasil Evaluasi		100	57,75	58,79	61,50	62,27	64,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC	CC	B	B

Sumber: Setda Kab. Purbalingga. 2022

Disamping itu nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Purbalingga mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan peningkatan. Mulai dari tahun 2017 dengan nilai 53,29 kemudian meningkat menjadi 60,67 pada tahun 2018, yang kemudian meningkat lagi menjadi 64,09 pada tahun 2019, 64,88 pada tahun 2020 dan 66,22 pada tahun 2021. Nilai tersebut mempunyai predikat cukup baik (Kategori B) dimana penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.

Tabel II.97. Rincian Penilaian IRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai			No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Nilai	
			2017	2018	2019				2020	2021
A	Komponen Pengungkit					A	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5	1,87	2,74	1,92	1	Pemenuhan	20	11,92	12,18
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,09	1,25	1,56	2	Hasil Antara Area Perubahan	10	5,27	6,22
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	1,32	3,01	3,09	3	Reform	30	14,74	15,76
4	Penataan Tatalaksana	5	2,16	2,21	2,91					
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	9,78	11,71	11,86					
6	Penguatan Akuntabilitas	6	1,82	3,11	3,31					
7	Penguatan Pengawasan	12	4,11	5,64	5,52					
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	2,12	3,64	3,05					
Total Komponen Pengungkit		60	25,26	33,30	33,22	Total Komponen Pengungkit		60	31,93	34,16
B	Komponen Hasil					B	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	7	8,23	8,23	1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	7,31	7,36
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	4,5	4,06	4,84	2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,78	8,31
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,62	5,74	6,25	3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	9,05	8,04
4	Opini BPK	3	3	3	3	4	Kinerja Organisasi	10	7,81	8,35
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	7,9	8,18	8,55					
Total Komponen Hasil		40	28,02	29,07	30,87	Total Komponen Hasil		40	32,95	32,06
IRB (Peningkit+Hasil)		100	53,29	62,37	64,09	IRB (Peningkit+Hasil)		100	64,88	66,22

Sumber: Setda Kab. Purbalingga. 2022

Tabel II.98. Kinerja Fungsi Penunjang Pemerintahan Lainnya di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SKPD Yang di evaluasi SOTK	OPD	19	0	4	4	0
2	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi	persen	107	100	106	100	100
3	Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	persen	98,87	94,18	94	98,65	99
4	Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	persen	100	98,72	96,80	99,26	100
5	Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	persen	5,01	10,54	14,71	15,92	20
6	Tingkat capaian target laba perusda (ribu rupiah)	Rp.000	27.948.558	31.285.026	35.714.216	35.714.216	7.403.219
7	Tingkat capaian target deviden perusda (ribu rupiah)	Rp. 000	17.478.131	21.406.072	20.642.144	21.682.472	18.439.443
8	Jumlah LKM berbadan hukum (unit)	unit	3	11	13	13	14
9	Tingkat kesesuaian Perdes dengan perundangan lebih tinggi	persen	100	100	90	100	95
10	Tingkat Keberhasilan pelaksanaan pilkades	persen	0	100	100	100	100
11	Persentase kecamatan yang menerapkan standar PATEN	persen	100	100	100	100	100
12	Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	persen	147	314	102	100	100
13	Persentase usulan Raperda yang disetujui	persen	69,6	86,67	57,14	52	100

Sumber : Setda dan Setwan Kab. Purbalingga, 2022

2.1.3.6 Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum yang menjadi fokus pembahasan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Secara umum bidang kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional. Angka konflik sosial di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 menurun disbanding dengan angka tahun 2020, dimana pada tahun 2021 sebesar 0,04 per 10.000 penduduk kemudian menjadi 0,067 per 10.000 penduduk. Beberapa kejadian konflik yang tercatat dan tertangani di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut.

Tabel II.99. Kejadian Konflik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Tanggal	Keterangan
1.	15 Januari 2021	Mediasi galian C Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon di pendopo Kecamatan Kemangkon
2.	20 Januari 2021	Penyampaian aspirasi galian C warga desa Selanegara Kecamatan Kejobong
3.	25 Januari 2021	Penolakan pembangunan pabrik beton (mini rateling plant) CV. Mandiri Rizky Rangka Teknik Beton warga perumahan Griya Perwira Desa Padamara Kecamatan Padamara karena sudah beroperasi
4.	1 Februari 2021	Mediasi Galian C Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon di aula balai desa Kemangkon
5.	24 Februari 2021	Mediasi penolakan warga Desa Jetis adanya PT Universal Fishing Gear Solution
6.	23 Desember 2021	Mediasi permasalahan dugaan penganiayaan verbal oleh Kepala Bagian kepada Karyawan PT Boyang antara LSM Garda Anak Bangsa dengan manajemen PT Boyang
7.	31 Desember 2021	Unjuk rasa Calon Perangkat Desa yang tidak lulus seleksi penjurangan perangkat desa di Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon

Sumber : Kesbangpol Kab. Purbalingga, 2022

Kondisi realisasi kinerja terkait pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.100. Kinerja Terkait Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	2.324	1.624	1.682	1.267	1.267
2.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pencegahan penggunaan NARKOBA	1.135	175	1.020	1.800	1.800
3	Partisipasi masyarakat dalam pemilu	NA	68,3	77,5	73,02	NA

Sumber : Kesbangpol Kab. Purbalingga, 2022

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan dan 15 kelurahan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah, perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan lebih dikenal dengan nama PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang merupakan proses pelayanan administrasi pada tingkat kecamatan mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen. Pelayanan tersebut dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan. Masyarakat setempat cukup menyerahkan berkas kepada petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat, dilaksanakan pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan yang ada di kecamatan. Namun tidak semua kecamatan melakukan pengukuran IKM, dikarenakan adanya keterbatasan SDM di kecamatan yang belum memahami terkait survey pengukuran kepuasan masyarakat. Beberapa hasil penilaian IKM yang dilaksanakan di 18 kecamatan baik yang dilakukan penilaian oleh bagian organisasi Setda Kabupaten Purbalingga maupun perhitungan mandiri kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.101. Hasil IKM Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-20201

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Bobotsari	80,25	81,83	78,97	84,62	NA
2.	Karangjambu	NA	NA	79,14	NA	NA
3.	Karangreja	NA	78,10	80,53	NA	NA
4.	Bojongsari	78,4	78,5	81,15	81,20	NA
5.	Kutasari	NA	NA	82,37	NA	NA
6.	Mrebet	80,68	82,15	82,15	90,02	NA
7.	Bukateja	82,5	83	83,63	83,7	NA
8.	Kejobong	NA	NA	83,69	NA	NA
9.	Kemangkong	NA	NA	85,64	NA	NA
10.	Kaligondang	NA	NA	82,80	NA	NA
11.	Rembang	NA	NA	82,03	NA	NA
12.	Pengadegan	NA	NA	81,30	NA	NA
13.	Kalimanah	82,03	82,05	82,76	82,06	81,30
14.	Purbalingga	NA	NA	80,69	NA	89,28
15.	Padamara	78	78,5	78,98	79,5	NA
16.	Karanganyar	78,62	79,84	80,72	81,64	NA
17.	Karangmoncol	NA	NA	77,81	NA	NA
18.	Kertanegara	81,83	85,84	79,01	84,62	NA

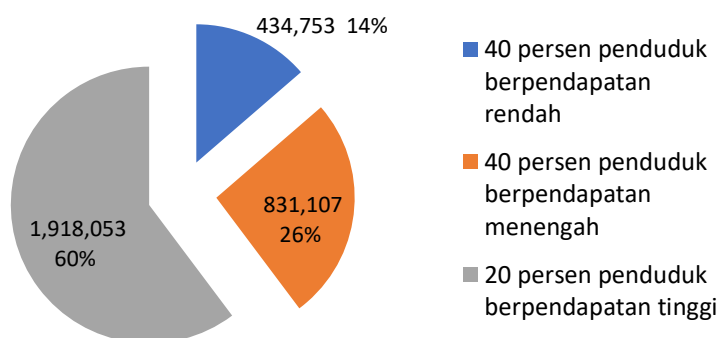
Sumber : Setda Bagian Organisasi dan Kecamatan di Kab. Purbalingga, 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Rata-Rata Pengeluaran Penduduk

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tercatat sebesar 900.102 rupiah. Secara rinci rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut distribusi pengeluaran di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga. 2022

Gambar 2. 73. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Distribusi Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Sedangkan dilihat dari rincian pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu tahun 2016 s.d 2019 pengeluaran penduduk untuk makanan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran penduduk untuk selain makanan. Tercatat pada tahun 2019 pengeluaran makanan sebesar 423.155 rupiah dan pengeluaran bukan makanan sebesar 409.763 rupiah. Pengeluaran makanan terbesar untuk makanan dan minuman jadi lainnya yaitu sebesar 147.144 rupiah. Namun pada tahun 2020 dan 2021, pengeluaran untuk bukan makanan lebih besar dibanding dengan makanan, dimana pada tahun 2021 pengeluaran bukan makanan sebesar 470.547 rupiah dan pengeluaran makanan sebesar 429.554 rupiah. Pengeluaran bukan makanan terbesar yaitu berupa perumahan dan fasilitas rumah tangga yang saat ini menjadi kebutuhan primer masyarakat. Perubahan pendapatan seseorang diharapkan akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan diharapkan semakin

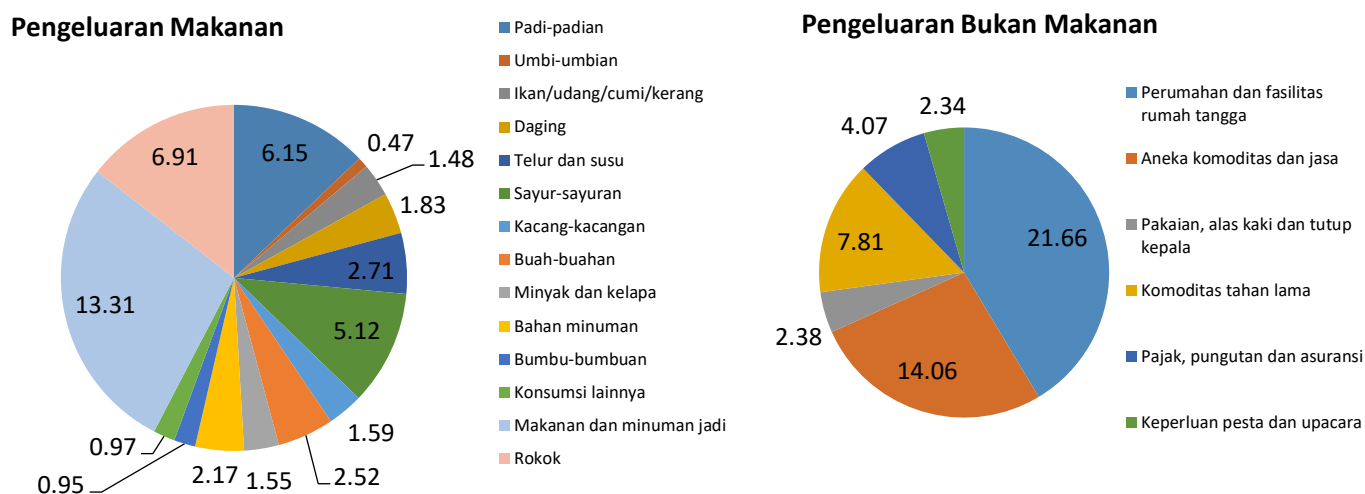
tinggi pengeluaran bukan makanan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Secara lengkap rata-rata perkapita pengeluaran sebulan menurut jenis pengeluaran Kabupaten Purbalingga tahun 2017 - 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.102. Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Makanan	387.634	471.634	423.155	430.508	429.554
Bukan Makanan	355.196	425.791	409.763	459.326	470.547
Jumlah	742.830	897.401	832.918	889.834	900.102

Sumber : BPS Kab. Purbalingga, 2022

Secara rinci untuk persentase pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas pada tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 74. Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Jaringan Jalan

Aspek daya saing daerah di bidang infrastruktur/fasilitas wilayah menunjukkan tingkat pencapaian daerah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat pada bidang sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Di sisi lain hal tersebut juga menunjukkan daya tarik daerah untuk investasi dilihat dari ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur.

Sejak tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pelebaran jalan kolektor primer antar ibukota

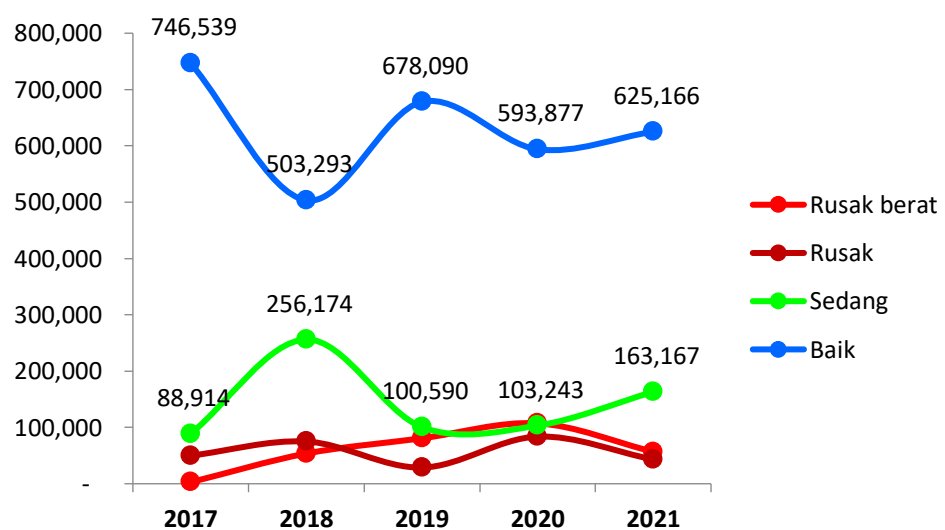
kecamatan dan untuk jalan-jalan strategis tertentu. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2021 mencapai 86,38. Adapun panjang jalan menurut kecamatan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel II.103. Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No	Kecamatan	Panjang Jalan
1.	Kemangkon	60.089
2.	Bukateja	61.219
3.	Kejobong	64.483
4.	Pengadegan	40.091
5.	Kaligondang	67.636
6.	Purbalingga	64.382
7.	Kalimanah	36.156
8.	Padamara	32.902
9.	Kutasari	47.760
10.	Bojongsari	42.306
11.	Mrebet	65.584
12.	Bobotsari	385
13.	Karangreja	44.077
14.	Karangjambu	32.857
15.	Karanganyar	38.090
16.	Kertanegara	19.460
17.	Karangmoncol	73.043
18.	Rembang	70.567
	Jumlah	888.087

Sumber: BPS Kab. Purbalingga. 2022

Sedangkan panjang jalan dilihat dari kondisinya, pada tahun 2021 sebagian besar jalan mempunyai kondisi jalan baik, masih ada beberapa ruas jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat yang memerlukan penanganan ke depannya.



Sumber : BPS Kab.Purbalingga, 2022

Gambar 2.75. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021

Secara rinci data kondisi jalan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.104. Jenis Perkerasan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2021

No.	Jenis Perkerasan	2019	2020	2021
1	Aspal/Penetrasi Macadam	869.027	780.793	837.498
2	Perkerasan Rigid/Beton	16.857	107.294	49.589
3	Tanah/Belum Tembus	2.203	0	1.000
	Jumlah	888.087	888.087	888.087

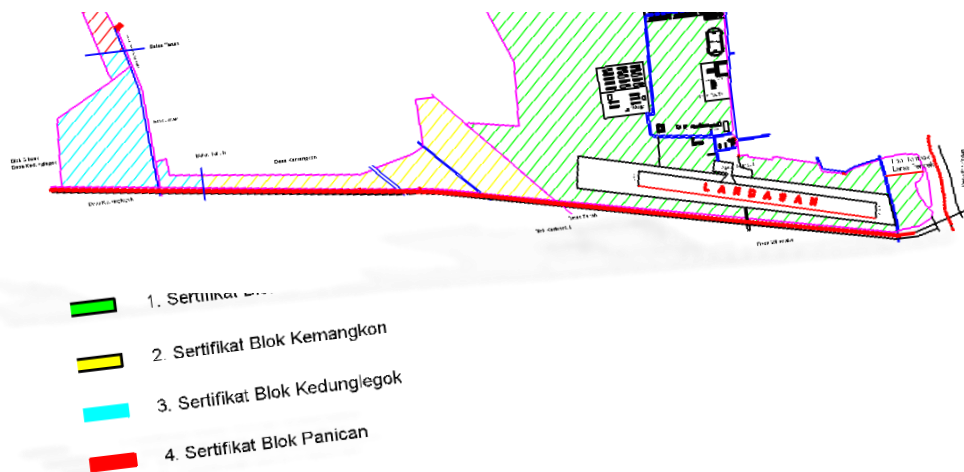
Sumber : BPS Kab.Purbalingga, 2022

B. Bandara Jenderal Besar (JB) Soedirman

Keberadaan Bandara JB Soedirman yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dapat menjadi “pengungkit” perkembangan ekonomi di wilayah Jawa Tengah bagian Tengah Barat. Target beroperasinya bandara pada tahun 2020 ini akan membuka peluang investasi yang seluas-luasnya. Beberapa manfaat dengan keberadaan bandara JB Soedirman yaitu kemudahan transportasi melalui jalur udara, terbukanya akses pintu tol Pemalang, serta rencana Reaktivasi jalur KA Purwokerto – Wonosobo menjadikan letak geografis Kabupaten Purbalingga menjadi sangat penting karena menjadi titik simpul pengembangan ekonomi wilayah Banyumas. Banyumas. Cilacap. Kebumen. Wonosobo. dan juga Pemalang.

Terkait pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman sebagai bandara sipil atau komersial selain fungsinya sebagai Pangkalan Udara TNI AU, aset tanah milik Lanud Jenderal Besar Soedirman yang digunakan berada di wilayah Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Kemangkon dengan luas keseluruhan 115,042 hektar yang keseluruhannya sudah bersertifikat. Rincian luas aset tanah tersebut yakni:

1. Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja dengan luas 86,573 hektar;
2. Desa Kedunglegok Kecamatan Kemangkon dengan luas 13,557 hektar;
3. Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon dengan luas 13,409 hektar; dan
4. Desa Panican Kecamatan Kemangkon dengan luas 1,513 hektar.



Sumber: Lanud Jenderal Besar Soedirman, 2018

Gambar 2. 76. Aset Lahan Lanud Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Keamanan dan Ketertiban

Salah satu pertimbangan bagi calon investor untuk berinvestasi adalah faktor keamanan dan ketertiban. Keamanan adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Adapun pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Keamanan dan ketertiban di Kabupaten Purbalingga ditunjukkan oleh angka kriminalitas. Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Purbalingga juga mengalami trend menurun, dimana angka kriminalitas pada tahun 2017 sebesar 2.46 persen, selanjutnya menurun pada tahun 2018 menjadi 1.77 persen, tahun 2019 menjadi 1.62 persen. Namun pada tahun 2020 angka kriminalitas naik menjadi 1.91 dan kemudian dapat turun menjadi 1,39 per 10.000 penduduk pada tahun 2021.

Tabel II.105. Perkembangan Kondisi Keamanan dan Kertertiban Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka kriminalitas	Angka	2,46	1,73	1,62	1,91	1,39
2	Jumlah kasus kriminalitas	Kasus	225	171	163	192	142
3	Jumlah kasus kriminalitas	Kasus	156	134	139	172	142

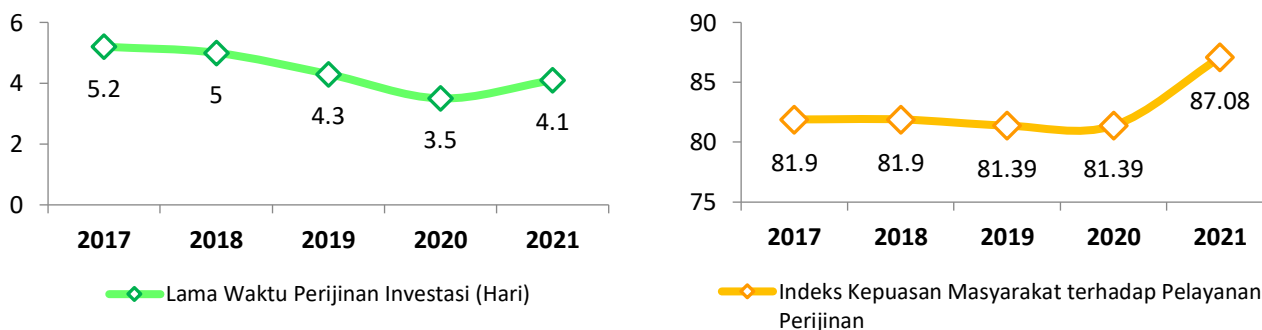
No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	yang ditangani						
4	Persentase kasus kriminalitas yang ditangani	Persen	69,33	78,36	85,27	89,58	100

Sumber: Satpol PP Kab.Purbalingga, 2022

B. Kemudahan Perijinan

Kemudahan perijinan dalam berinvestasi di Kabupaten Purbalingga dapat ditunjukkan pada lama waktu perijinan investasi dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan di Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga dikeluarkan kebijakan dengan pemberian kemudahan perijinan melalui perijinan terpadu satu pintu (PTSP) serta layanan perijinan secara online.

Perkembangan rata-rata lama waktu perijinan investasi dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lama waktu perijinan investasi semakin lama semakin baik, karena waktu perijinan yang semakin singkat akan lebih cepat perijinan berproses.



Sumber: DPMPTSP Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2.77. Perkembangan rata-Rata Lama Waktu Perijinan Investasi dan IKM Terhadap Pelayanan Perijinan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021

Berdasarkan data realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 dimana besarnya nilai investasi yaitu sebesar Rp 1.462.142.613.811 dapat dilihat bahwa beberapa sektor lapangan usaha dapat berinvestasi di Kabupaten Purbalingga. Realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 berdasarkan sektor lapangan usahanya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.106. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Sektor	Nilai Investasi (ribu rupiah)
1	Tanaman pangan dan perkebunan	8.830.092.536
2	Peternakan	12.588.156.810
3	Kehutanan	150.000.000

No.	Sektor	Nilai Investasi (ribu rupiah)
4	Perikanan	1.156.500.000
5	Pertambangan	7.513.050.000
6	Industri Makanan	29.579.347.352
7	Industri Tekstil	21.533.119.185
8	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	120.000.000
9	Industri Kayu	44.734.271.599
10	Industri Kertas dan Percetakan	4.589.525.060
11	Industri Kimia dan Farmasi	2.039.399.200
12	Industri Karet dan Plastik	4.132.470.318
13	Industri Mineral Non Logam	9.024.000.000
14	Industri Logam, Mesin dan Elektronik	1.899.000.000
15	Industri Instrumen Kedokteran Presisi Optik dan Jam	582.000000
16	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	2.465.000.000
17	Industri Lainnya	281.984.905.476
18	Listrik, Gas dan Air	21.793.278.462
19	Konstruksi	84.244.660.393
20	Perdagangan dan Reparasi	296.450.850.285
21	Hotel dan Restoran	136.497.766.564
22	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	216.707.551.476
23	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	59.952.093.774
24	Jasa Lainnya	213.575.575.321
JUMLAH		1.462.142.613.811

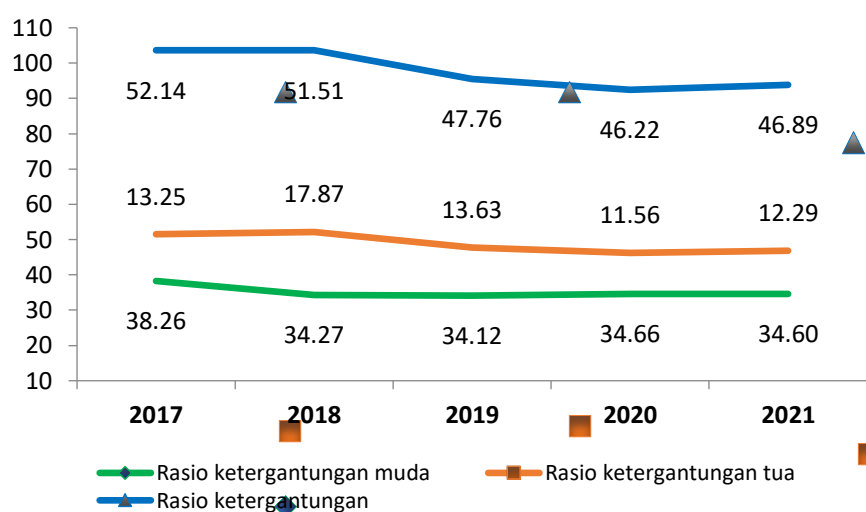
Sumber: BPS Kab. Purbalingga. 2022

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun+) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Selanjutnya akan semakin besar pula hambatan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami penurunan. Rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2020 sebesar 46.22 yang artinya diantara 100 orang penduduk produktif harus menanggung sekitar 46 orang penduduk tidak produktif.

Sedangkan untuk angka rasio ketergantungan muda dan rasio ketergantungan tua mengalami penurunan dan kenaikan. Bahkan rasio ketergantungan muda cenderung stag pada 3 tahun terakhir. Angka rasio ketergantungan muda lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan tua. Hal ini menunjukkan perlunya program-program pembangunan yang diprioritaskan untuk memperkecil rasio ketergantungan anak. misalnya penguatan program Keluarga Berencana (KB) dan program pendidikan untuk penduduk usia muda. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dindukcapil Kab. Purbalingga, 2022

Gambar 2. 78. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021

2.1.4.5 Inovasi Daerah

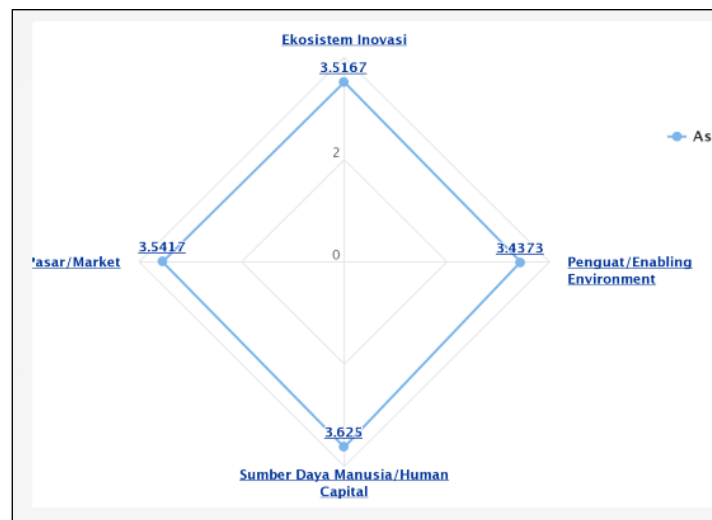
Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, peran pemerintah daerah dalam mengupayakan daya saing daerah menjadi sangat penting dan strategis. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi (1) keselarasan, dan (2) keserasian. Selaras dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Serasi dalam menyelenggarakan hubungan antar tingkat pemerintahan, baik antar daerah maupun antara pusat dan daerah. Sementara itu, instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pendanaan atas penyerahan urusan kepada daerah yang proporsional, adil, demokratis, dan transparan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal bermakna pada mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung pelayanan publik.

a. Peluang

Berdasarkan kondisi topografi dan geomorfologi, fisiografi Kabupaten Purbalingga terletak pada daerah perbatasan antara Zona Serayu Utara dan Zona Vulkanik Kwarter. Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 23 meter – 3.432 meter di atas permukaan laut, dengan klasifikasi ketinggian Kabupaten Purbalingga termasuk dalam klasifikasi antara 0 – 1.500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Purbalingga yang merupakan bagian dari wilayah Barlingmascakeb ini memiliki peluang dalam sektor agrominapolitan, pariwisata, industri pengolahan dan perdagangan jasa. Apalagi, Kabupaten Purbalingga juga memiliki potensi yang sangat besar pada aspek pasar dengan ketersediaan tenaga kerja usia produktif dan ukuran pasar menjadi faktor pendorong pembangunan Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki kekuatan pada aspek sumber daya manusia/human capital yang menunjukkan nilai indeks 3,625, aspek pasar/market yang menunjukkan nilai indeks 3,5417, aspek ekosistem inovasi yang menunjukkan nilai indeks 3,5167 dan aspek penguat/enabling environment yang menunjukkan nilai indeks 3,4372. Dapat dilihat dari masing-masing aspek tersebut Kabupaten Purbalingga memiliki gap/perbedaan yang tidak signifikan, artinya upaya yang dilaksanakan pada tahun 2021 guna memaksimalkan daya saing pada segala aspek berjalan optimal.

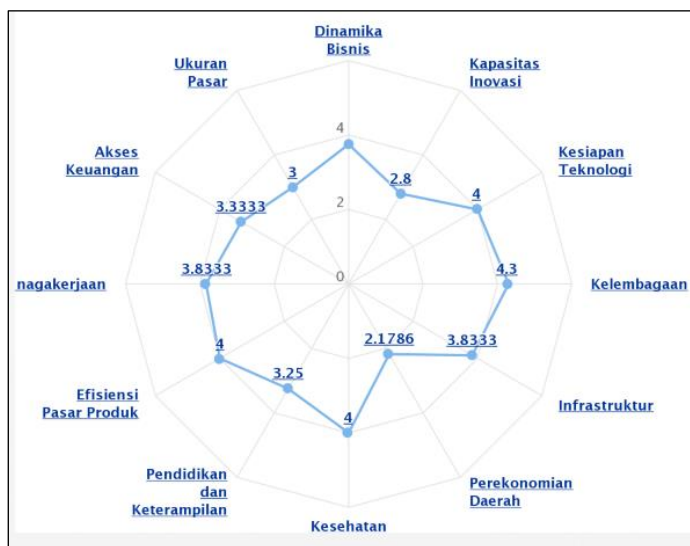


Sumber : Laporan Analisis IDSD Kab.Purbalingga, 2021

Gambar 2. 79. Daya Saing Daerah Berdasarkan Aspek

Selanjutnya, berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki kekuatan pada pilar kelembagaan yang menunjukkan nilai indeks 4,30, didukung dengan pilar kesiapan teknologi, pilar efisiensi pasar produk dan pilar kesehatan yang baik dengan nilai indeks semuanya 4,0. Pada tahun 2021 yang menjadi isu global salah

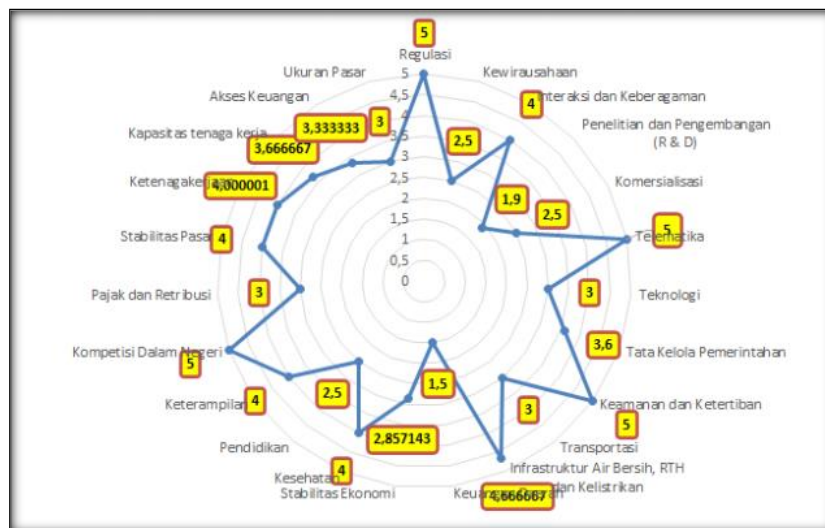
satunya yaitu pandemic covid-19, yang sangat berpengaruh dalam segala sektor, akan tetapi Kabupaten Purbalingga memiliki inovasi yang baik dan diinisiasi langsung oleh Bupati Purbalingga, Inovasi yang dimaksud yaitu 1 Kerjasama antara Pemkab dengan Alfamart dan Indomart untuk membantu pemasaran UMKM yang ada di Purbalingga, 2 Menggerakkan ASN untuk membela produk UMKM dengan membelinya, atau sering disebut BELA BELI UMKM Purbalingga, serta dalam sektor kesehatan juga berhasil mengendalikan penularan Covic-19 dengan berbagai cara.



Sumber : Laporan Analisis IDSD Kab.Purbalingga, 2021

Gambar 2. 80. Daya Saing Daerah Berdasarkan Pilar

Selanjutnya, dapat dilihat bahwa daya saing daerah berdasarkan dimensi yaitu dimensi regulasi, telematika serta keamanan dan ketertiban memperoleh nilai indeks maksimal sebesar 5,00. Kemudian dimensi infrastruktur air bersih, RTH dan kelistrikan memperoleh nilai indeks sebesar 4,66667 dan ada 5 dimensi yang memperoleh nilai indeks sebesar 4,00.



Sumber : Laporan Analisis IDSD Kab.Purbalingga, 2021

Gambar 2. 81. Daya Saing Daerah Berdasarkan Dimensi

b. Kendala

Aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah yang menjadi mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memerlukan aksi pelayanan publik yang handal dari ASN yang profesional dan berintegritas. Dalam pencapaian visi misi RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD dalam skala tahunan, tentunya tidak terlepas pada persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah adalah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan melihat pada kondisi riil saat perencanaan dibuat. Umumnya permasalahan pembangunan daerah timbul dari kekuatan (*strength*) yang dimiliki di daerah namun belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (*weakness*) yang tidak diatasi, peluang (*opportunity*) yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman (*threats*) yang tidak diantisipasi.

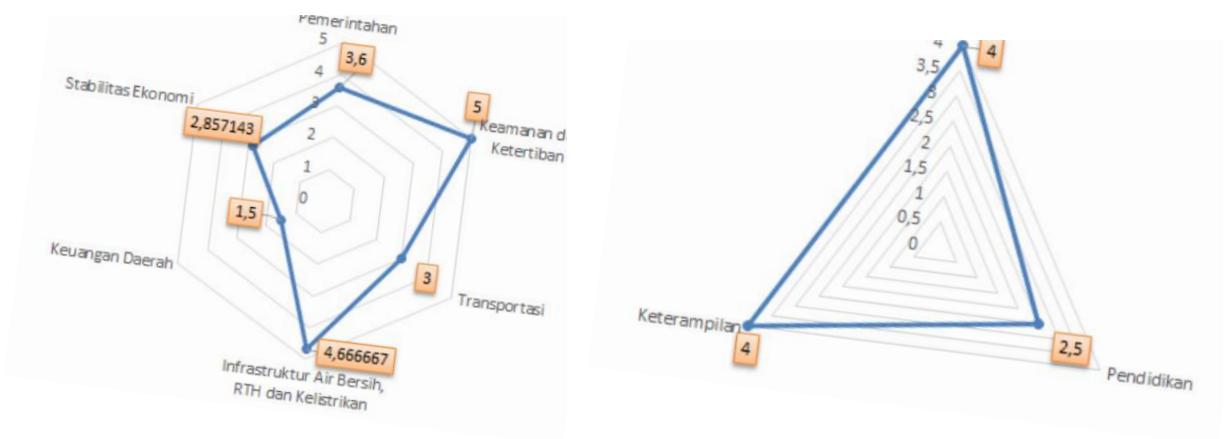
Berdasarkan kondisi demografi, struktur penduduk Kabupaten Purbalingga yang bekerja sebagai petani/pekebun sebesar 18,99% dari jumlah penduduk, disusul karyawan swasta sebanyak 11,51% dari penduduk Kabupaten Purbalingga dalam industri pengolahan. Era kemajuan teknologi dan era revolusi industri generasi ke-4 memberikan tantangan sekaligus ancaman bagi pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membangun ekonomi berbasis teknologi industri. Hal ini mengingat potensi SDM yang tinggi tidak didukung dengan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan nilai indeks dimensi pendidikan yang bernilai 2,50. Dimensi pendidikan adalah dimensi dengan nilai indeks terendah berdasarkan hasil pemetaan IDSD. Dimensi pendidikan juga terkait dengan PKBM di Kabupaten Purbalingga yang sebenarnya terdapat cukup banyak namun belum terdata/terdaftar dengan baik.

Selain hal tersebut Kabupaten Purbalingga juga masih belum memiliki peneliti untuk bidang kelitbangan yang terbukti pada dimensi penelitian dan pengembangan (R & D) seperti gambar dengan nilai indeks 1,90 yang masih jauh dari kata cukup. Tidak hanya masalah SDM untuk peneliti di bidang kelitbangan saja, unit-unit litbang di Kabupaten Purbalingga juga belum optimal karena belum memiliki jejaring atau yang biasa disebut Jaringan Penelitian (Jarlit). Seharusnya, Kabupaten Purbalingga merupakan Kabupaten yang mampu untuk mendongkrak dimensi R & D karena memiliki 24 PMA yang seharusnya sudah memiliki unit litbang dan satu perguruan tinggi, yaitu Universitas Perwira

Purbalingga.

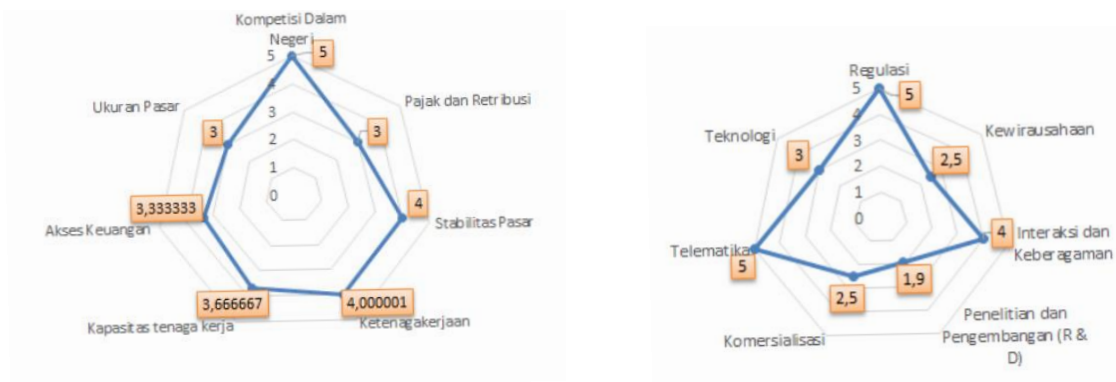
Selain itu, dalam hal keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat menjadi prioritas dikarenakan tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Meski demikian, tidak berarti bahwa urusan yang dimaksud tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai atau memenuhi standar layanan minimal bagi masyarakat.

Untuk dapat menciptakan daya saing daerah yang baik, perlu adanya pengoptimalan potensi. Hal ini seiring dengan pencapaian kesejahteraan dan juga pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dilihat dari hasil hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2021, Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai indeks **3,5303** yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 3,3297. Sektor-sektor andalan pembentuk Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten purbalingga dapat dilihat dari hasil pemetaan IDSD berikut ini:



Sumber : Laporan Analisis IDSD Kab.Purbalingga, 2021

Gambar 2. 82. Dimensi pada Aspek Faktor Penguat/Enabling Environment dan Aspek SDM/Human Capital



Sumber : Laporan Analisis IDSD Kab.Purbalingga, 2021
Gambar 2. 83. Dimensi pada Aspek Pasar/Market dan Aspek Ekosistem Inovasi

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pada aspek Sumber Daya Manusia dimensi/sector yang paling berpengaruh adalah sector kesehatan dan ketrampilan yang memperoleh nilai indeks sebesar 4,00. Selanjutnya, pada aspek pasar/market sector yang paling berpengaruh adalah sector kompetisi dalam negeri.

Pada aspek ekosistem inovasi, Kabupaten Purbalingga memiliki peluang yang baik dalam mengembangkannya. Hal ini dapat dilihat dari sector yang paling berpengaruh dalam aspek ini, yaitu sector regulasi dan telematika yang memperoleh indeks maksimal sebesar 5,00, di mana pada sector ini Kabupaten Purbalingga memiliki pola kerjasama, komunikasi, dan regulasi yang baik. Selain sector tersebut, aspek ekosistem inovasi juga dipengaruhi oleh sector interaksi dan keberagaman, karena Kabupaten Purbalingga sudah memiliki Roadmap SIDA yang sudah terintegrasi dengan RPJMD dan lengkap dengan rencana aksi serta sudah terbentuk klaster inovasi. Terakhir, pada aspek Penguat/Enabling Environment, sector yang paling berpengaruh adalah sector Keamanan dan Ketertiban serta Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Komponen dari IDSD sendiri ada 4 Aspek, 12 Pilar, 23 Dimensi, dan 97 Indikator. Berdasarkan hasil penilaian IDSD tahun 2021, berikut merupakan urutan pilar yang memiliki pengaruh terhadap IDSD Kabupaten Purbalingga.

Tabel II.107. Daya Saing Daerah Berdasarkan Pilar

No.	Pilar	Indeks	Median
1	Kelembagaan	4,3000	3,7917
2	Efisiensi Pasar Produk	4,0000	3,7917
3	Kesiapan Teknologi	4,0000	3,7917
4	Kesehatan	4,0000	3,7917
5	Ketenagakerjaan	3,8333	3,7917
6	Infrastruktur	3,8333	3,7917
7	Dinamika Bisnis	3,7500	3,7917
8	Akses Keuangan	3,3333	3,7917
9	Pendidikan dan Keterampilan	3,2500	3,7917
10	Ukuran Pasar	3,0000	3,7917
11	Kapasitas Inovasi	2,8000	3,7917
12	Perekonomian Daerah	2,1786	3,7917

Sumber : Laporan Analisis IDSD Kab.Purbalingga, 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat urutan pilar yang memiliki pengaruh besar terhadap IDSD Kabupaten Purbalingga. Median menunjukkan nilai tengah atau salah satu ukuran pemusatan data. Terlihat ada 6 pilar yang melebihi median, yang berarti pilar-pilar tersebut sudah cukup baik namun masih perlu peningkatan untuk hasil akhir IDSD. Sementara itu, untuk 6 pilar lain yang masih memiliki nilai di bawah median berarti masih diperlukan upaya keras Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya. Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu dengan menggupayakan dan menjalankan Program dan Kegiatan Unggulan yang akan menjadi prioritas saat pembahasan APBD Perubahan Tahun 2022.

Tahun 2021 ini Kabupaten Purbalingga sedang menjalankan tahapan keempat (Tahap Terwujudnya Daya Saing SIDA Kabupaten Purbalingga) yang merupakan tahap terakhir dari proses Pemantapan Kapasitas SIDA. Arah pengembangan pada tahapan keempat ini adalah terciptanya arah dan kondisi indikator pembangunan daerah yang kondusif dalam menjawab berbagai tantangan yang ada. Hal tersebut akan terlihat dari semakin luasnya wilayah pengembangan, mantapnya produksi dan kualitas berbagai usaha masyarakat, kemampuan penyesuaian dengan berbagai tuntutan global, dan perluasan cakupan bidang-bidang baru yang mampu dikembangkan secara inovatif baik pada organisasi pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha.

- a. Penciptaan Daya Saing Unsur Kelembagaan bagi Inovasi Pembangunan
- b. Penciptaan Daya Saing Jejaring bagi Inovasi Pembangunan
- c. Penciptaan Daya Saing Kesumberdayaan Bagi Inovasi Pembangunan

Dalam mewujudkan penciptaan daya saing diatas, pada tahap keempat ini Aspek Kewirausahaan berbasis teknologi (Teknopreneur) menjadi ujung tombak tercapainya Program Penguatan Daya Saing Daerah. Oleh sebab itu, masyarakat perlu senantiasa didorong agar semakin menunjukkan prospek pengembangan dan

keuntungan yang semakin mantap. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai penyesuaian atas berbagai tantangan dan tuntutan dalam persaingan global. Lebih jauh, Hal tersebut akan dilakukan melalui upaya pencapaian 4 pilar prakarsa utama dan 3 pilar tematik SIDA Kabupaten Purbalingga yang disinergikan dalam 6 elemen Kerangka Kebijakan Inovasi sebagai berikut:

- a. Pilar Prakarsa Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- b. Pilar Prakarsa Pengembangan Klaster Industri
- c. Pilar Prakarsa Pengembangan Jaringan Inovasi
- d. Pilar Prakarsa Pengembangan Teknopreneur
- e. Pilar Tematik Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi Daerah
- f. Pilar Tematik Pengembangan Pelayanan Dasar dan Tatanan Sosial Masyarakat
 1. berbasis Inovasi Daerah
- g. Pilar Tematik Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Potensi Unggulan Berbasis Inovasi Daerah

Kabupaten Purbalingga menjalin hubungan baik dengan lembaga pemerintah, akademi, bisnis, dan komunitas. Untuk lembaga pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat (LIPI, BPPT, Kemenpan-RB, Kemendagri, BRIN, dll), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Seluruh OPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Untuk Lembaga akademi, Kabupaten Purbalingga selalu menjalin komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Banyumas dan Purbalingga yaitu Universitas Perwira Purbalingga yang sudah dilakukan komunikasi lebih lanjut. Untuk lembaga bisnis, Kabupaten Purbalingga selalu berkoodinasi dengan beberapa perusahaan di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, untuk komunitas, Kabupaten Purbalingga memiliki banyak komunitas, baik dari seni grafis, seni tari, kelompok peneliti muda, dan lain sebagainya.

Kabupaten Purbalingga juga memiliki Tim Koordinasi yang diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 130/59.1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga Periode 2016-2020 dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Selaku Ketua Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 Nomor 130/1366 Tahun 2016 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020.

2.2 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Program

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja program RKPD terhadap RPJMD sampai dengan triwulan IV tahun 2021. Pelaksanaan indikator kinerja program tahun 2021 didasarkan pada indikator program dalam RPJMD Kab. Purbalingga tahun 2016-2021, dimana pelaksanaan tahun 2021 merupakan tahun terakhir RPJMD Kab. Purbalingga. Hasil evaluasi kinerja program tersebut ditunjukkan dengan capaian indikator program berdasarkan urusan.

2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

Capaian kinerja program pada urusan pendidikan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini.

Tabel II.112.

Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pengelolaan Pendidikan								
1	APK PAUD	%	57.7	100	100	164.71	164.71	◆
2	Cakupan Guru PAUD memenuhi kualifikasi	%	34.5	43	43	54.36	126.40	◆
3	APK SD/Sederajat	%	108.89	110	110	112.32	102.11	◆
4	APK SMP/Sederajat	%	90.98	100.3	100.3	136.80	136.391	◆
5	APM SD/ sederajat	%	99.71	93.5	93.5	100.03	106.982	◆
6	APM SMP/ sederajat	%	69.3	72.5	72.5	115.33	159.075	◆
7	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip manajemen berbasis Sekolah	%	100	100	100	100	100.00	●
8	Persentase akreditasi PAUD	%	30	45	45	74	164.44	◆
9	Persentase akreditasi SD/Sederajat	%	22	45	45	94.33	209,61	◆
10	Persentase akreditasi SMP/ sederajat	%	80	85	85	98.31	115,65	◆
11	Cakupan capaian SPM :SD/ sederajat	%	83.96	98.04	98.04	100	101,9	◆
12	Cakupan capain SPM: SMP/ sederajat	%	76.84	90.52	90.52	115	127,04	◆
13	Persentase angka kelulusan : SD/ sederajat	%	99.75	100	100	99.98	99.98	●
14	Persentase angka kelulusan SMP/ sederajat	%	99.96	100	100	100	100	●
15	% angka melanjutkan: SD/ sederajat	%	98.2	86.07	86.07	100	116.18	◆
16	% angka melanjutkan: SMP/ sederajat	%	96.98	84.29	84.29	82.3	97,64	●
17	% angka putus sekolah : SD/ sederajat	%	0.24	0.17	0.17	1.04	16.35	▼
18	% angka putus sekolah SMP/ sederajat	%	0.61	0.69	0.69	0.97	71.13	▶

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
19	% angka mengulang:SD/ sederajat	%	3.76	4.8	4.8	1.66	288.16	●
20	% angka mengulang : SMP/ sederajat	%	0.21	0.2	0.2	0.26	76,92	●
21	Indek integritas UN	%	90	96	96	0	0	▼
22	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	%	40	100	100	25	25.00	▼
23	Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	%	11	100	100	38.89	38.89	▼
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
24	Persentase sertifikasi pendidik	%	56.93	100	100	80.04	80.04	●
25	Jumlah pendidik/tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	1	8	8	2	25	▼
26	Persentase tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan minimal D.IV/S.1	%	74.93	100	100	78.56	78.5	●
27	Persentase pendidik lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	75.84	100	100	0	0	▼

Ket : ◆ : *Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)*

● : *Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))*

▶ : *Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))*

▼ : *Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))*

Sumber : Dindikbud Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pendidikan tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 program dan 27 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 13 indikator telah tercapai melebihi target, 7 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, 1 indikator tercapai memenuhi target dengan persyaratan minimal dan 6 indikator tidak tercapai.

Beberapa indikator program tidak tercapai karena sudah tidak dilaksanakan lagi di tahun 2021 seperti Indeks integritas UN yang tahun 2021 sudah tidak dilaksanakan lagi sehingga tidak tersedia data mengenai indeks integritas UN. Uji Kompetensi Guru juga tidak dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga tidak ada guru yang lulus uji kompetensi karena memang tidak ada yang mengikuti UKG.

B. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

Capaian kinerja program berdasarkan indikator program pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel II.113.
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat								
1	Angka Kesakitan (morbiditas)	%		<20	<20	0	100.00	●
2	Angka Kematian Ibu	per 1000 kelahiran hidup	135.78	11.65	11.65	191.64	0.06	▼
3	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	10.06	9.2	9.2	9.72	0.95	▼
4	Angka Kematian Balita	per 1000 kelahiran hidup	11.81	110	110	11.64	9.45	▼
5	Jumlah Puskesmas perawatan	Unit	11	13	13	11	84.62	●
6	Jumlah Puskesmas mampu bersalin	Unit	12	22	22	17	77.27	▶
7	Jumlah Puskesmas poned	Unit	5	7	7	6	85.71	●
8	Jumlah RS Poned	Unit	1	2	2	1	50.00	▼
9	Jumlah Puskesmas terakreditasi	Unit	22	22	22	22	100.00	●
10	Jumlah RS terakreditasi	Unit	3	3	3	6	200.00	◆
11	Cakupan BLUD pada Fasilitas Pelayan Kesehatan Pemerintah	Unit	1	23	23	23	100.00	●
12	Cakupan Puskesmas terakreditasi	%	100	100	100	100	100.00	●
13	Cakupan Rumah Sakit terakreditasi	%	100	100	100	100	100.00	●
14	Cakupan pelayanan perijinan/registrasi kesehatan	%	100	100	100	100	100.00	●
15	Cakupan pemanfaatan SIM pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	%	100	100	100	100	100.00	●
16	Prevalensi balita gizi kurang	%	3	2.5	2.5	2.99	83.61	●
17	Cakupan bayi dengan BBLR	%	5.3	5	5	6	83.33	●
18	Cakupan kecamatan bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100.00	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
19	Cakupan desa/kelurahan dengan konsumsi beryodium baik	%	100	100	100	100	100.00	●
20	Cakupan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100.00	●
21	Prevalensi malaria	per 1000 penduduk	0.04	0.04	0.04	0.016	250.00	◆
22	Case Notification Rate (CNR) TBC per 10.000	%	121.24	121.24	121.24	17.80	681.12	◆
23	Prevalensi HIV/AIDS	%	0.001	0.001	0.001	0.008	12.50	▼
24	Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani	%	54.5	54.5	54.5	100	183.49	◆
25	Angka penemuan kasus baru kusta	Ks	24	24	24	8	300.00	◆
26	Accute Flacid Paralysis (AFP)	per 100000 penduduk	4	4	4	1	400.00	◆
27	Incident Rate DBD per 10.000	per 100000 penduduk	27.4	27.4	27.4	1.80	1522.22	◆
28	Case Fatality Rate (CFR) DBD	%	2	0.5	0.5	0.56	89.29	●
29	Cakupan balita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100.00	●
30	Jumlah desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	%	100	100	100	100	100.00	●
8,5	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100.00	●
32	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100.00	●
33	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	%	72.12	100	100	78.91	78.91	●
34	Jumlah layanan rawat jalan Puskesmas	Orang/hari	91	871750	871750	0	0.00	▼
35	Bed Occupancy Ratio (BOR)	%	50.97	80	80	11.59	14.49	▼
36	Net Death Rate (NDR)	%	0.7	10	10	4.51	221.73	◆
37	Gross Death Rate (GDR)	%	0.6	20	20	9.88	202.43	◆
38	Length Of Stay (LOS)	hari	0	9	9	44.63	20.17	▼

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
39	Turn Over Interval (TOI)	hari	2.69	3	3	26.98	11.12	▼
40	Bed Turn Over (BTO)	kali	66.6	50	50	64.71	129.42	◆
41	Jumlah layanan rawat jalan Rumah Sakit	Orang/bln	119	91250	91250	103042	112.92	◆
42	Bed Occupancy Ratio (BOR)	%	80.09	80	80	61.26	76.57	●
43	Net Death Rate (NDR)	%	17.7	10	10	29.06	34.41	▼
44	Gross Death Rate (GDR)	%	29	20	20	78.37	36.91	▼
45	Length Of Stay (LOS)	hari	0	9	9	3.87	232.56	◆
46	Turn Over Interval (TOI)	hari	2.11	3	3	3.04	98.68	●
47	Bed Turn Over (BTO)	%	68.94	50	50	7.85	15.69	▼
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan								
48	Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi	%	100	100	100	91.7	91.70	●
49	Cakupan pelatihan tenaga kesehatan	%	100	100	100	100	100.00	●
50	Rasio dokter umum per jumlah penduduk	per 100.000 penduduk	10.51	40	40	17.1	42.75	▼
51	Rasio dokter spesialis per jumlah penduduk	per 100.000 penduduk	4.92	6	6	10.1	168.33	◆
52	Rasio tenaga paramedis per jumlah penduduk	per 100.000 penduduk	83.66	118	118	124.5	105.51	◆
53	Rasio bidan per jumlah penduduk	per 100.000 penduduk	51.45	77	77	71.3	92.60	●
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman								
54	Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	60	100	100	75	75.00	▶
55	Persentase ketersediaan obat generik dan esensial sesuai standar dan kebutuhan	%	80	95	95	75	78.95	●
56	Cakupan pengawasan peredaran obat	%	100	100	100	50	50.00	▼
57	Cakupan pemeriksaan makanan dan minuman yang diperdagangkan	%	100	100	100	50	50.00	▼
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan								
58	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	78.24	78.24	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
59	Cakupan kepemilikan jamban keluarga	%	74.1	90	90	79.55	88.39	●
60	Cakupan akses jamban keluarga	%	64.85	100	100	82.63	82.63	●
61	Cakupan desa memenuhi syarat kesehatan lingkungan	%	74.06	100	100	61.92	61.92	▼
62	Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	67.8	100	100	70.28	70.28	▶
63	Cakupan desa Open Defecation Free (ODF)	%	14	100	100	51.43	51.43	▼
64	Cakupan per rumah tangga ber PHBS	%	74.8	93	93	86.8	93.33	●
65	Cakupan Posyandu Mandiri	%	57.54	100	100	71.5	71.50	▶
66	Cakupan kepesertaan KB aktif	%	88.07	95	95	79.3	83.47	●
67	Cakupan rumah sehat	%	69.87	87	87	61.15	70.29	▶
68	Cakupan desa/kelurahan melakukan STBM	%	74.06	100	100	85.71	85.71	●
69	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	%	90.54	100	100	61	61.00	▼
70	Proporsi Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) yang memenuhi syarat	%	53.17	85	85	51.04	60.05	▼

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))

Sumber : Dinkes Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan kesehatan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 program dan 70 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 14 indikator telah tercapai melebihi target, 32 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, 5 indikator tercapai memenuhi target dengan persyaratan minimal dan 19 indikator tidak tercapai.

Kinerja program pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 yang dilakukan oleh OPD Dinas Kesehatan juga terpengaruh karena adanya pandemi

Covid-19. Beberapa kebijakan pemerintah pusat dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 bagi pemerintah kabupaten, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk penanganan bidang kesehatan dan kegiatan lain dalam rangka penanganan Covid-19. Dengan tambahan alokasi anggaran pada urusan kesehatan, diharapkan beberapa indikator program yang ada juga ikut meningkat untuk mencapai target yang diharapkan baik dalam hal pencapaian target dalam RPJMD maupun target dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Purbalingga.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel II.114.
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)								
1	Persentase bangunan pengairan dalam kondisi baik	%	38.5	40	40	56.67	141.68	◆
2	Jumlah bendung	Bh	179	184	184	230	125.00	◆
3	Jumlah irigasi	Bh	253	256	256	255	99.61	●
Program Penataan Bangunan Gedung								
4	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	30	60	60	60	100	●
5	Tersedianya produk hukum penataan bangunan dan lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	100	●
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya								
6	Persentase bangunan cagar budaya yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	●
Program Penyelenggaraan Jalan								
7	Persentase jalan kondisi mantap	%		82.15	82.15	88.77	108.06	◆
8	Penambahan jalan	m	784,233	826,186	826,186	888,087	107.49	◆
9	Jumlah jembatan	unit	273	275	275	287	104.36	◆
Program Pengembangan Jasa Konstruksi								
10	Persentase jasa konstruksi yang dibina	%		50	50	50	100.00	●
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
11	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah	Dokumen	1	1	1	1	100.00	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
12	Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan	%	100	100	100	92.22	92.22	●
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum								
13	Cakupan pelayanan air bersih (rumah tangga yang mengakses air bersih)	%	90	100	100	93.01	93.01	●
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional								
14	Persentase bangunan persampahan yang terbangun	%	80.25	100	100	93,13	93,13	●
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah								
15	Cakupan pelayanan sanitasi	%	80.25	100	100	93,18	93,18	●
16	Cakupan pengelolaan air limbah rumah tangga	%		100	100	93,18	93,18	●

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : DPU-PR dan Dinrumkim Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 8 program dan 14 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 4 indikator telah tercapai melebihi target dan 10 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan. Namun demikian untuk indikator Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Cakupan Pelayanan Sanitasi belum mencapai target universal 100 – 0 – 100.

Sedangkan untuk indikator Persentase Jalan Kondisi Mantap, meskipun melampaui target capaian namun masih banyak keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan kabupaten khususnya pada wilayah – wilayah yang dekat dengan pertambangan bahan Galian C.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja program pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel II.115.
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pengembangan Perumahan								
1	Persentase tercapainya SPM bidang perumahan	%		100	100	100	100	●
Program Kawasan Permukiman								
2	Persentase luasan kumuh perkotaan tertangani	%		100	100	100	100	●
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh								
3	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni	%		5.2	5.2	7.49	144.04	◆
4	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%		100	100	144.04	144.04	◆
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)								
5	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU	%		100	100	100	100	●

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja *tinggi* ($76 \leq 90$) dan *sangat tinggi* ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja *sedang* ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja *rendah* ($51 \leq 65$) dan *sangat rendah* (≤ 50))

Sumber : Dinrumkim Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan perumahan dan permukiman triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 program dan 5 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 2 indikator telah tercapai melebihi target dan 3 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja program pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terdapat di bawah ini.

Tabel II.116.
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum								
1	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani	%		100	100	100	100.00	●
2	Persentase penanganan pelanggaran K3	%		100	100	100	100.00	●
3	Intensitas sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	%		100	100	0	0.00	▼
Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik								
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%		60	60	91.67	152.78	◆
5	Tingkat waktu tanggap	%		75	75	57.33	76.44	●
6	Presentase aparaturn pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%		85	85	28.75	33.61	▼
7	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 liter pada WMK	%		90	90	83.33	92.59	●
Program Pembinaan Kehidupan Beragama								
8	Cakupan pelayanan korban bencana	%		100	100	100	100.00	●
9	Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	%		100	100	100	100.00	●

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 9 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 1 indikator telah tercapai melebihi target, sebanyak 6 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal dan 2 indikator tidak tercapai. Indikator-indikator tersebut diharapkan dapat mencapai target yang diharapkan pada akhir triwulan IV tahun 2021.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Capaian kinerja program pada urusan sosial sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.117.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pemberdayaan Sosial								
1	Cakupan LK3 yang dibina	%		100	100	100	100	●
2	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	%		100	100	56.3	56.3	▼
Program Rehabilitasi Sosial								
3	Cakupan PMKS yang terlayani	%		100	100	88.73	88.73	●
4	Cakupan penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	%		100	100	100	100.00	●
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial								
5	Persentase DTKS tervalidasi	%		80	80	212.16	265.20	◆
4	Persentase DTKS yang mendapatkan program bansos	%		100	100	143.75	143.75	◆
Program Penanganan Bencana								
7	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%		100	100	100	100	●
8	Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	%		100	100	100	100	●
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan								
9	Cakupan TMP yang terpelihara	%		100	100	100	100.00	●

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Dinsodalduk, KB dan P3A Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan sosial triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 program dan 9 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 2 indikator telah tercapai melebihi target, 6 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal dan 1 indikator tidak tercapai.

2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Capaian kinerja program pada urusan tenaga kerja sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.118.
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja								
1	Cakupan pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	%	1.6	2	2	3	150	◆
Program Penempatan Tenaga Kerja								
2	Cakupan pencari kerja yang ditempatkan	%	48	75	75	47.08	62.78	▼
Program Hubungan Industrial								
3	Prosentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar BPJS ketenagakerjaan	%		92	92	91.93	99.92	●
4	Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	%	85	90	90	100	111.11	◆
5	Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial	%	70	90	90	85.33	94.81	●
6	Rasio tenaga kerja terhadap upah sesuai UMK	%	79	95	95	96.40	101.47	◆

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))

Sumber : Dinnaker Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan tenaga kerja triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 6 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 3 indikator telah tercapai melebihi target, 2 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal dan 1 indikator tidak tercapai.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.119.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan								
1	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	orang	31,991	4,600	4,600	3,881	81.91	●
2	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta	orang	9	44,592	44,592	33,339	74.76	▶
3	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga politik	orang	5,219	15	15	10	66.67	▶
Program Perlindungan Perempuan								
4	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	8	100	100	100	100.00	●
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak								
5	Rekomendasi yang ditindaklanjuti	rekomendasi		5	5	1	20.00	▼
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)								
6	Cakupan desa/kelurahan layak anak	%		70	70	25	35.71	▼
Program Perlindungan Khusus Anak								
7	Cakupan anak yang mendapatkan perlindungan	%		100	100	100	100.00	●
8	Jumlah pekerja dibawah umur	orang	2,079	127	127	0	100.00	●

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Dinsodalduk, KB dan P3A Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 program dan 8 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 4 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, 2 indikator tercapai memenuhi target dengan persyaratan minimal dan 2 indikator tidak tercapai.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Capaian kinerja program pada urusan pangan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.120.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan								
1	Cakupan lumbung pangan masyarakat	%	25.1	30.13	30.13	3	9.96	▼
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat								
2	Angka konsumsi energi	kcal/kap/hari	1997.1	2,200	2,200	1957	90.45	●
3	Angka konsumsi protein	gr/kap/hari	55.19	71.81	71.81	53.89	76.95	●
4	Cakupan kecamatan rawan pangan yang tertangani	%	0	0	0	7	100.00	●
5	Cakupan desa rawan pangan yang tertangani	%	0	0	0	12	100.00	●
6	Skor pola pangan harapan (PPH)	angka	84.33	99.51	99.51	80.5	80.5	●
Program Penanganan Kerawanan Pangan								
7	Cakupan desa mandiri pangan	desa	0	0	0	0	0.00	▼
8	Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	ton setara beras	7.84	22.5	22.5	41	182.22	◆
Program Pengawasan Keamanan Pangan								
9	Persentase pangan aman yang beredar di masyarakat	%	87	99	99	90	90.91	●
10	Persentase pangan segar bersertifikat prima 3	komoditas	2	8	8	5	62.50	▼

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))

Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga, 2020

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pangan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 program dan 10 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 1 indikator telah tercapai melebihi target, 6 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal dan 3 indikator tidak tercapai.

D. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Capaian kinerja program pada urusan pertanahan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.121.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan								
1	Cakupan penyelesaian proses pengadaan tanah pemerintah daerah	%	50	90	90	8.3	9.22	▼
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee								
2	Cakupan penandaan tanah-tanah milik pemerintah daerah	%	50	100	100	40	40.00	▼
Program Penatagunaan Tanah								
3	Rasio tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat	%	50	100	100	76.69	76.69	●

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja *tinggi* ($76 \leq 90$) dan *sangat tinggi* ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja *sedang* ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja *rendah* ($51 \leq 65$) dan *sangat rendah* (≤ 50))

Sumber : Dinrumkim Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pertanahan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 3 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 1 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, dan 2 indikator tidak tercapai karena adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.

E. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Capaian kinerja program pada urusan lingkungan hidup sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.122.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
Program Perencanaan Lingkungan Hidup								
1	Persentase dokumen perencanaan dan informasi lingkungan yang diterbitkan	%		100	100	100	100.00	●
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka		67	67	71.66	106.96	◆
3	Indeks Kualitas Udara (minimal 84)	%	41.37	85	85	86.44	101.69	◆
4	Indeks Kualitas Air (minimal 55)	%	64.29	56	56	54.4	97.14	●
5	Indeks Tutupan Lahan (minimal 62)	%	40.23	63	63	73.94	117.37	◆
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)								
6	Persentase RTH Publik	%		5.68	5.68	5.68	100.00	●
7	Jumlah taman kota	Bh	10	12	12	11	91.67	●
8	Luas taman	Ha	4.57	5.37	5.37	4.89	91.06	●
9	Jumlah mata air yang dilindungi	Lokasi	8	13	13	13	100	●
10	Jumlah wilayah/desa yang telah memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Desa	2	8	8	8	100.00	●
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)								
11	Persentase izin rekomendasi pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	%		100	100	35.71	35.71	▼
12	Cakupan industri yang memiliki TPS B3	%		73.05	73.05	43.07	58.96	▼
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)								
13	Cakupan perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	%		781	150	180	120	◆
14	Cakupan penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan	%		180	180	180	100	●
15	Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran air sesuai persyaratan teknis	Perusahaan	20	32	32	32	100	●
16	Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus	Perusahaan	10	16	16	10	62.5	▼
17	Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL	Perusahaan	9	14	14	8	57.14	▼
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat								
18	Persentase bank sampah yang beroperasi	%		60	60	60	100.00	●

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
19	Persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	16	21	7	7	100	●
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat								
20	Persentase Sekolah Adiwiyata	%		38	38	51	134.21	◆
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup								
21	Prosentase penanganan aduan masyarakat	%		100	100	100	100.00	●
22	Cakupan aduan kasus lingkungan yang tertangani	%	100	100	100	100	100.00	●
23	Jumlah sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melanggar peraturan perundangan bidang lingkungan	%		0	0	0	0.00	▼
Program Pengelolaan Persampahan								
24	Persentase penanganan sampah	%		100	100	100	100.00	●
25	Persentase TPA/TPS3 yang terbangun	unit		2	2	3	150.00	◆
26	Persentase pengurangan timbulan sampah melalui bank sampah	%		2	2	2	100.00	●

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))

Sumber : DLH Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan lingkungan hidup triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 9 program dan 26 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 6 indikator telah tercapai melebihi target, 15 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, dan 5 indikator tidak tercapai.

Indikator yang tidak terpenuhi antara lain Persentase izin rekomendasi pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan, Cakupan industri yang memiliki TPS B3, Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus, Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL, Jumlah sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melanggar peraturan perundangan bidang lingkungan, secara umum

dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga banyak perusahaan yang tidak berjalan atau tidak berkembang.

Di sisi lain untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, meskipun bisa tercapai namun trend kualitas air ternyata terus menurun yang mengindikasikan pencemaran air sungai terus berlangsung. Perlu langkah nyata untuk mencegah degradasi lingkungan tidak semakin parah.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja program pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.123.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pendaftaran Penduduk								
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP el, KIA)	%		100	100	98.81	98.81	●
2	Cakupan kepemilikan KK	%		100	100	99.81	99.81	●
3	Cakupan kepemilikan KTP	%		100	100	98.41	98.41	●
Program Pencatatan Sipil								
4	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak, akte pengesahan anak)	%		100	100	97.99	97.99	●
5	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	%		100	100	87.94	87.94	●
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
6	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%		100	100	23.86	23.86	▼
Program Pengelolaan Profil Kependudukan								
7	Cakupan lembaga/instansi yang memanfaatkan profil data kependudukan dan agregatnya	%		100	100	100	100	●

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Dindukcapil Kabupaten Purbalingga, 2021


Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 program dan 7 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 6 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, dan 1 indikator tidak tercapai.


G. Urusan Pemeritahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Capaian kinerja program pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.


Tabel II.124.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Peningkatan Kerjasama Desa								
1	Cakupan desa yang difasilitasi kerjasama antar desa	%		100	100	53	53.00	▼
Program Administrasi Pemerintahan Desa								
2	Cakupan desa yang melaksanakan musrenbangdes tepat waktu	%	100	100	100	100	100.00	●
3	Cakupan desa/kelurahan yang menyusun profil desa secara tepat waktu	%	100	100	100	100	100.00	●
4	Cakupan desa yang memiliki BUMDes yang sehat	desa	17	18	18	130	722.22	◆
5	Cakupan desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tepat waktu	%	100	100	100	100	100.00	●
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat								
6	Rasio lembaga Rukun Tetangga (RT) yang aktif	RT	5081	5,081	5,081	5122	100.81	◆
7	Jumlah pasar desa yang dibina	desa	34	38	38	44	115.79	◆
8	Cakupan posyandu aktif	unit	1194	1,194	1,194	1230	103.02	◆
9	Cakupan lumbung desa sehat	unit	70	12	12	12	100.00	●
10	Rasio karang taruna aktif	desa dan kel	224/15	224 ds 15 kel	224 ds 15 kel	224 15	100.00	●
11	Rasio PKK desa/kelurahan aktif	desa dan kel	224/15	224 ds 15 kel	224 ds 15 kel	224 15	100.00	●
12	Cakupan BP-SPAM aktif	klp	30	10	10	125	1250.00	◆
13	Cakupan KPP sanitasi lingkungan aktif	klp	60	60	60	66	110.00	◆

Ket :  : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

 : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

 : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

 : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))









Sumber : Dinpermasdes Kab. Purbalingga ; data diolah

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 13 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 6 indikator telah tercapai melebihi target, 6 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, dan 1 indikator tidak tercapai.

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja program pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.125.
Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			Status Capaian
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	
Program Pengendalian Penduduk								
1	Tingkat penurunan laju pertumbuhan penduduk	%		<1	<1	1.58	158.00	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)								
2	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need KB)	%	51.99	9	9	10.66	84.43	
3	Drop Out KB	%	25	15	15	7.79	192.55	
4	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100.00	
5	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB		24	10	10	1	10.00	
6	Jumlah peserta KB aktif pria	Orang	5720	5250	5250	5192	98.90	
7	Persentase kelompok PIK remaja yang dibina	%	100	100	100	117	117.00	
8	Rasio petugas lapangan keluarga berencana atau penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) dibanding jumlah desa/kelurahan	rasio	1:6	1:1	1:1	1:6	108.20	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
9	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) dibanding jumlah desa/kelurahan	rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	100.00	●
10	Rasio sub PPKBD dibanding jumlah desa/kelurahan	rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	100.00	●
11	Persentase kelompok Prio Utomo yang dibina	%	100	100	100	100	100.00	●
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)								
12	Cakupan keluarga mengikuti UPPKS	% (KK)	8.01	13.61	13.61	10.7	78.62	●
13	Cakupan anggota UPPKS yang mengikuti KB	%	77.19	77.2	77.2	81.72	93.99	●
14	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa atau kelurahan	%	100	100	100	100	100	●
15	Bina keluarga balita	%	12.553	34.7	34.7	27.82	80.17	●
16	Bina keluarga remaja	%	9.959	25	25	27.37	109.48	◆
17	Bina keluarga lansia	%	9.159	86	86	90.61	105.36	◆
18	Cakupan anggota BKB ber KB	%	84.39	86.95	86.95	81.72	87.35	●

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja *tinggi* ($76 \leq 90$) dan *sangat tinggi* ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja *sedang* ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja *rendah* ($51 \leq 65$) dan *sangat rendah* (≤ 50))

Sumber : Dinsodalduk, KB dan P3A Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 18 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 6 indikator telah tercapai melebihi target, 11 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, dan 1 indikator tidak tercapai.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Capaian kinerja program pada urusan perhubungan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.126.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)								
1	Cakupan ruas jalan kolektor primer bermarka	M2	161	1,170	1,170	2,325	198.72	◆
2	Trafic light	Unit	24	2	2	2	100.00	●
3	Warning light	Unit	37	2	2	7	350.00	◆
4	Rambu penunjuk arah	Buah	156	4	4	14	350.00	◆
5	Rambu standar	Buah	995	100	100	50	50.00	▼
6	Guardraill	M2	3428	2500	500	0	0.00	▼
7	Paku Marka	Buah	460	100	100	100	100.00	●
8	Trafic cone	Buah	95	100	100	131	131.00	◆
9	Cakupan kendaraan angkutan umum yang laik operasi (lulus uji KIR)	buah	9,471	12,600	12,600	8,456	67.11	▶
10	Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal	%		177,035	177,035	22,364	12.63	▼
11	Jumlah penumpang terlayani angkutan	Org		100	100	100	100.00	●

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan perhubungan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 program dan 11 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 4 indikator telah tercapai melebihi target, 3 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, 1 indikator tercapai memenuhi target dengan persyaratan minimal dan 3 indikator tidak tercapai.

Indikator persentase kendaraan angkutan umum yang masuk terminal tidak tercapai karena terjadi perubahan 2 terminal besar di Purbalingga. Terminal Purbalingga menjadi terminal type B kewenangan provinsi sedangkan Terminal Bobotsari menjadi terminal type A kewenangan pusat.

Indikator rambu standar dan guardrail tidak terpenuhi mengingat sejak terjadinya pandemic Covid-19, anggaran diprioritaskan untuk menangani pandemi.

J. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja program pada urusan komunikasi dan informatika sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.127.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Informasi Dan Komunikasi Publik								
1	Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi	angka	500	1000	1000	1636	163.60	◆
2	Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah	Kec	10	18	18	18	100.00	●
3	Cakupan kelompok informasi masyarakat (KIM) ditingkat kecamatan	KIM	7	18	18	17	94.44	●
4	Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan Radio	kali	12	12	12	11	91.67	●
5	Cakupan kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal	kali	2	2	2	0	0.00	▼
6	Cakupan komunikasi dan kerjasama dengan media massa (cetak dan online)	kali	6	30	30	30	100.00	●
7	Cakupan kegiatan diseminasi informasi ke masyarakat melalui media massa	media	20	20	20	51	255.00	◆
Program Aplikasi Informatika								
8	Persentase SKPD yang memiliki website	angka	25	43	43	133	309.30	◆
9	Intensitas updating informasi pada website pemerintah daerah	hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	100	●
10	Cakupan sistem informasi manajemen (SIM) milik pemerintahan daerah yang berfungsi dan aktif	SKPD	26	43	43	43	100	●
11	Jumlah pelayanan publik secara online	web	1	15	15	224	1493.33	◆

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))

Sumber : Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan komunikasi dan informatika triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 program dan 11 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 4 indikator telah tercapai melebihi target, 6 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, dan 1 indikator tidak tercapai. Cakupan kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal dengan target 2 kali pertemuan tidak satupun mampu diselenggarakan. Target tidak terpenuhi karena selama pandemi tidak boleh menyelenggarakan pertemuan yang mengundang masyarakat (menimbulkan kerumunan).

K. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja program pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.128.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi								
1	Persentase koperasi aktif	%		73.5	73.5	73.5	100	●
2	Jumlah anggota koperasi	org	52,328	52,928	52,928	54,044	102.11	◆
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi								
3	Persentase koperasi yang sudah menerapkan Standar SAK	%		74	74	74	100.00	●
4	Jumlah koperasi sehat	unit	105	135	135	98	72.59	▶
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian								
5	Persentase SDM koperasi yang memiliki kompetensi bidang perkoperasian	%		25	25	25	100.00	●
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi								
6	Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya	%		7	7	7	100.00	●
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)								
7	Jumlah usaha mikro yang mandiri/berdaya	unit		5	5	7	140.00	◆
8	Pertambahan jumlah UMKM baru	unit		133,133	133,133	757	0.57	▼
9	Pertumbuhan UMKM berorientasi ekspor	unit	33	45	45	1	2.22	▼
Program Pengembangan UMKM								
10	Jumlah UMKM yang meningkat omsetnya	pelaku		4	4	5	125.00	▶
11	Jumlah UMKM yang sudah difasilitasi promosi dan pemasaran	unit	30	300	300	300	100.00	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
12	Cakupan UMKM yang difasilitasi melalui internet	unit	0	250	250	295	118.00	◆

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 6 program dan 12 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 3 indikator telah tercapai melebihi target, 5 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, 2 indikator tercapai memenuhi target dengan persyaratan minimal dan 2 indikator tidak tercapai.

L. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Capaian kinerja program pada urusan penanaman modal sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.129.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal								
1	Skor iklim usaha	poin		78.3	78.3	78.3	100.00	●
Program Promosi Penanaman Modal								
2	Jumlah kepeminatan investasi	unit		2	2	2	100.00	●
3	Pertumbuhan jumlah PMDN (baru)	Rp.(000)		800	800	3,288	411.00	◆
4	Pertumbuhan jumlah PMA (baru)	unit		2	2	6	300.00	◆
5	Pertumbuhan nilai investasi PMDN (baru/Rp.000)	Rp.(000)		750,000,000	750,000,000	722,436,428	96.32	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
6	Pertumbuhan nilai investasi PMA (baru/Rp.000)	Rp.(000)		20,000,000	20,000,000	490,320,012	2451.60	◆
7	Realisasi total investasi	unit		770,000,000	770,000,000	1,212,756,440	157.50	◆
Program Pelayanan Penanaman Modal								
8	Indeks pelayanan publik bidang investasi	poin		3.9	3.9	4.42	113.33	◆
9	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan	poin		82.25	82.25	87.08	100.30	◆
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								
10	Jumlah kepatuhan perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	jumlah		85	85	91	107.87	◆
11	Rata-rata jangka waktu proses perijinan	hari		4.2	4.2	4.1	97.62	●
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal								
12	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersaji secara update	%		10	10	12	120.00	◆
13	Jumlah ijin yang dilayani di DPMPSTSP (jenis)	jenis		24	24	29	120.83	◆

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : DMPTSP Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan penanaman modal dan perijinan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 program dan 13 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 9 indikator telah tercapai melebihi target, dan 4 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal.

M. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja program pada urusan kepemudaan dan olah raga sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.130.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan								
1	Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	kegiatan	6	24	24	9	37.50	▼
2	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	organisasi	6	14	14	7	50.00	▼
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan								
3	Cakupan kelompok/organisasi olahraga yang difasilitasi	organisasi	26	1	1	6	600.00	◆
4	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional	piagam	6	10	10	23	230.00	◆
5	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/provinsi	piagam		70	70	29	41.43	▼
6	Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi	kegiatan	26	45	45	14	31.11	▼
7	Cabor yang menjalankan kompetensi secara teratur dan terjadwal	cabor		26	26	14	53.85	▼
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan								
8	Organisasi kepramukaan yang dibina	kwardcab		1	1	1	100.00	●

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))

Sumber : Dinporapar Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan kepemudaan dan olah raga triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 8 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 2 indikator telah tercapai melebihi target, 1 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal dan 5 indikator tidak tercapai.

N. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada statistik sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.131.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral								
1	Cakupan ketersediaan data dasar pembangunan	%	100	100	100	70.78	70.78	▶

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan pada capaian indikator program pada urusan statistik triwulan IV tahun 2021 di atas, bahwa terdapat 1 program dan 1 indikator yang telah tercapai memenuhi target dengan persyaratan minimal.

O. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Capaian kinerja program pada urusan persandian sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.132.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Persandian

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisaasi (%)	Status Capaian
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi								
1	Cakupan informasi pemerintah daerah melalui SANTEL yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	100	100	60	60.00	▼

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan pada capaian indikator program pada urusan persandian triwulan IV tahun 2021 di atas, bahwa terdapat 1 program dan target 1 indikator dimana masih tidak mencapai target tahun 2021.

P. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Capaian kinerja program pada urusan kebudayaan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.133.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			Status Capaian
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	
Program Pengembangan Kebudayaan								
1	Cakupan kajian seni	%	68	68	68	0	0.00	▼
2	Cakupan fasilitasi seni	Buah	143	143	143	10	6.99	▼
3	Cakupan gelar seni	%	100	100	100	28	28.00	▼
4	Cakupan misi kesenian	%	100	100	100	0	0.00	▼
5	Cakupan sumber daya manusia kesenian	%	100	100	100	89	89.00	●
6	Cakupan tempat gelar seni	%	100	100	100	11	11.00	▼
Program Pembinaan Sejarah								
7	Cakupan organisasi kesejarahan yang dibina	%	307	307	307	0	0.00	▼
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya								
8	Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya	%	40	70	70	45	64.29	▼
9	Jumlah kunjungan museum dan monumen	orang	200807	300,000	300,000	901	0.30	▼
10	Jumlah cagar budaya	buah	298	360	360	292	81.11	●
11	Cakupan cagar budaya yang dikonservasi	situs	1	1	1	0	0.00	▼
Program Pengelolaan Permuseuman								
12	Rasio pengunjung museum dan monumen dibanding penduduk	%		300,000		0	0.00	▼

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Dindikbud Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan kebudayaan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 program dan 12 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 2 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal dan 10 indikator tidak tercapai. Banyaknya indikator program yang tidak memenuhi target karena selama pandemi tidak boleh menyelenggarakan pertemuan yang mengundang masyarakat (menimbulkan kerumunan).

Q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Capaian kinerja program pada urusan perpustakaan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.134.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pembinaan Perpustakaan								
Jumlah Perpustakaan								
1	Umum	Bh	2	2	2	1	50.00	▼
2	Desa/kel	Bh	56	239	239	156	65.27	▶
3	Sekolah/Madrasah	Bh	811	811	811	811	100.00	●
4	Pondok pesantren	Bh	2	18	18	15	83.33	●
5	Rumah Ibadah	Bh	4	50	50	27	54.00	▼
6	Khusus	Bh	2	12	12	10	83.33	●
7	Rasio perpustakaan per jumlah penduduk	%	0.00109625	0.1415	0.1415	0.0011	0.77	▼
8	Rasio pengunjung perpustakaan per jumlah penduduk	%	0.044858125	0.125	0.125	0.026	21.17	▼
Jumlah perpustakaan yang dibina :								
9	Umum	Bh	2	2	2	1	50.00	▼
10	Desa/kel	Bh	18	108	108	76	70.37	▶
11	Sekolah/Madrasah	Bh	38	518	518	148	28.57	▼
12	Pondok pesantren	Bh	1	8	8	3	37.50	▼
13	Rumah Ibadah	Bh	2	14	14	3	21.43	▼
14	Khusus	Bh	1	8	8	4	50.00	▼
Perpustakaan yang memenuhi standar								
15	Umum	Bh	1	1	1	1	100.00	●
16	Desa/kel	Bh	16	90	90	84	93.33	●
17	Sekolah/Madrasah	Bh	424	622	622	586	94.21	●
18	Pondok pesantren	Bh	2	18	18	3	16.67	▼
19	Rumah Ibadah	Bh	2	14	14	2	14.29	▼
20	Khusus	Bh	2	8	8	4	50.00	▼
21	Jumlah koleksi buku	Bh	49283	98283	98283	85734	87.23	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
	perpustakaan							
22	Jumlah judul buku perpustakaan	Bh	26857	41857	41857	43053	102.86	◆
23	Jumlah anggota perpustakaan berkartu	orang	10090	40000	40000	31766	79.42	●
24	Jumlah layanan perpustakaan keliling	Bh	160	520	520	171	32.88	▼
25	Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek perpustakaan	orang	380	900	900	760	84.44	●
26	Jumlah pustakawan bersertifikat kompetensi perpustakaan	orang	1	7	7	2	28.57	▼

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Dinarpus Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan perpustakaan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 program dan 26 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 1 indikator telah tercapai melebihi target, 9 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, 2 indikator tercapai memenuhi target diatas persyaratan minimal dan 14 indikator tidak tercapai.

R. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan kearsipan sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.135.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pengelolaan Arsip								
1	Cakupan SKPD/ormas/BUMD/ lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Unit	240	622	622	627	100.80	◆

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
2	Jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik (berkas)	Berkas	8,000	50000	50000	96,302	192.60	◆
3	Alih media Sistem Informasi Dokumen Masyarakat (SIDOMAS)	KK	289,295	59,659	59,659	40,641	68.12	▶

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Dinarpus Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan kearsipan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 program dan 3 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 2 indikator telah tercapai melebihi target dan 1 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal.


2.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan


A. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan


Capaian kinerja program pada urusan kelautan dan perikanan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.


Tabel II.136.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap								
1	Produksi ikan sungai	ton	240	230	230	271.9	118.22	◆
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya								
2	Produksi benih ikan	ekor	122.5	137000	137000	379,825	204.25	◆
3	Produksi ikan hias	ekor	689	980000	980000	15,805,410	1612.80	◆
4	Produksi ikan konsumsi	ton	4873	5293	5293	5,180.80	97.88	●
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan								
5	Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan	%		73	73	0	0	▼
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan								
6	Produksi olahan hasil perikanan	ton	2,500	3200	3200	554,429	17325.91	◆
7	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/tahun	10.5	12	12	29.39	244.92	◆

Ket :  : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

 : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

 : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

 : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))









Sumber : DKPP Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan kelautan dan perikanan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 program dan 7 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 5 indikator telah tercapai melebihi target, 1 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, dan 1 indikator tidak tercapai.

B. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Capaian kinerja program pada urusan pariwisata sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.137.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target 2019	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata								
1	Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi/dikembangkan	unit		4	4	13	325.00	
2	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa	4	27	27	27	100.00	
3	Penetapan TDUP yang terfasilitasi	Dokumen		25	25	3	12.00	
4	Sertifikasi usaha hotel dan pelaksana manajemen	Paket		10	10	0	0.00	
Program Pemasaran Pariwisata								
5	Angka kunjungan wisata	orang	1,579,000	2,979,000	2,979,000	1,070,529	35.94	
6	Jumlah/event pameran pariwisata yang diikuti	event		5	5	5	100.00	
7	Pendapatan daerah dari sektor pariwisata	rupiah		17,222,611,000	17,222,611,000	11,179,948,019	64.91	
8	Presentase kenaikan	%		120	120	36	29.90	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target 2019	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
	kunjungan wisata							
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif								
9	Jumlah pokdarwis yang dibina/dilatih	kelompok		1	1	3	300.00	◆
10	Cakupan Pokdarwis dan pelaku ekonomi kreatif yang dibina	%		15	15	6	36.67	▼

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Dinporapar Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pariwisata triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 10 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 2 indikator telah tercapai melebihi target, 2 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal dan 6 indikator tidak tercapai.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Capaian kinerja program pada urusan pertanian sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.138.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian								
1	Cakupan fasilitasi penanganan pasca panen produk pertanian, Jumlah power thresher	unit	937	1,050	1,050	1071	102,00	◆
2	Cakupan fasilitasi penanganan pasca panen produk pertanian, Jumlah alat pemipil jagung	unit	43	114	114	127	111,40	◆
3	Cakupan fasilitasi	unit	451	451	451	451	100,00	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
	penanganan pasca panen produk pertanian, Jumlah rice mill							
4	Penggunaan pupuk organik	ton	3,172	3572	3572	91,101	2550.43	◆
Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura								
5	Produksi padi	Ton	249,691	3,421	265,053	192,469	72.62	▶
6	Produksi jagung	Ton	39,339	78.721	41759	40,300	96.51	●
7	Produksi kedelai	Ton	221	4.092	235	444	188.92	◆
8	Ubi kayu	Ton	74,159	2,113	78,721	33,256	42.24	▼
9	Produksi kentang	Ton	3,855	486	4,092	6,155	150.42	◆
10	Kobis	Ton	3,223	764	3,421	12,499	365.36	◆
11	Wortel	Ton	1,990	607	2,113	8,667	410.18	◆
12	Produksi stroberi	Ton	458	8,033	486	871	179.22	◆
13	Cabai besar	Ton	719	4,003	764	1,547	202.49	◆
14	Cabai rawit	Ton	572	14,912	607	1,183	194.89	◆
15	Produksi buah duku	Ton	7,567	433	8,033	4,204	52.33	▼
16	Durian	Ton	3,771	5,071	4,003	4,669	116.64	◆
17	Pisang	Ton	14,048	760	14,912	15,831	106.16	◆
18	Nanas	Ton	408	13	433	266,471	61540.65	◆
19	Pepaya	Ton	4,777	614	5,071	2,461	48.53	▼
20	Manggis	Ton	716	186	760	1,272	167.37	◆
21	Kapulaga	Ton	12.16	13,432	12.91	2,887	22362.51	◆
22	Kopi	Ton	578	56,399	614	291	47.39	▼
23	Lada	Ton	175	59	186	191	102.43	◆
24	Kelapa Dalam	Ton	12,654	741	13,432	13,518	100.64	◆
25	Kelapa Deres	Ton	53,130	754	56,399	69,444	123.13	◆
26	Cengkeh	Ton	56	986	59	28	48.10	▼
27	Glagah Arjuna	Ton	698	134	741	415	55.99	▼
28	Nilam	Ton	710	1,050	754	277	36.68	▼
29	Tebu	Ton	929	114	986	362	36.76	▼
30	Karet	Ton	126	451	134	73	54.76	▼
31	Populasi ternak siap potong (sapi)	Ton	1,224	3,572	1,300.35	90,012	6922.13	◆
32	Populasi ternak siap potong (kerbau)	Ton	1.18	1,300.35	1.26	65	5131.35	◆
33	Populasi ternak siap potong (kambing)	Ton	277.26	1.26	294.4	1,704	578.69	◆
34	Domba	Ton	81.10	294.4	86.12	124	144.03	◆
35	Kelinci	Ton	0.77	86.12	0.82	363	44235.37	◆
36	Babi	Ton	3.75	0.82	0	0	100.00	●
37	Ayam Layer	Ekor	46,758	0	49,694	1,015,623	2043.75	◆
38	Ayam Broiler	Ekor	4,611,863	49,694	4,897,006	6,690,430	136.62	◆
39	Ayam Buras	Ekor	8,233,678	4,897,006	8,742,751	2,403,984	27.50	▼
40	Itik	Ekor	18,834	8,742,751	19,998	155,656	778.36	◆
41	Burung Puyuh	Ekor	9,555	19,998	10,146	155,924	1536.80	◆
42	Angsa	Ekor	72	10,146	77	6,164	8004.95	◆
43	Entog	Ekor	5,088	77	5,403	61,347	1135.43	◆

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhr RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
44	Merpati	Ekor	1,527	5,403	1,622	32,361	1995.11	◆
45	Produksi hasil peternakan (susu)	Liter	288,249	1.622	305,982	261,476	85.45	●
46	Produksi hasil peternakan (telur)	Ton	12,314	305,982	13,071	32,758	250.62	◆
47	Produksi olahan daging	Ton	429	13,071	456	446	97.81	●
48	Produksi olahan telur	Ton	92286	456	97,963	70,798	72.27	●
49	Produksi olahan susu	Liter	95849	97,963	101,746	96,104	94.46	●
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								
50	Prevalensi penyakit hewan	%	33.66	17.89	17.89	5	362.15	◆
51	Prevalensi penyakit zoonosis	%	8.55	4.54	4.54	0	986.96	◆
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian								
52	Cakupan lahan pertanian yang mengalami kekeringan yang tertangani	%		100	100	25	25.00	▼
53	Tingkat pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman)	%		100	100	100	100.00	●
Program Penyuluhan Pertanian								
54	Cakupan gapoktan yang terfasilitasi penyuluhan	%		97	97	100	103.09	◆

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pertanian triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 program dan 54 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 34 indikator telah tercapai melebihi target, 7 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, 2 indikator tercapai memenuhi target dengan persyaratan minimal dan 11 indikator tidak tercapai.


D. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan


Capaian kinerja program pada urusan perdagangan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.


Tabel II.139.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perdagangan


No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan								
1	Jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	unit		80	80	64	80.00	●
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan								
2	Jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	unit		10	10	10	100.00	●
3	Jumlah pasar tradisional yang memenuhi standar SNI	Pasar	0	3	3	0	0.00	▼
4	Cakupan pedagang kaki lima yang ditata dan diberdayakan	PKL	6	16	16	562	3515.50	◆
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting								
5	Persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	%		3	3	51	1700.00	◆
Program Pengembangan Ekspor								
6	Jumlah calon eksportir yang telah difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor	orang		90	90	0	0.00	▼
7	Jumlah eksportir	Perusahaan		29	29	2	6.90	▼
8	Jumlah/jenis barang yang diekspor	Produk	33	80	80	1	1.25	▼
9	Nilai ekspor (milyar)	Rp.		3,800,000,000,000	3,800,000,000,000	3,883,760,727,061	102.20	◆
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen								
10	Persentase pengawasan terhadap komoditas barang yang peredarannya diawasi	Komoditi		3	3	2	66.67	▶
11	Persentase sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	%		25	25	0	0.00	▼
12	Jumlah UTTP yang ditera dan	UTTP		32,000	32,000	5,273	16,48	▼

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
	ditera ulang							

Ket :  : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

 : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

 : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

 : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))






Sumber : Dinperindag Kabupaten Purbalingga, 2021


Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan perdagangan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 program dan 12 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 3 indikator telah melebihi target, 2 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal, 1 indikator tercapai memenuhi target dengan persyaratan minimal dan 6 indikator tidak tercapai.


E. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian


Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan perindustrian sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.


Tabel II.140.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri								
1	Kawasan/klaster industri yang terbangun	unit		4	4	1	25.00	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota								
2	Cakupan ijin usaha industri yang terfasilitasi	%		100	100	100	100.00	
3	Persentase fasilitasi HKI	%	100	100	100	100	100.00	
4	Persentase penerapan standarisasi produk Industri	%	100	100	100	100	100.00	
5	Persentase fasilitasi sertifikasi halal	%	100	100	100	0	0.00	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional								
6	Cakupan industri yang terdata dalam SIINAS	%		80	80	28	34.96	

Ket :  : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

 : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

 : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

 : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))

Sumber : Dinperindag Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan perindustrian triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 6 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 3 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal dan 3 indikator tidak tercapai.

F. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan transmigrasi sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.141.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi								
1	Jumlah Calon Transmigran yang difasilitasi	KK	2	15	15	0	0.00	▼

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Dinnaker Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan pada capaian indikator program pada urusan transmigrasi triwulan IV tahun 2021 di atas, bahwa terdapat 1 program dan target 1 indikator dimana belum terdapat progress capaian.

2.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.142.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka		82	82	83.14	101.39	◆
2	Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	SKPD	60	6	6	NA	NA	NA
3	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	poin	50.5	65	65	NA	NA	NA
4	Persentase kegiatan keprotokalan pemda yang difasilitasi	%		100	100	110	110.00	◆

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
5	Persentase penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan	%		100	100	100	100.00	●
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat								
6	Cakupan naskah kerjasama daerah yang difasilitasi	%		100	100	100	100.00	●
7	Persentase kecamatan yang menerapkan standar Paten	%	100	100	100	100	100.00	●
8	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	%	70	100	100	100	100.00	●
9	Tingkat kesesuaian perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	%	90	90	90	90	100.00	●
10	Tingkat Keberhasilan pelaksanaan pilkades	%	100	100	100	100	100.00	●
11	Tingkat fasilitasi kegiatan keagamaan	kegiatan	130	215	215	77	35.81	▼
Program Perekonomian Dan Pembangunan								
12	Cakupan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	%		100	100	NA	NA	NA
13	Jumlah LKM berbadan hukum (unit)	unit	4	224	224	14	6.25	▼
14	Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	%		100	100	100	100.00	●
15	Tingkat capaian target laba perusda (ribu rupiah)	rupiah	25,521,680	45,213,213	45,213,213	7,403,219	16.37	▼
16	Tingkat capaian target deviden perusda (ribu rupiah)	rupiah	12,299,895	22,334,772	22,334,772	18,439,443	82.56	●
17	Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	%	95	100	100	93.69	93.69	●
18	Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	%	94	100	100	99.19	99.19	●
19	Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	%	0.5	3	3	20	665.33	◆

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Setda Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada sekretariat daerah triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 19 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 3 indikator telah tercapai melebihi target, 10 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal dan 3 indikator tidak tercapai.

B. Sekretariat Dewan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada Sekretariat Dewan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.143.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Sekretariat Dewan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD								
1	Persentase Perda yang disetujui	%	100	100	100	100	100	●

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Setwan Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan pada capaian indikator program pada sekretariat dewan triwulan IV tahun 2021 di atas, bahwa terdapat 1 program dan target 1 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal.

2.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Urusan Perencanaan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan perencanaan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.144.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Perencanaan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
1	Tingkat pencapaian target kinerja sasaran pembangunan	%	80	100	100	75	75.00	●
2	Tingkat rekomendasi pengendalian dan evaluasi perencanaan yang ditindaklanjuti OPD	%		100	100	75	75.00	●
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
3	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	%		100	100	100	100.00	●
4	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	83.3	100	100	100	100.00	●

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
5	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	%	81.4	100	100	100	100.00	●
6	Tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	%	60	78	78	77.15	98.91	●

Ket : ◆ : *Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)*

● : *Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))*

▶ : *Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))*

▼ : *Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))*

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan perencanaan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 program dan 6 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal.

B. Urusan Keuangan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan keuangan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.145.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Keuangan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Pengelolaan Keuangan Daerah								
1	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	%		100	100	86.75	86.75	●
2	Ketetapan waktu pengiriman Laporan Keuangan sesuai ketentuan	%	90	100	100	100	100.00	●
3	Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	%	97	100	100	100	100.00	●
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah								
4	Rekomendasi kebijakan teknis keuangan bidang aset daerah	dokumen		5	5	5	100.00	●
5	Tingkat kesesuaian aset dengan laporan aset	%	87	100	100	100	100.00	●
6	Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan aset sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100.00	●
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah								
7	Persentase pertumbuhan pajak daerah	%		4	4	4.51	112.75	◆

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
8	Cakupan database wajib pajak yang valid	%		100	100	100	100.00	●
9	Capaian PAD	%		100	100	109.05	109.05	◆
10	Persentase PBB yang terbanyak oleh wajib pajak	%	100	100	100	101	101	◆

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Bakeuda Kab. Purbalingga ; data diolah

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan keuangan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 program dan 10 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 3 indikator tercapai melebihi target, dan 8 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal.

C. Urusan Kepegawaian

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan kepegawaian sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.146.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Kepegawaian

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Kepegawaian Daerah								
1	Persentase ASN yang mengikuti Diklat sesuai standar	%	100	100	100	60.29	60.29	▼
2	Persentase penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi	%	100	100	100	99.1	99.10	●
3	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	99.99	99.99	●
4	Persentase administrasi file kepegawaian yang terupdate	%	100	100	100	100	100.00	●

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : BKPPD Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan kepegawaian triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 program dan 3 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 3 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal dan 1 indikator tidak tercapai.

D. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan penelitian dan pengembangan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.147.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah								
1	Jumlah kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga Iptek	lembaga	7	7	7	9	128.57	◆
2	Frekuensi diseminasi hasil kelitbang	diseminasi	2	4	4	0	0.00	▼

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan penelitian dan pengembangan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 program dan 2 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 1 indikator telah tercapai melebihi target dan 1 indikator tidak tercapai.

E. Urusan Pengawasan

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada urusan pengawasan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.148.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Urusan Pengawasan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Penyelenggaraan Pengawasan								
1	Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil	%		65	65	72	110.37	◆

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
	ditarik							
2	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	obyek	105	548	548	84	15.33	▼
3	Persentase penanganan kasus/khusus	%	85	100	100	100	100.00	●
4	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100	100	100	87.92	87.92	●
5	Level kapabilitas APIP	level	2	5	5	3	60.00	▼
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi								
6	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	angka		1.75	1.75	2.34	133.71	◆
7	Nilai MCP Korsubgah	angka		72	72	84	116.67	◆

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja tinggi ($76 \leq 90$) dan sangat tinggi ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja sedang ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja rendah ($51 \leq 65$) dan sangat rendah (≤ 50))

Sumber : Inspektorat Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada urusan pengawasan triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 program dan 7 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 3 indikator telah tercapai melebihi target, 2 indikator tercapai memenuhi target di atas persyaratan minimal dan 2 indikator tidak tercapai.

2.2.6 Unsur Pemerintahan Umum

A. Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja berdasarkan indikator program pada kesatuan bangsa dan politik sampai dengan triwulan IV tahun 2021 terlihat pada tabel sebagaimana terlihat di bawah ini.

Tabel II.149.
Capaian Indikator Kinerja Program Pada Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan								
1	Penurunan kegiatan aksi massa bernuansa SARA	%		100	100	1.77	59.00	▼
2	Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan	Per 10.000		3	3	7.98	266.00	◆

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Akhir RPJMD 2016-2021	RKPD 2021			
					Target	Realisasi	Capaian Realisasi (%)	Status Capaian
	wawasan kebangsaan							
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik								
3	Cakupan masyarakat yang memperoleh pembinaan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Per 10.000		3	3	2.13	71.00	▶
4	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	%		100	100	N/A	N/A	N/A
5	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg	%		100	100	N/A	N/A	N/A
6	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres	%		100	100	N/A	N/A	N/A
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
7	Persentase ormas yang terbina	%		13	13	8.67	66.69	▶
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya								
8	Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi dan sosial budaya	%		3	3	4.44	148.00	◆
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial								
9	Cakupan masyarakat yang memperoleh pembinaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	%		3	3	5.05	168.33	◆

Ket : ◆ : Tercapai, melebihi target (dengan predikat kinerja >100)

● : Tercapai, telah memenuhi target di atas persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **tinggi** ($76 \leq 90$) dan **sangat tinggi** ($91 \leq 100$))

▶ : Tercapai, telah memenuhi target dengan persyaratan minimal (dengan predikat kinerja **sedang** ($66 \leq 75$))

▼ : Tidak tercapai, tidak memenuhi target (dengan predikat kinerja **rendah** ($51 \leq 65$) dan **sangat rendah** (≤ 50))

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja program pada kesatuan bangsa dan politik triwulan IV tahun 2021 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 5 program dan 9 indikator dimana seluruh indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut sebanyak 3 indikator telah tercapai melebihi target, 2 indikator tercapai memenuhi target dengan persyaratan minimal dan 1 indikator tidak tercapai.

Rekapitulasi capaian indikator program Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tercapai cukup baik dimana dari 464 total jumlah indikator program sebanyak 315 indikator atau sebanyak 68,32 % sudah tercapai dengan predikat tinggi.

Secara rinci rekapitulasi capaian indikator kinerja program Kabupaten Purbalingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.150. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Program Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Indikator	Indikator Tercapai				Indikator Tidak Tercapai	
				Tinggi (> 75 %)		Sedang (65 - 75 %)		Rendah (< 65 %)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pendidikan	2	27	20	74.07	1	3.70	6	22.22
2	Kesehatan	4	70	43	61.43	5	7.14	22	31.43
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	16	16	100.00	0	0.00	0	0.00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3	9	7	77.78	0	0.00	2	22.22
6	Sosial	5	9	8	88.89	0	0.00	1	11.11
7	Tenaga Kerja	3	6	5	83.33	0	0.00	1	16.67
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	8	3	37.50	2	25.00	3	37.50
9	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	18	17	94.44	0	0.00	1	5.56
10	Ketahanan Pangan	4	10	7	70.00	0	0.00	3	30.00
11	Pertanahan	3	3	1	33.33	0	0.00	2	66.67
12	Lingkungan Hidup	9	26	14	53.85	0	0.00	12	46.15
13	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	4	7	6	85.71	0	0.00	1	14.29
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	13	12	92.31	0	0.00	1	7.69
15	Perhubungan	1	11	7	63.64	1	9.09	3	27.27
16	Komunikasi dan Informatika	2	11	10	90.91	0	0.00	1	9.09
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6	12	9	75.00	1	8.33	2	16.67
18	Penanaman Modal	5	13	13	100.00	0	0.00	0	0.00

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Indikator	Indikator Tercapai				Indikator Tidak Tercapai	
				Tinggi (> 75 %)		Sedang (65 - 75 %)		Rendah (< 65 %)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
19	Kepemudaan dan Olahraga	3	8	3	37.50	0	0.00	5	62.50
20	Statistik	1	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00
21	Persandian	1	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00
22	Kebudayaan	4	12	2	16.67	0	0.00	10	83.33
23	Perpustakaan	1	26	10	38.46	2	7.69	14	53.85
24	Kearsipan	1	3	2	66.67	1	33.33	0	0.00
25	Kelautan dan Perikanan	4	7	6	85.71	0	0.00	1	14.29
26	Pariwisata	3	10	4	40.00	0	0.00	6	60.00
27	Pertanian	5	54	41	75.93	2	3.70	11	20.37
28	Perdagangan	5	12	5	41.67	1	8.33	6	50.00
29	Perindustrian	3	6	3	50.00	0	0.00	3	50.00
30	Transmigrasi	1	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00
31	Perencanaan dan Penelitian Pengembangan	2	6	4	66.67	2	33.33	0	0.00
32	Pengawasan	2	7	5	71.43	0	0.00	2	28.57
33	Keuangan	3	10	10	100.00	0	0.00	0	0.00
34	Kepegawaian dan Diklat	2	4	3	75.00	0	0.00	1	25.00
35	Penelitian dan Pengembangan	1	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00
36	Pemerintahan Lainnya	4	20	15	75.00	0	0.00	5	25.00
37	Pemerintahan Umum	5	6	3	50.00	2	33.33	1	16.67
	Jumlah	120	464	317	68.32	19	4.09	128	27.59

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2022

2.3 Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Tahun 2021

2.3.1 Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Dari 3 indikator SPM Bidang Pendidikan tersebut, yang sudah mencapai target 100% yaitu sebanyak 3 indikator sedangkan 1 indikator lainnya belum dapat tercapai. Secara rinci indikator SPM Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.106.
Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	124,93 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 15.884 • Realisasi pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 19.844 (124,93%); • Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp.22.599.033.150,- realisasi sebesar Rp.22.017.245.041,- (97,43%)
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	100,03 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Dasar sebanyak 84.211 • Realisasi pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Dasar sebanyak 84.235 (100,03%); • Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pendidikan Dasar, realisasi pencapaian sebesar Rp.103.210.120.475,- realisasi sebesar Rp.101.035.386.129,- (97,89%)
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	100 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan sebanyak 3.994 • Realisasi pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan sebanyak 3.994 (100%). • Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp.3.918.348.400,- realisasi sebesar Rp.3.530.027.600,- (84,16%)
	Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Warga Negara Usia 15 – 18 Tahun yang	100 %	115,33 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Pendidikan Menengah sebanyak 33.068; • Realisasi pencapaian pelayanan dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				Pendidikan Menengah sebanyak 38.137 (115,33%); <ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pendidikan Menengah Pertama sebesar Rp.71.430.874.514,- realisasi sebesar Rp.60.114.950.163,- (84,16%)

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kab. Purbalingga Tahun 2021

2.3.2 Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar urusan kesehatan meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan tersebut, yang sudah mencapai target 100% yaitu sebanyak 4 indikator sedangkan 8 indikator lainnya belum dapat tercapai. Secara rinci indikator SPM Bidang Kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.107.
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelayanan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	79,42 %	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebanyak 16.086 • Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebanyak 12.775 (79,42%);

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
						<ul style="list-style-type: none"> Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp.82.322.000,- realisasi sebesar Rp.39.280.000,- (47,72%)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelayanan ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	100 %	88,33 %	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebanyak 14.916 Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebanyak 13.175 (88,33%); Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bersalin sebesar Rp.3.340.105.000,- realisasi sebesar Rp.2.364.737.414,- (70,80%)
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pelayanan bayi baru lahir mendapat pelayanan bayi baru lahir	100 %	87,54 %	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebanyak 14.747 Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebanyak 12.909 (87,54%); Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp.39.375.000,- realisasi sebesar Rp.25.719.000,- (65,32%)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard	100 %	86,94 %	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Balita sebanyak 71.929 Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Balita sebanyak 62.534 (86,94%); Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp.26.538.000,- realisasi sebesar Rp.25.680.000,- (96,77%)
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 %	64,99 %	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebanyak 73.404 Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebanyak 47.703 (64,99%); Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp.162.081.000,- realisasi sebesar Rp.118.711.100,- (73,24%)
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standard	100 %	24,08 %	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebanyak 637.309 Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebanyak 153.453 (24,08%); Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
						Usia Produktif sebesar Rp.50.037.500,- realisasi sebesar Rp.29.050.300,- (58,06%)
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100 %	70,19 %	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebanyak 126.276 • Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebanyak 88.639 (70,19%); • Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp.12.370.200,- realisasi sebesar Rp.11.020.000,- (89,09%)
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 %	10 %	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebanyak 280.868 • Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebanyak 28.095 (10%); • Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp.83.742.000,- realisasi sebesar Rp.69.885.900,- (83,45%)
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 %	107 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebanyak 13.117 • Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebanyak 14.035 (107%); • Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus sebesar Rp.91.996.800,- realisasi sebesar Rp.34.466.000,- (37,46%)
10	Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	100 %	78,11 %	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebanyak 2.508 • Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebanyak 1.959 (78,11%); • Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp.9.300.000,- realisasi sebesar Rp.6.462.500,- (69,49%)
11	Pelayanan Kesehatan pada Orang terduga Tuberculosis (Tb)	Persentase Orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standard	100 %	57,09	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis sebanyak 7.600 • Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis sebanyak 4.339 (57,09%); • Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
						Terduga Tuberkulosis sebesar Rp.353.999.200,- realisasi sebesar Rp.292.863.152,- (82,73%)
12	Pelayanan Kesehatan pada Orang terinfeksi virus HIV/AIDS	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	100 %	86,10 %	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV sebanyak 17.138 • Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV sebanyak 14.756 (86,10%). • Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV sebesar Rp.330.455.800,- realisasi sebesar Rp.323.133.723,- (97,78%)

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kab. Purbalingga Tahun 2021

2.3.3 Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Dari 2 indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum tersebut, belum ada yang sudah mencapai target 100%. Secara rinci indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.108.
Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	93,01 %	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebanyak 1.003.246; • Realisasi pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebanyak 933.080 (93,01%); • Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebesar Rp.13.682.176.000,- realisasi sebesar Rp.11.656.366.400,- (85,19%)
2	Penyediaan Pelayanan	Jumlah Warga Negara yang	100 %	93,18 %	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
	Pengolahan air limbah domestik	memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				Limbah Domestik sebanyak 1.003.246. <ul style="list-style-type: none"> Realisasi pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebanyak 934.852 (93,18%). Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar Rp.3.522.427.000,- realisasi sebesar Rp.3.420.191.500,- (97,10%)

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kab. Purbalingga Tahun 2021

2.3.4 Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara rinci indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.109.
Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 9 Realisasi pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 9 (100%)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi	0	NA	NA	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
	program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	penyediaan rumah yang layak huni				sebanyak 0 <ul style="list-style-type: none"> Realisasi pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 0 (0%)

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kab. Purbalingga Tahun 2021

2.3.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota meliputi :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dari 5 indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat tersebut, semuanya sudah mencapai target 100%. Secara rinci indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.110.
Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan	100 %	100 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebanyak 100 Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
		hukum Perda dan Perkada				<p>sebanyak 100 (100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.1.716.904.800,- realisasi sebesar Rp.1.646.748.552,- (95,91%)
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebanyak 525 Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebanyak 525 (100%) Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar Rp.2.232.257.500,- realisasi sebesar Rp.1.644.930.116,- (73,69%)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebanyak 525 Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebanyak 525 (100%) Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp.2.232.257.500,- realisasi sebesar Rp.1.644.930.116,- (73,69%)
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebanyak 1.641 Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebanyak 1.641 (100%) Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp.2.232.257.500,- realisasi sebesar Rp.1.644.930.116,- (73,69%)
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebanyak 100 Realisasi pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebanyak 100 (100%). Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar Rp.1.262.739.000,- realisasi sebesar Rp.1.204.255.427,- (95,37%)

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kab. Purbalingga Tahun 2021

2.3.6 Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Dari 5 indikator SPM Bidang Sosial tersebut, 4 indikator sudah mencapai target dan 1 indikator tidak tercapai. Secara rinci indikator SPM Bidang Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB dan P3A Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.111.
Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	100 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebanyak 582 • Realisasi pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebanyak 582 (100%) • Alokasi anggaran pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rp.3.174.251.900,- realisasi Rp. 2.624.830.160,- (82,69%)
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	100 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Target pencapaian pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sebanyak 16 • Realisasi pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sebanyak 657 (100%) • Alokasi anggaran Rehabilitasi Sosial Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
						Anak Terlantar di Luar Panti Rp.3.174.251.900,- realisasi Rp. 2.624.830.160,- (82,69%)
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	100 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sebanyak 657 Realisasi pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sebanyak 657 (100%) Alokasi anggaran Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Rp.3.174.251.900,- realisasi Rp. 2.624.830.160,- (82,69%)
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	100 %	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sebanyak 47 Realisasi pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sebanyak 47 (100%) Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sebesar Rp.3.174.251.900,- realisasi Rp. 2.624.830.160,- (82,69%)
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	92,85 %	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Target pencapaian pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1.518 Realisasi pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1.518 (100%) Alokasi anggaran Perlindungan dan Jaminan Sosial Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Status Capaian	Keterangan
						Rp.36.585.000,- realisasi Rp.34.869.800,- (95,31%)

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kab. Purbalingga Tahun 2021

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan merupakan suatu kondisi di mana terjadi satu kesenjangan atau gap dari antara apa yang diharapkan dengan realisasi sesungguhnya. Permasalahan ini menjadi dasar dalam merumuskan berbagai alternatif pemecahannya. Rumusan permasalahan pembangunan dihasilkan berdasarkan analisis terhadap indikator kinerja berdasarkan masing-masing urusan. Analisis dilakukan terhadap indikator capaian pembangunan, baik secara makro maupun indikator daerah yang menjadi tolok ukur pembangunan.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan mendasarkan pada gambaran kondisi makro kabupaten, hasil evaluasi Indikator Program RKPD Tahun 2021 dan hasil evaluasi indikator SPM tahun 2021. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok permasalahan sebagai berikut:

Tabel II.112.
Permasalahan Pembangunan Daerah di Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator Belum Tercapai	Sumber Data	Permasalahan
1	Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga masih di bawah Provinsi Jawa Tengah	Gambaran kondisi makro	Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal
2	Penurunan beberapa lapangan usaha yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga terutama pada sektor lapangan usaha: Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan	Gambaran kondisi makro	Penurunan kondisi perekonomian daerah
3	Ekonomi Purbalingga masih tergerus dengan tingginya impor sampai dengan tahun 2021 dimana net ekspor yang bernilai negatif menandakan bahwa nilai impor lebih banyak daripada ekspor.	Gambaran kondisi makro	
4	Pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun	Gambaran kondisi makro	
5	Angka kemiskinan kembali naik. angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga tersebut masih menempati peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Tengah	Gambaran kondisi makro	
6	Jumlah penduduk miskin kembali naik dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan penduduk miskin	Gambaran kondisi makro	Penanganan kemiskinan belum optimal
7	Nilai RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7,75 tahun	Gambaran kondisi makro	Rendahnya angka rata-rata lama sekolah
8	Nilai HLS Kabupaten Purbalingga masih	Gambaran kondisi	Rendahnya angka harapan lama

No.	Indikator Belum Tercapai	Sumber Data	Permasalahan
	dibawah rata-rata HLS Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 12,77 tahun	makro	sekolah
9	Capaian UHH ini masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 74,47	Gambaran kondisi makro	Rendahnya angka usia harapan hidup
10	Pengeluaran perkapita masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 11.034.000	Gambaran kondisi makro	Rendahnya pengeluaran per kapita
11	% angka putus sekolah : SD/ sederajat	Indikator Program	Belum optimalnya kualitas pendidikan
12	Indek integritas UN	Indikator Program	
13	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	Indikator Program	
14	Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	Indikator Program	
15	Jumlah pendidik/tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Indikator Program	
16	Persentase pendidik lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	Indikator Program	
17	Angka Kematian Ibu	Indikator Program	Masih tingginya angka kesakitan dan penyakit menular dan tidak menular
18	Angka Kematian Bayi	Indikator Program	
19	Angka Kematian Balita	Indikator Program	
20	Prevalensi HIV/AIDS	Indikator Program	
21	Jumlah layanan rawat jalan Puskesmas	Indikator Program	Pelayanan fasilitas kesehatan belum optimal
22	Jumlah RS Poned	Indikator Program	
23	Bed Occupancy Ratio (BOR)	Indikator Program	
24	Length Of Stay (LOS)	Indikator Program	
25	Turn Over Interval (TOI)	Indikator Program	
26	Net Death Rate (NDR)	Indikator Program	
27	Gross Death Rate (GDR)	Indikator Program	
28	Bed Turn Over (BTO)	Indikator Program	
29	Rasio dokter umum per jumlah penduduk	Indikator Program	
30	Cakupan pengawasan peredaran obat	Indikator Program	
31	Cakupan pemeriksaan makanan dan minuman yang diperdagangkan	Indikator Program	
32	Proporsi Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) yang memenuhi syarat	Indikator Program	
33	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB	Indikator Program	
34	Cakupan desa memenuhi syarat kesehatan lingkungan	Indikator Program	Perilaku hidup sehat masyarakat yang masih kurang
35	Cakupan desa Open Defecation Free (ODF)	Indikator Program	
36	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	Indikator Program	Jaminan kesehatan bagi masyarakat belum optimal
37	Penurunan kegiatan aksi massa bernuansa SARA	Indikator Program	Upaya penanganan trantibum belum optimal
38	Intensitas sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Indikator Program	
39	Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	Indikator Program	
40	Presentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	Indikator Program	Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
41	Cakupan pencari kerja yang ditempatkan	Indikator Program	Terbatasnya lapangan pekerjaan
42	Cakupan lumbung pangan masyarakat	Indikator Program	Rawan pangan
43	Cakupan desa mandiri pangan	Indikator Program	
44	Persentase pangan segar bersertifikat prima 3	Indikator Program	
45	Cakupan penyelesaian proses pengadaan tanah pemerintah daerah	Indikator Program	Tanah pemda yang masih bermasalah
46	Cakupan penandaan tanah-tanah milik pemerintah daerah	Indikator Program	
47	Persentase izin rekomendasi pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	Indikator Program	Masih kurangnya ketaatan perusahaan/pelaku industri terhadap ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan
48	Cakupan industri yang memiliki TPS B3	Indikator Program	
49	Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan khusus	Indikator Program	
50	Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL	Indikator Program	
51	Jumlah sanksi administrasi terhadap	Indikator Program	

No.	Indikator Belum Tercapai	Sumber Data	Permasalahan
	perusahaan yang melanggar peraturan perundangan bidang lingkungan		
52	Cakupan desa yang difasilitasi kerjasama antar desa	Indikator Program	Terbatasnya ketersediaan sumberdaya di desa
53	Cakupan desa/kelurahan layak anak	Indikator Program	
54	Penyediaan prasarana lalu lintas:	Indikator Program	Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LLAJ serta sistem angkutan
55	Rambu standar	Indikator Program	
	Guardraill	Indikator Program	
56	Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal	Indikator Program	
57	Pertambahan jumlah UMKM baru	Indikator Program	Belum optimalnya perkembangan UMKM
58	Pertumbuhan UMKM berorientasi ekspor	Indikator Program	
59	Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	Indikator Program	Kurang optimalnya pembinaan pemuda dan olah raga
60	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	Indikator Program	
61	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/provinsi	Indikator Program	
62	Jumlah kegiatan olahraga yang difasilitasi	Indikator Program	
63	Cabor yang menjalankan kompetensi secara teratur dan terjadwal	Indikator Program	
64	Cakupan kajian seni	Indikator Program	Terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan
65	Cakupan fasilitasi seni	Indikator Program	
66	Cakupan gelar seni	Indikator Program	
67	Cakupan misi kesenian	Indikator Program	
68	Cakupan tempat gelar seni	Indikator Program	
69	Cakupan organisasi kesejarahan yang dibina	Indikator Program	Belum optimalnya pelestarian terhadap 10 obyek pemajuan kebudayaan
70	Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya	Indikator Program	
71	Jumlah kunjungan museum dan monumen	Indikator Program	
72	Jumlah cagar budaya	Indikator Program	
73	Cakupan cagar budaya yang dikonservasi	Indikator Program	
74	Jumlah Perpustakaan yang dibina dan yang memenuhi standar: Umum Sekolah/ Madrasah Pondok pesantren Rumah Ibadah Khusus	Indikator Program	Masih banyaknya perpustakaan yang belum memenuhi standar
75	Rasio perpustakaan per jumlah penduduk	Indikator Program	
76	Rasio pengunjung pepustakaan per jumlah penduduk	Indikator Program	
77	Jumlah layanan perpustakaan keliling	Indikator Program	
78	Jumlah pustakawan bersertifikat kompetensi perpustakaan	Indikator Program	
79	Penetapan TDUP yang terfasilitasi	Indikator Program	Belum optimalnya sarana dan prasarana di kawasan wisata dan destinasi wisata
80	Sertifikasi usaha hotel dan pelaksana manajemen	Indikator Program	
81	Angka kunjungan wisata	Indikator Program	
82	Pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Indikator Program	
83	Presentase kenaikan kunjungan wisata	Indikator Program	
84	Cakupan Pokdarwis dan pelaku ekonomi kreatif yang dibina	Indikator Program	Belum optimalnya produksi pertanian
85	Produksi ubi kayu	Indikator Program	
86	Produksi buah duku	Indikator Program	
87	Produksi papaya	Indikator Program	
88	Produksi kopi, cengkeh, glagah arjuna, nilam, tebu, karet	Indikator Program	
89	Produksi itik	Indikator Program	
90	Cakupan lahan pertanian yang mengalami kekeringan yang tertangani	Indikator Program	
91	Jumlah pasar tradisional yang memenuhi standar SNI	Indikator Program	Masih adanya pasar rakyat yang belum memenuhi standar
92	Jumlah calon eksportir yang telah difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor	Indikator Program	Belum optimalnya nilai ekspor produk unggulan daerah
93	Jumlah eksportir	Indikator Program	
94	Jumlah/jenis barang yang diekspor	Indikator Program	
95	Persentase sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	Indikator Program	
96	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	Indikator Program	Belum semua pelaku usaha melakukan

No.	Indikator Belum Tercapai	Sumber Data	Permasalahan
			tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
	Kawasan/klaster industri yang terbangun	Indikator Program	Pengembangan usaha industri yang belum maksimal
	Persentase fasilitasi sertifikasi halal	Indikator Program	
	Cakupan industri yang terdata dalam SIINAS	Indikator Program	
	Jumlah Calon Transmigran yang difasilitasi	Indikator Program	Terbatasnya alokasi pemberangkatan transmigran
97	Cakupan informasi pemerintah daerah melalui SANTEL yang tersampaikan kepada pihak terkait	Indikator Program	Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan
98	Cakupan kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal	Indikator Program	
99	Tingkat fasilitasi kegiatan keagamaan	Indikator Program	
100	Jumlah LKM berbadan hukum (unit)	Indikator Program	
101	Tingkat capaian target laba perusda (ribu rupiah)	Indikator Program	
102	Persentase ASN yang mengikuti Diklat sesuai standar	Indikator Program	
103	Frekuensi diseminasi hasil kelitbangan	Indikator Program	
104	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	Indikator Program	
105	Level kapabilitas APIP	Indikator Program	
106	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Indikator Program	
107	Persentase pelayanan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	Indikator SPM	
108	Persentase pelayanan ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	Indikator SPM	
109	Persentase pelayanan bayi baru lahir mendapat pelayanan bayi baru lahir	Indikator SPM	
110	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard	Indikator SPM	
111	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	Indikator SPM	
112	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standard	Indikator SPM	
113	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	Indikator SPM	
114	Persentase penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	Indikator SPM	
115	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	Indikator SPM	
116	Persentase Orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standard	Indikator SPM	
117	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	Indikator SPM	
118	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Indikator SPM	Belum optimalnya cakupan layanan sanitasi dan air bersih
119	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Indikator SPM	

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2022

2.5 Isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dijelaskan pada tabel permasalahan pembangunan di atas, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.113.
Isu Strategis di Kabupaten Purbalingga

No.	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
1	Penanganan kemiskinan belum optimal	Angka kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah	Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat
2	Rendahnya angka rata-rata lama sekolah	Kualitas manusia di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah	Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
3	Rendahnya angka harapan lama sekolah		
4	Rendahnya angka usia harapan hidup		
5	Rendahnya pengeluaran per kapita		
6	Belum optimalnya kualitas pendidikan		
7	Masih tingginya angka kesakitan dan penyakit menular dan tidak menular		
8	Pelayanan fasilitas kesehatan belum optimal		
9	Perilaku hidup sehat masyarakat yang masih kurang		
10	Jaminan kesehatan bagi masyarakat belum optimal		
11	Kurang optimalnya pembinaan pemuda dan olah raga		
12	Belum optimalnya pelestarian terhadap 10 obyek pemajuan kebudayaan		
13	Terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan		
14	Mutu pelayanan kesehatan masih belum menyeluruh sesuai standard		
15	Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal		
16	Penurunan kondisi perekonomian daerah		
17	Terbatasnya lapangan pekerjaan		
18	Rawan pangan		
19	Belum optimalnya perkembangan UMKM		
20	Belum optimalnya produksi pertanian		
21	Belum optimalnya nilai ekspor produk unggulan daerah		
22	Belum semua pelaku usaha melakukan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya		
23	Pengembangan usaha industri yang belum maksimal		
24	Penurunan kondisi perekonomian daerah	Kesiapsiagaan pandemic covid-19	Penanganan Dampak Pandemi Covid-19
25	Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Kualitas infrastruktur belum merata dan penanganan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan
26	Tanah pemda yang masih bermasalah		
27	Masih kurangnya ketaatan perusahaan/pelaku industri terhadap ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan		
28	Belum optimalnya sarana dan prasarana di kawasan wisata dan destinasi wisata		
29	Belum optimalnya cakupan layanan sanitasi dan air bersih		
30	Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah (SAKIP dan IRB belum maksimal)	Reformasi Birokrasi
31	Upaya penanganan trantibum belum optimal	Masih tingginya angka kriminalitas dan masih terdapat potensi konflik sosial	Kerentanan hubungan masyarakat, berbangsa dan bernegara
32	Terbatasnya ketersediaan sumberdaya di desa	Kemandirian desa rendah (Desa maju mandiri < 50%)	Kemandirian Desa sebagai Basis Pertumbuhan yang Berkeadilan

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2022

Selanjutnya isu strategis dijelaskan sebagai berikut :

1. Kecukupan kebutuhan pokok masyarakat

Tingkat kesejahteraan atau taraf hidup diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar manusia (*basic needs*). Apabila pemenuhan kebutuhan pokok tersebut tidak terpenuhi maka tingkat kesejahteraan masyarakat belum berkualitas. Salah satu indikator utama dari tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator utama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah/daerah. Keluarga yang miskin hampir dapat dipastikan sulit untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas karena rendahnya kemampuan untuk mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi guna menunjang kehidupannya.

Rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup antara lain ditandai dengan kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, papan (termasuk sanitasi), sandang (dalam batas yang memadai), akses untuk memperoleh layanan kesehatan dan layanan pendidikan serta kesempatan untuk mengaktualisasikan pikiran, gagasan, aspirasi dan sebagainya. Berdasarkan data BPS Kab. Purbalingga, selama periode tahun 2017 – 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga sudah menunjukkan kecenderungan yang semakin penurunan. Namun kemudian pada tahun 2021 naik lagi menjadi 15,90. Salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebanyak 171.780 jiwa menurun cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 140.070 jiwa atau sebesar 15.03 persen. Pada tahun 2020, dampak dari pandemic Covid-19 salah satunya juga menyebabkan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan menjadi 15.90. Dan tahun 2021 kembali naik menjadi 16,24 persen. Salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga masih menempati peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Tengah. Relatif tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga menyebabkan relatif rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya.

Kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. secara normatif pelaksanaannya terfokus pada pengurangan beban penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah (40 % terbawah). Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat strategis sehingga harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan agar dapat dicapai tujuan pembangunan dan tujuan penyelenggaraan negara sesuai amanat konstitusi. Dengan adanya kemiskinan, berarti masih ada masyarakat yang belum sejahtera, sehingga perlu langkah-langkah sistematis, terpadu, terarah, dan berkesinambungan guna terbebas dari kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan tentunya perlu ditingkatkan melalui berbagai program yang mengarah pada pemenuhan hak dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi, dan pangan; perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Permasalahan kemiskinan (*poverty*) yang merupakan permasalahan fundamental harus segera ditangani melalui implementasi langkah-langkah penanggulangan dan pendekatan yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

2. Penguatan daya saing sumberdaya manusia

Pada hakekatnya tujuan utama pembangunan adalah membangun manusia melalui upaya peningkatan kualitas manusia baik dari aspek lahiriah maupun dalam dimensi yang lebih luas termasuk aspek intelektual, moral dan spiritual. Pembangunan fisik prasarana, ekonomi, sosial dan sebagainya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dan mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat. Untuk mengetahui gambaran komprehensif mengenai tingkat pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah dapat dilihat berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2021 yaitu sebesar 69,15. Walaupun nilai IPM tersebut masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,16, apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar IPM Kabupaten Purbalingga masih berada di atas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih di bawah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH) dan Pengeluaran riil yang disesuaikan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. RLS di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 7.25 tahun. Dengan kata lain penduduk di Kabupaten Purbalingga baru bisa bersekolah rata-rata hampir tujuh tahun atau sampai kelas 1 SLTP. RLS di Kabupaten Purbalingga masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7.75 tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Kondisi HLS Kabupaten Purbalingga tahun 2021 masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 12.77. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah yaitu 12. Angka HLS Kabupaten Purbalingga tersebut menunjukkan diharapkan anak usia 7 tahun saat ini dapat merasakan pendidikan selama hampir 12 tahun atau kira-kira setara kelas 3 SLTA.

Usia Harapan Hidup (UHH) menggambarkan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Komponen UHH sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Semakin tinggi UHH memberikan indikasi semakin sejahtera dan tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. UHH Kabupaten Purbalingga terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 menjadi 73,21. Angka ini memang masih relatif jauh dari UHH tertinggi yaitu 85 tahun. Apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di eks karesidenan Banyumas, UHH Purbalingga adalah yang paling rendah.

Komposit IPM juga menilai pengeluaran perkapita sebagai komponen ekonomi. Komponen ekonomi direpresentasikan melalui aspek pengeluaran. Karena besarnya pengeluaran yang berbeda-beda di setiap desa bahkan di setiap rumah tangga, maka angka pengeluaran riil diwujudkan dalam nilai rata-rata Kabupaten. Dari hasil penghitungan diperoleh gambaran rata-rata pengeluaran riil penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2021 yaitu sekitar Rp 10.032.000,- per orang per tahun. Dibanding dengan pencapaian pengeluaran riil Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp 11.034.000,.

Disamping berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, kualitas dan daya saing sumberdaya manusia juga berkaitan erat

dengan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan peningkatan apresiasi terhadap seni budaya daerah dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Dilihat dari kesetaraan gender di Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu sebesar 93,08. Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik selama ini perannya belum optimal, karena kurangnya tingkat partisipasinya. Oleh karena itu, upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik ini harus secara kontinyu ditingkatkan, sehingga peran perempuan dalam ekonomi dan politik dapat lebih optimal.

3. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perekonomian Kabupaten Purbalingga tahun 2021 ditinjau dari sisi PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 26.393,81 (Miliar Rupiah). Struktur perekonomian menurut lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Dimana kategori lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 menggeser peranan Pertanian yaitu dengan angka 28,07 %. Sedangkan lapangan usaha pertanian di angka 26,51 %. Peranan terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya memberikan peran sebesar 0,05 %.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kabupaten Purbalingga, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: Tingkat kunjungan wisatawan masih belum optimal dan semakin rendah ketika pandemi covid. Kondisi tersebut menyebabkan sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan. Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus

terus dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah.

Disamping dari sektor wisata, pertumbuhan investasi di Kabupaten Purbalingga belum optimal, dikarenakan keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kabupaten Purbalingga telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Kondisi produktivitas ekonomi juga dipengaruhi karena pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kabupaten Purbalingga. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Purbalingga dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dilihat dari pertumbuhan jumlah UMKM mengalami kenaikan yang tidak signifikan.

Masalah ketenagakerjaan juga menjadi salah satu aspek yang menonjol dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang terus meningkat tanpa diikuti pertambahan lapangan pekerjaan dapat menjadi pemicu bertambahnya pengangguran. Banyaknya penduduk angkatan kerja yang menganggur dapat diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tercatat 6.05 persen yang berarti bahwa ada 6.05 angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam pasar kerja yang ada di Kabupaten Purbalingga. Mereka adalah yang tidak bekerja, sedang mempersiapkan usaha, atau sedang mencari pekerjaan. Sementara itu jika dilihat dari jenis kelamin. TPT perempuan (5,11 persen) lebih rendah dari TPT laki-laki (6,05 persen). Kondisi ini bisa terjadi karena banyak kegiatan industri di Kabupaten Purbalingga lebih banyak menyerap tenaga kerja perempuan seperti industri rambut palsu dan bulu mata palsu.

4. Penanganan Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 melanda dunia, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan. Pemerintah dan lembaga kajian strategis memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2020) menyebutkan bahwa Covid-19 memukul negara-negara berkembang dengan krisis utang. Indonesia juga tidak luput akan adanya kemungkinan terjebak pada bahaya defisit anggaran yang tidak berkelanjutan. Ketika Covid-19 mulai merebak di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Pada Pasal 2 Perpu tersebut, pemerintah dimungkinkan untuk merelaksasi pembatasan defisit anggaran lebih dari 3 persen. Disebutkan di pasal tersebut bahwa batasan defisit anggaran boleh melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

Dampak pada sektor ketenagakerjaan, Covid-19, kebijakan karantina wilayah di berbagai negara berdampak pada 2,7 miliar pekerja (81 persen dari total pekerja di seluruh dunia). Kontraksi ekonomi secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan kerja. Perhitungan ILO per 1 April 2020 menunjukkan penurunan jam kerja sebesar 6,7 persen pada kuartal kedua 2020 atau setara dengan hilangnya 195 juta pekerjaan penuh waktu. Perhitungan total kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 tergantung pada perkembangan pandemi ini, bagaimana pemerintah masing-masing negara mengantisipasi, serta penemuan obat dan vaksin sehingga diketahui kepastian berakhirnya pandemi. ILO memperkirakan bahwa jumlah orang yang menganggur sampai laporan ini dibuat meningkat sebesar 24,7 juta dari angka tahun 2019.

Ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja. Perkiraan ILO menunjukkan bahwa sekitar 1,25 miliar pekerja atau 38 persen dari total pekerja terancam akan diberhentikan yang meliputi sektor perdagangan ritel, akomodasi dan makanan, dan manufaktur. Sektor- sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dimana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial, atau punya tetapi dalam keadaan minimal. Para pekerja ini kini berada dalam kondisi paling rentan di antara kelompok pekerja lainnya.

Pekerja di sektor kesehatan sangat rentan terhadap paparan risiko kesehatan dan risiko ekonomi. Walaupun belum ada angka seluruh dunia yang resmi, berbagai laporan menunjukkan besarnya korban pada para tenaga

kesehatan terutama yang berhubungan langsung dengan pandemi Covid-19. Respon kebijakan harus diarahkan ke bantuan segera untuk pekerja dan sektor-sektor usaha tertentu untuk melindungi mata pencaharian. Terutama di negara-negara berkembang dan di sektor-sektor tertentu dengan dampak yang signifikan. Dengan demikian, ketika pandemi berlalu, negara dapat memulihkan ekonomi lebih cepat.

Economist Intelligence Unit (2020), menerbitkan analisis dengan kesimpulan bahwa Covid-19 akan membuat hampir semua negara Group 20 (G-20) masuk ke jurang resesi. Analisis ini terbit pada akhir Maret 2020. Gambaran suasana ekonomi global tampak suram karena jika resesi terjadi pada anggota G-20 maka efek dominonya akan membuat pelambatan ini menyebar ke seluruh dunia. Meskipun diasumsikan bahwa pemulihan akan terjadi pada paruh kedua tahun 2020, risiko pandemi gelombang kedua dan ketiga akan semakin memperburuk gambaran proyeksi ekonomi global paling tidak untuk jangka menengah.

Saat ini Indonesia menghadapi masa sulit dengan tingkat ketidakpastian yang belum bisa diprediksi. Perekonomian global dan nasional dipastikan melambat signifikan. Kondisi ini juga seiring dengan semakin banyak daerah yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar akan menggerus konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi 54-55 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kegiatan dunia usaha juga akan menurun sehingga berpotensi meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja.

Akibat wabah covid 19, hampir seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Purbalingga tertekan dan mengalami penurunan aktivitas secara signifikan, serta hampir tidak ada arus investasi yang masuk. Menurunnya aktivitas ekonomi juga akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dimana pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 6,05 persen. Disamping itu juga berdampak pada terhambatnya upaya pengurangan angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga dimana tahun 2021 meningkat menjadi 16,24 persen.

Sebagai solusi jangka pendek, untuk memperkecil tekanan, pemerintah mempercepat pencairan bantuan sosial secara bertahap. Stimulus bagi dunia usaha juga diperluas dan diberlakukan pada awal April. Selain itu, suntikan stimulus baru disiapkan untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari kebangkrutan. Stimulus ekonomi juga akan diarahkan untuk mendukung penduduk rentan miskin yang diatas 20 persen dan pengusaha menengah ke bawah.

Implikasi dampak pandemi Covid-19 pada skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru ini, Pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi. Pertama, melakukan penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman Covid-19. Kedua, melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi Covid-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca Covid-19. Ketiga, menyusun program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca Covid-19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya. Pada perencanaan pembangunan pasca Covid-19, Pemerintah perlu memasukkan unsur revolusi budaya dimana protokol kesehatan bersama Covid-19 harus menjadi panduan hidup masyarakat Indonesia dalam jangka menengah dan bahkan jangka panjang.

5. Pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur wilayah berkelanjutan

Ketersediaan infrastruktur seperti prasarana jalan dan jembatan, prasarana irigasi, prasarana perumahan dan permukiman, dan prasarana lainnya menjadi sangat penting sebagai wujud pelayanan dasar pemerintah. Pertumbuhan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak bisa lepas dari ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis di Kabupaten Purbalingga dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar. Untuk kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat keberadaan infrastruktur jalan yang memadai sangat dibutuhkan dari segi kuantitas dan kualitasnya. Penyediaan jalan dan jembatan harus memperhatikan dinamika ekonomi dan pengembangan wilayah. Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman harus disikapi dengan pemenuhan infrastruktur jalan pendukungnya, dengan demikian dapat sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi jaringan jalan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa, pembukaan pintu tol Pemalang memberikan efek peningkatan kendaraan yang melalui wilayah Kabupaten Purbalingga. Perencanaan pembangunan jalan kabupaten yang berkualitas sangat dibutuhkan agar mampu menampung seluruh pergerakan yang ditimbulkannya. Disamping jalan kabupaten, pemerataan pembangunan jalan antar kecamatan pun juga menjadi sangat penting untuk menciptakan kualitas jalan desa yang saling terkoneksi dengan baik. Oleh karena itu pelebaran jalan antar kecamatan harus terus

dilaksanakan dimana jalan dengan lebar lebih dari 5.5 meter menjadi pintu gerbang pengembangan ekonomi kecamatan. Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Purbalingga sudah menunjukkan kenaikan sampai dengan 86,38 persen di tahun 2021.

Peningkatan jaringan jalan tersebut juga harus dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sarpras tidak akan memadai apabila tidak didukung konsep manajemen lalu lintas dan manajemen angkutan. Keberadaan terminal di Kabupaten Purbalingga hingga saat ini belum optimal menjadi titik pusat pergerakan angkutan umum. Disamping kualitas jalan, infrastruktur lainnya di Kabupaten Purbalingga yang menjadi faktor penting adalah pembangunan bendung dan jaringan irigasi untuk menjaga ketahanan pangan. Pemberdayaan petani melalui P3A atau GP3A pun perlu terus ditingkatkan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dalam ikut serta memelihara prasarana irigasi yang ada. Kondisi eksisting yang terlihat dimana adanya pembangunan Bendung Slinga oleh Kementerian PUPR beserta jaringan irigasi primernya, harus segera ditindaklanjuti dengan pembangunan jaringan irigasi sekunder dan tersier yang menjadi kewenangan kabupaten, sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi para petani khususnya di wilayah Kec. Kaligondang. Kec. Pengadegan. Kec. Kejobong dan Bukateja.

Layanan air bersih dan sanitasi juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Purbalingga. Secara umum dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, cakupan penanganan prasarana air bersih dan sanitasi selalu mengalami peningkatan. Cakupan penanganan prasarana air bersih pada tahun 2021 meningkat menjadi 93,01. Begitu pula cakupan penanganan sanitasi juga meningkat menjadi 93,18. Perlunya sinergi semua pihak agar sumber air yang menjadi kebutuhan dasar manusia selalu terjaga sepanjang masa.

Kondisi layanan air bersih dan sanitasi tersebut juga harus dibarengi dengan menjaga kualitas penggunaan lahan agar memberikan manfaat dalam perlindungan lingkungan. Penataan kawasan perkotaan dan wilayah Kabupaten Purbalingga harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang yang sudah tertuang dalam RTRW Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031, agar pengendalian pemanfaatan ruang dapat terkontrol Hal ini dimaksudkan untuk menghindari degradasi lingkungan dan tercipta keseimbangan lingkungan hidup. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dapat mendegradasi lingkungan sehingga harus dikendalikan secara maksimal.

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan akan menimbulkan

dampak negatif yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia seperti pencemaran air dan udara, meningkatnya angka kesakitan penyakit degeneratif. meningkatnya kerusakan lahan, menurunnya populasi ikan di perairan umum, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna, terjadinya banjir dan tanah longsor, serta meningkatnya pemanasan global yang semakin terasa. Kelestarian lingkungan juga telah menjadi isu global karena berkaitan pula dengan isu perubahan iklim. Upaya menjaga daya tampung dan daya dukung lingkungan juga menjadi parameter dalam pembangunan infrastruktur. Penanganan isu strategis ini dapat dilaksanakan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan guna menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup.

6. Reformasi Birokrasi

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah bahwa kewenangan pemerintahan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Terdapat banyak konsep tentang tata kelola pemerintahan yang baik, namun terdapat empat prinsip utama untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Tata kelola pemerintahan pun harus dilakukan upaya peningkatan secara kontinyu sehingga benar-benar dilaksanakan dalam rangka untuk melayani kepentingan masyarakat. Sedangkan kondusivitas wilayah yang baik merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Upaya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Purbalingga, disebabkan beberapa aspek terkait masih terjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan. Beberapa permasalahan tersebut yaitu akuntabilitas kinerja yang masih perlu ditingkatkan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang belum optimal dengan nilai SPBE masih sebesar 3.04, Pemerintah selama ini telah membangun system namun perlu diperkuat lagi.

Sedangkan sistem akuntabilitas di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari beberapa hal. Penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),

menghasilkan nilai SAKIP bagi Kabupaten Purbalingga dimana nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga baru berada pada kategori B (Baik). Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun tetapi harus terus ditingkatkan agar optimal.

Sedangkan untuk hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Purbalingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diharapkan pada masa yang akan datang kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah akan semakin meningkat sehingga dapat terus mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu sesuai hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) untuk menilai Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam empat tahun berturut-turut masuk dalam peringkat 10 besar nasional. dengan mendapat skor dengan kategori sangat tinggi sehingga mendapatkan tropi Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha dari kementerian Dalam Negeri. Kondisi tersebut perlu dipertahankan agar, kinerja yang telah dilakukan tersebut tetap terjaga konsistensinya.

Begitu pula dengan nilai Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 yang merupakan instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, nilai pencapaiannya adalah 64.88. Nilai tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori baik namun masih diperlukan sedikit perbaikan dalam rangka untuk terus meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat

Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga ditunjukkan dengan level kapabilitas APIP yang berada pada level 3 dari tahun 2018, 2019 dan 2020. Ketika level 3 telah dicapai berarti kemampuan APIP di lingkungan telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Level tersebut juga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk kinerja yang lebih baik.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan kualitas tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Melalui integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara berkualitas.

7. Kerentanan hubungan masyarakat, berbangsa dan bernegara

Keanekaragaman adalah sifat esensial bangsa Indonesia. Berbagai suku bangsa dengan budayanya masing-masing tersebar di seluruh Nusantara, pada dasarnya merupakan kekayaan yang menjadi potensi bangsa. Namun di sisi lain, keanekaragaman berkombinasi dengan persoalan kesenjangan kesejahteraan antar daerah, atau antar kelompok masyarakat, dapat berpotensi menjadi permasalahan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan, membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Konflik sosial di wilayah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari adanya angka kriminalitas yang terjadi. Angka kriminalitas di Kabupaten Purbalingga mengalami trend menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dimana angka kriminalitas pada tahun 2016 sebesar 3.54 persen, selanjutnya menurun pada tahun 2017 menjadi 2.46 persen, kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 1.77 persen, dan pada tahun 2019 menjadi 1.62 persen. Namun pada tahun 2020 naik menjadi 1.91 dan kemudian turun menjadi 1,39 per 10.000 penduduk dengan 142 kasus. Adapun kasus kriminalitas tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengelapan, persetuhuan, penganiayaan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba.

Stabilitas keamanan dan keteriban umum dalam menjaga semangat nasionalisme dan nilai patriotisme menjadi alasan penting guna mendukung terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat. Pembangunan daerah tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa situasi yang kondusif. Situasi kondusif tersebut tidak mungkin terwujud tanpa penegakan hukum, keamanan dan ketertiban sosial kemasyarakatan dilaksanakan secara konsisten, sehingga suasana damai, aman dan tenteram tanpa rasa kuatir dan takut dapat dirasakan oleh masyarakat.

8. Kemandirian desa sebagai basis pertumbuhan yang berkeadilan

Kemandirian desa merupakan isu yang sangat sentral dalam pembangunan masyarakat agar menjadi desa yang lebih berdaya guna. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan angin segar kepada desa karena kebijakan tersebut telah menjadikan desa tidak lagi dilihat sebelah mata bahkan telah mengangkat hak dan kedaulatan desa secara utuh.

Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan. Masing-masing desa tersebut memiliki status dan potensi desa yang berbeda-beda. Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Berdasar perkembangannya, desa terbagi menjadi 4 kelompok yakni Desa Tradisional, Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada. Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun, dimana pada tahun 2016 hanya berjumlah 1 kemudian meningkat menjadi 25 desa pada tahun 2020. Begitu pula dengan desa swakarya di Kabupaten Purbalingga juga mengalami peningkatan, data terakhir tercatat pada tahun 2020 berjumlah 161 desa. Namun untuk desa swadaya di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan yaitu 208 desa di tahun 2017 kemudian menjadi 53 desa pada tahun 2020.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun yaitu berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Nilai IDM di Kabupaten Purbalingga selalu mengalami kenaikan, dan di tahun 2021 naik menjadi 0.6919. Secara rinci status desa di Kabupaten Purbalingga paling tinggi adalah desa mandiri, kemudian diikuti oleh desa

maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Untuk desa sangat tertinggal yang dulu di tahun 2016 ada 2 desa, saat ini sudah naik statusnya menjadi desa tertinggal. Desa tertinggal jumlahnya semakin turun, pada tahun 2016 yang berjumlah 50 kemudian turun menjadi 41 di tahun 2017, 30 desa di tahun 2018, 14 desa di tahun 2019, 9 desa di tahun 2020 dan menjadi 2 desa di tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa desa tertinggal sudah naik statusnya menjadi desa berkembang.

Untuk desa mandiri selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017-2021 semakin meningkat yaitu dari 0 dan saat ini terdapat 4 desa mandiri yang terdiri dari: Bojongsari, Kaligondang, Karanganyar dan Karangreja. Sedangkan desa berkembang jumlahnya semakin naik, pada tahun 2017 berjumlah 159 desa dalam kurun waktu 5 tahun sampai dengan tahun 2021 menjadi 153 desa. Untuk desa maju, pada tahun 2017 terdapat sebanyak 21 desa, kemudian bertambah jumlahnya pada tahun 2018 menjadi 38 desa, pada tahun 2019 menjadi 40 desa, pada tahun 2020 menjadi 51 desa dan pada tahun 2021 menjadi 153 desa.

Pembangunan dan pemberdayaan Desa diharapkan mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah konsep mengenai perkuatan dan kontribusi yang disumbangkan oleh sektor ekonomi riil. Sektor ekonomi riil yang tumbuh dan berkembang dari bawah karena dukungan ekonomi rakyat di desa.

Tiga usaha realisasi kemandirian sebuah desa, yakni: (a) potensi ekonomi; (b) potensi sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Pertumbuhan ekonomi dari bawah bertumpu pada 2 hal pokok yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku ekonomi lokal untuk memanfaatkan sumberdaya milik lokal dalam rangka kesejahteraan bersama dan memperbanyak pelaku ekonomi untuk mengurangi faktor produksi yang tidak terpakai.

Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya tidak cukup hanya melalui *treatment* membuka akses permodalan, akan tetapi juga akses produksi, akses distribusi dan akses pasar. Akses permodalan dibuka dan dikembangkan melalui pemberian kredit yang terjangkau dan fleksible, akses produksi dikembangkan melalui dorongan dan dukungan sektor industri lokal yang berbasis sumberdaya lokal, dan akses pasar dikembangkan melalui regulasi dan kebijakan yang memastikan terbentuk dan berkembangnya kondisi yang optimum dari perekonomian di perdesaan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan konsep kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah adalah salah satu instrument dasar yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dalam kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tersebut telah menggambarkan secara umum kondisi dan analisis statistik sekaligus juga karakteristik perekonomian dan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya (tahun n-2) dan prediksi perekonomian pada tahun anggaran berjalan (tahun n-1). Kebijakan pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memprediksi perekonomian daerah juga mencakup untuk pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian global terus menuju ke pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Telah dua puluh satu bulan dunia hidup bersama pandemi Covid-19. Dari hidup dalam ketakutan dan kepanikan, kemudian dapat bertahan, hingga kini bangkit dan optimis untuk hidup lebih baik, dengan kebiasaan, budaya, dan peradaban baru. Begitu pula dengan perkembangan ekonomi, setelah selamat dari resesi tahun lalu, kini terus membaik dan menuju ke pemulihan. Stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan yang sempat terancam krisis pada awal pandemi Covid-19, kemudian telah membaik dan tetap terjaga. Tetapi, kita tidak boleh lengah. Pandemi Covid-19 belum berakhir, bahkan bisa menjadi endemi, dengan munculnya sejumlah varian baru Covid-19. Distribusi dan kemampuan vaksinasi untuk mencapai imunitas massal (*herd immunity*) belum merata ke berbagai penjuru dunia, sangat cepat di negara maju (*advanced economies, AEs*) tetapi masih lambat di banyak negara berkembang dan sedang tumbuh (*emerging markets and developing economies, EMDEs*). Ketidakpastian masih berlanjut, bahkan banyak di antaranya belum diketahui, *the unknowns*. Karenanya, kita harus tetap waspada, agar lebih baik dalam mengantisipasi sejumlah risiko yang mungkin dapat muncul dan menempuh langkahlangkah lanjutan untuk penanganannya, dengan senantiasa mendekat dan berdoa kepada Tuhan Yang Mahakuasa. Pandemi memunculkan sejumlah permasalahan dan tantangan yang perlu diwaspadai dan diantisipasi secara baik. Kini dan ke depan. Setidaknya 7 (tujuh) hal penting perlu kita cermati. Pertama, masih belum meratanya vaksinasi untuk mencapai imunitas massal dan risiko endemi Covid-19 yang mungkin saja terjadi. Kedua, ketidakseimbangan

dalam proses pemulihan ekonomi global, lebih cepat di AEs dan masih berjalan lambat di EMDEs. Ketiga, terjadinya gangguan dalam mata rantai pasokan global serta munculnya ancaman kelangkaan energi. Keempat, ketidaksinkronan rencana kebijakan moneter dan fiskal untuk kembali ke kenormalan baru (*exit policy*) antara AEs dan EMDEs, serta dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang ditimbulkannya. Kelima, dampak luka memar (*scarring effect*) dari pandemi terhadap kondisi korporasi dan risiko yang dapat terjadi terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Keenam, demikian cepatnya digitalisasi ekonomi-keuangan dengan dominasi sejumlah pemain teknologi besar (*BigTech*) dunia dan akan semakin meluasnya sistem pembayaran antar negara. Ketujuh, semakin kuatnya tuntutan atas ekonomi hijau (*green economy*) dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dari AEs yang perlu dipersiapkan secara baik transisinya oleh EMDEs. Berikut ini penjelasan dari ketujuh tantangan tersebut dan antisipasinya dengan langkah kebijakan yang diperlukan di Indonesia.

Perbaikan ekonomi global terus berlanjut sepanjang tahun 2021, meski belum berjalan seimbang, dan diperkirakan akan pulih pada tahun 2022. Kecepatan tingkat perbaikan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat vaksinasi untuk mencapai imunitas massal, besarnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter, serta daya tahan dalam menghadapi penyebaran varian delta Covid-19. Secara keseluruhan, setelah kontraksi 3,1% pada 2020, ekonomi dunia diperkirakan tumbuh sekitar 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada 2022. Pemulihan ekonomi telah terjadi di dua negara ekonomi terbesar dunia, yaitu Tiongkok dengan pertumbuhan 8,0% dan 5,4% pada 2021 dan 2022 setelah tumbuh 2,3% pada 2020, dan AS dengan pertumbuhan 5,9% dan 3,9% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 3,4% pada 2020. Sementara itu, pemulihan ekonomi negara-negara lain diperkirakan akan terjadi pada tahun 2022 dengan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut sejak tahun 2021. Di antara negara maju, kawasan Eropa diperkirakan akan tumbuh 4,8% dan 4,4% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 6,3% pada 2020, demikian pula Jepang akan tumbuh 2,4% dan 2,5% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 4,6% pada 2020. Di antara negara Asia, India diperkirakan akan tumbuh tinggi sekitar 8,8% dan 8,1% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 7,1% pada 2020.

Pertumbuhan ekonomi nasional terus membaik sejak triwulan II 2021 dan akan meningkat tinggi pada tahun 2022. Pada triwulan III 2021, kinerja perekonomian tetap tumbuh positif, yaitu 3,51% dibandingkan kontraksi 3,49% pada triwulan yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini lebih rendah dari 7,07% pada

triwulan II 2021. Penyebaran varian delta Covid-19 dan PPKM ketat khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang harus ditempuh Pemerintah tidak dipungkiri berdampak pada ekonomi, terutama konsumsi swasta yang hanya tumbuh 1,03% pada triwulan III 2021. Demikian pula, pembatasan mobilitas juga berdampak pada kenaikan investasi yang lebih rendah, yaitu sebesar 3,74% pada triwulan III 2021. Dukungan pertumbuhan dari kinerja ekspor yang tetap tinggi, yaitu 29,16% pada triwulan III 2021 sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat, tidak mampu mengompensasi penurunan pertumbuhan konsumsi swasta dan investasi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja LU utama seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertambangan tumbuh positif Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan kembali semakin membaik pada triwulan IV 2021 dan seterusnya, didorong oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, kinerja ekspor yang tetap kuat, pembukaan sektor-sektor prioritas yang semakin luas, serta stimulus kebijakan yang terus berlanjut. Secara keseluruhan 2021 pertumbuhan ekonomi tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia yaitu 3,2-4,0%, dan pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi menjadi 4,7-5,5%.

Prospek perekonomian Indonesia diperkirakan akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2022 dengan stabilitas yang tetap terjaga. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai sekitar 4,7-5,5%, meningkat lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan sekitar 3,2-4,0% pada tahun 2021. Dengan asumsi tidak terjadi penyebaran gelombang ketiga pandemi Covid-19, tercapainya imunitas massal, dan berangsurnya pulihnya mobilitas masyarakat, konsumsi swasta diperkirakan akan kembali pulih dan mencapai pertumbuhan sekitar 5% pada semester II 2022. Kinerja ekspor juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dari tahun 2021 karena faktor perhitungan statistik. Kenaikan permintaan domestik, kinerja ekspor, kenaikan PMA dari implementasi UU Cipta Kerja, serta kembali dilanjutkannya proyekproyek infrastruktur strategis nasional yang tertunda akan mendorong kenaikan pertumbuhan investasi yang tinggi. Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi akan didukung sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Sementara itu, inflasi diperkirakan masih dapat terkendali dalam kisaran sasaran yaitu $3\pm 1\%$ dengan kapasitas produksi nasional yang masih memadai dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat hingga akhir 2022, meskipun dampak

kenaikan harga energi global perlu tetap perlu diwaspadai. Stabilitas eksternal juga diperkirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang berada pada kisaran 1,1-1,9% dari PDB, dengan surplus neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan lebih besar terutama dari arus modal asing khususnya dalam bentuk PMA sejalan dengan implementasi UU Cipta Kerja. Kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang lebih baik tersebut akan menjadi faktor positif untuk stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah kemungkinan kenaikan ketidakpastian pasar keuangan global karena normalisasi kebijakan moneter dari the Fed dan sejumlah negara maju lainnya. Bank Indonesia akan terus menempuh langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan dan terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tetap mendukung upaya bersama untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut.

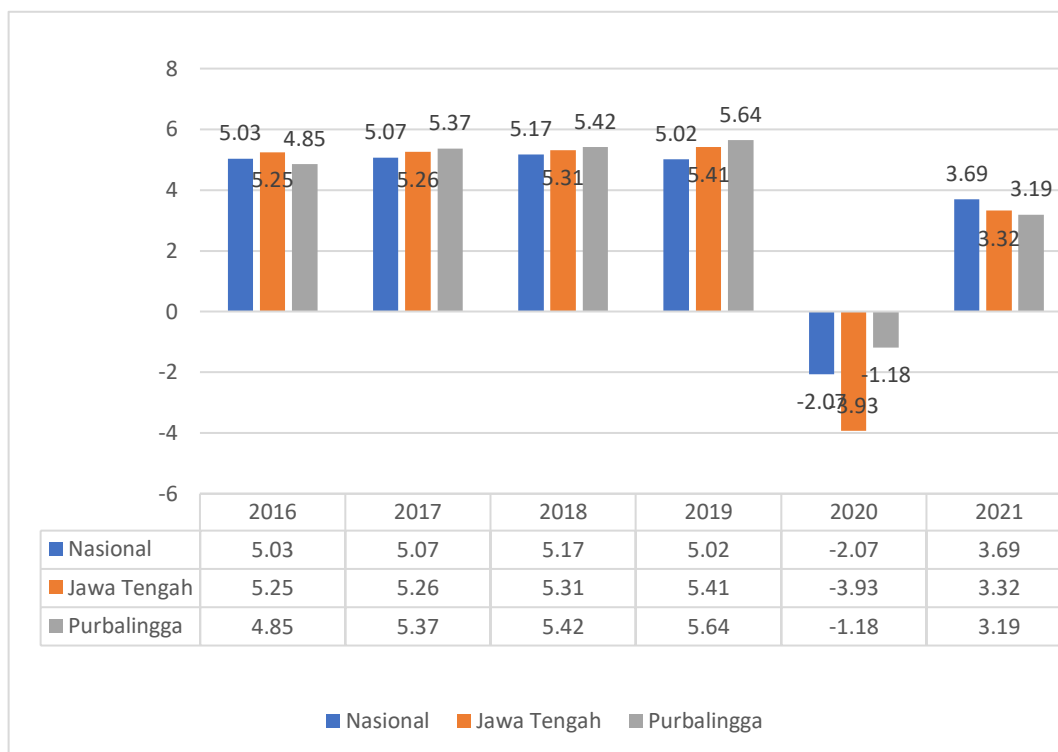
Hal ini yang nantinya bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level sebelum pandemi COVID-19. Potensi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor dengan dukungan belanja pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang rendah dan terkendali guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, investasi perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan pemberian fasilitas investasi dan promosi investasi. Hal ini agar pemerintah lebih pro-aktif dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Namun, Indonesia juga perlu mewaspadai gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada tahun 2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Karena itu, peningkatan pertumbuhan ekspor akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor dan investasi, baik melalui insentif fiskal maupun moneter wajib dilakukan. Investasi juga dapat diarahkan kepada UMKM, terutama UMKM yang berorientasi ekspor, hal ini dilakukan untuk mendorong program UMKM tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan,

perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan e-commerce. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan ekonomi, terutama kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Purbalingga selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purbalingga terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2016-2020. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama periode waktu 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan. Akan tetapi perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19 dimana mengalami kontraksi minus 1.18 persen. Pertumbuhan ekonomi kembali mengalami tren positif di tahun 2021 yang mencapai 3,19 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2021

Gambar III. 1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Purbalingga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2021

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5 % hingga 5,65%.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional, hanya pada tahun 2016 berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional. Selanjutnya berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2017-2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga bertumbuh antara 5.37 % pada tahun 2017 dan 5.64% pada tahun 2019. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi tertinggi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 11.65 %. Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu kategori usaha jasa perusahaan sebesar 10.95 %. Diikuti

dengan kategori jasa lainnya sebesar 9.23 %, transportasi dan pergudangan sebesar 9.12 %, jasa pendidikan sebesar 7.64 %, industri pengolahan 7.33 %, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6.99 %, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6.50 %, konstruksi sebesar 6.25 %, real estate sebesar 5.69 %, pengadaan listrik dan gas sebesar 5.62 %, pengadaan air. pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5.38 % dan diikuti lapangan usaha yang lain yang mengalami pertumbuhan dibawah 5 %. Namun, dampak pandemic Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan beberapa lapangan usaha mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga terutama pada sektor lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Konstruksi. Pertumbuhan ekonomi kembali mengalami tren positif di tahun 2021 dengan persentase sebesar 3,19 %.

**Tabel III.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga
Tahun 2017- 2021**

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	2.43	4.05	1.54	1.91	1.20
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.01	4.80	4.52	0.71	4.64
C.	Industri Pengolahan	5.99	5.13	7.33	-0.09	3.80
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4.63	4.79	5.62	3.24	5.98
E.	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	6.80	6.73	5.38	0.81	4.39
F.	Konstruksi	9.35	5.82	6.25	-2.19	6.95
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.44	5.56	6.50	-4.08	5.68
H.	Transportasi dan Pergudangan	6.31	5.08	9.12	-29.78	2.69
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.46	8.51	10.06	-1.81	4.44
J.	Informasi dan Komunikasi	15.95	12.80	11.65	10.11	5.76
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.27	3.50	3.63	1.62	2.24
L.	Real Estate	6.08	5.92	5.69	-0.01	2.21
M.N.	Jasa Perusahaan	9.13	9.77	10.95	-2.83	3.05
O.	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.97	3.54	3.74	-0.23	-0.38
P.	Jasa Pendidikan	7.31	7.80	7.64	-0.22	0.21
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.29	8.76	6.99	6.15	0.12
R.S.T.U.	Jasa lainnya	9.25	9.61	9.23	-6.16	0,67
Produk Domestik Regional Bruto		5.37	5.42	5.64	-1.18	3.19

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Purbalingga Dalam Angka, BPS Kabupaten Purbalingga, 2022

c. PDRB per Kapita

PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu. maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

**Tabel III.2 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 – 2021**

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB (Miliar Rp)						
- ADHB	19.984,16	21.439,65	23.190,33	24.917,59	25.093,68	26.393,81
- ADHK Tahun 2010	14.816,43	15.612,29	16.458,71	17.387,61	17.182,87	17.731,44
PDRB Perkapita (Rp)						
- ADHB	22,020,943	23,465,111	25,162,054	26,810,318	25,129,842	26,189,688
- ADHK Tahun 2010	16,326,519	17,087,225	17,858,088	18,708,364	17,207,632	17,594,310
Jumlah Penduduk	907,507	913,682	921,639	929,403	998,561	1,007,794

*Catatan : * Angka Sementara*

*** Angka Sangat Sementara*

Sumber : Purbalingga Dalam Angka, BPS Kabupaten Purbalingga, 2022

Pada tahun 2021, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) penduduk Kabupaten Purbalingga mencapai Rp.26.189.688,-. Sedangkan apabila menggunakan dasar PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) Tahun 2010, PDRB per kapita penduduk Kabupaten Purbalingga baru mencapai Rp.17.594.310,. Apabila menggunakan perhitungan atas dasar harga konstan (ADHK Tahun 2010) pertumbuhan PDRB perkapita masyarakat Purbalingga dari tahun 2016 - 2020 berada pada kisaran 4 % hingga 5% setiap tahunnya namun pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,18 %. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami tren positif dengan pertumbuhan mencapai 3,19 %. Hal ini berarti pada kenyataannya masyarakat Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatannya meningkat rata-rata kurang dari 5 % setiap tahun.

Berbeda pada perhitungan atas dasar harga berlaku yang memperhatikan adanya inflasi, kenaikan PDRB perkapita ADHB penduduk kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan antara 6 persen hingga 9 persen setiap tahunnya.

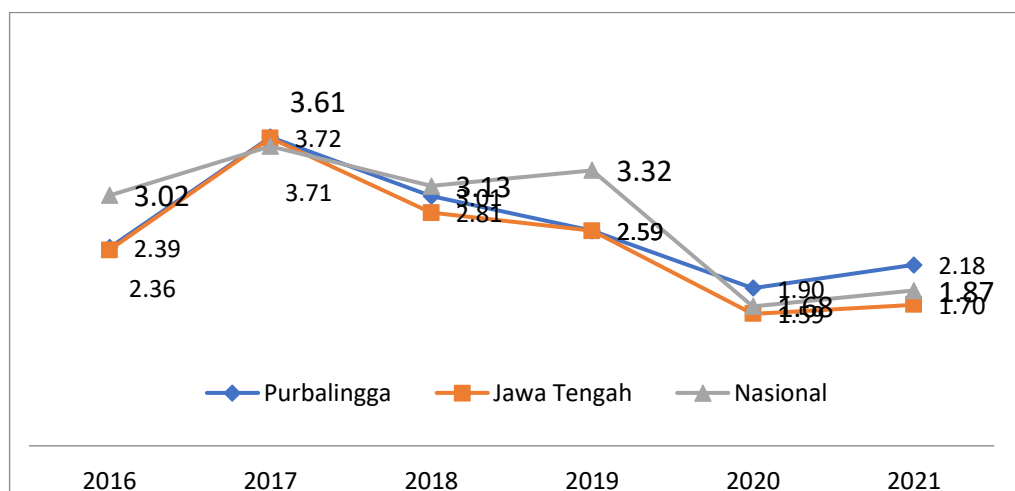
d. Inflasi

Inflasi pada tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga mengikuti inflasi 6 kota di Jawa Tengah, dimana yang paling dekat adalah Kota Purwokerto dengan nilai inflasi (YoY) sebesar 2,18 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 1,9. Bila dilihat dari perkembangannya, inflasi di Kabupaten Purbalingga mengalami tren perubahan setiap tahunnya dimana menunjukkan kenaikan dan penurunan. Tingkat inflasi di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2017-2021 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1% - 3%.

Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi yaitu cabai rawit, telur ayam ras, minyak goreng, beras, dan daging ayam ras. Sedangkan beberapa

komoditas yang menahan inflasi antara lain pepaya, nangka muda, kelapa, ayam hidup, dan kol putih/ kubis.

Gambar III. 2. Perbandingan Inflasi Kab. Purbalingga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2016-2021

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 diperkirakan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global, nasional dan kebijakan regional. Kondisi perekonomian Purbalingga juga tidak lepas atas peran dan arah perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”, dengan target sasaran dan proyeksi Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, yaitu :

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00 – 5,60 persen;
7. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21; dan

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga antara lain :

- a. Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dapat mendukung new normal, menekan penyebaran COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Purbalingga;
- b. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit.
- c. Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19.
- d. Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kabupaten Purbalingga, antara lain pembangunan Tol yang menghubungkan pantura dan pansela, reaktivasi jalur kereta Jawa Tengah bagian selatan, Pembangunan Terminal type A, pembangunan jaringan irigasi bendung slinga intage utara, Revitalisasi BLK Purbalingga dan lainnya.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Purbalingga yaitu :

- a. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama ekspor produk purbalingga seperti biumata palsu dan perlengkapan kecantikan lainnya.
- b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Nonmigas.
- c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan

pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.

- d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi COVID-19, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
- f. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
- g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.
- h. Isu penguatan ketahanan energi, dan air dimana ketergantungan kabupaten purbalingga terutama untuk pengembangan bandara jenderal besar sudirman membutuhkan cukup besar.
- i. Ketahanan industri pariwisata yang tertekan dimasa covid-19 membutuhkan sumberdaya besar untuk menjaga dan membangkitkannya kembali.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pemeliharaan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
- f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
- g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis

Memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan makro Provinsi Jawa Tengah di atas, serta memperhatikan tantangan dan potensi perekonomian daerah, maka sasaran makro pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 diproyeksikan sebagai berikut :

- a. Ekonomi Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu tumbuh antara 4,5 – 5 persen dengan pendapatan per kapita sebesar Rp. 27.154.253,-. Kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga difokuskan pada upaya pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis comparative advantages dan competitive advantage (digital) dengan preferensi perilaku milenial dan leisure ekonomi dengan seoptimal mungkin memanfaatkan bandara baru, pemanfaatan exit tol penghubung pantura, pembangunan universitas baru dan proyek nasional lainnya; peningkatan konektivitas dan peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan; perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil; dan pengembangan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja terampil.
- b. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka dibawah 14 - 15 persen, yang akan diupayakan melalui: 1) pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin; melalui pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok antara lain pangan, papan yang layak, air minum layak, sanitasi layak serta perlindungan kesehatan

dan pendidikan untuk semua dengan menggerakkan potensi social capital dan 2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian daerah. melalui sinergitas antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.

- c. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan pada kisaran < 5 persen. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah adanya peningkatan kualitas SDM utamanya bagi penduduk usia produktif, serta belum optimalnya serapan tenaga kerja.
- d. Inflasi dijaga berada dibawah 4 persen, dengan menjaga distribusi barang-barang strategis dan revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa.
- e. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan dapat mencapai lebih dari 69,5. Upaya pencapaiannya ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan gerakan promotif dan preventif, peningkatan pelayanan Pendidikan dengan menggerakkan potensi sosial masyarakat dalam mencegah putus sekolah dan mendorong anak tetap sekolah.

Proyeksi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga tersebut, disusun dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang berkembang, serta realisasi indikator makro tahun 2020 dan 2021 serta proyeksi tahun 2022 dan 2023 selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III.3 Realisasi dan Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2020	2021	2022	2023
1	PDRB (HK)	Rp. M	17.174,55	17.731,44	18,529.35	19,455.82
2	PDRB perkapita (HB)	Rp.Ribu	24,798	26,190	26.218.796	27.154.253
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,23	3,19	4 – 4,5	4,5 - 5
4	Tingkat Inflasi	Persen	1,90 *	2,18	< 4	< 4
5	Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,58	0,92	1,2	1,2
6	Penduduk Miskin	Persen	15,90	16,24	14,5 – 15,5	14 - 15
7	Tkt. Pengangguran	Persen	6,1	6,05	<5	<5
8	IPM	Angka	68,97	69.86	69,57	69,86

Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah hal-hal yang terkait dengan pendapatan, belanja, pembiayaan dan tata kelolanya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dijalankan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 1,983,948,936,000.00 Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga yang ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tersebut, antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah, pendapatan asli daerah diproyeksikan sebesar Rp. 295,954,164,000.00 proyeksi ini naik dari APBD induk tahun 2022 yang sebesar

Rp. 285,220,904,000.00 Adapun kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah adalah :

- a) E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya. Tujuan dari eMonitoring Pajak Daerah antara lain :
 - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
 - Mempermudah penghitungan pajak yang harus disetorkan;
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
 - b) Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
 - c) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai;
 - d) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
 - e) Mengevaluasi Perda yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan;
 - f) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
 - g) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
 - h) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
 - i) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
 - j) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- b. Pendapatan Transfer, pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi diproyeksikan sebesar Rp. 1,676,684,772,000.00 proyeksi ini turun dari APBD induk tahun 2022 yang sebesar Rp. 1,719,087,824,000.00. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan dana DAK tahun 2023 yang menghapus DAK regular. Adapun kebijakan untuk optimalisasi belanja transfer adalah :
- a) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
 - b) Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid.

- c) Penyiapan readiness criteria sesuai persyaratan yang dibutuhkan dana alokasi khusus.
 - d) Perbaikan data teknis urusan wajib pelayanan dasar seperti dapodik, sisdmk dan lain sebagainya.
 - e) Peningkatan tatakelola keuangan daerah dan peningkatan kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar agar dapat meningkatkan dana insentif daerah.
- c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 11,310,000,000.00, proyeksi ini turun dari APBD induk tahun 2022 yang sebesar Rp. 15,986,750,000.00. Adapun kebijakan pendapatan ini dilakukan dengan :
- a) Meningkatkan optimalisasi dana hibah.
 - b) Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2020 – 2021, Anggaran tahun 2022, Proyeksi 2023 serta Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel III.4.

Tabel III.4

Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 s.d tahun 2024 (dalam ribu rupiah)

Uraian	Realisasi 2020	APBD P 2021	APBD Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024
1 Pendapatan Daerah	1.952.575.564	1,980,449,932	2,020,295,478	1,983,948,936	2,049,368,140
1.1 Pendapatan asli daerah	313.514.951	289,814,522	285,220,904	295,954,164	300,783,766
a Pajak daerah;	58.829.669	55,825,000	60,501,110	70,800,778	74,340,817
b Retribusi daerah;	10.969.197	12,415,891	13,778,461	14,499,028	14,756,729
c Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	21.682.472	18,439,442	17,956,312,	20,269,337	21,801,199
d Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	222.033.613	203,134,189	192,985,021	190,385,021	189,885,021
1.2 Pendapatan transfer;	1.539.129.862	1,578,944,711	1,719,087,824	1,676,684,772	1,732,597,624
<i>a Transfer Pemerintah Pusat;</i>	1.420.758.825	1,451,934,935	1,591,955,824	1,536,042,972	1,591,955,824
I Dana perimbangan;	1.144.405.027	1,188,666,504	1,344,587,620	1,288,674,768	1,344,587,620
- Dana Transfer Umum;	873.100.126	855,344,073	857,626,302	863,670,443	857,626,302
+ DBH;	32.048.138	25,293,473	27,096,587	28,753,420	27,096,587
+ DAU	841.051.988	830,050,600	830,529,715	830,529,715	830,529,715
- Dana Transfer Khusus	271.304.900	339,286,694	333,322,431	425,004,325	342,162,713
+ DAK Fisik;	63.818.587	121,163,317	171,045,996	98,747,782	160,704,775

Uraian	Realisasi 2020	APBD P 2021	APBD Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024
+ DAK Non Fisik	207.486.313	212,159,114	315,915,322	326,256,543	326,256,543
ii Dana insentif daerah;	16.385.091	16,385,091	-	-	-
iii Dana otonomi khusus;					
iv Dana keistimewaan;					
v Dana desa.	246.883.340	246,883,340	247,368,204	247,368,204	247,368,204
<i>b Transfer antar-daerah.</i>	<i>127.009.776</i>	<i>127,009,776</i>	<i>127,132,000</i>	<i>140,641,800</i>	<i>140,641,800</i>
i Pendapatan bagi hasil;	112.992.776	112,992,776	113,115,000	126,624,800	126,624,800
ii Bantuan keuangan	14.017.000	14,017,000	14,017,000	14,017,000	14,017,000
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	99.930.750	111,690,699	15,986,750	11,310,000	15,986,750
a Hibah;	<i>4.300.000</i>	12,163,750	15,986,750	11,310,000	15,986,750
b Dana darurat; dan/atau					
c Lain-lain pendapatan	95.630.750	99,526,949	-	-	

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diurusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Selain itu, Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan sasaran yang dicapai Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021, maka kebijakan umum belanja Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 diprioritaskan pada:

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
- b. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Rekonstruksi sosial pasca covid dan arus informasi sehat;
- c. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Akses pendidikan untuk semua dan Layanan kesehatan dengan membangun kualitas layanan yang baik;
- d. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;

- e. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi umat berbasis *comparative advantages* dan *competitive advantage* (digital) dengan preferensi perilaku milenial dan leisure ekonomi;
- f. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Pendidikan keagamaan dan tempat ibadah juara;
- g. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Infrastruktur konektivitas wilayah dan lingkungan;
- h. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Gerakan membangun desa;
- i. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah;

Belanja daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp. **2,054,148,545,000.00** terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun kebijakan masing-masing komponen belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

Belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp. 1,525,850,488,698,- atau naik dari tahun 2022 sebesar Rp. 1,424,716,247,500.00,-. Kenaikan belanja operasi disebabkan karena adanya kenaikan belanja pegawai untuk formasi tahun 2021 dan sisa formasi yang belum terangkat. Belanja operasi dibagi kedalam beberapa komponen yakni :

- a) Belanja Pegawai, Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja ASN.
- b) Belanja Barang dan Jasa, Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah dalam bentuk belanja barang,

belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

(a) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada: i. Pemerintah Pusat; ii. Badan Usaha Milik Negara iii. Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; iv. Partai Politik. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Dalam hal Pemberian hibah kepada partai politik merupakan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Belanja Bantuan Sosial, Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada: i. individu; ii. keluarga; iii. kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; iv. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Sifat pemberian hibah dilaksanakan tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b) Belanja Modal

Belanja modal diproyeksikan sebesar Rp. 120,080,433,000.00,-, belanja ini digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal terdiri atas: (a) belanja modal

peralatan dan mesin; (b) belanja modal bangunan dan gedung; (c) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; (d) belanja modal aset tetap lainnya; (e) belanja aset lainnya;

c) Belanja tidak terduga,

Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar Rp. 4,000,000,000,- digunakan untuk pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

d) Belanja transfer

Belanja transfer diproyeksikan sebesar Rp. 404,218,014,000,- merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dihitung berdasarkan kemampuan daerah. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya diserahkan kepada pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Apabila dibandingkan antara total rencana pendapatan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp. 1,983,948,936,000,- dengan total rencana belanja Kabupaten Purbalingga tahun 2023 yang sebesar Rp. 2,054,148,936,000,- maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 70,200,000,000,-. Defisit ini akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 75,000,000,000,- dan pengeluaran pembiayaan dalam sebesar Rp. 4,800,000,000,-.

Tabel III. 5.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 s.d Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun 2020	APBD Tahun 2021	APBD TAHUN 2022	Proyeksi /Target pada Tahun 2023	Prakiraaan maju tahun 2024
1 Belanja Daerah	1.894.819.879	2,147,958,138	2,077,807,977	2,054,148,936	2,094,505,640
1.1 Belanja Operasi	1.361.356.364	1,501,221,057	1,424,716,247	1,525,850,488,698	1,565,107,194
1.2 Belanja Modal	130.334.116	240,445,215	238,358,322	120,080,433	120.080.433
1.3 Belanja Tidak Terduga	9.913.347	12,954,903	13,700,000	4,000,000	4,000,000
1.4 Belanja Transfer	393.216.050	393,336,962	401,033,407	404,218,014	405,318,013
a Belanja bagi hasil;	6.937.738	6,937,738	7,427,957	8,529,981	8,529,980
b Belanja bantuan keuangan	386.278.312	386,399,224	393,605,450	395,688,033	396,788,033

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2023 diarahkan dalam rangka menutup defisit anggaran yang direncanakan. Sumber utama pada penerimaan pembiayaan Kabupaten Purbalingga adalah SiLPA. SiLPA tersebut dengan kontribusi utama adalah sisa belanja, baik karena efisiensi ataupun penyebab lain. Namun demikian, diharapkan dalam realisasinya SiLPA dapat turun dengan asumsi dari acres gaji yang tidak dipakai dan sisa belanja yang turun dari tahun ke tahun. Adapun silpa dari aspek lain adalah karena adanya silpa BLUD yang belum teralokasikan dalam APBD tahun 2022 yakni pendapatan dari klaim covid tahun 2020.

Dalam hal keuangan daerah diperkirakan surplus diutamakan untuk penyertaan modal dan investasi daerah lainnya yang mendukung pelayanan publik dan penerimaan pendapatan. Sebaliknya, apabila APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Kebijakan Pembiayaan harus terkait pula dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pemanfaatan potensi-potensi daerah melalui pos pembiayaan diantaranya adalah melalui Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pembiayaan ini dimaksudkan dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai *profit center* yang dimiliki pemerintah daerah. Alokasi pembiayaan untuk penyertaan modal diberikan sesuai dengan rencana pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Apabila terdapat surplus pembiayaan dapat menyediakan dana cadangan. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III. 6.**Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 s.d Tahun 2024**

Uraian		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	APBD Tahun 2022	Proyeksi /Target pada Tahun 2023	Prakiraan Maju 2024
1	Penerimaan Pembiayaan daerah.	129.993.761.009	179,575,632,000.00	62,375,000,000.00	75,000,000,000.00	50,000,000,000.00
	- Silpa Tahun Lalu	129.993.761.009	179,575,632,000.00	62,375,000,000.00	75,000,000,000.00	50,000,000,000.00
2	Pengeluaran Pembiayaan daerah.	8.300.000.000	12,067,426,000.00	4,862,500,000.00	4,800,000,000.00	4,862,500,000.00
	- Penyertaan Modal	8.300.000.000	12,067,426,000.00	4,862,500,000.00	4,800,000,000.00	4,862,500,000.00
	- Cadangan Pilkada 2024	0	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	121.693.761.009	167,508,206,000.00	57,512,500,000.00	71,200,000,000.00	45,137,500,000.00

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga untuk Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-dua dari Dokumen RPJMD tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu juga dalam prosesnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 tidak terlepas dari capaian pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dalam menentukan target untuk tahun berikutnya. Sehingga, perumusan sasaran dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dilakukan dengan mendasarkan pada: a) hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2021 disandingkan dengan target kinerja Tahun 2021 yang direncanakan dalam masa transisi RPJMD 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026; b) identifikasi permasalahan pembangunan daerah; c) rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka keuangan daerah tahun 2023, termasuk juga memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang; serta d) mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian sasaran pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana amanat dalam PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 wajib mengacu pada Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 guna keselarasan antar dokumen perencanaan skala lima tahunan dengan dokumen perencanaan skala tahunan. Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah. Selain itu juga, tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan upaya dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi, perumusannya juga memperhatikan perkembangan isu strategis nasional dan global, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDG's, serta mempertimbangkan keberlanjutan

program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah “**PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA**”.

Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Purbalingga yang Mandiri** adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.
- b. **Purbalingga yang Berdaya Saing** adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.
- c. **Purbalingga yang Sejahtera** adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

d. **Maksud dari Berakhlak Mulia** adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati Purbalingga Terpilih tersebut adalah:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Ketujuh Misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Misi 1:** Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.

Untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan perilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

- b. Misi 2:** Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus diciptakan agar berbagai upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakat harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga dapat diwujudkan

kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang tinggi.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah: Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran, dengan Sasaran: Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum.

c. Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia antara lain pangan, papan, air bersih, lingkungan permukiman yang sehat dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Tercukupinya kebutuhan tersebut secara layak merupakan landasan yang harus dibangun secara kokoh agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan Sasaran:

1. Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat.
2. Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

d. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, serta kesetaraan gender, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

e. Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta

didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah dari Misi ke - 5 adalah: Meningkatnya daya saing ekonomi daerah, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah.
2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha.

f. Misi ke-6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan melalui pembangunan berbasis desa dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dan sumberdaya alam. Oleh karena itu dibutuhkan pemerintahan desa yang kuat dan didukung oleh lembaga kemasyarakatan desa serta peran serta aktif masyarakat.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 adalah: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa, dengan Sasaran: Meningkatnya status kemandirian desa.

g. Misi ke-7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Misi ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan daya saing infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Implementasi misi ini diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan koneksitas wilayah serta daya dukung lingkungan dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-7 adalah Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.
2. Optimalnya Pemanfaatan Ruang.
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Adapun indikator dan target kinerja tujuan serta sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 secara lengkap terdapat pada tabel 4.1.

Tabel IV. 1.
Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga dan Target Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN 2023
				2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	Misi 1: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.					
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,88 (B)	66,22 (B)	72
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Angka	62,27 (B)	64,06 (B)	69
	Misi 2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia					
	Tujuan: Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran	Angka konflik sosial dan kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,96	1,487	1,49
1.	Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum	Angka konflik sosial	per 10.000 penduduk	0,04	0,067	0,058
		Angka kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,91	1,39	1,54

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN 2023
				2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak					
	Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	15,9	16,24	14 – 15
1.	Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	80,15	79,33	81,5
		Cakupan akses air minum layak	Persen	92,05	93,01	92,86
		Cakupan sanitasi layak	Persen	92,26	93,18	92,50
		Cakupan kawasan permukiman tidak kumuh perkotaan	Persen	99,39	100,00	99,19
2.	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah	Persen	77,09	88,73	82,30
	Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat					
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia, serta Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,97	69,15	69,86
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,78	93,08	93
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	Tahun	11,99	12,00	12,10
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,14	73,21	73,3
3.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak	Nilai	374,98	601,53	610

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN 2023
				2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja					
	Tujuan: Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,23	3,19	4,5 – 5
1.	Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah	Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah /jiwa	25.118.000	26.190.000	27.154.253
2.	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,10	6,05	< 5
	Misi ke-6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa					
	Tujuan: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Angka	0,68	0,69	0,76
1.	Meningkatnya status kemandirian desa	Persentase desa dengan kategori desa mandiri dan maju	Persen	23,66	30,80	44,64
	Misi ke-7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan					
	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	84,25	84,25	80,775
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,48	71,66	69,33
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks jalan mantap	Angka	78,5	86,38	82,5

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN 2023
				2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
		Ratio konektivitas angkutan jalan	Persen	90	91	95
		Persentase luas oncoran air irigasi	Persen	66	67	72
2.	Optimalnya pemanfaatan ruang	Ketaatan pelaksanaan penataan ruang	Persen	87,41	92,22	>90
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,48	71,66	>70

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 merupakan tahapan pada tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026, dan juga dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Purbalingga tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sedangkan tema RKP Tahun 2023 adalah : **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan arah kebijakan:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;

5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0%
3. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31 – 73,49
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 106 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5%

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 juga harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden yang juga tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 13402/SJ tentang fokus kerja presiden 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai

tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional Jangka Menengah serta mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional (PN) yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; serta
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022, dimana masih mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan dampak Covid-19. Kebijakan di tahun 2023 lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumberdaya manusia, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023.

Prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah guna "**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari**". Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 ini dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2023 dan fokusnya yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas pembangunan daerah memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi prioritas pembangunan nasional meliputi:
 - a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
 - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
 - d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
 - e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
 - f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
 - g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
2. Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diarahkan pada:
- a. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dengan fokus pada:
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi berbasis industri, peningkatan kualitas kelembagaan petani berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan dan subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, pengembangan kawasan pertanian/food estate, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan database, serta peningkatan prasarana dan sarana pertanian;
 - 2) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, peningkatan akses permodalan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui optimalisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI), serta peningkatan kualitas prasarana sarana perikanan berbasis teknologi;
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;
 - 4) Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar;

- 5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan keperantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keperantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;
- 6) Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
- 7) Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepeminatan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;
- 8) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah, dan pansela;
- 9) Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air sungai danau waduk, peningkatan tampungan air baku, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir dan laut, pengelolaan sampah berbasis 3Ng (Ngelongi, Nggunakke, dan Ngolah), penerapan *Good Mining Practice*, konservasi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dengan pendekatan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim;
- 10) Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dokumentasi sejarah kebencanaan, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta

peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana;

- b. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE), dengan fokus pada:
- 1) Penyediaan *basic need access* (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih, dan listrik murah);
 - 2) Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, utamanya melalui pendampingan dan pengembangan daya saing usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (community based), pengembangan aktivitas ekonomi baru berbasis pada potensi lokal, pengembangan kewirausahaan pemuda yang berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi digital;
 - 3) Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keperantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal;
 - 4) Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan, peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, pelayanan pengawasan tenaga kerja, serta membangun kesatuan sistem demand dan supply side tenaga kerja;

- c. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, dengan fokus pada:
- 1) Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya, dan kearifan lokal;
 - 2) Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan even olahraga;
 - 3) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;
 - 4) Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, dengan fokus pada:
- 1) Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif, sarana pelayanan publik yang inklusif, open

government melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- 2) Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan penguatan sistem integritas internal instansi;
- 3) Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta optimalisasi peta proses bisnis pemerintahan daerah;
- 4) Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
- 5) Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2023.

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00 – 5,60 persen;
7. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05;

11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga

Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 dilaksanakan dengan tema **“Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Manusia Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang Didukung Penguatan Perekonomian Daerah, Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan serta Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Desa”**, dengan menitikberatkan pada beberapa prioritas sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain melalui:
 - Peningkatan Akses Pangan utamanya bagi kelompok rentan;
 - Peningkatkan Akses Air Bersih;
 - Penyediaan Rumah Layak Huni;
 - Peningkatan Akses Sanitasi Masyarakat.
 - b. Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain melalui:
 - Santunan Kematian Bagi Keluarga Kurang Mampu;
 - Revitalisasi Rumah Singgah;
 - Peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial;
 - Fasilitasi dan Bantuan kepada PPKS.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, utamanya melalui
 - Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
 - Penguatan tenaga kesehatan (peningkatan kapasitas SDM Kesehatan); dan
 - Sinergitas pembiayaan kesehatan murah dan terjangkau.
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan, utamanya melalui

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai sesuai Standar Nasional Pendidikan;
 - Layanan Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan distribusi dan komposisi tenaga pendidik;
 - Peningkatan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peningkatan kualitas layanan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan;
 - Penguatan PKBM / Kejar Paket;
 - Peningkatan Manajemen Sekolah; dan
 - Pengembangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- c. Peningkatan cakupan pelayanan KB;
- d. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak, utamanya melalui:
- Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - Pembentukan Desa Ramah Anak;
 - Revitalisasi Forum Lintas Perempuan.
- e. Pengembangan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga, utamanya melalui:
- Fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi;
 - Fasilitasi berkembangnya olahraga prestasi.
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan fokus pada:
- a. Pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro - kecil secara tepat sasaran :
- Fasilitasi proses produksi;
 - Fasilitasi permodalan usaha;
 - Pengembangan branding produk Usaha Mikro Kecil Purbalingga;
 - Pelatihan kewirausahaan;
 - Pengembangan sentra IKM.
- b. Menciptakan Perluasan Lapangan Kerja, antara lain melalui:
- Program Kartu Pra Kerja Purbalingga;
 - Mendorong Percepatan Realisasi Investasi;
 - Sinergitas Pelatihan Ketrampilan Produktif.
- c. Pemulihan Aktivitas Wisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain melalui:
- Pengembangan sinergitas pelaku wisata dan pendukung wisata;
 - Mendorong Penyelenggaraan Event nasional dan Internasional;
 - Peningkatan kapasitas Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif;
 - Optimalisasi *Tourism Information Center* (TIC);
 - Penguatan dan Pengembangan Desa Wisata.

- d. Mengembangkan Komoditas Sektor Primer yang memiliki nilai strategis, antara lain melalui:
 - Asuransi Pertanian;
 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - Pengembangan komoditas pertanian unggulan dan bernilai tambah tinggi;
 - Pengembangan Klaster Ikan Hias.
 - e. Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat.
 - Rehabilitasi Pasar Pemda;
 - Rehabilitasi Pasar Desa;
 - Sertifikasi Pasar Rakyat;
4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan, dengan fokus pada:
- a. Memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar dan kawasan khusus, antara lain melalui:
 - Peningkatan akses menuju destinasi wisata, kawasan bandara, kawasan budidaya dan kawasan peruntukan industri;
 - Peningkatan akses pelayanan dasar antar wilayah.
 - Mendukung implementasi Peningkatan Jalan Banyumas – Klampok sebagaimana tercantum dalam Perpres 79 Tahun 2019
 - b. Memperkuat infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang, antara lain melalui :
 - Mendukung keberlanjutan Pengembangan simpul transportasi udara Bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS) dan Reaktivasi Kereta Api Purwokerto – Wonosobo sebagaimana tercantum dalam Perpres 79 Tahun 2019;
 - Meningkatkan fasilitas kelengkapan jalan untuk mendukung konektivitas menuju Bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS);
 - Revitalisasi Terminal Tipe C untuk mendukung akses Trans Jateng;
 - Kajian trayek angkutan perkotaan dan perdesaan sebagai *feeder* Trans Jateng;
 - c. Peningkatan Infrastruktur dan Manajemen Pengelolaan Sampah, utamanya melalui :
 - Melanjutkan pembangunan pengembangan TPA;
 - Penyusunan Rencana Induk Persampahan;
 - Pembangunan TPS, TPS 3R dan TPST.
 - d. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau, antara lain melalui :
 - Pembangunan RTH untuk meningkatkan persentase RTH Publik;
 - Pembangunan RTH di Ibukota Kecamatan.

5. Peningkatan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui pengembangan regulasi dan sistem penunjang kinerja;
 - b. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui:
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
 - Membangun lingkungan budaya birokrasi yang bersih dan melayani.
 - c. Peningkatan Inovasi pelayanan publik, antara lain melalui:
 - Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi;
 - Pembangunan Mall Pelayanan Publik;
 - Satu OPD satu Inovasi Pelayanan Publik.
 - d. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, melalui
 - Memfasilitasi komunikasi antar dan intern umat beragama;
 - Penguatan aparat Trantibum;
 - Mendorong ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat;
 - Peningkatan ketahanan bencana;
 - Fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan lainnya.
6. Penguatan Desa, dengan fokus pada:
 - a. Optimalisasi Potensi Desa melalui Pengembangan Desa Tematik;
 - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Penguatan Peran lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah;
 - c. Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa melalui:
 - Digitalisasi desa;
 - Pembinaan dan pengawasan administrasi desa;
 - Penghargaan desa berprestasi.
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana desa.

4.3. Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Purbalingga juga disusun dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, terutama yang tertuang dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, sebagai bentuk keselarasan antara kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Secara lengkap sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel IV. 2. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Prioritas Kabupaten Purbalingga	Selaras Dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Selaras Dengan Prioritas Nasional
Prioritas 1 : Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)	Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Prioritas 3 : Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Prioritas 4 : Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; dan	Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; serta Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Prioritas 5 : Peningkatan Pelayanan Publik	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,	Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam

Prioritas Kabupaten Purbalingga	Selaras Dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Selaras Dengan Prioritas Nasional
	kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	dan Transformasi Pelayanan Publik;
Prioritas 6 : Penguatan Desa	<p>Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE); dan</p> <p>Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah</p>	Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas Tahun 2023

Indikasi rencana program tahun 2023 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, yang mempertimbangkan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Rencana program prioritas yang disusun berdasarkan urusan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Kunkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Selain itu rencana program prioritas juga mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 terbagi ke dalam : 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan serta 1 (satu) urusan pemerintahan umum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (6 Urusan Bidang)

1. Urusan Pendidikan (2 Program)

1. Program Pengelolaan Pendidikan (4 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator program pada tahun 2023 yaitu: 1) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar : 99,75%; 2) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama : 95,77%; 3) APM PAUD : 76%; 4) Presentase PKBM yang terakreditasi : 66,67%.

Fokus kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan 22 sub kegiatan; 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan 27 sub kegiatan; 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan 10 sub kegiatan; 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan 4 sub kegiatan.

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (1 kegiatan)

Program ini akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai target indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20 : 14,62%.

Fokus kegiatan yaitu: Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan 1 sub kegiatan.

2. Urusan Kesehatan (4 Program)

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (4 kegiatan)

Program ini akan dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai target indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Persentase status akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan minimal Madya atau sederajat : 51,72%; 2) Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk : 2,20 s/d 2,25 per 100.000; 3) Prevalensi stunting (data EPPGM) : 15%; 4) Angka Morbiditas : 18,6%.

Fokus kegiatan yaitu: 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 7 sub kegiatan; 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan 30 sub kegiatan; 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, dengan 2 sub kegiatan; 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan 3 sub kegiatan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase puskesmas dengan 9 (Sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar : 56,62%.

Fokus kegiatan yaitu: 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan 2 sub kegiatan; 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan 2 sub kegiatan; 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

1) Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar : 49,43%; dan
2) Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan : 34%.

Fokus kegiatan yaitu: 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan 1 sub kegiatan; 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dengan 1 sub kegiatan; 3) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, dengan 1 sub kegiatan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu : Persentase Desa/Kelurahan sehat mandiri : 27,20%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan; 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan; 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (8 Program)

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

1) Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik : 47%; 2) Persentase bendung kondisi baik : 48,5%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan 4 sub kegiatan.

2. Program Penataan Bangunan Gedung (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik sebesar : 58 bangunan

Fokus kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan 2 sub kegiatan.

3. Program Penyelenggaraan Jalan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang sebesar : 1,4%

Fokus kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan 11 sub kegiatan.

4. Program Pengembangan Jasa Kontruksi (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase jasa kontruksi yang terbina : 69%

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dengan 1 sub kegiatan; 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan; dan 3) Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil), dengan 1 sub kegiatan.

5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang sebanyak : 4 kawasan.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, dengan 2 sub kegiatan; 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan 2 sub kegiatan.

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n sebesar : 1,39%

Fokus kegiatan, yaitu: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan 3 sub kegiatan.

7. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R sebesar : 2,5%

Fokus kegiatan, yaitu: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah di Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan.

8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahun n sebesar : 1,44%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam di Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (4 Program)

1. Program Pengembangan Perumahan (4 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan : 100%

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan 3 sub kegiatan; 2) Sosialisasi dan Perseiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan 2 sub kegiatan; 3) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan 2 sub kegiatan; 4) Penerbitan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, dengan 1 sub kegiatan.

2. Program Kawasan Permukiman (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase Luas kawasan kumuh perkotaan tertangani sebesar : 24,88%.

Fokus kegiatan, yaitu: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) ha, dengan 1 sub kegiatan.

3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar : 97,71%

Fokus kegiatan, yaitu: Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Cakupan Lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU layak sebesar : 79,25%.

Fokus kegiatan, yaitu: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, dengan 2 sub kegiatan.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (3 Program)

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

1) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sebesar 99,65%; dan 2) Persentase penegakkan perda : 12,96%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 sub kegiatan; 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan 3 sub kegiatan; dan 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

2. Program Penanggulangan Bencana (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan sebesar : 53%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan 9 sub kegiatan; 2) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan 4 sub kegiatan; dan 3) Penataan sistem dasar penanggulangan bencana dengan 3 sub kegiatan.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase penanganan kejadian kebakaran sebesar 100%

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; dan 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan 1 sub kegiatan.

6. Urusan Sosial (5 Program)

1. Program Pemberdayaan Sosial (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial sebesar 58,34%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 sub kegiatan.

2. Program Rehabilitasi Sosial (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebesar 45,36%.

Fokus kegiatan, yaitu: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan 10 sub kegiatan.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial sebesar 86,87%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

4. Program Penanganan Bencana (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 94,94%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan 4 sub kegiatan; dan 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase TMP dan makam leluhur yang fasilitasi pengelolaannya : 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (18 Urusan Bidang)

7. Urusan Tenaga Kerja (4 Program)

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja : 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan 1 sub kegiatan.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja sebesar 3,86%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan 2 sub kegiatan; dan 2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta dengan 1 sub kegiatan.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja lintas daerah sebesar 50,23%.

Fokus kegiatan, yaitu: Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

4. Program Hubungan Industrial (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) sebesar 93,01%

Fokus kegiatan, yaitu: Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (5 Program)

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif dan perempuan sebagai pengambilan keputusan di OPD : 14,02%; dan 2) Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga : 30,43%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan; dan 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

2. Program Perlindungan Perempuan (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) sebesar 2,43%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan; dan 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase data gender dan anak yang disediakan : 100%

Fokus kegiatan, yaitu: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Cakupan desa/kelurahan layak anak sebesar 31,38%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; dan 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan.

5. Program Perlindungan Khusus Anak (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus sebesar 26,49%; dan 2) Persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; dan 2) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

9. Urusan Pangan (4 Program)

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik sebesar 54,87%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG sebesar 94,5%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan 3 sub kegiatan; dan 2) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan 3 sub kegiatan.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase desa rentan pangan (Prioritas I, II dan III) sebesar 24,27%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman sebesar 90%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan.

10. Urusan Pertanahan (3 Program)

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten dengan 1 sub kegiatan.

2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan 1 sub kegiatan.

3. Program Penatagunaan Tanah (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah sebesar 0,27%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

11. Urusan Lingkungan Hidup (9 Program)

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan pemantauan kualitas air dan udara sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase peningkatan luas RTH sebesar 1,05%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan.

3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup : 100%

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; dan 2) Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/Atau Kegiatan Yang izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan sebesar 69,01%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyimpanan sementara Limbah B3 dengan 2 sub kegiatan.

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase bank sampah yang beroperasi sebesar 64,29%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat dengan 2 sub kegiatan.

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase sekolah adiwiyata sebesar 6,50%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

9. Program Pengelolaan Persampahan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan area pelayanan sampah sebesar 61,11%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pengelolaan Sampah dengan 3 sub kegiatan.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (4 Program)

1. Program Pendaftaran Penduduk (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Cakupan kepemilikan KTP elektronik : 99,02%; 2) Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga : 99,22%; dan 3) Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA : 50%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan 2 sub kegiatan.

2. Program Pencatatan Sipil (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian sebesar 72,68%; dan 2) Cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian, pengakuan, dan pengesahan anak sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan 1 sub kegiatan; dan 2) Pelayanan Pencatatan Sipil dengan 1 sub kegiatan.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama sebesar 38,46%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan 1 sub kegiatan.

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Cakupan lembaga/instansi yang memanfaatkan profil data kependudukan dan agregatnya sebesar 96,37%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyusunan Profil Kependudukan dengan 1 sub kegiatan.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 Program)

1. Program Penataan Desa (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Penataan Desa dengan 3 sub kegiatan.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase desa yg melakukan kerjasama aktif (baik antar desa dan desa dengan pihak ketiga) sebesar 74,55%.

Fokus kegiatan, yaitu: Fasilitasi Kerjasama antardesa dengan 2 sub kegiatan.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa sebesar 48,15%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi desa dengan 14 sub kegiatan.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina sebesar 63,14%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat kab/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat dengan 6 sub kegiatan.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (3 Program)

1. Program Pengendalian Penduduk (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

1) Persentase ketersediaan dokumen kebijakan pengendalian penduduk : 100%

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan 4 sub kegiatan; dan 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 sub kegiatan.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (4 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

1) Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need* KB) sebesar 9,57%; dan 2) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 33,70%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan 7 sub kegiatan; 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan 1 sub kegiatan; 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 sub kegiatan; dan 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan 2 sub kegiatan.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

1) Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS : 10,34%; dan 2) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB sebesar 83,77%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan 4 sub kegiatan; dan 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan 1 sub kegiatan.

15. Urusan Perhubungan (1 Program)

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (10 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

1) Persentase angkutan umum yang aktif sebesar 71,12%; dan 2) Persentase perlengkapan jalan kondisi baik sebesar 75%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan 4 sub kegiatan; 2) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan 1 sub kegiatan; 3) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan 1 sub kegiatan; 4) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan 1 sub kegiatan; 5) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan; 6) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan; 7) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan 1 sub kegiatan; 8) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan; 9) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; dan 10) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika (2 Program)

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase OPD yang memiliki Website aktif sebesar 70%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan 4 sub kegiatan.

2. Program Aplikasi Informatika (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi informatika sebesar 80%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan 2 sub kegiatan; dan 2) Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan 1 sub kegiatan.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah (6 Program)

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase koperasi aktif sebesar 75,1%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan 1 sub kegiatan.

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK sebesar 58%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian sebesar 55%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan; dan 2) Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 10%.

Fokus kegiatan, yaitu: emberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin sebesar 2,5%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan 2 sub kegiatan.

6. Program Pengembangan UMKM (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase UMKM yang difasilitasi sebesar 4,42%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan 1 sub kegiatan.

18. Urusan Penanaman Modal (5 Program)

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Score Iklim Usaha sebesar 80 point.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; dan 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

2. Program Promosi Penanaman Modal (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: jumlah kepedulian investasi sebanyak 3 investor

Fokus kegiatan, yaitu: Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Indeks pelayanan publik bidang investasi sebesar 4 point.

Fokus kegiatan, yaitu: Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 sub kegiatan.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase kepatuhan perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sebesar 105%.

Fokus kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase Data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersaji secara update sebesar 34,68%.

Fokus kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga (2 Program)

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi sebesar 29,2%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; dan 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (4 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase Cabang olah raga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional sebesar 45,45%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan; 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan; 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan 1 sub kegiatan; dan 4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan 1 sub kegiatan.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase kelompok pramuka aktif sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan 1 sub kegiatan.

20. Urusan Statistik (1 Program)

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar sebesar 80%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Statistik Sektor Di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota dengan 2 sub kegiatan.

21. Urusan Persandian (1 Program)

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan informasi pemerintah daerah melalui santel yang tersampaikan kepada pihak terkait sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan 3 sub kegiatan.

22. Urusan Kebudayaan (4 Program)

1. Program Pengembangan Kebudayaan (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan) sebanyak 7 objek.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; 2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan; dan 3) Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

2. Program Pembinaan Sejarah (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase sejarah lokal yang dilestarikan sebesar 70%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diestarkan sebesar 15%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan; dan 2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

4. Program Pengelolaan Permuseuman (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase benda koleksi museum yang dikelola sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan.

23. Urusan Perpustakaan (2 Program)

1. Program Pembinaan Perpustakaan (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase perpustakaan aktif sebesar 3,24%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 sub kegiatan; dan 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 sub kegiatan.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan) sebesar 60%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan; dan 2) Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

24. Urusan Kearsipan (2 Program)

1. Program Pengelolaan Arsip (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase SKPD/Ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku sebesar 25,89%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; dan 3) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (5 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase jumlah arsip yang diselamatkan sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun dengan 2 sub kegiatan; 2) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; 3) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan 3 sub kegiatan; 4) Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; dan 5)

Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang dengan 3 sub kegiatan.

5.1.3. Urusan Pilihan (6 Urusan Bidang)

25. Urusan Kelautan dan Perikanan (3 Program)

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: produksi perikanan tangkap sebanyak 272 ton.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan 1 sub kegiatan; dan 2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

2. Program Perikanan Budidaya (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: produksi perikanan budidaya sebanyak 6.634 ton.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan 1 sub kegiatan; dan 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan 2 sub kegiatan.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: produksi olahan ikan sebesar 2.197 ton

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan 1 sub kegiatan; dan 2) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan 1 sub kegiatan.

26. Urusan Pariwisata (3 Program)

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan daya tarik wisata yang dikembangkan sebesar 20,59%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan; 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; dan 3) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

2. Program Pemasaran Pariwisata (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan daya tarik wisata yang meningkat angka kunjungan wisatanya sebesar 55,88%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat sebanyak 128 orang.

Fokus kegiatan, yaitu: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan 1 sub kegiatan.

27. Urusan Pertanian (5 Program)

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: rata-rata (prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, power thresher, benih padi) sebesar 40%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan 2 sub kegiatan; 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; dan 3) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: luas lahan pertanian yang diolah/ dimanfaatkan sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pengembangan Prasarana Pertanian dengan 1 sub kegiatan; 2) Pembangunan Prasarana Pertanian dengan 4 sub kegiatan; dan 3) Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan 1 sub kegiatan.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (4 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Prevalensi penyakit hewan sebesar 19,8%; dan 2) Persentase daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) sebesar 82%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan; 2) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan; 3) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan

Masyarakat Veteriner dengan 1 sub kegiatan; dan 4) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan dengan 1 sub kegiatan.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase penanggulangan bencana pertanian sebesar 62%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.

5. Program Penyuluhan Pertanian (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase kelompok tani (kategori madya dan utama) sebesar 11,83%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan 4 sub kegiatan.

28. Urusan Perdagangan (5 Program)

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase usulan izin usaha yang diterbitkan / mendapat rekomendasi sebesar 90%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan 1 sub kegiatan; dan 2) Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan 1 sub kegiatan.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase Pasar Rakyat layak usaha sebesar 38,1%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan 2 sub kegiatan; dan 2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan 1 sub kegiatan.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting sebesar 88,89%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan 2 sub kegiatan; 2) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan; dan 3) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

4. Program Pengembangan Ekspor (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

Nilai Ekspor sebesar 2.149 miliar rupiah.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 52,34%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan 1 sub kegiatan.

29. Urusan Perindustrian (3 Program)

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: jumlah kelompok IKM yang bersertifikat sebanyak 250 unit.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan 4 sub kegiatan.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase usulan izin usaha yang mendapat rekomendasi sebesar 85%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan.

30. Urusan Transmigrasi (1 Program)

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Jumlah transmigran yang ditempatkan sebanyak 3 KK.

Fokus kegiatan, yaitu: Kegiatan Penataan penyebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah/Kabupaten dengan 1 sub kegiatan.

5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (2 Unsur Pendukung)

31. Sekretariat Daerah (3 Program)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (12 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

1) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 100%; 2) Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti sebesar 100%; 3) Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%; 4) Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan sebesar 100%; 5) Persentase pengadaan barang milik daerah sebesar 100%; 6) Persentase pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100%; 7) Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dan kerumahtanggaan sekretaris daerah sebesar 100%; 8) Persentase Ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretaris daerah sebesar 100%; 9) berita yang mendapat respon public sebesar 100%; dan 10) Rata-rata nilai pelaporan dan pengukuran SAKIP OPD sebesar 67%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan; 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan; 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 1 sub kegiatan; 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 1 sub kegiatan; 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 6 sub kegiatan; 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 1 sub kegiatan; 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 sub kegiatan; 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 sub kegiatan; 9) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan 1 sub kegiatan; 10) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan 2 sub kegiatan; 11) Penataan Organisasi dengan 3 sub kegiatan; dan 12) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan 3 sub kegiatan.

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (4 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

1) Rata-rata capaian kinerja program rumpun pemerintahan sebesar 100%; 2) Rata-rata capaian kinerja program rumpun kesra sebesar 100%; dan 3) Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Administrasi Tata Pemerintahan dengan 3 sub kegiatan; 2) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan 3 sub kegiatan; 3) Fasilitasi

dan Koordinasi Hukum dengan 3 sub kegiatan; dan 4) Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan 1 sub kegiatan.

3. Program Perekonomian dan Pembangunan (4 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Presentase kenaikan deviden dari sektor BUMD sebesar 6,56%; 2) capaian realisasi program rumpun ekonomi dan pembangunan sebesar 100%; dan 3) tingkat maturitas kelembagaan UKPBJ sebanyak 7 kriteria.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan 3 sub kegiatan; 2) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan 3 sub kegiatan; 3) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan 3 sub kegiatan; dan 4) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan 3 sub kegiatan.

32. Sekretariat DPRD (2 Program)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan layanan keuangan dan administrasi DPRD sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan 3 sub kegiatan; dan 2) Layanan Administrasi DPRD dengan 3 sub kegiatan.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (8 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan sebesar 100%; dan 2) Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan 4 sub kegiatan; 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan 6 sub kegiatan; 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan 6 sub kegiatan; 4) Peningkatan Kapasitas DPRD dengan 5 sub kegiatan; 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan 3 sub kegiatan; 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan 1 sub kegiatan; 7) Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan 2 sub kegiatan; dan 8) Fasilitasi Tugas DPRD dengan 3 sub kegiatan.

5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (5 Unsur Pendukung)

33. Perencanaan (2 Program)

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Tingkat keterisian data IKK, SDG's, indikator program sebesar 82,3%; 2) persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100%; dan 3) Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan 3 sub kegiatan; 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 sub kegiatan; dan 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 2 sub kegiatan.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (3 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia sebesar 97,05%; 2) Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi sebesar 95,12%; dan 3) Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebesar 94,74%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan 3 sub kegiatan; 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan 3 sub kegiatan; dan 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan 3 sub kegiatan.

34. Keuangan (3 Program)

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (4 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: 1) Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD sebesar 100%; 2) Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan sebesar 88%; 3) Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD sebesar 100 (skala angka); dan 4) Tingkat ketepatan waktu penyaluran dana transfer dan BTT sebesar 100 (skala angka).

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan 4 sub kegiatan; 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan dengan 5 sub kegiatan; 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan 4 sub kegiatan; dan 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 3 sub kegiatan.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: rekomendasi kebijakan teknis keuangan bidang aset daerah sebanyak 5 dokumen.

Fokus kegiatan, yaitu: Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 5 sub kegiatan

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

1) Persentase pertumbuhan pajak daerah sebesar 4,5%; dan 2) Cakupan database wajib pajak yang valid sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 7 sub kegiatan.

35. Kepegawaian (1 Program)

1. Program Kepegawaian Daerah (4 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

1) Indeks kualifikasi aspek perencanaan, pengadaan, dan sistem informasi senilai 0,1 (angka); 2) Indeks kualifikasi aspek mutasi, rotasi, promosi senilai 0,04 (angka); 3) Indeks kinerja dan disiplin senilai 0,12 (angka); dan Indeks kompetensi senilai 0,13 (angka).

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan 5 sub kegiatan; 2) Mutasi dan Promosi ASN dengan 2 sub kegiatan; 3) Pengembangan Kompetensi ASN dengan 5 sub kegiatan; dan 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan 4 sub kegiatan.

36. Pendidikan dan Pelatihan (1 Program)

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan kebijakan penyelenggaraan pengembangan SDM sebesar 80%.

Fokus kegiatan, yaitu: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dengan 1 sub kegiatan.

37. Penelitian dan Pengembangan (1 Program)

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan sebesar 35,71%.

Fokus kegiatan, yaitu: Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan 2 sub kegiatan.

5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (1 Unsur Pendukung)

38. Pengawasan (2 Program)

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik sebesar 64%

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan 7 sub kegiatan; dan 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan 2 sub kegiatan.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu:

1) Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI) sebesar 2 (angka); dan 2) Nilai MCP Korsubgah sebesar 75 (angka).

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan 1 sub kegiatan; dan 2) Pendampingan dan Asistensi dengan 4 sub kegiatan.

5.1.7. Unsur Kewilayahan (1 Urusan)

39. Urusan Kewilayahan (5 Program)

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: nilai evaluasi pelayanan publik sebesar 3,1 – 5,0 (angka)

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan 1 sub kegiatan; dan 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan 1 sub kegiatan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (2 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: prosentase keaktifan lembaga desa sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan 2 sub kegiatan; dan 2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan 2 sub kegiatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan sebanyak 12 dokumen.

Fokus kegiatan, yaitu: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan 2 sub kegiatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan potensi konflik yang dilaporkan sebesar 100%.

Fokus kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan 1 sub kegiatan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi sebesar 45 - 48%

Fokus kegiatan, yaitu: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 2 sub kegiatan.

5.1.8. Urusan Pemerintahan Umum (1 Urusan)

40. Kesatuan Bangsa dan Politik (5 Program)

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan sebesar 31,90 per 10.000 penduduk.

Fokus kegiatan, yaitu: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan 5 sub kegiatan.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik sebesar 31,90 per 10.000 penduduk.

Fokus kegiatan, yaitu: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan 3 sub kegiatan.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: persentase ormas yang terbina sebesar 20,96%.

Fokus kegiatan, yaitu: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan 4 sub kegiatan.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya sebesar 31,90 per 10.000 penduduk.

Fokus kegiatan, yaitu: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan 3 sub kegiatan.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (1 kegiatan)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program pada tahun 2023, yaitu: Jumlah potensi konflik sosial yang terpantau sebesar 45 potensi.

Fokus kegiatan, yaitu: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan 4 sub kegiatan.

5.2. Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Rincian pendanaan indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
1																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01						764,721,199,000							719,427,416,000			
1	01	01															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah Persentase pengadaan barang milik daerah Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen persen persen persen persen persen	persen persen persen persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	570,977,547,000							100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	545,015,479,000		
1	01	01	2.01					2,490,000						100 persen	6,000,000		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	persen	100 persen											
1	01	01	2.01	01				2 Dokumen	1,245,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	2 Dokumen	3,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	07				4 Laporan	1,245,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	4 Laporan	3,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.02						569,659,479,000						100 persen	542,599,903,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen	persen	100 persen											
1	01	01	2.02	01				4286 Orang/bulan	568,982,260,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	4286 Orang/bulan	541,525,290,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN														
1	01	01	2.02	02				19 dokumen	389,264,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	19 dokumen	786,658,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
1	01	01	2.02	04				12 Dokumen	287,955,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Dokumen	287,955,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	210,757,000						100 persen	210,757,000	
1 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	210,757,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0		12 Laporan	210,757,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	300,000,000						100 persen	688,700,000	
1 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				250 Orang	300,000,000		DBH CHT	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0		250 Orang	688,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	persen		persen	100 persen	51,991,000						100 persen	120,255,000	
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,276,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0		1 Paket	3,276,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	32,133,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0		3 Paket	77,424,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0		1 dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	16,582,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0		12 Laporan	29,955,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0		12 Dokumen	9,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia			3 unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	566,736,000						100 persen	1,041,852,000	
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 Laporan	800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	154,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Laporan	154,260,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 laporan	19,684,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	2 laporan	19,684,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	391,992,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Laporan	867,108,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	186,094,000						100 persen	348,012,000	
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 unit	124,508,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	60 unit	257,220,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	5 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	17,742,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	3 Unit	17,742,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	43,844,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 unit	73,050,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	193,633,011,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	174,145,348,000	
1 01 02	2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD	persen		persen	62 persen	128,051,071,000						62 persen	111,926,378,000	
1 01 02	2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			20 Ruang	398,742,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	20 Ruang	398,742,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02	2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			20 Ruang	604,482,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	20 Ruang	604,482,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02	2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			10 Ruang	2,572,739,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	10 Ruang	2,572,739,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02	2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			30 ruang	1,384,014,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	30 ruang	5,828,880,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02	2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat			100 Ruang	2,984,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	100 Ruang	3,934,337,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02	2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			15 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	15 Ruang	1,575,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02	2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			15 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	15 Ruang	1,575,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02	2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi			40 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	40 Unit	320,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	14		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				300 paket	88,338,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	300 paket	201,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	21		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1850 Peserta Didik	1,103,874,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1850 Peserta Didik	1,554,330,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	22		Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia				90 Paket	39,134,527,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	90 Paket	9,938,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	24		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				469 Satuan Pendidikan 120 Satuan Pendidikan	82,164,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	469 Satuan Pendidikan 120 Satuan Pendidikan	200,382,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	25		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				72 Peserta Didik	143,106,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	72 Peserta Didik	157,530,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	26		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				2183 orang	9,395,196,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	2183 orang	11,747,772,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	27		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	100 Orang	35,394,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	28		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				90 Satuan Pendidikan	25,752,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	90 Satuan Pendidikan	64,460,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				469 Satuan Pendidikan	65,424,755,000		DAK Non Fisik - BOS Reguler	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	469 Satuan Pendidikan	65,423,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				469 Orang	103,120,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	469 Orang	900,668,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				50 ruang	4,606,162,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	50 ruang	4,894,662,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	39,269,035,000					62 persen	32,623,106,000		
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	3,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 Ruang	2,375,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	450,256,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	4 Ruang	450,256,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	1,062,520,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	6 Ruang	1,062,520,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	1,319,208,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	6 Ruang	1,319,208,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	499,700,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	5 Ruang	499,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				6 unit	1,453,342,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	6 unit	1,917,220,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 ruang	10,484,486,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	6 ruang	1,917,220,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	1,371,130,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	6 Ruang	1,137,130,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	76,164,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	3 Ruang	76,164,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	927,864,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	5 Ruang	927,864,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6,074,810,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	6 Ruang	6,074,810,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	1,021,492,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	6 Unit	1,021,492,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				180 Paket	63,083,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	180 Paket	63,083,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				70 Peserta Didik	5,646,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	70 Peserta Didik	18,425,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia				86 Paket	2,222,005,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	86 Paket	2,484,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				20688 Peserta Didik	166,839,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	20688 Peserta Didik	264,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				20 Satuan Pendidikan	77,664,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	20 Satuan Pendidikan	374,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				20 Peserta Didik	112,941,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	20 Peserta Didik	276,950,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1079 Orang	3,255,180,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1079 Orang	4,838,790,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				360 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	360 Orang	93,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				77 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	77 Satuan Pendidikan	142,215,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				23 Satuan Pendidikan	4,190,319,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	23 Satuan Pendidikan	3,787,026,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				77 Orang	7,235,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	77 Orang	74,282,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	1,239,473,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	3 Ruang	1,239,473,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	187,678,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	2 Ruang	187,678,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	persen		persen	50.5 persen	22,528,258,000					50.5 persen	25,457,490,000		
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	168,282,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 Unit	220,782,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				40 Unit	880,017,000		Pendapatan Hibah Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	40 Unit	891,717,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	53,141,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	2 Unit	53,141,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	1,077,513,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	5 Unit	1,430,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				2 Paket	112,753,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	2 Paket	171,250,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				30 Peserta Didik	8,917,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	30 Peserta Didik	28,715,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1555 orang	8,831,928,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1555 orang	10,829,172,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3700 Orang	88,759,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	3700 Orang	120,213,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	55,726,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	3 Satuan Pendidikan	396,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				600 Satuan Pendidikan	11,251,222,000		DAK Non Fisik-BOP PAUD		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	600 Satuan Pendidikan	11,316,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi	persen		persen	50.5 persen	3,784,647,000						50.5 persen	4,138,374,000	
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				300 Peserta Didik	121,699,000				2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	300 Peserta Didik	300,462,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				38 Satuan Pendidikan	72,848,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	38 Satuan Pendidikan	247,812,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				8 Satuan Pendidikan	3,590,100,000		DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	8 Satuan Pendidikan	3,590,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	persen		persen	14,62 persen	110,641,000						14,62 persen	266,589,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan PTK bersertifikat	persen		persen	81 persen	110,641,000						81 persen	266,589,000		
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Laporan	110,641,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	2 Laporan	266,589,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1,333,043,000							3,137,456,500		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	objek		objek	7 objek	406,403,000							7 objek	1,841,462,000	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi	obyek		obyek	7 obyek	269,138,000							7 obyek	1,450,722,000	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Obyek	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	2 Obyek	415,828,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				10 Orang	269,138,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	10 Orang	1,034,894,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek tradisi budaya yang difasilitasi	obyek		obyek	2 obyek	128,965,000							2 obyek	370,740,000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Obyek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				7 Obyek	128,965,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	7 Obyek	370,740,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase Jumlah lembaga adat yang dibina	persen		persen	100 persen	8,300,000						100 persen	20,000,000	
2 22 02 2.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	8,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 Objek	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	persen		persen	70 persen	29,555,000						70 persen	76,032,000	
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	29,555,000						3 kegiatan	76,032,000	
2 22 04 2.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				2 Orang	29,555,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	2 Orang	76,032,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen		persen	15 persen	157,548,000						15 persen	379,610,500	
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	obyek		obyek	7 obyek	30,679,000						7 obyek	73,920,500	
2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				7 objek	30,679,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	7 objek	73,920,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelola	cagar		cagar	1 cagar	126,869,000						1 cagar	305,690,000	
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				3 objek	89,028,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	3 objek	214,513,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 05 2.02 03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				1 objek	37,841,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 objek	91,177,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase benda koleksi museum yang dikelola	persen		persen	100 persen	739,537,000						100 persen	840,352,000	
2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	cakupan pengunjung museum	orang		orang	220 orang	739,537,000						220 orang	840,352,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				100 Unit	144,702,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	100 Unit	98,375,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	572,852,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 Unit	644,301,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				4 Unit	21,983,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	4 Unit	97,676,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						155,200,000						0		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						155,200,000						0		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						155,200,000						0		
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dana yang dibutuhkan Jumlah Rombel				70000000 Rp 8 Rombel	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		70000000 Rp 8 Rombel	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Kasar PAUD Dana yang Dibutuhkan Jumlah Siswa Persentase pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				62 persen 85200000 Rp 100 anak 100 persen	85,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		62 persen 85200000 Rp 100 anak 100 persen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						124,000,000						124,000,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						124,000,000						124,000,000		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						124,000,000						124,000,000		
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	85				6 Peserta Didik	70,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Bobotsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		6 Peserta Didik	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD						54,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Bobotsari	DAK Non Fisik-BOP PAUD		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		54,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						126,400,000						126,400,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						126,400,000						126,400,000		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						126,400,000						126,400,000		
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				92 peserta didik	70,000,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	92 peserta didik	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 satuan pendidikan	56,400,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOP PAUD		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	1 satuan pendidikan	56,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						133,000,000						133,000,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						133,000,000						133,000,000		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						133,000,000						133,000,000		
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				105 peserta didik	70,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Bukateja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	105 peserta didik	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	63,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Bukateja	DAK Non Fisik-BOP PAUD		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	1 Satuan Pendidikan	63,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						967,800,000						975,500,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Kategori Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1	01 02		APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	967,800,000					76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	975,500,000			
1	01 02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen	persen	62 persen	967,800,000					62 persen	975,500,000		
1	01 02	2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			848 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Purbalingga	848 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02	2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	932,800,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga Kidul	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Purbalingga	1 Satuan Pendidikan	940,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						884,200,000							891,900,000	
1	01 02		APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	884,200,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	891,900,000		
1	01 02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen	persen	62 persen	884,200,000					62 persen	891,900,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	770				770 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Purbalingga	770 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	770				770 Peserta Didik	849,200,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Purbalingga	770 Peserta Didik	856,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						882,000,000							889,700,000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	882,000,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	889,700,000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	882,000,000						62 persen	889,700,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						35,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	847,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 Satuan Pendidikan	854,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						806,100,000							813,800,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	806,100,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	813,800,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	806,100,000						62 persen	813,800,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 4 Purbalingga		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						771,100,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 4 Purbalingga		778,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						906,200,000						913,900,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	906,200,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	913,900,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	906,200,000						62 persen	913,900,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				794 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 5 Purbalingga	794 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	871,200,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 5 Purbalingga	1 Satuan Pendidikan	878,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	978,800,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	35,000,000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	978,800,000						62 persen	35,000,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				855 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Selabaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMPN 1 Kalimanah	855 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	943,800,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Selabaya	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMPN 1 Kalimanah	0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	905,100,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	912,800,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	905,100,000						62 persen	912,800,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				798 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kalimantan Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP NEGERI 2 KALIMANAH	798 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	870,100,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kalimantan Wetan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP NEGERI 2 KALIMANAH	1 Satuan Pendidikan	877,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						428,400,000							436,100,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	428,400,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	436,100,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	428,400,000						62 persen	436,100,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	untuk kegiatan proses belajar dan ujian				12 rombel	50,000,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kedungwuluh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Siswa SMP N 3 KALIMANAH	12 rombel	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				12 rombel	378,400,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kedungwuluh	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Siswa SMP N 3 KALIMANAH	12 rombel	386,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						867,700,000							807,809,294	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	867,700,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	807,809,294	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	867,700,000						62 persen	807,809,294	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 1 Padamara		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	832,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 1 Padamara	0 Satuan Pendidikan	772,809,294	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						605,900,000							613,600,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	605,900,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	613,600,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	605,900,000						62 persen	613,600,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Yang Mengikuti Proses Belajar				518 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Dawuhan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 2 Padamara	518 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	570,900,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Dawuhan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 2 Padamara	1 Satuan Pendidikan	578,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						860,000,000						866,600,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	860,000,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	866,600,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	860,000,000						62 persen	866,600,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				748 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Meri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Kutasari	748 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	825,000,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Meri	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Kutasari	1 Satuan Pendidikan	831,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						711,500,000						719,200,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	711,500,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	719,200,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	711,500,000						62 persen	719,200,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						35,000,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Munjul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Kutasari		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	676,500,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Munjul	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Kutasari	1 Satuan Pendidikan	684,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						452,600,000						460,300,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	452,600,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	460,300,000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	452,600,000						62 persen	460,300,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah rombel				12 rombel	50,000,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Karangjengko	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 3 Kutasari	12 rombel	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah rombel				12 rombel	402,600,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Karangjengko	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 3 Kutasari	12 rombel	410,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						710,400,000						717,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	710,400,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	717,000,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	710,400,000						62 persen	717,000,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						35,000,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Cendana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 4 Kutasari		35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						675,400,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Cendana	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 4 Kutasari		682,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						605,900,000						613,600,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						605,900,000						613,600,000		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						605,900,000						613,600,000		
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				526 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Karangreja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		526 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	570,900,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Karangreja	DAK Non Fisik-BOS Reguler		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		1 Satuan Pendidikan	578,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						546,100,000						553,800,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	546,100,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	553,800,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	546,100,000						62 persen	553,800,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				445 Peserta Didik	50,000,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Karangreja	445 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	496,100,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Karangreja	1 Satuan Pendidikan	503,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						549,400,000							557,100,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	549,400,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	557,100,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	549,400,000						62 persen	557,100,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				450 Peserta Didik	50,000,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Tlahab Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 3 Karangreja	450 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	499,400,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Tlahab Kidul	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 3 Karangreja	1 Satuan Pendidikan	507,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						391,000,000						398,700,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	391,000,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	398,700,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	391,000,000						62 persen	398,700,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar dan Ujian				370 Peserta Didik	50,000,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Karangjambu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 1 Karangjambu	370 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	341,000,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Karangjambu	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 1 Karangjambu	1 Satuan Pendidikan	348,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						226,200,000						233,900,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						226,200,000							233,900,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						226,200,000							233,900,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				145 Peserta Didik	70,000,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		145 Peserta Didik	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana Bos				1 Pendidikan	156,200,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Danasari	DAK Non Fisik-BOS Reguler		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		1 Pendidikan	163,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						872,100,000						879,800,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	872,100,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	879,800,000	
1 01 02	2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	872,100,000						62 persen	879,800,000	
1 01 02	2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dana Yang Dibutuhkan			35000000 Rupiah	35,000,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Karangkemiri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Kemangkon	35000000 Rupiah	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02	2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dana Yang Dibutuhkan			844800000 Rupiah	837,100,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Karangkemiri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Kemangkon	844800000 Rupiah	844,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						389,000,000						396,700,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	389,000,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	396,700,000	
1 01 02	2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	389,000,000						62 persen	396,700,000	
1 01 02	2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			290 Peserta Didik	70,000,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Toyareka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Kemangkon	290 Peserta Didik	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	319,000,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Toyareka	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Kemangkon	1 Satuan Pendidikan	326,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						327,400,000						335,100,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	327,400,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	335,100,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	327,400,000						62 persen	335,100,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						70,000,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Kedungbenda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 3 Kemangkon		70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						257,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 3 Kemangkon		265,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						349,400,000						356,000,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	349,400,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	356,000,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	349,400,000						62 persen	356,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				256 Peserta Didik	70,000,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Kedunglegok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 4 Kemangkon	256 Peserta Didik	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	279,400,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Kedunglegok	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 4 Kemangkon	1 Satuan Pendidikan	286,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						909,500,000						917,200,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	909,500,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	917,200,000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	909,500,000						62 persen	917,200,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				796 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kedungjati	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Bukateja	796 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 satuan pendidikan	874,500,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kedungjati	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Bukateja	1 satuan pendidikan	882,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						889,700,000						897,400,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	889,700,000					76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	897,400,000		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	889,700,000					62 persen	897,400,000		
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						35,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kembangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Bukateja	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Rombel				24 rombel	854,700,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kembangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Bukateja	24 rombel	862,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						714,800,000						722,500,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	714,800,000					76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	722,500,000		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	714,800,000					62 persen	722,500,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Kategori Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				617 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 3 Bukateja	617 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	679,800,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 3 Bukateja	1 Satuan Pendidikan	687,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							784,100,000						791,800,000	
1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	784,100,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	791,800,000	
1	01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	784,100,000						62 persen	791,800,000	
1	01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				677 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Kejombang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Kejombang	677 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	749,100,000	Kab. Purbalingga, Kejombang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Kejombang	1 Satuan Pendidikan	756,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							400,900,000						408,600,000	
1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						400,900,000							408,600,000	
1	01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						400,900,000							408,600,000	
1	01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				322 peserta didik	50,000,000	Kab. Purbalingga, Kejombang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		322 peserta didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	350,900,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Timbang	DAK Non Fisik-BOS Reguler		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	1 Satuan Pendidikan	358,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						976,600,000					984,300,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	976,600,000					76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	984,300,000		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	976,600,000					62 persen	984,300,000		
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				854 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Kaligondang	854 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	941,600,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Selanegara	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Kaligondang	1 Satuan Pendidikan	949,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						556,000,000					563,700,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	556,000,000					76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	563,700,000		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	556,000,000					62 persen	563,700,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar dan Ujian				454 peserta didik	50,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Sidanegara	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 2 Kaligondang	454 peserta didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 tahun	506,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Sidanegara	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 2 Kaligondang	1 tahun	513,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						764,300,000							772,000,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						764,300,000							772,000,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						764,300,000							772,000,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				663 Peserta didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Tegalpingen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		663 Peserta didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	729,300,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Tegalpingen	DAK Non Fisik-BOS Reguler		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		1 Satuan Pendidikan	737,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						447,100,000							450,800,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						447,100,000							450,800,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						447,100,000							450,800,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				362 Peserta Didik	50,000,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		362 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS				1 satuan pendidikan	397,100,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Bedagas	DAK Non Fisik-BOS Reguler		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		1 satuan pendidikan	400,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						370,300,000							378,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	370,300,000					76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	378,000,000		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	370,300,000					62 persen	378,000,000		
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						70,000,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						300,300,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	308,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						864,400,000						872,100,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	864,400,000					76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	872,100,000		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	864,400,000					62 persen	872,100,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				754 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Losari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Rembang	754 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	829,400,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Losari	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Rembang	1 Satuan Pendidikan	837,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						611,400,000						619,100,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	611,400,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	619,100,000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	611,400,000						62 persen	619,100,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				598 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Makam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Rembang	598 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian				598 peserta didik	576,400,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Makam	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Rembang	598 peserta didik	584,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						283,400,000						291,100,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	283,400,000					76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	291,100,000			
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	283,400,000					62 persen	291,100,000			
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta Didik yang mengikuti proses belajar dan ujian				201 peserta didik	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 4 Rembang	201 peserta didik	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah Menengah pertama yang mengelola Dana BOS				1 satuan pendidikan	213,400,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 4 Rembang	1 satuan pendidikan	221,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						918,300,000							926,000,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	918,300,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	926,000,000		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	918,300,000						62 persen	926,000,000		
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				810 Peserta Didik	35,000,000		Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Karangmoncol	810 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	883,300,000	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Karangmoncol	1 Satuan Pendidikan	891,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	312,000,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	319,700,000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	312,000,000						62 persen	319,700,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				221 Peserta Didik	70,000,000	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Karang Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	Siswa SMP NEGERI 2 KARANGMONCOL	221 Peserta Didik	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	78				1 satuan pendidikan	242,000,000	Kab. Purbalingga, Karangmoncol, Karang Sari	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP NEGERI 2 KARANGMONCOL	1 satuan pendidikan	249,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	198,700,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	206,400,000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	198,700,000						62 persen	206,400,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				121 Peserta Didik	70,000,000	Kab. Purbalingga, Karangmonco, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 3 Karangmoncol	121 Peserta Didik	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS"				1 Satuan Pendidikan	128,700,000	Kab. Purbalingga, Karangmonco, Baleraksa	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 3 Karangmoncol	1 Satuan Pendidikan	136,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						338,400,000						345,000,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						338,400,000						345,000,000		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						338,400,000						345,000,000		
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Mengajar				239 peserta didik	70,000,000	Kab. Purbalingga, Karangmonco, Tunjungmuli	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		239 peserta didik	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	268,400,000	Kab. Purbalingga, Karangmonco, Tunjungmuli	DAK Non Fisik-BOS Reguler		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		1 Satuan Pendidikan	275,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						898,500,000						906,200,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	persen	persen	95,77 persen	898,500,000						95,77 persen	906,200,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen	persen	62 persen	898,500,000						62 persen	906,200,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				783 peserta didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Karanganyar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Karanganyar	783 peserta didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	863,500,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Karanganyar	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Karanganyar	1 Satuan Pendidikan	871,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						629,000,000						636,700,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	629,000,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	636,700,000	
1 01 02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen	persen	62 persen	629,000,000						62 persen	636,700,000	
1 01 02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		530 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	siswa SMP N 1 Kertanegara	530 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	"Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	594,000,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Krangean	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	siswa SMP N 1 Kertanegara	1 Satuan Pendidikan	601,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						425,100,000					432,800,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	425,100,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	432,800,000	
1 01 02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen	persen	62 persen	425,100,000					62 persen	432,800,000	
1 01 02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		342 peserta didik	50,000,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Karangasem	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Kertanegara	342 peserta didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	375,100,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Karangasem	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Kertanegara	1 Satuan Pendidikan	382,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						968,900,000						976,600,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						968,900,000						976,600,000		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						968,900,000						976,600,000		
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				874 peserta didik 1 satuan pendidikan	35,000,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		874 peserta didik 1 satuan pendidikan	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 satuan pendidikan	933,900,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Bojongsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		1 satuan pendidikan	941,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						825,900,000						833,600,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						825,900,000						833,600,000		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						825,900,000						833,600,000		
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen			76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	825,900,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	833,600,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						825,900,000						833,600,000		
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian				726 peserta didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Metenggeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 2 Bojongsari	726 peserta didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana BOS				1 Satuan Pendidikan	790,900,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Metenggeng	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 2 Bojongsari	1 Satuan Pendidikan	798,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										869,900,000		877,600,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	869,900,000					76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	877,600,000		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	869,900,000					62 persen	877,600,000		
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 1 MREBET	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	834,900,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP N 1 MREBET	0 Satuan Pendidikan	842,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										671,900,000		679,600,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	671,900,000					76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	679,600,000		
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	671,900,000					62 persen	679,600,000		
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				582 Peserta Didik	35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Mrebet	582 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	636,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Mrebet	1 Satuan Pendidikan	644,600,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						481,200,000						488,900,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	481,200,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	488,900,000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	481,200,000						62 persen	488,900,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				394 Peserta Didik	50,000,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Cipaku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 3 Mrebet	394 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	431,200,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Cipaku	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 3 Mrebet	1 Satuan Pendidikan	438,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						420,700,000						427,300,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	420,700,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	427,300,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	420,700,000						62 persen	427,300,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				337 Peserta Didik	50,000,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Tangkisan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	SMP Negeri 4 Mrebet	337 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	370,700,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Tangkisan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	SMP Negeri 4 Mrebet	1 Satuan Pendidikan	377,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						476,800,000							483,400,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	476,800,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	483,400,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen persen		persen persen	62 persen 62 persen	476,800,000						62 persen 62 persen	483,400,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				383 Peserta Didik	50,000,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Binangun	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 5 Mrebet	383 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	426,800,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Binangun	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 5 Mrebet	1 Satuan Pendidikan	433,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						877,600,000							885,300,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	877,600,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	885,300,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	877,600,000						62 persen	885,300,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				764 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Bobotsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Bobotsari	764 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	842,600,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Bobotsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 1 Bobotsari	1 Satuan Pendidikan	850,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						776,400,000						784,100,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	776,400,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	784,100,000	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	776,400,000						62 persen	784,100,000	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				675 Peserta Didik	35,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Bobotsari	675 Peserta Didik	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	741,400,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 2 Bobotsari	1 Satuan Pendidikan	749,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											611,000,000		618,700,000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	611,000,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	618,700,000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	611,000,000						62 persen	618,700,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				510 Peserta Didik	50,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Talagening		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa di SMP Negeri 3 Bobotsari	510 Peserta Didik	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	561,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Talagening		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa di SMP Negeri 3 Bobotsari	1 Satuan Pendidikan	568,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											390,100,000		397,800,000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD Presentase PKBM yang terakreditasi Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen persen persen persen		persen persen persen persen	76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	390,100,000						76 persen 66,67 persen 95,77 persen 99,75 persen	397,800,000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	persen		persen	62 persen	390,100,000						62 persen	397,800,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				293 Peserta didik	70,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Limbasari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 4 Bobotsari	293 Peserta didik	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	320,100,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Limbasari	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Siswa SMP Negeri 4 Bobotsari	1 Satuan Pendidikan	327,800,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						148,893,922,000						171,995,051,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan BLUD Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah Persentase pengadaan barang milik daerah Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen persen persen persen persen persen persen	persen persen persen persen persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	102,524,310,000							100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	102,924,452,000	
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun	Persen	Persen	100 Persen	7,500,000							100 Persen	25,500,000	
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	4,500,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	7 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Dokumen	3,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	6 Dokumen	5,500,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji tepat waktu	Persen	Persen	100 Persen	101,470,552,000							100 Persen	101,470,552,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1437 Orang 0 Orang/bulan	101,232,627,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda dan Rumah Sakit	1437 Orang 0 Orang/bulan	101,232,627,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54 Dokumen	77,925,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar			Pegawai Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda dan Rumah Sakit	54 Dokumen	77,925,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen 5 Dokumen	160,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Puskesmas, Labkesda dan Rumah Sakit	0 Dokumen 5 Dokumen	160,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah yang tersusun	Persen		Persen	100 Persen	8,000,000					100 Persen	9,000,000		
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Dokumen 0 Laporan	8,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	8 Dokumen 0 Laporan	9,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peraturan Perundangan terbaru Yang tersosialisasikan	Persen		Persen	100 Persen	4,000,000					100 Persen	10,000,000		
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti bintek perundang-undangan				0 Orang 4 Orang	4,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Dinkes, Puskesmas, Labkesda dan RSUD	0 Orang 4 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum dinas yang yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	111,800,000					100 Persen	161,400,000		
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan	1 Paket	3,000,000	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	69,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan	1 Paket	70,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	2,300,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan	24 Dokumen	2,400,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Dokumen	10,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan	15 Dokumen	11,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Dokumen	14,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan	50 Dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				9 Dokumen 0 Dokumen	14,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan	9 Dokumen 0 Dokumen	45,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD yang harus disediakan	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	80,000,000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan	1 Unit	80,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen yang harus dikirm	Persen		Persen	100 Persen	678,310,000						100 Persen	738,000,000	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Dokumen 0 Laporan	1,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	20 Dokumen 0 Laporan	3,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Dokumen 0 Laporan	263,325,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	60 Dokumen 0 Laporan	265,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Dokumen	11,973,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	402,012,000					0	12 Laporan	450,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara	Persen	Persen	100 Persen	244,148,000						100 Persen	430,000,000	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	202,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan	39 Unit	280,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 40 Unit	25,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Kesehatan	0 Unit 40 Unit	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	17,148,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Kesehatan	2 Unit	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka morbiditas Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat Prevalensi stunting (data EPPGM) Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	persen persen persen Per 100.000	persen persen persen Per 100.000	persen persen persen Per 100.000	18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	44,335,096,000						18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	66,822,985,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitas pelayanan primer Persentase Puskesmas dan RS dengan ketersediaan sapras, alkes sesuai standar Rasio Puskesmas dan RS thd jumlah penduduk Rasio Puskesmas dan RS thd jumlah penduduk	Persen Persen /100.000 /100.000		Persen Persen /100.000 /100.000	100 Persen 100 Persen 3.2 /100.000 3.2 /100.000	18,255,460,000						100 Persen 100 Persen 3.2 /100.000 3.2 /100.000	34,635,479,000	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				0 Unit	0	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis Kab. Purbalingga, Kertanegara, Karangtengah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Purbalingga	0 Unit	5,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Jumlah unit bangunan puskesmas yang dibangun sesuai standar				0 Unit 0 Unit	0	Kab. Purbalingga, Mrebet, Serayu Larangan Kab. Purbalingga, Bobotsari, Bobotsari	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Purbalingga	0 Unit 0 Unit	5,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				15 Unit	1,020,479,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Purbalingga, Kemangkon, Gambarsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Purbalingga	15 Unit	1,020,479,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				152 Unit	4,967,055,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Purbalingga, Kemangkon, Gambarsari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Purbalingga	152 Unit	10,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	5,117,706,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	DBH CHT Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Purbalingga	1 Paket	5,500,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				22 Dokumen	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Purbalingga	22 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen 0 Dokumen	207,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Purbalingga	1 Dokumen 0 Dokumen	210,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				11 Unit	559,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Purbalingga	11 Unit	559,262,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				15 Dokumen	5,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Purbalingga	15 Dokumen	5,420,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				23 Unit	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Purbalingga	23 Unit	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				250000 Keluarga 0 Keluarga	71,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Purbalingga	250000 Keluarga 0 Keluarga	75,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase sistem Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam SIK	%		%	100 %	90,500,000						100 %	110,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				40 Dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	40 Dokumen	45,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen 1 Dokumen	60,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	0 Dokumen 1 Dokumen	65,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan	%		%	100 %	10,500,000						100 %	18,500,000	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				8 Unit	3,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	RS di Kabupaten Purbalingga	8 Unit	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				54 Unit	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	RS di Kabupaten Purbalingga	54 Unit	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				54 Unit	4,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	RS di Kabupaten Purbalingga	54 Unit	6,500,000	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen		Persen	56,52 Persen	63,150,000						56,52 Persen	135,000,000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan yang mendapatkan ijin praktek	%		%	80 %	10,700,000						80 %	25,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				150 Dokumen 0 Dokumen	6,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Nakes di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD	150 Dokumen 0 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				150 Dokumen 0 Dokumen	4,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Nakes di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD	150 Dokumen 0 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan RSUD dan Puskesmas yang memiliki SDMK sesuai standar (%)	%		%	100 %	28,450,000						100 %	70,000,000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				50 Orang 0 Orang	20,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD	50 Orang 0 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				200 Dokumen 0 Dokumen	8,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD	200 Dokumen 0 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki sertifikasi tenaga kesehatan	%		%	90 %	24,000,000						90 %	40,000,000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				5 Orang 0 Orang	24,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Nakes di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Dinas Kesehatan		5 Orang 0 Orang	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	persen persen		persen persen	49,43 persen 34 persen	267,502,000						49,43 persen 34 persen	275,000,000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase rekomendasi pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan	%		%	100 %	38,960,000						100 %	40,000,000	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				78 Sarana	38,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Apotek, Toko Obat dan UMOT		78 Sarana	40,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan Persentase sertifikat produksi Pangan Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan	% %		% %	100 % 100 %	121,390,000					100 % 100 %	125,000,000		
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				128 Dokumen	121,390,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	PIRT	128 Dokumen	125,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Hasil pemeriksaan post market yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	107,152,000					100 Persen	110,000,000		
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				45 Unit	107,152,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	45 Unit	110,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kelurahan Sehat Mandiri	persen		persen	27,20 persen	1,703,864,000					27,20 persen	1,837,614,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan penyuluhan melalui media promosi	%	%		100 %	1,582,614,000						100 %	1,582,614,000	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				152 Dokumen	1,582,614,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Ormas, linsek, desa dll	152 Dokumen	1,582,614,000	DINAS KESEHATAN
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan RT yang ber PHBS	%	%		88 %	86,250,000						88 %	170,000,000	
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				3 Dokumen	86,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Purbalingga	3 Dokumen	170,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa sehat mandiri	%	%		27.2 %	35,000,000						27.2 %	85,000,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				65 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Posyandu, Posbindu, Posketren	65 Dokumen	85,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						812,000,000						812,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						812,000,000							812,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						812,000,000							812,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	812,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		0 Unit Kerja	812,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02						2,466,453,000						1,040,626,000					
1	02	01					1,600,000,000						0					
1	02	01	2.10				1,600,000,000						0					
1	02	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			12 Jenis	1,600,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan dari BLUD	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	12 Jenis	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02									866,453,000				1,040,626,000			
1	02	02	2.02												1,040,626,000			
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			3 Dokumen	866,453,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	3 Dokumen	1,040,626,000	DINAS KESEHATAN	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02						1,668,896,000							1,946,899,100				
1	02	01													100 persen	875,350,000		
1	02	01	2.10												12 Pelayanan 1 Unit	875,350,000		
1	02	01	2.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Puskesmas sesuai standar			12 Pelayanan	875,350,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat di Lingkungan Puskesmas Bojong	12 Pelayanan	875,350,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka morbiditas Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat Prevalensi stunting (data EPPGM) Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	persen persen persen Per 100.000		persen persen persen persen Per 100.000	18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	793,546,000						18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	1,071,549,100	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara	%		%	100 %	793,546,000						100 %	1,071,549,100	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai stansar Jumlah orang usia 15-59 tahun yang				158 Orang 490 Orang 256 Orang 0 Dokumen 258 Orang 287 Orang 20 Orang 2 Orang 14 Orang 100 Orang 929 Orang 399 Orang 876 Orang	793,546,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	158 Orang 490 Orang 256 Orang 0 Dokumen 258 Orang 287 Orang 20 Orang 2 Orang 14 Orang 100 Orang 929 Orang 399 Orang 876 Orang	1,071,549,100	DINAS KESEHATAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1																
1	02															
1	02	01														
1	02	01	2.10													
1	02	01	2.10	01				0 Unit Kerja	4,032,790,000					0 Unit Kerja		0 DINAS KESEHATAN
1	02	02														
1	02	02	2.02													

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang usia 15- 59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar Jumlah penderita DM usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar											0	DINAS KESEHATAN	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		4,158,346,000												0

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,180,000,000							0	
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD						3,180,000,000							0	
1 02 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					12 jenis	3,180,000,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		12 jenis	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						978,346,000							0	
1 02 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						978,346,000							0	
1 02 02	Operasional Pelayanan Puskesmas						978,346,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia			0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,438,284,000							3,674,377,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,371,600,000							2,371,600,000	
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD						2,371,600,000							2,371,600,000	
1 02 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2,371,600,000		Lain-lain PAD Yang Sah		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		2,371,600,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,066,684,000							1,302,777,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,066,684,000							1,302,777,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas						1,066,684,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia			1,302,777,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,604,760,000							0	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,580,840,000							0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2,580,840,000							0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2,580,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia			0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,023,920,000							0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,023,920,000							0	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	1,023,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,805,937,000							4,876,126,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	%		%	100 %	3,724,860,000						100 %	3,724,860,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar yang terselenggara	Jenis		Jenis	16 Jenis	3,724,860,000						16 Jenis	3,724,860,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar yang terselenggara				16 jenis	3,724,860,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kemangkon	16 jenis	3,724,860,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya	%		%	100 %	1,081,077,000						100 %	1,151,266,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang orang		orang orang	834 orang 834 orang	1,081,077,000						834 orang 834 orang	1,151,266,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas												
					Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar												
					Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar												
					Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar												
					Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar												
					Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar												
					Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	834 orang							834 orang				
					Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3985 orang							3985 orang				
					Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	826 orang							826 orang				
					Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	826 orang							826 orang				
					Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	939 orang							939 orang				
					Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	95 orang							95 orang				
					Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	16 orang	1,081,077,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kemangkon	16 orang	1,151,266,000	DINAS KESEHATAN		
					Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	490 orang							490 orang				
					Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	12901 orang							12901 orang				
					Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	7917 orang							7917 orang				
					Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1241 orang							1241 orang				
					Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	998 orang							998 orang				
					Jumlah orang usia 15- 59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar												
					Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar												
					Jumlah penderita DM usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar												
					Jumlah penderita DM usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar												
					Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar												
					Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar												
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3,029,321,000							0		
1 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD		persen	persen	100 persen	2,192,765,000						100 persen	0	
1 02 01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melakukan pengelolaan BLUD		Persen	Persen	100 Persen	2,192,765,000						100 Persen	0	
1 02 01	2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Unit Kerja	2,192,765,000		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka morbiditas Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederhana Prevalensi stunting (data EPPGM) Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk		persen persen persen Per 100.000	persen persen persen Per 100.000	18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	836,556,000						18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	0	
1 02 02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara		%	%	100 %	836,556,000						100 %	0	
1 02 02	2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	836,556,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,963,316,000								0	
1 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,153,200,000								0	
1 02 01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1,153,200,000								0	
1 02 01	2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1,153,200,000		Lain-lain PAD Yang Sah		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia				0	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						810,116,000						0		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						810,116,000						0		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	810,116,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,374,478,000						4,433,983,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	3,445,321,000					100 Persen	3,445,321,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan puskesmas sesuai standar	Pelayanan		Pelayanan	12 Pelayanan	3,445,321,000					12 Pelayanan	3,445,321,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan puskesmas sesuai standar				12 Pelayanan	3,445,321,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat di Lingkungan Puskesmas Kejobong	12 Pelayanan	3,445,321,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Status Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya	persen		persen	100 persen	929,157,000					100 persen	988,662,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang		Orang	662 Orang	929,157,000					662 Orang	988,662,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar													
						Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar													
						Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar													
						Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar													
						Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar													
						Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1737 Anak												
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2540 Bayi												
						Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	693 Orang												
						Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	704 Orang												
						Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	662 Orang												
						Jumlah penderita DM usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	201 Orang												
						Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1963 Orang	929,157,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Kejobong						
						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	170 Orang												
						Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	17851 Orang												
						Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4569 Orang												
						Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	1296 Orang												
						Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	2174 Orang												
						Jumlah penderita DM usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar													
						Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar													
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02							3,475,544,000								0	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	2,618,354,000						100 Persen		0	
1 02 01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Kesehatan dasar yang terselenggara		Jenis	15 Jenis	2,618,354,000						15 Jenis		0	
1 02 01	2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2,618,354,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pengadegan	1 Unit Kerja		0	DINAS KESEHATAN
1 02 02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas		unit kerja	15 unit kerja	857,190,000						15 unit kerja		0	
1 02 02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Dokumen	1 Dokumen	857,190,000						1 Dokumen		0	
1 02 02	2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	857,190,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Pengadegan	1 Dokumen		0	DINAS KESEHATAN
1																
1 02							3,638,158,000								3,687,700,000	
1 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD		%	100 %	2,856,040,000						100 %		2,856,040,000	
1 02 01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar yang Terselenggara		Jenis	18 Jenis	2,856,040,000						18 Jenis		2,856,040,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Table with columns: Kode, Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Target Akhir Periode RPJMD, Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021, Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022, Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Target 2023, Pagu Indikatif, Lokasi, Sumber Dana, Prioritas Nasional/Daerah), Kelompok Sasaran, Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (Target, Pagu Indikatif), Perangkat Daerah Penanggung Jawab. Rows include health service support, health facility accreditation, and health service provision for UKM.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023															
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar Jumlah penderita DM usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar													
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,582,153,000						0	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen		persen	100 persen	1,890,947,000						100 persen	0	
1 02 01	2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar yang terselenggara	jenis		jenis	16 jenis	1,890,947,000						16 jenis	0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Puskesmas Sesuai Standar				16 pelayanan	1,890,947,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Cipawon Kab. Purbalingga, Bukateja, Karangcengis Kab. Purbalingga, Bukateja, Karanggedang Kab. Purbalingga, Bukateja, Karangnangka Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis Kab. Purbalingga, Bukateja, Kebutuh Kab. Purbalingga, Bukateja, Penaruban	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat di wilayah Kecamatan Bukateja	16 pelayanan	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya	persen		persen	100 persen	691,206,000						100 persen	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	orang orang orang orang		orang orang orang orang	368 orang 368 orang 384 orang 384 orang	691,206,000						368 orang 368 orang 384 orang 384 orang	0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				500 dokumen	691,206,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Cipawon Kab. Purbalingga, Bukateja, Karangcengis Kab. Purbalingga, Bukateja, Karanggedang Kab. Purbalingga, Bukateja, Karangnangka Kab. Purbalingga, Bukateja, Kutawis Kab. Purbalingga, Bukateja, Kebutih Kab. Purbalingga, Bukateja, Penaruban	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bukateja	500 dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5,065,426,000							5,094,109,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,045,880,000							4,000,000,000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						4,045,880,000							4,000,000,000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				85 Persen 0 Unit Kerja	4,045,880,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		85 Persen 0 Unit Kerja	4,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,019,546,000							1,094,109,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,019,546,000						1,094,109,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai setandar										
						Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar										
						Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar										
						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar										
						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar										
						Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	10300 pasien							10300 pasien		
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4800 pasien							4800 pasien		
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	800 pasien							800 pasien		
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	800 pasien							800 pasien		
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	840 pasien							840 pasien		
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	115 pasien							115 pasien	1,094,109,000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	300 pasien	1,019,546,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia			300 pasien		
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	700 pasien							700 pasien		
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5000 pasien							5000 pasien		
						Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3000 pasien							3000 pasien		
						Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	230 pasien							230 pasien		
						Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1200 pasien							1200 pasien		
						Jumlah orang usia 15-59 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar										
						Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar										
						Jumlah penderita DM usia 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar										
						Jumlah penderita DM usia 15 tahun yang mendapatkan pelayanan sesuai standar										
						Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan sesuai standar										
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4,483,026,000						0

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen		persen	100 persen	3,553,194,000						100 persen	0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melakukan pengelolaan BLUD	Unit		Unit	1 Unit	3,553,194,000						1 Unit	0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan kehatan dasar terselenggara				12 Pelayanan	3,553,194,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Pelayanan	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka morbiditas Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat Prevalensi stunting (data EPPGM) Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	persen persen persen Per 100.000		persen persen persen Per 100.000	18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	929,832,000						18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara	%		%	100 %	929,832,000						100 %	0	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen 0 Dokumen	929,832,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	0 Dokumen 0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,372,436,000							4,453,085,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen		persen	100 persen	3,480,000,000						100 persen	3,480,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melakukan pengelolaan BLUD	Unit		Unit	1 Unit	3,480,000,000						1 Unit	3,480,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar yang terselenggara				14 jenis	3,480,000,000	Kab. Purbalingga, Karangmonco, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	14 jenis	3,480,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka morbiditas Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat Prevalensi stunting (data EPPGM) Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	persen persen persen Per 100.000		persen persen persen Per 100.000	18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	892,436,000						18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	973,085,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara	%		%	100 %	892,436,000						100 %	973,085,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah penderita DM usia 15 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				900 Orang 60 Orang 8 Orang 25 Orang 30000 Orang 900 Orang 150 Orang 500 Orang	892,436,000	Kab. Purbalingga, Karangmonco, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	900 Orang 60 Orang 8 Orang 25 Orang 30000 Orang 900 Orang 150 Orang 500 Orang	973,085,000	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kegiatan Layanan BLUD	persen		persen	100 persen	2,139,690,000					100 persen	2,139,690,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Puskesmas Sesuai Standar	pelayanan		pelayanan	12 pelayanan	2,139,690,000					12 pelayanan	2,139,690,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar yang Terselenggara				12 jenis	2,139,690,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Seluruh Masyarakat Kecamatan Kertanegara	12 jenis	2,139,690,000	DINAS KESEHATAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						836,310,000							932,268,800	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						836,310,000							932,268,800	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah ODGJ berat yang menamatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang dengan resiko HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah orang usia 15- 59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang				524 orang 2193 orang 522 orang 0 Dokumen 519 orang 519 orang 98 orang 8 orang 55 orang 30867 orang 1685 orang 285 orang 660 orang	836,310,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	524 orang 2193 orang 522 orang 0 Dokumen 519 orang 519 orang 98 orang 8 orang 55 orang 30867 orang 1685 orang 285 orang 660 orang	932,268,800	DINAS KESEHATAN	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		mendapat skrining kesehatan sesuai standar Jumlah penderita DM usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar														
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02						5,140,767,000									0
1	02	01														
1	02	01														
1	02	01	2.10													
1	02	01	2.10	01												
1	02	01	2.10	01												
1	02	02														
1	02	02	2.02													

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	961,767,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,288,057,000						0		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	2,421,878,000						100 Persen	0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar yang terselenggara	Pelayanan		Pelayanan	12 Pelayanan	2,421,878,000						12 Pelayanan	0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar yang terselenggara				0 Unit Kerja 12 Pelayanan	2,421,878,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Karangturi Kab. Purbalingga, Mrebet, Onje Kab. Purbalingga, Mrebet, Sindang Kab. Purbalingga, Mrebet, Tangkisan Kab. Purbalingga, Mrebet, Kradenan Kab. Purbalingga, Mrebet, Selaganggang Kab. Purbalingga, Mrebet, Mangunegara Kab. Purbalingga, Mrebet, Karangnangka Kab. Purbalingga, Mrebet, Mrebet Kab. Purbalingga, Mrebet, Cipaku	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Mrebet	0 Unit Kerja 12 Pelayanan	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya	Persen		Persen	100 Persen	866,179,000						100 Persen	0	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang		Orang	652 Orang	866,179,000						652 Orang	0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka morbiditas Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat Prevalensi stunting (data EPPGM) Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	persen persen persen Per 100.000		persen persen persen persen Per 100.000	18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	790,001,000						18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara	%		%	100 %	790,001,000						100 %	0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar											
						Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar											
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas											
						Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar											
						Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar											
						Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	953 orang						953 orang				
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	779 orang						779 orang				
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1181 orang						1181 orang				
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	779 orang						779 orang				
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	901 orang						901 orang				
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	113 orang						113 orang				
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	16 orang	790,001,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0			0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	461 orang						461 orang				
						Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	28712 orang						28712 orang				
						Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5023 orang						5023 orang				
						Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	581 orang						581 orang				
						Jumlah orang usia 15- 59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	12443 orang						12443 orang				
						Jumlah orang usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar											
						Jumlah penderita DM usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar											
						Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar											
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		2,313,378,000							0			

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen		persen	100 persen	1,629,285,000						100 persen	0	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah UPTD yang melakukan pengelolaan BLUD	Unit		Unit	1 Unit	1,629,285,000						1 Unit	0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan Puskesmas Sesuai Standar				100 Persen	1,629,285,000		Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	100 Persen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka morbiditas Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat Prevalensi stunting (data EPPGM) Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	persen persen persen Per 100.000		persen persen persen Per 100.000	18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	684,093,000						18,6 persen 51,72 persen 15 persen 2,20 s.d 2,25 Per 100.000	0	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara	%		%	100 %	684,093,000						100 %	0	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar yang terselenggara Sesuai Dengan Target				100 Persen	684,093,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	100 Persen	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						116,300,000,000							170,583,000,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						116,300,000,000							110,473,000,000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						116,300,000,000							110,473,000,000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 RS 0 Unit Kerja	116,300,000,000		Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		1 RS 0 Unit Kerja	110,473,000,000	DINAS KESEHATAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						0						60,110,000,000		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0						60,110,000,000		
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				0 Unit 1 Unit	0			2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0 Unit 1 Unit	40,000,000,000	DINAS KESEHATAN		
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				7 Unit	0		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	7 Unit	20,110,000,000	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						27,537,144,000						54,287,600,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						27,537,144,000						30,287,600,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						27,537,144,000						30,287,600,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	27,537,144,000		Pendapatan dari BLUD	5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Unit Kerja	30,287,600,000	DINAS KESEHATAN		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								0					24,000,000,000	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								0					24,000,000,000	
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit			0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Unit		2,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Gedung Rawat Jalan yang disediakan				0 Unit 85 Unit 1 Unit			0	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Unit 85 Unit 1 Unit		22,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									75,521,351,000				89,016,598,714	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen		persen	100 persen			10,973,034,000				100 persen	12,010,750,985	
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan	persen		persen	100 persen			5,250,000				100 persen	5,775,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,750,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab. Purbalingga	2 Dokumen	3,025,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	2,500,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab. Purbalingga	20 Laporan	2,750,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	9,590,070,000						100 persen	10,549,033,147	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/Bulan	9,391,773,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab. Purbalingga	81 Orang/Bulan	10,330,906,300	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				135 Dokumen	39,397,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab. Purbalingga	135 Dokumen	43,336,847	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	158,900,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	DPUPR Kab. Purbalingga	12 Dokumen	174,790,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan		bulan	12 bulan	73,600,000						12 bulan	80,960,000	
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	73,600,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab. Purbalingga	12 laporan	80,960,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	bulan		bulan	12 bulan	71,896,000						12 bulan	83,595,600	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3,600,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab. Purbalingga	6 Paket	2,090,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	50,500,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab. Purbalingga	12 Paket	55,550,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	996,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab. Purbalingga	36 Dokumen	1,095,600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	7,200,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab. Purbalingga	12 laporan	14,300,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 dokumen	9,600,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab. Purbalingga	12 dokumen	10,560,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	1 unit	154,359,000						1 unit	110,251,900	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				31 Unit	154,359,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kabupaten Purbalingga	31 Unit	110,251,900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan		bulan	12 bulan	738,521,000						12 bulan	810,227,000	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,925,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab Purbalingga	12 Laporan	937,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	156,600,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab Purbalingga	12 laporan	172,260,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 laporan	1,500,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab Purbalingga	12 laporan	684,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	578,496,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab Purbalingga	36 Laporan	636,345,600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	339,338,000						12 bulan	370,908,338	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				68 Unit	315,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	68 Unit	346,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	12,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	9 Unit	13,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	12,338,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	3 Unit	11,208,338	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase bendung kondisi baik Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen persen		persen persen	48,5 persen 47 persen	2,500,663,000						48,5 persen 47 persen	2,750,728,974	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				500 Dokumen	337,437,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah	500 Dokumen	371,180,823	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				7 Dokumen	8,342,216,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan 4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah	7 Dokumen	9,176,437,932	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang	persen		persen	1,4 persen	52,997,131,000						1,4 persen	64,218,000,000	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang kondisi jalan dalam kondisi baik dan sedang	meter		meter	728231 meter	52,997,131,000						728231 meter	64,218,000,000	
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Purbalingga	1 Dokumen	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	1,800,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Purbalingga	1 KM	3,382,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				2 KM	700,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Purbalingga	2 KM	770,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				2 KM	14,017,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Purbalingga	2 KM	15,418,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan secara Berkala				20 KM	8,100,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Purbalingga	20 KM	10,890,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				200 KM	12,349,131,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Purbalingga	200 KM	15,400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				80 Meter	11,500,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Purbalingga	80 Meter	12,650,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				35 Meter	874,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Purbalingga	35 Meter	961,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 17	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran				30 Meter	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Purbalingga	30 Meter	722,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				20 Meter	657,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Purbalingga	20 Meter	722,700,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				200 Meter	2,800,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Purbalingga	200 Meter	3,080,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi yang terbina	persen		persen	69 persen	90,000,000						69 persen	121,000,000	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi	persen		persen	8 persen	60,000,000						8 persen	66,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				30 Orang	60,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tenaga Konstruksi	30 Orang	66,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Updating Sistem Informasi Jasa Konstruksi	kali		kali	2 kali	30,000,000						2 kali	33,000,000	
1 03 11 2.02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan"				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	DPUPR Kab Purbalingga	1 Dokumen	33,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan	persen		persen	100 persen	0						100 persen	22,000,000	
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				0 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Jasa Konstruksi	0 Laporan	22,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang	kawasan		kawasan	4 kawasan	280,870,000						4 kawasan	368,500,000	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan	dokumen		dokumen	4 dokumen	159,870,000						4 dokumen	214,500,000	
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	129,870,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab Purbalingga	1 Dokumen	165,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				2 Dokumen	30,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kab Purbalingga	2 Dokumen	49,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						121,000,000						154,000,000		
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				3 Dokumen	81,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	DPUPR Kabupaten Purbalingga	3 Dokumen	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	DPUPR Kabupaten Purbalingga	1 Dokumen	44,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							13,400,410,000						19,328,375,000	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	persen		persen	1,39 persen	9,637,240,000						1,39 persen	15,520,000,000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Kebutuhan Air Minum	SR		SR	1500 SR	9,637,240,000						1500 SR	15,520,000,000	
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				2 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Purbalingga	2 Dokumen	520,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				1500 SR	2,150,505,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Purbalingga	1500 SR	3,000,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 03 03 2.01 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan				4500 SR	7,486,735,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Purbalingga	4500 SR	12,000,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	persen		persen	2,5 persen	1,800,000,000						2,5 persen	1,820,000,000	
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Persampahan yang Terbangun	persen		persen	100 persen	1,800,000,000						100 persen	1,820,000,000	
1 03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				3 Rumah Tangga	1,800,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Masyarakat Kab. Purbalingga	3 Rumah Tangga	1,820,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi tahun n	persen		persen	1,44 persen	1,963,170,000					1,44 persen	1,988,375,000		
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan air limbah domestik	rumah		rumah	300 rumah	1,963,170,000					300 rumah	1,988,375,000		
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				8000 Rumah Tangga	1,963,170,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan 4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	8000 Rumah Tangga	1,988,375,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						6,767,815,000						15,824,935,000		
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen		persen	100 persen	4,052,859,000					100 persen	3,991,856,000		
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesiapan Laporan Capaian Kinerja	persen		persen	100 persen	4,565,000					100 persen	11,000,000		
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,490,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	2 Dokumen	6,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	2,075,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	3 Laporan	5,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	3,405,125,000						100 persen	3,200,073,000	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan 24 orang	3,247,010,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	12 bulan 24 orang	3,135,763,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				30 Dokumen	26,690,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Dokumen	64,310,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	131,425,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	persen		persen	100 persen	23,158,000						100 persen	55,800,000	
1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	23,158,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	1 Laporan	55,800,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	80,158,000						100 persen	76,277,000	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	851,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	1 Paket	2,050,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	23,366,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	1 Laporan	23,366,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	539,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	1 Laporan	1,300,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	460,572,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	1 Laporan	458,112,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen		persen	100 persen	54,909,000						100 persen	132,303,000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	52,201,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	24 Unit	125,778,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	2,708,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	10 Unit	6,525,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	15 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan	persen		persen	100 persen	97,008,000						100 persen	256,250,000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Terdatanya Rumah korban Bencana Alam atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	persen		persen	100 persen	5,550,000						100 persen	20,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2,775,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	2,775,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Tersosialisasinya Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persen		persen	100 persen	6,470,000						100 persen	20,000,000	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				10 Orang	3,695,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Orang	10,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP				10 Orang	2,775,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	10 Orang	10,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana Yang Dibangun/Direhab	persen		persen	100 persen	77,708,000						100 persen	195,000,000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				3 Unit Rumah	14,900,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	3 Unit Rumah	40,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit Rumah	62,808,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Tumanggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	3 Unit Rumah	155,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Ijin (Rekomendasi) yang Diterbitkan	persen		persen	100 persen	7,280,000						100 persen	21,250,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	7,280,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	1 Laporan	21,250,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	persen		persen	24,88 persen	600,000,000						24,88 persen	4,226,979,000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani				0	600,000,000						0	4,226,979,000	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	600,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	1 Dokumen	4,226,979,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen		persen	97,71 persen	1,091,678,000						97,71 persen	6,025,000,000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	rumah		rumah	2000 rumah	1,091,678,000						2000 rumah	6,025,000,000	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				0 Unit Rumah 500 Unit Rumah	1,091,678,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	0 Unit Rumah 500 Unit Rumah	6,025,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan perumahan Yang sehat dan aman yang didukung PSU layak	persen		persen	79,25 persen	926,270,000						79,25 persen	1,324,850,000	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang Ditangani	lokasi		lokasi	12 lokasi	926,270,000						12 lokasi	1,324,850,000	
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				12 Lokasi	921,870,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0		12 Lokasi	1,311,250,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	4,400,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0		1 Laporan	13,600,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						248,005,000							3,004,985,000	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen		persen	100 persen	1,385,000						100 persen	4,500,000	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah yang Difasilitasi	persen		persen	100 persen	1,385,000						100 persen	4,500,000	
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Berita Acara	1,385,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0		4 Berita Acara	4,500,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	persen		persen	100 persen	110,045,000						100 persen	2,392,500,000	
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembebasan Tanah yang diselesaikan	persen		persen	100 persen	110,045,000						100 persen	2,392,500,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	110,045,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0	1 dokumen	2,392,500,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah	persen		persen	0,27 persen	136,575,000						0,27 persen	607,985,000	
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						136,575,000							607,985,000	
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	136,575,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Tanah Eks Bengkok yang digunakan masyarakat		1 dokumen	607,985,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						7,911,569,000							0	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja Persentase ketersediaan layanan pegawai, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah Persentase pengadaan barang milik daerah Persentase temuan pengelaaan anggaran yang ditindak lanjuti	persen persen persen persen persen		persen persen persen persen persen	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	7,602,489,000						100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	0	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6,450,000						6 Dokumen	0	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3,450,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Perencanaan dan evaluasi Satpol PP		1 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Perencanaan dan evaluasi Satpol PP	4 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun Sesuai Ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	5,604,596,000						100 Persen	0	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	5,495,446,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai pada Satuan Polisi PamongPpraja Kab. Purbalingga	51 Orang/bulan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				38 Dokumen	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai pada Satuan Polisi PamongPpraja Kab. Purbalingga	38 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				8 Dokumen	54,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai pada Satuan Polisi PamongPpraja Kab. Purbalingga	8 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6,500,000						6 Dokumen	0	
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	6,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	2 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian SKP	Angka		Angka	91 Angka	38,506,000						91 Angka	0	
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				114 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	114 Paket	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 3 Orang	23,506,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Orang 3 Orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				215 Orang	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	215 Orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	50,923,000					12 Bulan	0		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	5 Paket	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	33,473,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	9 Paket	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	365 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				18 Laporan	2,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	18 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	4,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	14 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15 Dokumen	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	15 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,317,030,000					12 Bulan	0		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	12 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	49,545,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	12 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3,225,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	12 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				61 Laporan	1,263,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	61 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	578,484,000					12 Bulan	0		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				43 Unit	565,169,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang milik daerah pada satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	43 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	8,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang milik daerah pada satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	13 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	4,385,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang milik daerah pada satuan Polisi Pamong Praja Kab. Purbalingga	2 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakkan perda Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	persen persen		persen persen	12,96 persen 99,65 persen	153,830,000						12,96 persen 99,65 persen	0	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelanggaran Perda yang ditangani	Persen		Persen	100 Persen	120,330,000						100 Persen	0	
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				50 Kasus	81,190,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Wilayah Kabupaten Purbalingga	50 Kasus	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				80 Kasus	23,790,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Wilayah Kabupaten Purbalingga	80 Kasus	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				8 Dokumen	5,450,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Wilayah Kabupaten Purbalingga	8 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				110 Orang	9,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Wilayah Kabupaten Purbalingga	110 Orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Wilayah Kabupaten Purbalingga	1 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang mengandung sanksi ditegakkan	Persen		Persen	100 Persen	26,000,000						100 Persen	0	
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				2 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Yang Melanggar perda / Perkada	2 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				40 Laporan	8,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Yang Melanggar perda / Perkada	40 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				40 Laporan	8,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Yang Melanggar perda / Perkada	40 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Cakupan PPNS yang mengikuti Pembinaan PPNS	Persen		Persen	100 Persen	7,500,000						100 Persen	0	
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				2 Laporan	7,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Anggota PPNS	2 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan kejadian kebakaran	persen		persen	100 persen	155,250,000						100 persen	0	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	145,640,000						100 Persen	0	
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				84 Dokumen	47,540,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	84 Dokumen	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				6 Unit	98,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	6 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisai dan Edukasi Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	9,610,000						100 Persen	0	
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				88 Orang	9,610,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Purbalingga Terdampak Kebakaran	88 Orang	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						2,626,103,000							6,412,052,000	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,395,835,000							2,881,408,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4,565,000					15,000,000			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,490,000				2 Dokumen	8,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	2,075,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	6 Laporan	7,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,633,655,000				1,663,593,000				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1,547,870,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	13 Orang/bulan	1,409,593,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	49,803,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	12 Dokumen	135,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				14 Dokumen	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	14 Dokumen	110,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	35,982,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	0	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Jenis Laporan Prognosis				2 dokumen	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	2 dokumen	9,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4,150,000				100,800,000				
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				52 paket	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	52 paket	20,800,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH			

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 5 Orang	4,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		0 Orang 5 Orang	80,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						15,525,000						210,800,000		
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				37 Paket 0 Paket	1,207,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		37 Paket 0 Paket	4,500,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket 0 Paket	8,093,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		12 Paket 0 Paket	180,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan" Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket 0 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		12 Paket 0 Paket	4,500,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		12 Dokumen	2,300,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	4,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. Peningkatan Pelayanan Publik		30 Laporan	10,500,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 12 Laporan	2,075,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		0 Laporan 12 Laporan	9,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10,000,000						653,215,000		
1 05 01	2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		10 Unit	10,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		6 Unit	612,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		4 Unit	31,215,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit							0 Unit		
1 05 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					605,880,000						68,000,000		
1 05 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	2,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	55,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0 Laporan							0 Laporan		
1 05 01	2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	2,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	11,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0 Laporan	553,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	0	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					122,060,000						170,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	116,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		20 Unit	120,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara" Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit 0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		16 Unit 0 Unit	20,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit 0 Unit	5,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		1 Unit 0 Unit	30,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						230,268,000							3,530,644,000	
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						8,920,000							100,000,000	
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				100 Orang	8,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		100 Orang	100,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						101,723,000							1,900,000,000	
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang disusun				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Dokumen	100,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				200 orang 0 Orang	22,241,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		200 orang 0 Orang	200,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				100 Dokumen	31,735,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		100 Dokumen	1,240,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				100 Unit	6,017,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		100 Unit	30,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)"				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Dokumen	35,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				100 Orang 0 Orang	18,790,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		100 Orang 0 Orang	75,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang				1 Dokumen	0				5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Dokumen	110,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				100 Orang 0 Orang	22,940,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		100 Orang 0 Orang	110,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						119,625,000						1,460,644,000		
1 05 03 2.03 01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				5 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	5 Laporan	220,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				0 Dokumen 5 Dokumen	12,501,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Dokumen 5 Dokumen	80,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	10,962,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	100 Orang	270,644,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				0 Orang 100 Orang	62,912,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Orang 100 Orang	510,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.03 05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				3 Laporan 0 Laporan	33,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	3 Laporan 0 Laporan	160,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 03 2.03 06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				3 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	220,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						0						70,000,000		
1 05 03 2.04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah" Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				2 Dokumen 0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	2 Dokumen 0 Dokumen	20,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				2 Dokumen 0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	2 Dokumen 0 Dokumen	30,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 03 2.04 03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				2 Dokumen 0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	2 Dokumen 0 Dokumen	20,000,000	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						19,017,280,000						5,378,135,000		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	5,557,374,000						100 persen	179,300,000	
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	4,150,000						100 persen	5,500,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN Dinsosdaldukkb p3a	2 Dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	2,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN Dinsosdaldukkb p3a	5 Laporan	5,500,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan yang ASNnya terbayar tepat waktu	bulan		bulan	12 bulan	4,469,841,000						12 bulan	0	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 orang/bulan	4,388,934,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN Dinsosdaldukkb p3a	33 orang/bulan	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen 33 dokumen	35,277,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN Dinsosdaldukkb p3a	20 Dokumen 33 dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 Dokumen 12 dokumen	45,630,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	ASN Dinsosdaldukkb p3a	10 Dokumen 12 dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan daftar inventaris barang	persen		persen	100 persen	4,358,000						100 persen	11,500,000	
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	4,358,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	10 Laporan	11,500,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin dan Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	persen		persen	100 persen	0						100 persen	4,300,000	
1.06.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana pegawai				1 unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 unit	4,300,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 Orang	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase administrasi umum penunjang operasional kantor	persen		persen	100 persen	45,037,000						100 persen	2,600,000	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,610,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 Paket	2,600,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket 1 Paket	27,523,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 paket 1 Paket	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				10 dokumen	996,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	10 dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	3,113,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	5 Laporan	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	5,819,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	6 Laporan	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10 dokumen	5,976,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	10 dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	40,000,000						100 persen	150,000,000	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				11 unit	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	11 unit	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 Unit	150,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan kantor	persen		persen	100 persen	853,701,000						100 persen	0	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				10 Laporan	415,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	10 Laporan	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				12 Laporan	144,100,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Laporan	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				12 Laporan	1,162,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Laporan	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				32 Laporan	708,024,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	32 Laporan	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	140,287,000						12 bulan	5,400,000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				66 Unit	127,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	66 Unit	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				10 unit	8,617,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	10 unit	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	4,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 unit	5,400,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	persen		persen	58,34 persen	1,690,779,000						58,34 persen	7,350,000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PSKS yang dibina	persen		persen	100 persen	1,690,779,000						100 persen	7,350,000	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten /kota				18 orang	388,376,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	18 orang	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota				1434 keluarga	19,786,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1434 keluarga	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				292 lembaga	1,279,567,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	292 lembaga	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	3,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	1 Sertifikat	7,350,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	persen		persen	45,36 persen	4,578,212,000						45,36 persen	4,841,485,000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	persen		persen	100 persen	4,578,212,000						100 persen	4,841,485,000	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				510 Orang	2,342,378,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	510 Orang	2,386,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	9,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	60 Orang	23,975,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
																				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022		Target 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
																				Nasional	Daerah													
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				35 orang	62,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	35 orang	151,510,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	4,150,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	5 Orang	10,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				300 orang	2,111,127,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	300 orang	2,155,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				900 orang	39,427,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	900 orang	95,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 orang	2,075,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	10 orang	5,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 orang	2,075,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	10 orang	5,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 orang	2,075,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	5 orang	5,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 orang	2,075,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	10 orang	5,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial	persen		persen	86,87 persen	6,963,655,000						86,87 persen	0	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan rumah tangga tervalidasi	persen		persen	100 persen	6,963,655,000						100 persen	0	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				71000 orang	3,781,526,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	71000 orang	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1686 keluarga	3,182,129,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1686 keluarga	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen		persen	94,94 persen	165,422,000						94,94 persen	250,000,000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan kampung siaga	persen		persen	100 persen	145,258,000						100 persen	250,000,000	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				275 orang	103,756,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	275 orang	250,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				175 Orang	10,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	175 Orang	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	31,127,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	200 Orang	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan korban bencana menerima bantuan	persen		persen	100 persen	20,164,000						100 persen	0	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				49 orang	20,164,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	49 orang	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP dan makam leluhur yang difasilitasi pengelolaannya	persen		persen	100 persen	61,838,000						100 persen	100,000,000	
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang dipelihara	persen		persen	100 persen	61,838,000						100 persen	100,000,000	
1 06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 dokumen	41,502,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	1 dokumen	100,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				30 Makam	20,336,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	30 Makam	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						263,838,000							379,800,000	
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif dan perempuan sebagai pengambilan keputusan di OPD Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga	persen persen		persen persen	14,02 persen 30,43 persen	178,268,000						14,02 persen 30,43 persen	379,800,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan PUG yang aktif di OPD	persen		persen	100 persen	14,728,000						100 persen	0	
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Dokumen	14,728,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	20 Dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan organisasi wanita yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	149,174,000						100 persen	379,800,000	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 dokumen	3,500,000		Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	4 dokumen	28,800,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 organisasi	145,674,000		Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	2 organisasi	351,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	persen		persen	100 persen	14,366,000						100 persen	0	
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				200 orang	14,366,000		Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	200 orang	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	per 100.000 penduduk perempuar		per 100.000 penduduk perempuan	2,43 per 100.000 penduduk perempuan	20,463,000						2,43 per 100.000 penduduk perempuan	0	
2 08 03	2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan thd perempuan yang tertangani	persen		persen	100 persen	6,480,000						100 persen	0	
2 08 03	2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 perangkat daerah	6,480,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	3 perangkat daerah	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03	2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	13,983,000						100 persen	0	
2 08 03	2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				15 orang	13,983,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	15 orang	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang disediakan	persen		persen	100 persen	5,395,000						100 persen	0	
2 08 05	2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Profil Gender dan Profil Anak	dokumen		dokumen	2 dokumen	5,395,000						2 dokumen	0	
2 08 05	2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 dokumen	5,395,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa/kelurahan layak anak	persen		persen	31,38 persen	35,067,000						31,38 persen	0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelebagaan PHA yang difasilitasi	lembaga		lembaga	2 lembaga	18,879,000						2 lembaga	0	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				1 organisasi	7,055,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 organisasi	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 dokumen	11,824,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	3 dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak yang berkembang	lembaga		lembaga	2 lembaga	16,188,000						2 lembaga	0	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 dokumen	5,981,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	3 dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				9 dokumen	1,868,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	9 dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	8,339,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus Persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani	persen persen		persen persen	26,49 persen 100 persen	24,645,000					26,49 persen 100 persen	0		
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penurunan kekerasan terhadap anak	persen		persen	100 persen	18,001,000					100 persen	0		
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 perangkat daerah	16,501,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	3 perangkat daerah	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 dokumen	1,500,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	3 dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	kasus		kasus	56 kasus	6,644,000					56 kasus	0		
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	6,644,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	50 Orang	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						11,222,847,000					11,270,658,000			

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase ketersediaan dokumen kebijakan pengendalian penduduk	persen		persen	100 persen	229,899,000						100 persen	234,200,000	
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan yang mendukung pengendalian kuantitas penduduk	persen		persen	100 persen	16,891,000						100 persen	47,700,000	
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	1 dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 02 2.01 10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Laporan	6,225,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	1 Laporan	18,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 02 2.01 14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Laporan	3,196,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	1 Laporan	8,700,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				4 laporan	7,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	4 laporan	21,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 02 2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah yang terpetakan dalam profil kependudukan dan KB	persen		persen	100 persen	213,008,000						100 persen	186,500,000	
2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				2 dokumen	24,901,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	2 dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 laporan	2,573,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	1 laporan	7,500,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	25,605,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	1 Dokumen	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	159,929,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	1 Dokumen	179,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	persen		persen	9,57 persen	6,100,744,000						9,57 persen	6,144,798,000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	persen		persen	100 persen	1,159,775,000						100 persen	1,185,800,000	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				30 organisasi	4,375,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	30 organisasi	6,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				10 dokumen	25,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	10 dokumen	25,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	73,130,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	3 Dokumen	85,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBP					0	7,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	0	20,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				6 laporan	280,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	6 laporan	280,800,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				18 laporan	729,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	18 laporan	729,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP				2 laporan	40,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	2 laporan	40,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga penyuluh KB yang diperdanakan	persen		persen	100 persen	1,147,200,000						100 persen	1,147,200,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1808 orang	1,147,200,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	1808 orang	1,147,200,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke wilayah	persen		persen	100 persen	3,174,175,000						100 persen	3,208,048,000	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya				49 laporan	22,950,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	49 laporan	22,950,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4188 orang	1,585,781,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	4188 orang	1,585,781,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				5 laporan	4,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	5 laporan	12,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				40 unit	1,535,618,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	40 unit	1,547,317,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya				2 laporan	25,676,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	2 laporan	40,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	persen		persen	9 persen	619,594,000						9 persen	603,750,000	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				5 Organisasi	15,844,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	5 Organisasi	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				36 kampung	603,750,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	36 kampung	603,750,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS	persen persen		persen persen	83,77 persen 10,34 persen	4,892,204,000						83,77 persen 10,34 persen	4,891,660,000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga sejahtera	KK		KK	293 KK	4,885,979,000						293 KK	4,891,660,000	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				20 unit	330,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	20 unit	330,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)				3 laporan	10,521,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	3 laporan	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)				2307 orang	4,536,660,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	2307 orang	4,536,660,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)				1 laporan	8,798,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	1 laporan	25,000,000	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	persen		persen	100 persen	6,225,000						100 persen	0	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				2 laporan	6,225,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	2 laporan	0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6,337,509,000						10,998,508,206		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersusunnya Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	4,792,088,000						100 Persen	9,249,108,206	
2 07 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen Laporan	Dokumen Laporan	6 Dokumen 6 Laporan	8,415,000						6 Dokumen 6 Laporan	11,000,000	
2 07 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	3,665,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	6 Dokumen	6,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Dokumen	4,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	6 Dokumen	5,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Orang Orang Dokumen	Orang Orang Dokumen	32 Orang 12 Orang 12 Dokumen	3,824,070,000						32 Orang 12 Orang 12 Dokumen	6,548,468,206	
2 07 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN			32 Orang	3,714,270,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	32 Orang	6,421,068,206	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas ASN			20 Orang	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	20 Orang	60,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01	2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	79,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	12 Dokumen	67,400,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	Laporan	12 Laporan	6,000,000						12 Laporan	6,000,000	
2 07 01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD			12 Laporan	6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	12 Laporan	6,000,000	DINAS TENAGA KERJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	Dokumen Dokumen Laporan Paket Paket Persen		Dokumen Dokumen Laporan Paket Paket Persen	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Laporan 1 Paket 1 Paket 100 Persen	65,511,000						12 Dokumen 12 Dokumen 12 Laporan 1 Paket 1 Paket 100 Persen	111,969,000	
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	1 Paket	7,619,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				1 Paket	47,961,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	1 Paket	80,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan				12 Dokumen	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	12 Dokumen	2,400,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	6 Laporan	7,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD				31 Laporan	2,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	31 Laporan	8,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD				3 Laporan	6,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	3 Laporan	6,950,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Paket		Paket	2 Paket	3,000,000						2 Paket	1,200,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Paket	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	7 Paket	1,200,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	835,092,000						12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	857,512,000	
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	1 Laporan	2,220,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan				12 Laporan	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	12 Laporan	187,200,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				12 Laporan	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	12 Laporan	10,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor Yang Disediakan				12 Laporan	658,092,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	12 Laporan	658,092,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket Unit Paket		Paket Unit Paket	1 Paket 30 Unit 1 Paket	50,000,000						1 Paket 30 Unit 1 Paket	514,159,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya				30 Unit	38,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	30 Unit	140,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara				12 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	12 Unit	74,159,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung, Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	1 Unit	300,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	10,000,000						1 Dokumen	25,000,000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah buku rencana tenaga kerja mikro tersusun	Buku		Buku	1 Buku	10,000,000						1 Buku	25,000,000	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro Jumlah SDM Kabupaten/Kota Yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro				0 Perusahaan 25 Orang	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	0 Perusahaan 25 Orang	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah paket pelatihan	Paket		Paket	5 Paket	995,246,000						5 Paket	1,102,725,000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih Jumlah unit pengadaan sarpras pelatihan	Orang Paket		Orang Paket	80 Orang 1 Paket	991,246,000						80 Orang 1 Paket	1,072,725,000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun 2023				218 Orang	989,746,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	218 Orang	1,047,725,000	DINAS TENAGA KERJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 03 2.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				10 Lembaga	1,500,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah 3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah 3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	10 Lembaga	25,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						4,000,000							30,000,000	
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				15 Lembaga	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		15 Lembaga	30,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD dan Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui program kartu prakerja	Orang Orang		Orang Orang	80 Orang 148 Orang	507,675,000						80 Orang 148 Orang	507,675,000	
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi dan job canvasing	Kali		Kali	30 Kali	507,675,000						30 Kali	507,675,000	
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD, AKL Dan ULD				224 Orang	507,675,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	224 Orang	507,675,000	DINAS TENAGA KERJA
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan Presentase pembinaan ke perusahaan	Persen Persen		Persen Persen	93,01 Persen 95 Persen	32,500,000						93,01 Persen 95 Persen	114,000,000	
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina terkait peraturan ketenagakerjaan Presentase Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani	Perusahaan Persen		Perusahaan Persen	60 Perusahaan 95 Persen	32,500,000						60 Perusahaan 95 Persen	114,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Yang Dicegah				5 Perkara	12,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	Perusahaan Di Sekitar Kabupaten Purbalingga	5 Perkara	32,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan Yang terselesaikan				5 Perkara	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	Perusahaan Di Sekitar Kabupaten Purbalingga	5 Perkara	82,000,000	DINAS TENAGA KERJA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							29,000,000						300,000,000	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigran yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	29,000,000						100 Persen	300,000,000	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	KK		KK	3 KK	29,000,000						3 KK	300,000,000	
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran Yang Dipindahkan Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				3 KK 0 Kepala Keluarga	29,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	DINAS TENAGA KERJA	3 KK 0 Kepala Keluarga	300,000,000	DINAS TENAGA KERJA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							5,750,997,000						11,602,037,000	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,691,496,000							5,351,110,000	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8,715,000							15,000,000	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4,565,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 Dokumen	8,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 Laporan	7,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,094,471,000						4,549,070,000		
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4,005,471,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		35 Orang/bulan	4,463,070,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	49,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Dokumen	71,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Dokumen	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,000,000						8,000,000		
2 09 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Laporan	8,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0						10,400,000		
2 09 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia			10,400,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						46,985,000						118,465,000		
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Paket	2,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,085,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Paket	76,571,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Dokumen	2,494,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	4,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20 Laporan	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						8,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik			20,900,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Dokumen	6,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							4,994,000	
2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik			4,994,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						478,425,000							501,100,000	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Laporan	1,200,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	147,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Laporan	155,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Laporan	12,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						325,425,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik			332,400,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59,900,000							144,081,000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				49 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		49 Unit	130,206,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	6,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	7,875,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						2,000,000						5,175,000,000		
2 09 02	2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						2,000,000						5,175,000,000		
2 09 02	2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				0 Unit	0		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Unit	5,000,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
2 09 02	2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	1 Laporan	175,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						55,000,000					252,402,000			
2 09 03	2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						13,000,000					40,000,000			
2 09 03	2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	1 Laporan	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
2 09 03	2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
2 09 03	2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				3 Unit	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	3 Unit	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
2 09 03	2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						0					63,000,000			

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				25 Ton	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		25 Ton	63,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						42,000,000							149,402,000	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		1 Dokumen	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		1 Laporan	129,402,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				0 dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		0 dokumen	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						983,501,000							743,525,000	
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						0							10,000,000	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah			10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						983,501,000							733,525,000	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah			10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	983,501,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	1 Dokumen	723,525,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						19,000,000						80,000,000		
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						19,000,000						80,000,000		
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Dokumen	12,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	5,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	1 Sertifikat	20,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 paket	1,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	1 paket	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							256,730,000						447,000,000	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						29,000,000						170,000,000		
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						4,000,000						10,000,000		
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	4,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						25,000,000						160,000,000		
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				10 Orang	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		10 Orang	160,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						194,300,000						145,000,000		
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						21,000,000						70,000,000		
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				1 Kelompok	21,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		1 Kelompok	70,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						173,300,000						75,000,000		
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	7,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		0 Dokumen	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 pokdakan	165,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		10 pokdakan	50,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		0 Dokumen	10,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						33,430,000						132,000,000		
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						3,430,000						7,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	3,430,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	1 Dokumen	7,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						0						25,000,000		
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				0 Unit Usaha	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Unit Usaha	25,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						30,000,000						100,000,000		
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		25,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				1 Pelaku Usaha	30,000,000					1 Pelaku Usaha	75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						18,750,792,000						28,448,773,210		
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10,046,581,000						10,300,828,410		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															9,900,000
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 1 Dokumen	1,340,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	0 Dokumen 1 Dokumen	5,400,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan 0 Laporan	1,536,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	5 Laporan 0 Laporan	4,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															9,573,026,000
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/Bulan	9,509,034,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	12 Orang/Bulan	9,400,767,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				33 Dokumen	43,831,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	33 Dokumen	55,440,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	44,332,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	2 Dokumen	116,819,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															16,000,000
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,490,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	1 Laporan	16,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															41,366,000
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	438,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	12 Paket	2,055,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	27,316,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	12 Paket	72,327,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	5 Dokumen	3,400,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	2,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	12 Laporan	3,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	12 Laporan	3,640,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	5,478,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	12 Dokumen	14,520,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4,150,000						10,000,000		
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						251,223,000						252,398,400		
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	353,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	12 Laporan	937,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan 0 Laporan	126,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	12 Laporan 0 Laporan	111,660,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,618,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	1 Laporan	4,290,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	123,192,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	12 Laporan	135,511,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						147,279,000						339,961,810		
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	127,562,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		12 Unit	307,360,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	683,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		12 Unit	1,811,810	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 12 Unit	7,325,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		0 Unit 12 Unit	15,385,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	11,709,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		12 Unit	15,405,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						200,000,000							507,000,000	
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						33,202,000							375,000,000	
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	33,202,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		1 Dokumen	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		3 Dokumen	315,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						166,798,000							132,000,000	
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	166,798,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	1 Dokumen	132,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						236,315,000						1,492,753,000		
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						236,315,000						1,492,753,000		
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	225,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	1 Dokumen	1,465,253,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	10,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	1 Dokumen	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						2,762,855,000						3,994,449,100		
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						2,762,855,000						3,994,449,100		
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				13.3 Ha	2,728,873,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	13.3 Ha	3,912,569,100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 04 2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				4 Orang	8,932,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	4 Orang	21,522,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				2210 Unit	25,050,000				4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	2210 Unit	60,358,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	11	05					10,014,000							13,398,000	
2	11	05	2.01				10,014,000							13,398,000	
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50 Dokumen 0 Dokumen	10,014,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	50 Dokumen 0 Dokumen	13,398,000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	06					23,647,000							50,798,000	
2	11	06	2.01				23,647,000							50,798,000	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	6,424,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	12 Dokumen	10,023,000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				0 Dokumen 100 Dokumen	17,223,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		0 Dokumen 100 Dokumen	40,775,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						5,864,000							14,130,000	
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						5,864,000							14,130,000	
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				0 Lembaga 3 Lembaga	5,864,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		0 Lembaga 3 Lembaga	14,130,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						41,518,000							100,037,000	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						41,518,000							100,037,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				15 Entitas 0 Entitas	41,518,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		15 Entitas 0 Entitas	100,037,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						10,419,000							22,655,000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						10,419,000							22,655,000	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				4 Dokumen	10,419,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		4 Dokumen	22,655,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						5,413,579,000							11,952,724,700	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						5,413,579,000							11,952,724,700	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				39000 ton 0 Ton	5,388,678,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		39000 ton 0 Ton	5,091,780,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	24,901,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		1 Kelompok	60,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	1 unit	6,800,944,700	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5,933,273,000						7,988,359,000		
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,657,662,000						5,745,321,000		
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3,500,000						5,500,000		
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1,500,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	2 Dokumen	3,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	2,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	6 Laporan	2,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,241,757,000						3,350,416,000		
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3,161,861,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	29 Orang/bulan	3,235,350,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45 Dokumen	17,430,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	45 Dokumen	51,200,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				21 Dokumen	62,466,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	21 Dokumen	63,866,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						6,000,000						6,000,000		
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	6,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	2 Laporan	6,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0						30,000,000		
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	15 Orang	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44,000,000						74,000,000		
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	5,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	8 Paket	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Paket	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2,400,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	2 Dokumen	2,400,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	4,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	24 Laporan	6,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	6,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	24 Laporan	24,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				7 Dokumen	6,600,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		7 Dokumen	6,600,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							797,000,000	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Unit	797,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,219,784,000							1,219,784,000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	520,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	520,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	110,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	110,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,104,264,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	1,104,264,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						142,621,000							262,621,000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	127,621,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		24 Unit	147,621,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	5,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		40 Unit	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	10,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Unit	90,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						979,343,000						1,388,972,000	
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						979,343,000						1,388,972,000	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				186040 Dokumen	979,343,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		186040 Dokumen	1,338,972,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				40 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		40 Laporan	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL						87,112,000						496,086,000	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil						0						383,110,000	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				31500 dokumen	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		31500 dokumen	307,110,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				50 Layanan	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		50 Layanan	76,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						87,112,000						112,976,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				25 Laporan	87,112,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		25 Laporan	112,976,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						209,156,000						322,980,000		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						209,156,000						322,980,000		
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				73 Laporan	209,156,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		73 Laporan	322,980,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						0						35,000,000		
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						0						35,000,000		
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				160 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		160 Dokumen	35,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							4,527,939,000						6,026,999,000	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,498,539,000						3,908,583,000		
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4,568,000						11,000,000		
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2,493,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	6,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	2,075,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	6. Penguatan Desa		6 Laporan	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,164,669,000						3,292,923,000		
2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Org/bln	3,094,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		24 Org/bln	3,094,950,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50 Dokumen	36,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		50 Dokumen	117,223,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	33,519,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		2 Dokumen	80,750,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2,283,000							5,500,000	
2 13 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2,283,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		2 Laporan	5,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							30,000,000	
2 13 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				24 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24 Orang	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						26,741,000							64,419,000	
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1,502,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Paket	3,619,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	13,453,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		6 Paket	32,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		1 Dokumen	2,400,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 laporan	4,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		30 laporan	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	4,150,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		10 Laporan	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		2 Dokumen	6,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							110,000,000	
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		3 unit	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		2 unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						225,241,000							231,007,000	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	558,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		1 Laporan	1,345,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		12 Laporan	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3,533,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		1 Laporan	8,512,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	176,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		1 Laporan	176,150,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						75,037,000							163,734,000	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 unit	57,778,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		14 unit	109,214,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 unit	6,053,000				6. Penguatan Desa		10 unit	27,520,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	11,206,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Penguatan Desa		1 unit	27,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA						19,505,000						46,000,000		
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						19,505,000						46,000,000		
2 13 02 2.01 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				1 Desa	2,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Penguatan Desa 6. Penguatan Desa		1 Desa	6,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 02 2.01 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				1 Desa	2,490,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Penguatan Desa 6. Penguatan Desa		1 Desa	5,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 02 2.01 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa				150 Unit	14,525,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Penguatan Desa		150 Unit	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						69,515,000						197,500,000		
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						69,515,000						197,500,000		
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	7,677,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Penguatan Desa		2 Dokumen	18,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 03 2.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				6 Dokumen	61,838,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Penguatan Desa 6. Penguatan Desa		6 Dokumen	179,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						450,708,000						836,150,000		
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						450,708,000						836,150,000		
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				3 Dokumen	10,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Penguatan Desa		3 Dokumen	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 04 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa				10 Dokumen	3,776,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Penguatan Desa		10 Dokumen	9,100,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				224 Dokumen	9,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Penguatan Desa		224 Dokumen	22,625,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa				224 Dokumen	105,136,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		224 Dokumen	253,325,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Pelatih/trainer yang siap memberi bimtek peningkatan kapasitas aparatur desa Aparatur Pemerintah Desa Peningkatan Kapasitas				95 Orang	238,286,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		95 Orang	317,250,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				3 Dokumen	4,748,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa 6. Penguatan Desa		3 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				3 Dokumen	17,577,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		3 Dokumen	50,853,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				3 Laporan	8,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		3 Laporan	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	4,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		1 Laporan	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa				224 Dokumen	8,944,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		224 Dokumen	21,551,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				3 Dokumen	10,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		3 Dokumen	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa				2 Dokumen	4,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		2 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				18 Orang	6,225,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		18 Orang	15,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				3 Dokumen	19,276,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		3 Dokumen	46,446,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						489,672,000						1,038,766,000		
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						489,672,000						1,038,766,000		
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5112 Lembaga	42,592,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa	5112 Lembaga	322,625,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 05 2.01 04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				20 unit	20,751,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa	20 unit	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				5 Dokumen	8,550,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa	5 Dokumen	20,600,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	17,226,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		1 Laporan	21,506,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				10 Laporan	66,322,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		10 Laporan	239,804,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				239 Dokumen	334,231,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Penguatan Desa		239 Dokumen	334,231,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						21,141,448,000						13,420,966,550			
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja														
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen								100 Persen		
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen								100 Persen		
		Persentase pengadaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen								100 Persen		
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen								100 Persen		
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen								100 Persen		
							5,982,836,000								6,968,854,550	
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	Persen		Persen	100 Persen	2,794,000						100 Persen	6,730,000		
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1,832,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	2 Dokumen	2,316,000	DINAS PERHUBUNGAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	962,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	2 Laporan	4,414,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Penunjang Operasional Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	4,444,186,000						12 Bulan	4,525,815,000	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	4,323,339,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan	36 Orang/bulan	4,300,139,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	59,932,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan	5 Dokumen	78,900,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	60,915,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan	3 Dokumen	146,776,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	5,000,000						100 Persen	7,202,000	
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	5,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	3 Laporan	7,202,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	27,609,000						12 Bulan	66,711,550	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,552,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	1 Paket	6,150,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	13,057,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	1 Paket	31,461,550	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	0 Dokumen	2,400,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				10 Laporan	1,500,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	10 Laporan	3,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	4,500,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	16 Laporan	11,200,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	6,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	12 Dokumen	12,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercukupinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	0 Unit	0						0 Unit	533,280,000	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	0 Unit	42,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	0 Unit	80,780,000	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	0 Unit	410,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,287,171,000						12 Bulan	1,291,136,000	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	460,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	2 Laporan	1,100,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	116,760,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	12 Laporan	116,760,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	2,075,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	5 Laporan	5,400,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,167,876,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	12 Laporan	1,167,876,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	216,076,000						12 Bulan	537,980,000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	138,976,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	42 Unit	289,480,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	19,100,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	10 Unit	38,500,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	58,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Dinas Perhubungan	3 Unit	210,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan umum yang aktif Persentase perlengkapan jalan kondisi baik	persen persen		persen persen	71,12 persen 75 persen	15,158,612,000						71,12 persen 75 persen	6,452,112,000	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	48 Dokumen	21,978,000						48 Dokumen	21,978,000	
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				48 Dokumen	21,978,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Kabupaten Purbalingga	48 Dokumen	21,978,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	persen		persen	75 persen	14,716,152,000						75 persen	4,545,070,000	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				700 Unit	3,200,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Kabupaten Purbalingga	700 Unit	1,676,200,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				450 Unit	150,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Kabupaten Purbalingga	450 Unit	1,170,940,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				12477 Unit	11,288,152,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Kabupaten Purbalingga	12477 Unit	1,501,100,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1200 Unit	78,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Kabupaten Purbalingga	1200 Unit	196,830,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional		Daerah			
2	15	02	2.03			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Unit		Unit	5 Unit	22,000,000					5 Unit	110,500,000		
2	15	02	2.03	03		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan				4 Unit	22,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Kab. Purbalingga, Kejobong, Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban, Kab. Purbalingga, Kalimanah, Jompo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Terminal Bukateja, Terminal Kejobong, Terminal Penaruban, Terminal Jompo	4 Unit	110,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.04			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Penyediaan Fasilitas Parkir	Izin		Izin	389 Izin	34,810,000					389 Izin	198,758,000		
2	15	02	2.04	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Laporan	34,810,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Titik Parkir Kabupaten Purbalingga	5 Laporan	198,758,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen		Persen	100 Persen	194,445,000					100 Persen	422,601,000		
2	15	02	2.05	01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				9 Unit	194,445,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Penaruban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Seluruh KBWU Kabupaten Purbalingga	9 Unit	422,601,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						0						175,600,000		
2	15	02	2.06	01		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		0 Laporan	175,600,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Persetujuan Hasil Andalalin	Persen		Persen	100 Persen	13,695,000						100 Persen	40,000,000	
2 15 02 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				10 Laporan	13,695,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Kabupaten Purbalingga	10 Laporan	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	Persen		Persen	100 Persen	10,076,000						100 Persen	55,545,000	
2 15 02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				12 Laporan	10,076,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Kabupaten Purbalingga	12 Laporan	55,545,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Pada Hari Besar Nasional	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	95,456,000						10 Kegiatan	330,110,000	
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Unit	95,456,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Kabupaten Purbalingga	12 Unit	330,110,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Awak Angkutan dan Operasional Bus Sekolah	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	50,000,000						4 Kegiatan	511,950,000	
2 15 02 2.11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Kabupaten Purbalingga	0 Dokumen	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.11 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Kabupaten Purbalingga	4 Dokumen	481,950,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0							40,000,000	
2 15 02 2.12 01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		0 Dokumen	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						6,147,706,000						10,240,528,200		
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	4,843,924,000						100 %	7,803,668,700	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan	%		%	100 %	4,565,000						100 %	12,600,000	
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,490,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	2 Dokumen	6,600,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	2,075,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	20 Laporan	6,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	%		%	100 %	4,002,914,000						100 %	6,090,600,600	
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	3,921,701,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	44 Orang/bulan	5,961,841,600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	31,132,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	24 Dokumen	43,344,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 dokumen	50,081,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	4 dokumen	85,415,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitas penunjang penatausahaan Barang Milik Daerah	bulan		bulan	12 bulan	2,490,000						12 bulan	7,000,000	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2,490,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga	2 Laporan	7,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi di Bidang Cukai	kali		kali	158 kali	200,000,000						158 kali	300,000,000	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	35 Orang	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya perlengkapan dan bahan logistik kantor	bln		bln	12 bln	47,784,000						12 bln	79,333,100	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,098,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga	1 Paket	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	39,393,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga	12 Paket	57,005,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4,803,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga	12 Laporan	12,728,100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	2,490,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga	4 Dokumen	6,600,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						503,800,000		
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		19 Unit	503,800,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2 16 01 2.08		Tersedianya layanan kepegawaian , perlengkapan administrasi umum dan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	555,689,000						12 bulan	499,754,000	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	403,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga	1 Laporan	1,069,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	41,400,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga	12 Laporan	45,540,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,204,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga	1 Laporan	3,190,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	512,682,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga	12 Laporan	449,955,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	bulan		bulan	12 bulan	30,482,000						12 bulan	310,581,000	
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	25,081,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga	13 Unit	24,018,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	4,363,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga	20 Unit	11,563,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,038,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Purbalingga	1 Unit	275,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Keg. Pemerintahan dan Pembangunan yang terpublikasi	%		%	100 %	517,473,000						100 %	655,772,000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemda Jumlah Dialog Interaktif Radio dan Televisi Jumlah Informasi Publik Pemkab yang disusun dan daftar informasi yang dikecualikan Jumlah Kemitraan yang terbentuk Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemkab	% kali PPID Pembantu Forum KIM, FK Metra kali		% kali PPID Pembantu Forum KIM, FK Metra kali	100 % 14 kali 29 PPID Pembantu 21 Forum KIM, FK Metra 276 kali	517,473,000						100 % 14 kali 29 PPID Pembantu 21 Forum KIM, FK Metra 276 kali	655,772,000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				278 Dokumen	231,500,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Kabupaten Purbalingga	278 Dokumen	254,650,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				16 Dokumen	253,185,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Kabupaten Purbalingga	16 Dokumen	352,924,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				29 Orang	9,958,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Kabupaten Purbalingga	29 Orang	26,390,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				21 Dokumen	22,830,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Kabupaten Purbalingga	21 Dokumen	21,808,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan OPD yang memiliki website aktif dan pelayanan publik online	opd		opd	55 opd	786,309,000						55 opd	1,781,087,500	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah website dan sub domain OPD yang terpelihara	OPD		OPD	55 OPD	764,801,000						55 OPD	1,724,090,500	
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				195 Dokumen	37,323,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga	195 Dokumen	68,288,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				8 Unit	727,478,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga	8 Unit	1,655,802,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi (Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik)	Aplikasi		Aplikasi	5 Aplikasi	21,508,000						5 Aplikasi	56,997,000	
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				42 Unit	21,508,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga	42 Unit	56,997,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							27,557,000						29,030,000	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data Dasar Pembangunan	%		%	100 %	27,557,000						100 %	29,030,000	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Data Dasar Pembangunan	%		%	100 %	27,557,000						100 %	29,030,000	
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				280 Dokumen	6,400,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	280 Dokumen	16,962,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20 02 2.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				29 Dokumen	21,157,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	29 Dokumen	12,068,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							61,432,000						98,460,318	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi	Dok		Dok	3 Dok	61,432,000						3 Dok	98,460,318	
2 21 02	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Keamanan Informasi	keg		keg	1 keg	41,508,000						1 keg	45,660,318	
2 21 02	2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			1 Dokumen	20,754,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Keamanan Informasi Pemerintah	1 Dokumen	22,830,159	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21 02	2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2 Laporan	20,754,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Keamanan Informasi Pemerintah	2 Laporan	22,830,159	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21 02	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Pemerintah Yang Difasilitasi		unit	2 unit	19,924,000						2 unit	52,800,000	
2 21 02	2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			1 Perangkat Daerah	19,924,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		1 Perangkat Daerah	52,800,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2															
2	17						5,622,284,000							6,935,124,900	
2	17 01						3,167,294,000							3,389,259,000	
2	17 01	2.01					12,592,000						10 dokumen	12,100,000	
2	17 01	2.01 01					3,861,000					0		6,600,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8,731,000					0		5,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Penunjang Operasional Kantor Terpenuhinya Kebutuhan operaional Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Kinerja ASN	ok ok OK OH		ok ok OK OH	270 ok 165 ok 165 OK 270 OH	2,517,335,000						270 ok 165 ok 165 OK 270 OH	2,654,394,000	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,335,776,000					0		2,461,319,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						75,000,000					0		71,800,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						106,559,000					0		121,275,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Honor Pengurus Barang	Bulan		Bulan	12 Bulan	3,000,000						12 Bulan	3,300,000	
2 17 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3,000,000					0		3,300,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							87,500,000	
2 17 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0				3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah			87,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Kunjungan tamu Jumlah Kebutuhan Jamuan Makan dan Minum Jumlah Kebutuhan peralatan RT	OK Ok Buah		OK Ok Buah	800 OK 800 Ok 5 Buah	65,155,000						800 OK 800 Ok 5 Buah	67,787,500	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,000,000					0		1,760,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						39,755,000					0		43,587,500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2,400,000					0		2,640,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5,000,000					0		3,300,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10,000,000					0		9,900,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						6,000,000					0		6,600,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Barang		Barang	3 Barang	0						3 Barang	47,500,000	
2 17 01 2.07 05	Pengadaan Mebel						0					0		35,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0					0		12,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jaringan telepon,SDA,Listrik,internet,Telepon Kepala dinas Tersedianya Makmin Rapat Tersedianya Materi,Perangko dan Jasa pengiriman	Telepon paket ok buah/th		paket ok buah/th	16 paket ok 75 buah/th	392,506,000						16 paket ok 75 buah/th	429,797,500	
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0					0		330,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						44,475,000					0		43,422,500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2,081,000					0		5,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						345,950,000					0		380,545,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional/lpangan	paket ok/th		paket ok/th	5 paket ok/th	176,706,000						5 paket ok/th	86,880,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						114,016,000					0			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20,000,000					0		11,880,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						42,690,000					0		75,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentasekoperasi Aktif	Persen		Persen	75,1 Persen	22,714,000						75,1 Persen	38,885,000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa	koperasi		koperasi	160 koperasi	22,714,000						160 koperasi	38,885,000	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Unit Usaha	22,714,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Unit Usaha	38,885,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sudah menerapkan standar SAK	koperasi		koperasi	58 koperasi	26,975,000						58 koperasi	92,525,000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi dengan Kriteria Koperasi Terbaik	koperasi		koperasi	25 koperasi	26,975,000						25 koperasi	92,525,000	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						6,157,000					0		53,425,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 04 2.01 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				0 Unit Usaha	20,818,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0	0 Unit Usaha	39,100,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Memiliki Kompetensi Bidang Perkoperasian	Persen		Persen	55 Persen	415,172,000						55 Persen	478,861,900	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang dilatih	Orang		Orang	240 Orang	188,172,000						240 Orang	313,861,900	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						188,172,000					0		313,861,900	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 05 2.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan SDM UKM	pelatihan		pelatihan	5 pelatihan	227,000,000						5 pelatihan	165,000,000	
2 17 05 2.02 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM						227,000,000					0		165,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan Volume Usaha koperasi	Persen		Persen	10 Persen	123,715,000						10 Persen	105,022,000	
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Dibina	Koperasi		Koperasi	100 Koperasi	123,715,000						100 Koperasi	105,022,000	
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						123,715,000					0		105,022,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro yang Mandiri/Berdaya	UMKM		UMKM	5 UMKM	766,772,000						5 UMKM	919,222,000	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMK yang difasilitasi Sertifikat Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terdata Jumlah Usaha Mikro yang terbina/terdampingi	sertifikat sertifikat UMK		sertifikat sertifikat UMK	1900 sertifikat 1900 sertifikat 100000 UMK	766,772,000						1900 sertifikat 1900 sertifikat 100000 UMK	919,222,000	
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0 Dokumen	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	0 Dokumen	0		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro						16,699,000				0		44,132,000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				0 Unit Usaha	750,073,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	0 Unit Usaha	875,090,000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi Melalui Internet	Persen		Persen	3 Persen	1,099,642,000						3 Persen	1,911,350,000	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Pameran Terfasilitasinya Promosi Produk UMK Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pengembangan UMKM Tersalurkannya Subsidi Bunga Kepada Pelaku UMK	Pameran Produk pameran orang		Pameran Produk pameran orang	5 Pameran 65 Produk 20 pameran 1000 orang	1,099,642,000						5 Pameran 65 Produk 20 pameran 1000 orang	1,911,350,000	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi						1,099,642,000				0		1,911,350,000		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3,692,124,000							4,437,336,500	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,177,333,000						3,477,325,500		
2 18 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,220,000						11,000,000		
2 18 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	2 Dokumen	6,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						720,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,654,775,000						2,798,329,000		
2 18 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2,557,898,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	20 Orang/bulan	2,684,360,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						59,327,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		59,344,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						37,550,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		54,625,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						6,000,000						6,000,000		
2 18 01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		6,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0						20,000,000		
2 18 01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Orang	20,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah						72,450,000						114,197,000		
2 18 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,527,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1,814,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	51,983,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Paket	91,483,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik			2,400,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	10,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan	12,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik			6,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						344,950,000							349,550,000	
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik			550,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	156,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan	156,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik			4,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						188,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik			188,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						97,938,000							178,249,500	
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	84,358,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit	104,669,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	8,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit	38,580,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit	35,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						38,100,000						38,100,000		
2 18 02	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						20,600,000						20,600,000		
2 18 02	2.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					15,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		15,600,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 02	2.01	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					17,500,000						17,500,000		
2 18 02	2.02	01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					8,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		8,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 02	2.02	02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota					8,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		8,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					49,495,000						49,495,000		
2 18 03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					49,495,000						49,495,000		
2 18 03	2.01	01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal					8,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		8,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 03	2.01	02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					40,745,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		40,745,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					22,445,000						458,665,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						22,445,000						458,665,000		
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				124 Pelaku Usaha	5,355,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	124 Pelaku Usaha	438,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal						6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		6,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan						3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		6,975,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					83 kali	7,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	83 kali	7,590,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						388,601,000						397,601,000		
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						388,601,000						397,601,000		
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				0 Kegiatan Usaha.	37,865,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Kegiatan Usaha.	46,865,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				0 Pelaku Usaha	317,636,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Pelaku Usaha	317,636,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				0 Kegiatan Usaha	33,100,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Kegiatan Usaha	33,100,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						16,150,000							16,150,000	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						16,150,000							16,150,000	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik				43 data	16,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		43 data	16,150,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						8,814,565,000						15,071,661,400		
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen Renja Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja.	Dokumen persen		Dokumen persen	1 Dokumen 100 persen	4,022,565,000						1 Dokumen 100 persen	7,417,828,400	
2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang diserahkan sesuai dengan yang ditentukan Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja.	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	2,400,000						100 Persen 100 Persen	11,000,000	
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 4 Dokumen	1,200,000					0	0 Dokumen 4 Dokumen	6,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1,200,000				2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	5 Laporan	5,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja.	P Persen		P Persen	100 P 100 Persen	3,022,734,000						100 P 100 Persen	6,320,252,400	
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2,952,584,000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	25 Orang/bulan	6,162,776,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	23,000,000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	12 Dokumen	54,376,400	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	47,150,000				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	0 Dokumen	103,100,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja. Teradministrasinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	8,300,000						100 Persen 100 Persen	15,000,000	
2 19 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	8,300,000					0	5 Laporan	15,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja. Tersosialisasikannya Peraturan dan Perundang-Undangan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100,000,000						100 Persen 100 Persen	100,000,000	
2 19 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500 Orang	100,000,000				2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	500 Orang	100,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja. Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	19,191,000						100 Persen 100 Persen	43,023,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1,000,000				0	0 Paket	4,000,000	DINAS PEMUDA, OLAKHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9,981,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Paket	22,798,000	DINAS PEMUDA, OLAKHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0	12 Dokumen	2,400,000	DINAS PEMUDA, OLAKHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	2,850,000			2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Laporan	5,000,000	DINAS PEMUDA, OLAKHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	1,400,000				0	4 Laporan	5,225,000	DINAS PEMUDA, OLAKHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Dokumen	3,600,000	DINAS PEMUDA, OLAKHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja.	Persen		Persen	100 Persen	815,865,000					100 Persen	796,947,000		
2 19 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	204,000				0	6 Laporan	486,000	DINAS PEMUDA, OLAKHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42,645,000				0	12 Laporan	45,045,000	DINAS PEMUDA, OLAKHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	773,016,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Laporan	751,416,000	DINAS PEMUDA, OLAKHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	54,075,000					100 Persen 100 Persen	131,606,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	42,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Unit	101,606,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 12 Unit 16 Unit	2,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	0 Unit 12 Unit 16 Unit	5,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	1 Unit	25,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	persen		persen	25 persen	1,085,000,000						25 persen	1,332,092,000	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan pemuda yang difasilitasi per 10.000 pemuda	Persen		Persen	2.92 Persen	470,000,000						2.92 Persen	730,392,000	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				0 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	0 Orang	355,196,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				31 Orang	395,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	31 Orang	375,196,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi.	Persen		Persen	42 Persen	615,000,000						42 Persen	601,700,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				0 Dokumen	615,000,000				0	0 Dokumen	601,700,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang olah raga yg berprestasi ditingkat regional dan nasional	persen		persen	45.45 persen	3,357,000,000					45.45 persen	5,961,741,000		
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cabangolahraga tingkat pendidikan dasar yang difasilitasi	Cabor		Cabor	15 Cabor	678,000,000					15 Cabor	1,636,000,000		
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Unit	678,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	3 Unit	1,636,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan Pekan Olahraga tingkat Kab/kota yang diselenggarakan	Kejuaraan		Kejuaraan	2 Kejuaraan	409,000,000					2 Kejuaraan	1,869,141,000		
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	92,000,000				0	0 Dokumen	549,700,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				31 Dokumen	129,000,000				0	31 Dokumen	764,841,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				12 Orang	188,000,000			2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	12 Orang	554,600,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah olahraga prestasi yang difasilitasi	Cabor		Cabor	33 Cabor	20,000,000					33 Cabor	200,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				350 Orang	20,000,000				0	350 Orang	200,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah organisasi keolahragaan yang berprestasi	Oranisasi		Oranisasi	14 Oranisasi	2,250,000,000					14 Oranisasi	2,256,600,000		
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0 Organisasi 14 Organisasi	2,250,000,000				0	0 Organisasi 14 Organisasi	2,256,600,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kelompok pramuka aktif	persen		persen	100 persen	350,000,000					100 persen	360,000,000		
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan kegiatan kepramukaan tingkat regional dan nasional yang diikuti	Persen		Persen	100 Persen	350,000,000					100 Persen	360,000,000		
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				2 Laporan	350,000,000				0	2 Laporan	360,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						416,925,000						1,393,239,000		
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan Daya tarik wisata yang dikembangkan	persen		persen	20.59 persen	257,925,000					20.59 persen	820,239,000		
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Destinasi wisata yang dikelola secara baik	Persen		Persen	100 Persen	18,000,000					100 Persen	278,200,000		
3 26 02 2.01 01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0 Lokasi	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	0 Lokasi	15,500,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				10 Lokasi	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	10 Lokasi	232,700,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	12,000,000				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	0	0 Dokumen	30,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Destinasi wisata yang dikelola secara baik	Persen		Persen	100 Persen	199,925,000						100 Persen	392,000,000	
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				0 Unit	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0	0 Unit	64,950,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				6 Laporan	129,925,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0	6 Laporan	327,050,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Usaha Pariwisata yang ber TDUP	Persen		Persen	15 Persen	40,000,000						15 Persen	150,039,000	
3 26 02 2.04 02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0	0 Dokumen	27,814,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.04 05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi				0 Dokumen 0 Unit Usaha	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0	0 Dokumen 0 Unit Usaha	122,225,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Daya Tarik Wisata Yang meningkat angka kunjungan wisatanya	persen		persen	55.88 persen	135,000,000						55.88 persen	513,000,000	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terselenggarakannya Festival/pemasaran wiata	Persen		Persen	100 Persen	135,000,000						100 Persen	513,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Dokumen	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	5 Dokumen	348,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Laporan	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	0 Laporan	165,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif bersertifikat	Orang		Orang	128 Orang	24,000,000						128 Orang	60,000,000	
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah DTW yang difasilitasi	DTW		DTW	10 DTW	24,000,000						10 DTW	60,000,000	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				0 Orang	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	60,000,000	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						652,000,000						1,142,434,000		
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan aktif	persen		persen	3,24 persen	627,000,000						3,24 persen	1,109,804,000	
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi data jumlah kunjungan pemustaka di perpustakaan umum kabupaten	persen		persen	100 persen	572,000,000						100 persen	832,616,000	
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	519,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Perpustakaan	556,614,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	umlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				150 Perpustakaan	10,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	150 Perpustakaan	50,975,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 orang	15,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	100 orang	39,525,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				200 Eksemplar	20,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	200 Eksemplar	140,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	8,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	500 Eksemplar	45,502,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Expo tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi dalam rangka peningkatan pembudayaan gemar membaca	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	55,000,000						2 kegiatan	277,188,000	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				250 Lokus	20,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	250 Lokus	115,856,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				5 Orang	10,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	5 Orang	98,832,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Perpustakaan	25,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	5 Perpustakaan	62,500,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)	persen		persen	60 persen	25,000,000						60 persen	32,630,000	
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang di lestarikan	persen		persen	100 persen	25,000,000						100 persen	32,630,000	
2 23 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				0 Eksemplar 2 Eksemplar	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	0 Eksemplar 2 Eksemplar	32,630,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						3,479,835,000						4,505,228,000		
2 24 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya nilai saki	persen		persen	100 persen	3,391,790,000						100 persen	4,184,479,000	
2 24 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan	persen		persen	75 persen	11,000,000						75 persen	11,000,000	
2 24 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	6,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	6 Laporan	5,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi yang harus diselesaikan	persen		persen	75 persen	2,508,287,000						75 persen	2,840,927,000	
2 24 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 orang/bulan	2,421,524,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	20 orang/bulan	2,682,049,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	10 Laporan	63,403,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 dokumen	56,763,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	10 dokumen	95,475,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase nilai saki	persen		persen	100 persen	3,600,000						100 persen	3,600,000	
2 24 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	2 Laporan	3,600,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	persen		persen	75 persen	0						75 persen	20,000,000	
2 24 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	10 Orang	20,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosenyase Administrasi yang harus diselesaikan	persen		persen	75 persen	44,229,000						75 persen	49,229,000	
2 24 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				6 Paket	30,729,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	6 Paket	30,729,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	2,400,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 laporan	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	20 laporan	12,500,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	3,600,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	3,600,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase peralatan perlengkapan kerja	persen		persen	75 persen	0						75 persen	125,000,000	
2 24 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	10 unit	125,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	persen		persen	75 persen	747,630,000						75 persen	830,258,000	
2 24 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	1 laporan	540,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 laporan	174,685,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	10 laporan	233,350,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	572,405,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	24 Laporan	596,368,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	persen		persen	75 persen	77,044,000						75 persen	304,465,000	
2 24 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 unit	70,694,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	20 unit	218,965,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 unit	1,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	5 unit	10,500,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	2 unit	75,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD/Ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	persen		persen	25,89 persen	45,545,000						25,89 persen	232,895,500	
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	prosentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	persen		persen	100 persen	23,545,000						100 persen	159,321,500	
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1000 berkas	23,545,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	1000 berkas	159,321,500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang diolah, diakuisisi dan preservasi	persen		persen	100 persen	12,000,000						100 persen	31,791,500	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1000 Arsip	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	1000 Arsip	31,791,500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana Prosentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	10,000,000					100 persen 100 persen	41,782,500		
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				10 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	10 Laporan	41,782,500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	persen		persen	100 persen	42,500,000					100 persen	87,853,500		
2 24 03 2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	persen		persen	100 persen	17,000,000					100 persen	53,309,500		
2 24 03 2.02 01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				30 Arsip	8,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	30 Arsip	25,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2 24 03 2.02 02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				30 Arsip	8,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	30 Arsip	28,309,500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2 24 03 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	persen		persen	100 persen	25,500,000					100 persen	34,544,000		
2 24 03 2.03 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				10 Daftar	25,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	10 Daftar	34,544,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						39,720,721,000						45,947,214,800		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						24,944,524,000						24,422,067,800		
3 27 01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8,715,000						11,000,000		
3 27 01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4,565,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		6,000,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01	2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		5,000,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						24,204,757,000						23,270,742,000		
3 27 01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	24,069,361,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0 Orang/bulan	23,017,153,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01	2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	53,836,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Dokumen	99,719,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01	2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	81,560,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Dokumen	153,870,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10,707,000						25,800,000		
3 27 01	2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	10,707,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Laporan	25,800,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						49,456,000						88,669,000		
3 27 01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						7,291,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		2,569,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	18,883,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Paket	35,500,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01	2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						996,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		2,400,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01	2.06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu						6,225,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		9,500,000	DINAS PERTANIAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	13,073,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Laporan	31,500,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	2,988,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Dokumen	7,200,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
3 27 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		0	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						533,074,000						533,948,000		
3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						514,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		1,240,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						110,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		105,600,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3,652,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		8,800,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	418,308,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	1 Laporan	418,308,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						137,815,000						491,908,800		
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	90,769,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Unit	369,973,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	14,737,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	1 Unit	20,510,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	32,309,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	1 Unit	101,425,800	DINAS PERTANIAN	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						1,247,643,000						3,028,045,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3	27	02	2.01				105,990,000						1,549,570,000		
3	27	02	2.01	01			29,763,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		1,450,470,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	02	2.01	02			76,227,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		99,100,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	02	2.02				949,650,000						1,015,775,000		
3	27	02	2.02	01			33,202,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		80,000,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	02	2.02	03			916,448,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		935,775,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	02	2.05				192,003,000						462,700,000		
3	27	02	2.05	03			32 ton	192,003,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	32 ton	462,700,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	03					11,405,178,000						14,860,418,000		
3	27	03	2.01				334,793,000						28,525,000		
3	27	03	2.01	03				334,793,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		28,525,000	DINAS PERTANIAN	
3	27	03	2.02				4,774,883,000						8,537,893,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usahatani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara				15 unit 0 Unit	1,749,383,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	15 unit 0 Unit	2,803,500,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah jalan usahatani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara				0 Unit 15 unit	3,025,500,000		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Unit 15 unit	2,519,500,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	0		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	2 Unit	2,109,000,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						0		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		1,105,893,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						6,295,502,000						6,294,000,000		
3 27 03 2.03 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				32 Laporan	6,295,502,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	32 Laporan	6,294,000,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						138,773,000						326,669,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						45,210,000						114,935,000		
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				0 Laporan	45,210,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Laporan	114,935,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						11,902,000						28,680,000		
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						11,902,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		28,680,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						29,661,000						83,840,000		
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				0 Laporan	29,661,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Laporan	83,840,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 04 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan						52,000,000						99,214,000		
3 27 04 2.05 01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan				0 Laporan	52,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Laporan	99,214,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						204,167,000						413,375,000		
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						204,167,000						413,375,000		
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						74,007,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		109,755,000	DINAS PERTANIAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 05 2.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				0 Ha	130,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Ha	303,620,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						1,780,436,000						2,896,640,000		
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						1,780,436,000						2,896,640,000		
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1658 Kelompok	158,227,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	1658 Kelompok	201,114,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				45 Unit	1,508,709,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	45 Unit	2,243,333,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				18 Unit	95,862,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	18 Unit	388,443,000	DINAS PERTANIAN	
3 27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				8 Unit	17,638,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	8 Unit	63,750,000	DINAS PERTANIAN	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							3,667,183,000						21,353,000,000	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						12,488,000						85,000,000		
3 30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan						6,244,000						40,000,000		
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						6,244,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang						6,244,000						45,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				0 Dokumen	6,244,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		0 Dokumen	45,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						3,140,346,000							19,300,000,000	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						3,091,177,000							19,100,000,000	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						208,124,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah			15,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				0 Unit	2,883,053,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		0 Unit	4,100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						49,169,000							200,000,000	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	49,169,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		1 Dokumen	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						174,988,000							858,000,000	
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						149,390,000							790,000,000	
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						14,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat			40,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				0 Laporan	135,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat		0 Laporan	750,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						18,106,000						50,000,000		
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						18,106,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat		50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						7,492,000						18,000,000		
3 30 04 2.03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						7,492,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		18,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						49,949,000						850,000,000		
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						49,949,000						850,000,000		
3 30 05 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				30 Pelaku Usaha	49,949,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	30 Pelaku Usaha	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				10 Pelaku Usaha	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	10 Pelaku Usaha	100,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				10 Pelaku Usaha	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	10 Pelaku Usaha	200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				2 Pelaku Usaha	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	2 Pelaku Usaha	500,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						289,412,000						260,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						289,412,000						260,000,000		
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				0 Unit	289,412,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	0 Unit	240,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				1 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	1 Orang	20,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							8,486,034,000					19,489,762,000		
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7,949,895,000					8,665,462,000		
3 31 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4,124,000					15,000,000		
3 31 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2,250,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		10,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,874,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,262,786,000					7,302,962,000		
3 31 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	7,185,299,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Orang/bulan	7,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	33,299,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Dokumen	60,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Dokumen	120,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	44,188,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	120,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2,962,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,913,000					7,000,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2,913,000						7,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0						10,000,000		
3 31 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	5 Orang	10,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						45,132,000						182,000,000		
3 31 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1,665,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Paket	4,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30,814,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		95,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		13,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Dokumen	2,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		25,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Laporan	15,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	8,325,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Laporan	20,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	3,329,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	8,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						160,000,000		
3 31 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	10 Unit	50,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		110,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						575,000,000						593,500,000		
3 31 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,456,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		3,500,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						115,312,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		130,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	458,232,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Laporan	460,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59,940,000						395,000,000		
3 31 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						51,615,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		160,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8,325,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		35,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		200,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						536,139,000						10,798,300,000		
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						536,139,000						10,798,300,000		
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		45,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						41,624,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		150,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						372,762,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		603,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						121,753,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		10,000,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						0							16,000,000		
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						0							16,000,000		
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota						0			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		16,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						0							10,000,000		
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						0							10,000,000		
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						0			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah		10,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						27,588,447,000						48,215,319,000			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen		persen	100 persen	27,588,447,000							100 persen	48,215,319,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersusunnya dokumen evaluasi Tersusunnya dokumen Renja	persen dokumen dokumen dokumen dokumen		persen dokumen dokumen dokumen dokumen	100 persen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	3,500,000						100 persen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	25,250,000	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Perencanaan dan Evaluasi Setda	2 Dokumen	17,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	2,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Perencanaan dan Evaluasi Setda	3 Laporan	8,250,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Setda yang menerima gaji dan tunjangan Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang difasilitasi SPPD Tersusunnya LRA, LK, SPM, dan lain-lain	orang kali bulan		orang kali bulan	159 orang 200 kali 12 bulan	18,100,687,000						159 orang 200 kali 12 bulan	19,720,634,000	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				159 Orang/bulan	17,713,746,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Keuangan Sekretariat Daerah	159 Orang/bulan	18,772,325,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				240 Dokumen	262,301,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Keuangan Sekretariat Daerah	240 Dokumen	639,595,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				14 Dokumen	124,640,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Keuangan Sekretariat Daerah	14 Dokumen	308,714,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya honor Pejabat Pengadaan, PPKom dan Pengurus Barang	Laporan bulan		Laporan bulan	1 Laporan 12 bulan	12,400,000						1 Laporan 12 bulan	54,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	12,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pejabat Pengadaan, PPKom dan Pengurus Barang	2 Laporan	54,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang		orang	3 orang	17,637,000						3 orang	42,500,000	
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	17,637,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN karyawan Setda Purbalingga	10 Orang	42,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya honor operator Simda, Simbada dan SIPD Tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya jamuan rapat Tersedianya jamuan tamu Tersedianya perlengkapan listrik	bulan bulan bulan bulan bulan		bulan bulan bulan bulan bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	699,706,000						12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	2,859,317,000	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	20,712,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Logistik Kantor	15 Paket	77,904,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	206,029,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Logistik Kantor	7 Paket	589,413,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3600 Dokumen	4,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Logistik Kantor	3600 Dokumen	12,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				360 Laporan	405,065,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Logistik Kantor	360 Laporan	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	41,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Logistik Kantor	150 Laporan	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	21,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Logistik Kantor	2 Dokumen	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	unit		unit	0 unit	0					0 unit	500,000,000		
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pengadaan Barang Milik Daerah	0 Unit	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Frekuensi penggunaan jasa dekorasi, jasa rias, dan jasa hiburan Frekuensi penggunaan jasa pos/pengiriman/kurir Frekuensi sewa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah ASN Setda yang menerima honor PTT, THL pengemudi, THL operator, THL kebersihan, Jasa pihak ketiga, iuran2 asosiasi, lembur Jumlah perangko, materai, dan benda pos lainnya Tingkat realisasi pembayaran tagihan telepon dan internet, listrik, air	bulan bulan bulan bulan bulan persen		bulan bulan bulan bulan bulan persen	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 persen	2,303,070,000					12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 persen	15,123,430,000		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	2,781,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa	1000 Laporan	7,370,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	990,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa	36 Laporan	13,418,460,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Laporan	131,053,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa	24 Laporan	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				62 Laporan	1,178,636,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Penyediaan Jasa	62 Laporan	1,147,600,000	SEKRETARIAT DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang menjadi obyek pajak kendaraan bermotor Jumlah kendaraan dinas yang menjadi obyek pemeliharaan dan pajak kendaraan bermotor operasional/lapangan Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	unit unit bulan bulan		unit unit bulan bulan	7 unit 20 unit 12 bulan 12 bulan	754,005,000					7 unit 20 unit 12 bulan 12 bulan	3,106,168,000		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	181,902,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	9 Unit	776,478,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				110 Unit	323,093,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	110 Unit	1,045,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				570 Unit	166,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	570 Unit	317,790,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	83,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	16 Unit	966,900,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji, tunjangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	bulan		bulan	12 bulan	776,000,000					12 bulan	776,000,000		
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	776,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	176,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah Tersedianya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	4,921,442,000						12 bulan 12 bulan	6,008,020,000	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				31 Paket	3,247,219,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31 Paket	3,517,470,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				27 Paket	1,674,223,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27 Paket	2,140,550,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				25 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25 Paket	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						92,948,000						925,000,000		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai pelaporan dan pengukuran SAKIP OPD	angka		angka	67 angka	92,948,000						67 angka	925,000,000	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen evaluasiSOTK Jumlah Dokumen survei kepuasan masyarakat Jumlah Inovasi Desa/pemerintah/sekolah Jumlah OPD yang menyusun laporan kinerja dan perjanjian kinerja tingkat kabupaten dengan tepat waktu Jumlah unit pelayanan publik yang di monev Laporan kinerja dan perjanjian kinerja tingkat kabupaten yang disusun tepat waktu	dokumen dokumen dokumen inovasi OPD Unit laporan		dokumen dokumen inovasi OPD Unit laporan	0 dokumen 1 dokumen 21 inovasi 47 OPD 12 Unit 2 laporan	92,948,000						0 dokumen 1 dokumen 21 inovasi 47 OPD 12 Unit 2 laporan	925,000,000	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen evaluasi SOTK				1 Dokumen	34,208,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	41,676,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	1 Laporan	165,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	17,064,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	1 Dokumen	210,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							259,998,000						990,000,000	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	259,998,000						100 persen	990,000,000	
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Aksi HAM Cakupan Perda/Perkada yang terdokumentasi dan terinformasikan melalui website JDIH Jumlah masyarakat dan OPD yang mengikuti sosialisasi dan deseminasi produk hukum daerah Jumlah Perda yang Difasilitasi Penyusunannya Jumlah rekomendasi, evaluasi dan Pengawasan Perda/Perkada Prosentase Permohonan Bantuan Hukum yang Tertangani Prosentase Produk Hukum Daerah yang Terpublikasi	persen persen orang Dokumen Dokumen persen persen		persen persen orang Dokumen Dokumen persen persen	100 persen 100 persen 80 orang 15 Dokumen 15 Dokumen 100 persen 100 persen	259,998,000						100 persen 100 persen 80 orang 15 Dokumen 15 Dokumen 100 persen 100 persen	990,000,000	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				12 Dokumen	39,387,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Produk Hukum Daerah	12 Dokumen	220,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				20 Kasus	176,372,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Produk Hukum Daerah	20 Kasus	440,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				485 Dokumen	44,239,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Produk Hukum Daerah	485 Dokumen	330,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						451,693,000						855,000,000		
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rata-rata capaian kinerja program rumpun pemerintahan	%		%	100 %	451,693,000						100 %	855,000,000	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang administrasi pemerintahan Jumlah rekomendasi penegasan batas daerah kecamatan dan kelurahan Jumlah rekomendasi pengelolaan administrasi kewilayahan	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	3 dokumen 2 dokumen 3 dokumen	439,240,000						3 dokumen 2 dokumen 3 dokumen	825,000,000	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	323,014,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kabupaten Purbalingga	3 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				82 Dokumen	20,755,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kabupaten Purbalingga	82 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	95,471,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kabupaten Purbalingga	3 Dokumen	375,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	dokumen		dokumen	15 dokumen	12,453,000						15 dokumen	30,000,000	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				15 Dokumen	12,453,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kabupaten Purbalingga	15 Dokumen	30,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						725,789,000						1,030,000,000		
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase kenaikan deviden dari sektor BUMD	persen		persen	5 persen	725,789,000						5 persen	1,030,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis Pengelolaan BUMD dan BLUD	rekomendasi		rekomendasi	4 rekomendasi	338,305,000						4 rekomendasi	632,000,000	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				10 Dokumen	49,811,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Pelayanan Publik	BUMD, Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta Usaha Mikro Kecil	10 Dokumen	132,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				6 Laporan	19,509,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Pelayanan Publik	BUMD, Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta Usaha Mikro Kecil	6 Laporan	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				3 Dokumen	268,985,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Pelayanan Publik	BUMD, Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta Usaha Mikro Kecil	3 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan rekomendasi terkait sumber daya alam yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi kebijakan energi yang terbaharukan dan air Jumlah rekomendasi kebijakan lingkungan hidup Jumlah rekomendasi kebijakan pertanian dan perikanan	persen rekomendasi rekomendasi rekomendasi		persen rekomendasi rekomendasi rekomendasi	100 persen 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi	387,484,000						100 persen 2 rekomendasi 2 rekomendasi 2 rekomendasi	398,000,000	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				3 Dokumen	382,441,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kegiatan Yang Harus Mendapat Dukungan dari Sumber Daya Alam	3 Dokumen	390,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				3 Dokumen	1,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kegiatan Yang Harus Mendapat Dukungan dari Sumber Daya Alam	3 Dokumen	4,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				3 Dokumen	3,443,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kegiatan Yang Harus Mendapat Dukungan dari Sumber Daya Alam	3 Dokumen	4,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01		SEKRETARIAT DAERAH					14,198,149,000							21,790,698,000	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rata-rata Capaian Kinerja Program Rumpun Kesra	Persen		Persen	100 Persen	14,198,149,000						100 Persen	21,790,698,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitasi pelaksanaan haji, umroh, dan ziarah Jumlah lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan sarana prasarana Jumlah pelaksanaan even keagamaan Jumlah penerima bantuan kesejahteraan SDM keagamaan Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan bidang keagamaan Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan Pemda di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan Pemda di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB	orang lembaga kegiatan orang dokumen dokumen dokumen		orang lembaga kegiatan orang dokumen dokumen dokumen	600 orang 60 lembaga 195 kegiatan 2389 orang 55 dokumen 10 dokumen 15 dokumen	14,198,149,000					600 orang 60 lembaga 195 kegiatan 2389 orang 55 dokumen 10 dokumen 15 dokumen	21,790,698,000		
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				55 Dokumen	14,166,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	55 Dokumen	21,693,838,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				15 Dokumen	17,431,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	15 Dokumen	42,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				10 Dokumen	14,468,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kabupaten Purbalingga	10 Dokumen	54,860,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						172,155,000						325,000,000		
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang selesai tepat waktu rata - rata capaian kinerja program rumpun pembangunan	persen persen		persen persen	90 persen 100 persen	172,155,000						90 persen 100 persen	325,000,000	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan program pembangunan daerah Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian pembangunan yang sesuai dengan program pembangunan daerah Jumlah rekomendasi terkait penyusunan program pembangunan	laporan rekomendasi rekomendasi		laporan rekomendasi rekomendasi	12 laporan 12 rekomendasi 12 rekomendasi	172,155,000						12 laporan 12 rekomendasi 12 rekomendasi	325,000,000	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				12 Dokumen	16,062,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kinerja OPD	12 Dokumen	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 laporan	21,979,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kinerja OPD	12 laporan	65,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 laporan	134,114,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kinerja OPD	12 laporan	210,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif										
															Nasional	Daerah													
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
4	01					SEKRETARIAT DAERAH																240,403,000						1,205,000,000	
4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat maturitas kelembagaan UKPBJ	kriteria		kriteria	7 kriteria	240,403,000							7 kriteria	1,205,000,000									
4	01	03	2.03			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa di BPBJ Jumlah permohonan pelayanan LPSE yang ditindaklanjuti Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pengadaan barang/jasa	paket buah orang	paket buah orang	125 paket 50 buah 100 orang	240,403,000							125 paket 50 buah 100 orang	1,205,000,000										
4	01	03	2.03	01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			12 Dokumen	205,103,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	12 Dokumen	820,000,000	SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	03	2.03	02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			50 Dokumen	19,350,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	50 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH									
4	01	03	2.03	03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			170 Orang	15,950,000			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	170 Orang	352,000,000	SEKRETARIAT DAERAH									
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																							
4	01					SEKRETARIAT DAERAH																221,404,000						247,151,000	
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Berita yang mendapat respon publik	persen	persen	100 persen	221,404,000								100 persen	247,151,000									

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	fasilitasi tata keprotokolan pada penyambutan tamu pemda Jumlah fasilitasi peliputan media terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Kegiatan yang difasilitasi keprotokolan Jumlah naskah sambutan Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah notulen rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Pers Release yang disampaikan	kegiatan kegiatan kegiatan naskah naskah naskah		kegiatan kegiatan kegiatan naskah naskah naskah	12 kegiatan 360 kegiatan 360 kegiatan 360 naskah 12 naskah 360 naskah	221,404,000						12 kegiatan 360 kegiatan 360 kegiatan 360 naskah 12 naskah 360 naskah	247,151,000	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 laporan	20,726,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitasi Protokol Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 laporan	54,925,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi				12 laporan	141,434,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitasi Protokol Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 laporan	35,229,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	59,244,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitasi Protokol Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	156,997,000	SEKRETARIAT DAERAH
4															UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 02							50,793,163,000								71,893,806,100
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						41,097,432,000								47,177,675,500
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,974,000								7,144,000
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1,131,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Dokumen	2,708,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	1,843,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	6 Laporan	4,436,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,706,927,000						6,767,230,000		
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2,593,466,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	25 Orang/bulan	2,469,358,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1,063,783,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik		4,178,172,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						49,678,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik		119,700,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,320,000						8,000,000		
4 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3,320,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	2 Laporan	8,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7,000,000						21,000,000		
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	6 Orang	21,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						601,674,000						1,447,587,000		
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	13,218,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Paket	31,850,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	237,916,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Paket	571,113,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				21 Dokumen	4,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	21 Dokumen	12,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	325,826,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Laporan	785,074,000	SEKRETARIAT DPRD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	16,414,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	39,550,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	3,320,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	8,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10,000,000,000							10,000,000,000	
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	10,000,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,764,571,000							2,164,200,000	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,196,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	7,700,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	463,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	463,600,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	432,500,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,278,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	1,260,400,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						525,033,000							1,283,048,000	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	80,797,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Unit	194,680,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	165,086,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		19 Unit	397,768,000	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				171 Unit	117,290,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	171 Unit	300,600,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	161,860,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Unit	390,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						23,989,750,000						24,285,004,000		
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	23,820,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	45 Orang/Bulan	23,812,504,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	146,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	5 Paket	416,250,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	23,000,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	45 Orang	56,250,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD						496,183,000						1,194,462,500		
4 02 01 2.16 02	Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD				7 Laporan	33,075,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	7 Laporan	79,380,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	89,585,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Laporan	215,082,500	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	373,523,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Paket	900,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						9,695,731,000						24,716,130,600		
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						1,532,343,000						6,392,114,800		
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				25 Dokumen	193,413,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	25 Dokumen	481,027,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				25 Dokumen	938,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	25 Dokumen	5,011,087,800	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	5 Dokumen	700,000,000	SEKRETARIAT DPRD	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						755,339,000							1,875,776,000	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				3 Dokumen	216,675,000						3 Dokumen	559,826,800	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				3 Dokumen	216,675,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 Dokumen	550,540,800	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	110,351,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Dokumen	265,890,600	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	110,351,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Dokumen	257,365,800	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	471,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Dokumen	1,136,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	100,816,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Dokumen	241,016,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						1,561,837,000							3,890,631,000	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	309,207,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	790,730,400	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	309,207,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	790,730,400	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	343,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	831,042,400	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	337,433,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	845,876,400	SEKRETARIAT DPRD

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	51,732,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	124,648,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				4 Dokumen	210,668,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	507,603,400	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						2,165,933,000						5,107,428,000		
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	1,226,683,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	6 Dokumen	2,879,340,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				20 Orang	78,000,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	20 Orang	191,750,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	105,000,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	7 Orang	210,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				30 Dokumen	339,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	30 Dokumen	821,280,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	417,125,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	1,005,058,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						2,939,990,000						5,784,855,000		
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	21,525,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Laporan	43,050,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	4,685,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	2 Dokumen	11,685,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				135 Dokumen	2,913,780,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	135 Dokumen	5,730,120,000	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						126,561,000						304,947,200		
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				5 Laporan	126,561,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	5 Laporan	304,947,200	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah						195,020,000						469,898,000		
4 02 02 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	17,508,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	42,186,000	SEKRETARIAT DPRD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				6 Dokumen	177,512,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 Dokumen	427,712,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						418,708,000							890,480,600	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	404,333,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	779,509,600	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	842,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Laporan	2,029,000	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	13,533,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Dokumen	108,942,000	SEKRETARIAT DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 01	PERENCANAAN						5,359,445,000						7,628,163,000		
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0Persentas e Ketersediaan layanan kepegawain, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pemeliharaan barang milik daerah PersentaseProsetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti Presentas e Pengelolaan Admimistrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan				100 persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 persen							100 persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 persen	5,034,038,000	
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan				100 Persen	4,565,000						100 Persen	11,000,000	
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,490,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	2 Dokumen	6,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	2,075,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	5 Laporan	5,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	3,897,321,000						100 Persen	4,062,904,000	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3,755,471,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	29 Orang/bulan	3,721,116,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				99 Dokumen	82,242,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	99 Dokumen	198,161,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1202 Dokumen	59,608,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	1202 Dokumen	143,627,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan BMD yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	6,756,000						100 Persen	16,280,000	
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	6,756,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	2 Laporan	16,280,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	ASN		ASN	11 ASN	52,915,000						11 ASN	127,500,000	
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11,413,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Bappelitbangda Kab. Purbalingga	11 Orang	27,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				43 Orang	41,502,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Bappelitbangda Kab. Purbalingga	43 Orang	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	35,141,000						12 Bulan	84,610,000	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	1,826,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	10 Paket	4,400,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	12,477,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	10 Paket	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	996,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	12 Dokumen	2,400,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	2,739,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	12 Laporan	6,600,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	7,989,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	12 Laporan	19,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				24 Dokumen	9,114,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	24 Dokumen	21,960,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Buah		Buah	0 Buah	0						0 Buah	391,000,000	
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	0 Unit	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	0 Unit	46,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	0 Unit	45,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	415,278,000						12 Bulan	96,940,000	
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	630,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	6 Laporan	1,520,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	92,400,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	12 Laporan	92,400,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	622,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	1 Laporan	1,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	321,626,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Purbalingga	14 Laporan	1,520,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	119,860,000						12 Bulan	243,804,000	
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	92,980,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Aset Bappelitbangda Kab. Purbalingga	30 Unit	179,035,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6,129,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Aset Bappelitbangda Kab. Purbalingga	10 Unit	14,769,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,751,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Aset Bappelitbangda Kab. Purbalingga	1 Unit	50,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan Tingkat keterisian data IKK, SDG's, dan indikator program	persen persen persen		persen persen persen	100 persen 100 persen 82,33 persen	439,656,000						100 persen 100 persen 82,33 persen	1,259,350,000	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	319,507,000						100 Persen	969,850,000	
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				284 Dokumen	24,839,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	284 Dokumen	59,850,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	103,756,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	5 Berita Acara	450,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				5 Dokumen	190,912,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	5 Dokumen	460,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	32,164,000						100 Persen	77,500,000	
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	32,164,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	1 Dokumen	77,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	Persen		Persen	100 Persen	87,985,000						100 Persen	212,000,000	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	25,731,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	2 Laporan	62,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	62,254,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	4 Laporan	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dan tingkat capaian kinerja program RPJMD, dan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persen persen persen		Persen persen persen	97,05 Persen 95,12 persen 94,74 persen	387,953,000						97,05 Persen 95,12 persen 94,74 persen	1,334,775,000	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Dokumen		Dokumen	34 Dokumen	167,534,000						34 Dokumen	803,675,000	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				28 Dokumen	69,807,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	28 Dokumen	168,200,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	61,942,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	6 Dokumen	149,250,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	35,785,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	6 Laporan	486,225,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renja, Renstra, dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	89,458,000						6 Dokumen	215,550,000	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	60,293,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	4 Dokumen	145,275,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Perekonomian				4 Laporan	10,375,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	4 Laporan	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	18,790,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	2 Dokumen	45,275,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja, Renstra, dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	130,961,000						6 Dokumen	315,550,000	
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	60,946,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	2 Dokumen	146,850,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	9,722,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	2 Laporan	23,425,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	60,293,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pemkab Purbalingga	4 Dokumen	145,275,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						75,700,000							182,400,000	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	persen		persen	35,71 persen	75,700,000						35,71 persen	182,400,000	
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan invensi yang difasilitasi	inovasi		inovasi	350 inovasi	75,700,000						350 inovasi	182,400,000	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				297 Dokumen	32,008,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	masyarakat	297 Dokumen	137,125,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	43,692,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	masyarakat	2 Laporan	45,275,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						423,512,002,000							482,621,292,775	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Persen		Persen	100 Persen	12,584,401,000						100 Persen	18,516,577,475	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang diSerahkan Tepat Waktu sesuai Ketentuan	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	4,565,000						19 Dokumen	12,100,000	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2,490,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	6,600,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Dokumen	2,075,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	18 Dokumen	5,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Yang ASN yang Gaji dan Tunjanganya di bayarkan Tepat Waktu	Orang		Orang	70 Orang	11,452,856,000						70 Orang	14,860,800,975	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang	11,240,758,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	63 Orang	14,492,529,975	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				24 Dokumen	34,198,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	24 Dokumen	66,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				13 Dokumen	177,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	13 Dokumen	302,271,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terbayarnya Honor PPKom, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Operator SIM Aset	Orang		Orang	6 Orang	14,400,000						6 Orang	20,790,000	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	14,400,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	2 Laporan	20,790,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							74,057,500	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Paket	19,057,500	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Orang	55,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor, Honor Operator (SIMDA, SIPD, Sewa Cloud, Honor Admin), Jamuan Tamu, Perlengkapan Listrik, Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	321,221,000						12 Bulan	683,698,000	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				2 Paket	2,075,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	2 Paket	5,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				5 Paket	76,582,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	5 Paket	202,976,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	8,300,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	15 Laporan	22,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	7,064,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	10 Laporan	18,722,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	227,200,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	4 Dokumen	434,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	8 Unit	12,000,000						8 Unit	331,430,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan				0 Unit	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	0 Unit	137,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				8 Unit	12,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	8 Unit	193,930,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor, Jasa Pengiriman, Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	595,744,000						12 Bulan	1,498,662,000	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	714,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	6 Laporan	1,892,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	305,374,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	12 Laporan	458,700,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TeJumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan	289,656,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	12 Laporan	1,038,070,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Peralatan Mesindan Lainnya, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya, Pemeliharaan Kendaraan Dinas/lapangan dan Jasa Pengemudi	Bulan		Bulan	12 Bulan	183,615,000						12 Bulan	1,035,039,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya				0 Unit 50 Unit	144,200,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	0 Unit 50 Unit	180,246,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				10 Unit	15,470,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	10 Unit	41,002,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi				2 Unit	23,945,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	2 Unit	813,791,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD	Persen		Persen	100 Persen	409,747,658,000						100 Persen	459,904,831,300	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA, PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan yang disusun	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	233,858,000						8 Dokumen	672,926,300	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun				2 Dokumen	36,958,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	133,150,600	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan				2 Dokumen	29,217,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	95,340,300	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun				2 Dokumen	87,111,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	230,883,400	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Perubahan yang disusun				2 Dokumen	80,572,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	213,552,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Laporan Rekonsiliasi Pajak yang tepat waktu, Jumlah Dokumen SPP, SPM, SP2D dan SKPP yang diteliti dan diterbitkan, Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun, Perbup Sisdur dan Tata Usaha Keuangan Daerah yang disusun	Persen		Persen	100 Persen	89,643,000						100 Persen	248,600,000	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	10,375,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	12 Dokumen	27,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				10000 Dokumen	43,162,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	10000 Dokumen	114,400,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				51 Dokumen	6,225,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	51 Dokumen	27,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatusahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	10,375,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	1 Dokumen	27,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				51 Orang	19,506,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	51 Orang	51,700,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Perda		Perda	1 Perda	95,767,000						1 Perda	437,195,000	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				0 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	0 Laporan	110,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	95,767,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	2 Dokumen	83,600,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Orang 70 Orang	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	0 Orang 70 Orang	166,595,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten /Kota				0 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	0 Laporan	77,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Laporan OPD Pengguna Dana Darurat yang sesuai Ketentuan, Penyaluran ADD, DD dan BKK Tepat Waktu, Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Persen		Persen	100 Persen	409,328,390,000						100 Persen	458,546,110,000	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	396,798,409,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	12 Laporan	433,812,060,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan Hasil Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	4,000,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	12 Laporan	15,400,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota				2 Laporan	8,529,981,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	2 Laporan	9,334,050,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rekomendasi Kebijakan Teknis Keuangan Bidang Aset Daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	852,091,000						5 Dokumen	2,583,654,000	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perbup SSH yang disusun, Presentase Aset Daerah yang dimanfaatkan, Presentase BMD yang terdata dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	852,091,000						100 Persen	2,583,654,000	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun				80 Dokumen	170,834,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	80 Dokumen	429,330,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				5 Laporan	28,365,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	5 Laporan	102,681,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	587,194,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	1,694,143,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Laporan	41,502,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	1 Laporan	220,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota				70 Orang	24,196,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	70 Orang	137,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Cakupan Data Base yang Valid	Persen		Persen	4,25 Persen	327,852,000						4,25 Persen	1,616,230,000	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek dan Subjek Pajak yang terdata, Jumlah Pembinaan , Monev dan Laporan yang dilaksanakan, Persentase WP yang terlayani dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	327,852,000						100 Persen	1,616,230,000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				10 Laporan	24,901,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	10 Laporan	66,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				617000 Laporan	135,091,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	617000 Laporan	489,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				614000 Dokumen	65,574,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	614000 Dokumen	511,500,000	BADAN KEUANGAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				55000 Layanan	20,751,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	55000 Layanan	121,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				14 Dokumen	39,842,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	14 Dokumen	208,230,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				26 Laporan	20,942,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	26 Laporan	165,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	20,751,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Badan Keuangan Daerah	12 Laporan	55,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 03	KEPEGAWAIAN						6,627,510,000							7,805,491,800	
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,509,472,000							5,952,610,000	
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9,800,000							10,780,000	
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen 5 dokumen	6,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Dokumen 5 dokumen	6,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan 4 laporan	3,800,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Laporan 4 laporan	4,180,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,160,685,000							5,570,244,800	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan 42 orang/bulan	5,086,853,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		42 Orang/bulan 42 orang/bulan	5,492,554,100	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25 Dokumen 25 dokumen	35,245,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		25 Dokumen 25 dokumen	35,245,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen 3 dokumen	38,587,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 Dokumen 3 dokumen	42,445,700	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2,000,000							2,200,000	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan 5 laporan	2,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Laporan 5 laporan	2,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15,000,000							16,500,000	
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terkirimnya Peserta Diklat				5 Orang 5 orang	15,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Orang 5 orang	16,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						33,121,000							36,208,700	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3 Paket 3 paket	1,627,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 Paket 3 paket	1,789,700	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	21,124,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 Paket	23,012,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Dokumen 1 dokumen	1,200,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Dokumen 1 dokumen	1,320,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan 10 laporan	3,250,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		10 Laporan 10 laporan	3,575,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan 5 laporan	1,120,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Laporan 5 laporan	1,232,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen 3 dokumen	4,800,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 Dokumen 3 dokumen	5,280,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						13,000,000						13,000,000		
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 0 unit	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit 0 unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2 Unit 2 unit	13,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Unit 2 unit	13,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						196,311,000						216,166,500		
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan 10 laporan	415,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		10 Laporan 10 laporan	456,500	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5 Laporan 5 laporan	130,100,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Laporan 5 laporan	143,110,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Laporan 0 laporan	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan 0 laporan	0	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				3 laporan	65,796,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 laporan	72,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						79,555,000						87,510,000		
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				23 Unit 23 unit	74,865,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		23 Unit 23 unit	82,351,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20 Unit 20 unit	3,490,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		20 Unit 20 unit	3,839,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit 1 unit	1,200,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Unit 1 unit	1,320,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1,118,038,000						1,852,881,800		
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						15,600,000						640,200,000		
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				0 Dokumen 0 dokumen	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Dokumen 0 dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				15 Dokumen 15 dokumen	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	15 Dokumen 15 dokumen	623,040,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				0 Dokumen 400 dokumen	8,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Dokumen 400 dokumen	8,800,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen 4 dokumen	7,600,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Dokumen 4 dokumen	8,360,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN						270,350,000						297,385,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				0 Dokumen 1000 dokumen	235,350,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Dokumen 1000 dokumen	258,885,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1600 Dokumen 1600 dokumen	35,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1600 Dokumen 1600 dokumen	38,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						795,117,000							874,628,700	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya Meningkatnya Kapasitas ASN				100 Orang 100 orang	13,900,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		100 Orang 100 orang	15,290,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Terkelolanya Assessment Center				25 Dokumen 25 dokumen	74,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		25 Dokumen 25 dokumen	81,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				2 Orang 2 orang	12,873,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Orang 2 orang	14,160,300	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				102 Dokumen 102 dokumen	693,520,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		102 Dokumen 102 dokumen	762,872,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				222 Laporan 222 laporan	824,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		222 Laporan 222 laporan	906,400	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						36,971,000							40,668,100	
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				100 Dokumen 100 dokumen	16,171,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	100 Dokumen 100 dokumen	17,788,100	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN				100 Orang 100 orang	3,500,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	100 Orang 100 orang	3,850,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Meningkatnya Disiplin ASN				50 Orang 50 orang	15,300,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	50 Orang 50 orang	16,830,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				10 Dokumen 10 dokumen	2,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	10 Dokumen 10 dokumen	2,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
5 04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					631,200,000							694,320,000	
5 04 02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					631,200,000							694,320,000	
5 04 02 2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					631,200,000							694,320,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				120 Laporan 120 laporan	631,200,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		120 Laporan 120 laporan	694,320,000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6 01	INSPEKTORAT DAERAH						7,806,756,000				9,330,074,000				

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja																
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah																
		Persentase pengadaan barang milik daerah	%	%	100 %								100 %					
		Prosentase Pengelolaan Administrasi Aset milik daerah sesuai ketentuan	%	%	100 %								100 %					
		Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	%	%	100 %								100 %					
		Terkelolanya Administrasi Aset Milik Daerah sesuai ketentuan	%	%	100 %								100 %					
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	%	100 %								100 %					
		Tersedianya Barang Milik Milik Daerah	%	%	100 %								100 %					
		Tersedianya layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	%	100 %								100 %					
		Tersediaya Laporan Capaian Kinerja	%	%	100 %								100 %					
		Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan Pengelolaan Anggaran	%	%	100 %								100 %					
									7,425,455,000							7,384,805,000		
		6 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	%	%	100 %	4,565,000						100 %	11,000,000		
		6 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 dokumen	2,490,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tersusunnya Dokumen Perencanaan tepat waktu dan Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah	1 dokumen	6,000,000	INSPEKTORAT DAERAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 dokumen	2,075,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tersusunnya Dokumen Perencanaan tepat waktu dan Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah	6 dokumen	5,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	7,176,141,000						100 %	6,740,745,000	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 orang/bulan	7,083,164,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	57 orang/bulan	6,580,195,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	29,977,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	12 Dokumen	75,750,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 dokumen	63,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai ketentuan	12 dokumen	84,800,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Yang tersusun	Laporan		Laporan	12 Laporan	4,800,000						12 Laporan	8,000,000	
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 dokumen	4,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 dokumen	8,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata rata capaian SKP	%		%	100 %	0						100 %	75,000,000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tersusunnya SKP seluruh ASN Inspektorat Daerah	5 Orang	75,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	bulan		bulan	12 bulan	32,819,000						12 bulan	95,900,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	1 paket	1,500,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	5 Paket	5,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	13,954,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	9 Paket	36,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 Dokumen	2,400,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	6,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 Laporan	25,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 Laporan	20,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	3 Dokumen	6,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	0						100 %	50,000,000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	13 unit	50,000,000	INSPEKTORAT DAERAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	112,532,000						12 bulan	117,232,000	
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2,500,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	87,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	90,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24,732,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	24,732,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	unit		unit	12 unit	94,598,000						12 unit	286,928,000	
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 unit	82,253,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	19 unit	147,928,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	7,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	20 Unit	25,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	5,335,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 unit	114,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik	%		%	64 %	292,179,000						64 %	1,583,660,000	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa	Objek		Objek	110 Objek	241,410,000						110 Objek	1,392,160,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				25 Laporan	19,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal	25 Laporan	58,750,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				55 Laporan	33,085,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal	55 Laporan	129,250,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				4 Laporan	11,235,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal	4 Laporan	48,800,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	6,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal	1 Laporan	30,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				25 Laporan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal	25 Laporan	190,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal	2 Kesepakatan	358,360,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	145,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal	2 Dokumen	577,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	50,769,000						100 %	191,500,000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	38,945,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tertanganinya Kasus Pengaduan Masyarakat	2 Laporan	143,500,000	INSPEKTORAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	11,824,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tertanganinya Kasus Pengaduan Masyarakat	5 Laporan	48,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tercapainya Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI) Tercapainya Nilai MCP Korsubgah	Nilai Nilai		Nilai Nilai	2 Nilai 75 Nilai	89,122,000						2 Nilai 75 Nilai	361,609,000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	%		%	100 %	12,030,000						100 %	31,158,000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 dokumen	12,030,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Ditetapkannya kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	4 dokumen	31,158,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpsugah	Laporan		Laporan	4 Laporan	77,092,000						4 Laporan	330,451,000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				4 perangkat daerah	25,835,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksannya Pendampingan MCP Korpsugah dan Terlaksanya Pembinaan terhadap OPD Menuju WBK WBBM	4 perangkat daerah	68,550,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	29,886,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksannya Pendampingan MCP Korpsugah dan Terlaksanya Pembinaan terhadap OPD Menuju WBK WBBM	10 perangkat daerah	121,816,000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	1,425,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksannya Pendampingan MCP Korpsugah dan Terlaksanya Pembinaan terhadap OPD Menuju WBK WBBM	1 Kegiatan	90,305,000	INSPEKTORAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	19,946,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Pendampingan MCP Korpsupgah dan Terlaksananya Pembinaan terhadap OPD Menuju WBK WBBM	2 perangkat daerah	49,780,000	INSPEKTORAT DAERAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,309,347,000							1,683,223,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun	dokumen		dokumen	6 dokumen	1,216,009,000						6 dokumen	1,402,797,000	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja	dokumen		dokumen	6 dokumen	1,678,000						6 dokumen	1,678,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1,148,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Kecamatan Kemangkon	1 Dokumen	1,148,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	530,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Kecamatan Kemangkon	6 Laporan	530,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	ASN		ASN	8 ASN	1,057,133,000						8 ASN	1,057,133,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu				8 ASN	1,032,797,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN PNSD Kecamatan Kemangkon	8 ASN	1,032,797,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	1,040,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN PNSD Kecamatan Kemangkon	4 Dokumen	1,040,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	23,296,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN PNSD Kecamatan Kemangkon	2 Dokumen	23,296,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang dikelola oleh Kecamatan	unit		unit	187 unit	1,450,000						187 unit	1,450,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				12 dokumen	1,450,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	12 dokumen	1,450,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							1,000,000	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	0	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Paket	0	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Orang	1,000,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	bulan		bulan	12 bulan	19,822,000						12 bulan	53,050,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	550,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN PNSD Kecamatan Kemangkon	1 Paket	550,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	3,832,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN PNSD Kecamatan Kemangkon	12 Paket	13,490,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	0	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN PNSD Kecamatan Kemangkon	12 Paket	6,600,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				24 dokumen	1,140,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN PNSD Kecamatan Kemangkon	24 dokumen	1,140,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN PNSD Kecamatan Kemangkon	12 Laporan	7,000,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 laporan	9,900,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN PNSD Kecamatan Kemangkon	28 laporan	16,850,000	KECAMATAN KEMANGKON

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD				10 dokumen	4,400,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN PNSD Kecamatan Kemangkon	10 dokumen	7,420,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						14,600,000							110,000,000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	20,000,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Unit	30,000,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	14,600,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 Unit	60,000,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	86,036,000						100 persen	91,336,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	200,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kemangkon	12 laporan	500,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26,040,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kemangkon	12 Laporan	30,040,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor yang disediakan				1 laporan	600,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kemangkon	1 laporan	1,600,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				3 laporan	59,196,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kemangkon	3 laporan	59,196,000	KECAMATAN KEMANGKON
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	35,290,000						100 persen	87,150,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 unit	34,170,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah Kecamatan Kemangkon	10 unit	65,650,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				13 unit	1,120,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah Kecamatan Kemangkon	13 unit	2,500,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				3 unit	0	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah Kecamatan Kemangkon	3 unit	19,000,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai evaluasi pelayanan publik Kecamatan Kemangkon	angka		angka	3,7 angka	7,555,000						3,7 angka	39,570,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	dokumen		dokumen	13 dokumen	5,725,000						13 dokumen	39,570,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5,725,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemangkon	5 Dokumen	39,570,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan	jenis		jenis	5 jenis	1,830,000						5 jenis	0	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan				2 dokumen	1,830,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kemangkon	2 dokumen	0	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Kemangkon	persen		persen	100 persen	33,084,000						100 persen	86,025,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan forum Kemasyarakatan	persen		persen	70 persen	33,084,000						70 persen	86,025,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	18,194,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Lembaga Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemangkon	5 Lembaga Kemasyarakatan	48,220,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 dokumen	14,890,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Lembaga Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemangkon	6 dokumen	37,805,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	kasus		kasus	2 kasus	38,000,000						2 kasus	60,184,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	kasus		kasus	2 kasus	38,000,000						2 kasus	60,184,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia,				12 dokumen	25,200,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kemangkon	12 dokumen	29,784,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 laporan	12,800,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kemangkon	12 laporan	30,400,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Bulanan potensi konflik	dokumen		dokumen	12 dokumen	8,197,000						12 dokumen	64,247,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan potensi konflik	dokumen		dokumen	12 dokumen	8,197,000						12 dokumen	64,247,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	8,197,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kemangkon	100 Orang	64,247,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi Kecamatan Kemangkon	persen		persen	47 persen	6,502,000						47 persen	30,400,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	persen		persen	47 persen	6,502,000						47 persen	30,400,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				19 dokumen	6,502,000	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	19 Desa	19 dokumen	30,400,000	KECAMATAN KEMANGKON
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 dokumen	0	Kab. Purbalingga, Kemangkon, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	19 Desa	0 dokumen	0	KECAMATAN KEMANGKON
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,768,794,000						1,768,273,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja Tersusunnya dokumen renstra dan renja	dokumen persen dokumen		dokumen persen dokumen	4 dokumen 100 persen 2 dokumen	1,698,383,000						4 dokumen 100 persen 2 dokumen	1,697,862,000	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan Jumlah dokumen evaluasi yang disusun Tersusunnya dokumen renstra dan renja	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	6 dokumen 4 dokumen 2 dokumen	4,040,000						6 dokumen 4 dokumen 2 dokumen	4,040,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renstra dan renja				2 dokumen	2,760,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	2 dokumen	2,760,000	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun				4 dok	1,280,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	4 dok	1,280,000	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan tepat waktu Presentase Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	ASN persen		ASN persen	11 ASN 100 persen	1,508,067,000						11 ASN 100 persen	1,508,067,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu				11 Orang/bulan	1,480,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Bukateja	11 Orang/bulan	1,480,000,000	KECAMATAN BUKATEJA
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/sppd dalam dan luar daerah				2 kegiatan	4,630,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Bukateja	2 kegiatan	4,630,000	KECAMATAN BUKATEJA
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya honor PA, BP, PPK, PPTK				10 Orang/bulan	23,437,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Bukateja	10 Orang/bulan	23,437,000	KECAMATAN BUKATEJA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen bulan		dokumen bulan	1 dokumen 12 bulan	1,800,000						1 dokumen 12 bulan	1,800,000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya honor pejabat, pengadaan PPHP/PPKom, pengurus barang				1 Orang/bulan	1,800,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah	1 Orang/bulan	1,800,000	KECAMATAN BUKATEJA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							0	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 0	0	KECAMATAN BUKATEJA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor Terlaksananya Aministrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	51,448,000						12 bulan 12 bulan	50,927,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik				12 bulan	3,320,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	12 bulan	3,320,000	KECAMATAN BUKATEJA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor				12 bulan	36,208,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	12 bulan	35,687,000	KECAMATAN BUKATEJA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	0	0	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	0	0	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan tamu				12 bulan	5,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	12 bulan	5,000,000	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat				12 bulan	3,320,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	12 bulan	3,320,000	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya honor operator SIMDA dan SIM Aset				12 bulan	3,600,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	12 bulan	3,600,000	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		0	0	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	111,528,000						12 bulan	111,528,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	31,800,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	12 bulan	31,800,000	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0 Laporn	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	0 Laporn	0	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor THL				4 Orang/bulan	79,728,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	4 Orang/bulan	79,728,000	KECAMATAN BUKATEJA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	21,500,000						12 bulan	21,500,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	15,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	10 Unit	15,000,000	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya service AC, printer, komputer				12 bulan	1,500,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	12 bulan	1,500,000	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung, lingkungan kantor dan rumah dinas				12 bulan	5,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Bukateja	12 bulan	5,000,000	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	persen		persen	86 persen	3,800,000						86 persen	3,800,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	dokumen		dokumen	5 dokumen	3,000,000						5 dokumen	3,000,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan				12 kegiatan	3,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Desa di Wilayah Kecamatan Bukateja	12 kegiatan	3,000,000	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan urusan Pemerintahan Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	jenis jenis		jenis jenis	5 jenis 5 jenis	800,000						5 jenis 5 jenis	800,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah laporan pelaksanaan urusan Pemerintahan				5 jenis	800,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Bukateja	5 jenis	800,000	KECAMATAN BUKATEJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbangdes/Muskel tepat waktu Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	desa kegiatan persen		desa kegiatan persen	14 desa 14 kegiatan 100 persen	17,275,000						14 desa 14 kegiatan 100 persen	17,274,429	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi lembaga dan forum kemasyarakatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	kegiatan desa		kegiatan desa	2 kegiatan 14 desa	17,275,000						2 kegiatan 14 desa	17,274,429	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu				14 desa	9,275,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Bukateja	14 desa	9,274,429	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi				15 kegiatan	8,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Bukateja	15 kegiatan	8,000,000	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	kegiatan laporan		kegiatan laporan	12 kegiatan 12 laporan	35,000,000						12 kegiatan 12 laporan	35,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah laporan kejadian gangguan ketertiban umum yang dilaporkan	kegiatan dokumen		kegiatan dokumen	12 kegiatan 12 dokumen	35,000,000						12 kegiatan 12 dokumen	35,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan				7 kegiatan	30,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Bukateja	7 kegiatan	30,000,000	KECAMATAN BUKATEJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat				5 kegiatan	5,000,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Bukateja	5 kegiatan	5,000,000	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	kegiatan persen		kegiatan persen	2 kegiatan 12 persen	14,336,000						2 kegiatan 12 persen	14,336,571	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	laporan		laporan	2 laporan	14,336,000						2 laporan	14,336,571	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				2 kegiatan	14,336,000	Kab. Purbalingga, Bukateja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Bukateja	2 kegiatan	14,336,571	KECAMATAN BUKATEJA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	desa		desa	14 desa	0						14 desa	0	
7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pemerintahan desa yang dibina oleh kecamatan	desa		desa	14 desa	0						14 desa	0	
7 01 06 2.01 02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa					0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Desa se Kecamatan Bukateja	0	0	KECAMATAN BUKATEJA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
							1,747,586,000							1,784,257,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,693,030,000							1,729,701,000	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,630,000							1,630,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	730,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Dokumen	730,000	KECAMATAN KEJOBONG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	900,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Laporan	900,000	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,485,376,000							1,504,601,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,465,026,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		14 Orang/bulan	1,465,026,000	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				1 dokumen	1,125,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 dokumen	1,125,000	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 Dokumen	19,225,000	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						19,225,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik			19,225,000	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,800,000							1,800,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,800,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Laporan	1,800,000	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							0	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				17 Paket	0	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		17 Paket	0	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Orang	0	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						30,894,000							30,340,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,220,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Paket	2,220,000	KECAMATAN KEJOBONG	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	17,449,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Paket	16,895,000	KECAMATAN KEJOBONG	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Dokumen	0	KECAMATAN KEJOBONG	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Laporan	0	KECAMATAN KEJOBONG	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	4,625,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	300 Laporan	4,625,000	KECAMATAN KEJOBONG	
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd				12 dokumen	6,600,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 dokumen	6,600,000	KECAMATAN KEJOBONG	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						18,000,000		
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 unit	0	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 unit	18,000,000	KECAMATAN KEJOBONG	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 unit	0	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 unit	0	KECAMATAN KEJOBONG	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						114,660,000						114,660,000		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Laporan	0	KECAMATAN KEJOBONG	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12,000,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	12,000,000	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Laporan	0	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	102,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	102,660,000	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58,670,000							58,670,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	53,370,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		15 Unit	53,370,000	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	1,420,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Unit	1,420,000	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	3,880,000	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4,606,000							4,606,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						3,800,000							3,800,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	3,800,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	3,800,000	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						806,000							806,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				10 Dokumen	806,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	10 Dokumen	806,000	KECAMATAN KEJOBONG	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						13,250,000						13,250,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						13,250,000						13,250,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa				6 desa	6,000,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	6 desa	6,000,000	KECAMATAN KEJOBONG	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	7,250,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	15 Laporan	7,250,000	KECAMATAN KEJOBONG	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						30,950,000						30,950,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						30,950,000						30,950,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	27,450,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan			5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Laporan	27,450,000	KECAMATAN KEJOBONG	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	3,500,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Retribusi Jasa Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Laporan	3,500,000	KECAMATAN KEJOBONG	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						5,750,000						5,750,000		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						5,750,000						5,750,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan				100 orang	5,750,000	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		100 orang	5,750,000	KECAMATAN KEJOBONG
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0							0	
7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0							0	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Kejobong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		13 Dokumen	0	KECAMATAN KEJOBONG
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,875,823,000						1,875,823,449		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketersediaan Laporan Kinerja	Persen		Persen	100 Persen	1,820,183,000						100 Persen	1,825,048,449	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Yang Disusun Tersusunnya Dokumen Renja	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	4 Dokumen 1 Dokumen	3,240,000						4 Dokumen 1 Dokumen	3,240,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen	760,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	1 dokumen	760,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat				4 Laporan	2,480,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	4 Laporan	2,480,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kunjungan Lapangan/Survey/Koordinasi? undangan/SPPD dalam dan Luar Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangan Terbayar Tepat Waktu Tersusunnya SPM,LRA, dan Laporan Keuanga	Kali ASN Presen		Kali ASN Presen	10 Kali 14 ASN 100 Presen	1,630,938,000						10 Kali 14 ASN 100 Presen	1,634,803,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 orang/perbulan	1,596,938,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	14 orang/perbulan	1,596,938,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 dokumen 0 Dokumen	8,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	5 dokumen 0 Dokumen	11,865,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	26,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	12 Dokumen	26,000,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersediannya Honor Pengurus Barang	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,800,000						12 Bulan	1,800,000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"				12 Laporan	1,800,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	12 Laporan	1,800,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							0	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	0	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		15 Paket	0	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediaanya Bahan Logistik Kantor Tersediannya Jamuan Rapat Tersediannya Jamuan Tamu Tersediannya Perlengkapan Listrik	Bulan Bulan Bulan Bulan		Bulan Bulan Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	39,032,000						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	40,031,913	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1,500,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	1 paket	1,500,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 paket 10 Jenis	28,432,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	10 paket 10 Jenis	29,431,913	KECAMATAN KALIGONDANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	12 Laporan	1,000,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1,500,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	12 Laporan	1,500,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	"Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD"				12 Dokumen	6,600,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	12 Dokumen	6,600,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersediannya Perangko, Materai, Jasa Pos dan Jasa Pengiriman Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Tersediannya Peralatan Kantor	Bulan Bulan Bulan Bulan		Bulan Bulan Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	88,625,000						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	88,625,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	12 Laporan	500,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	12 Laporan	16,000,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	72,125,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	12 Laporan	72,125,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas atau Lapangan Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit Jenis Bulan		Unit Jenis Bulan	11 Unit 4 Jenis 12 Bulan	56,548,000						11 Unit 4 Jenis 12 Bulan	56,548,536	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 unit	43,500,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	11 unit	43,500,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"				4 unit	6,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	4 unit	6,000,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"				1 unit	7,048,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	1 unit	7,048,536	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Angka		Angka	3,1 Angka	7,400,000						3,1 Angka	5,000,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Desa	Desa		Desa	18 Desa	5,000,000						18 Desa	5,000,000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				15 Dokumen	5,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	15 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2,400,000							0	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	2,400,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Dokumen	0	KECAMATAN KALIGONDANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	Persen		Persen	100 Persen	18,850,000						100 Persen	18,850,000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Musrenbangdes/Musket Tepat Waktu Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang difasilitasi	Desa Desa		Desa Desa	18 Desa 18 Desa	18,850,000						18 Desa 18 Desa	18,850,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	0 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan"				18 Laporan	13,850,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	18 Laporan	13,850,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaporkan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	11,000,000						12 Dokumen	11,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan	Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan	12 Kegiatan 12 Kegiatan	11,000,000						12 Kegiatan 12 Kegiatan	11,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	6,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	12 Laporan	6,000,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat"				12 Laporan	5,000,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	12 Laporan	5,000,000	KECAMATAN KALIGONDANG
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik Yang Dilaporkan	Persen		Persen	100 Persen	15,925,000						100 Persen	15,925,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Bulan		Bulan	12 Bulan	15,925,000						12 Bulan	15,925,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	"Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa"				12 orang	15,925,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	12 orang	15,925,000	KECAMATAN KALIGONDANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	Persen		Persen	27 Persen	2,465,000						27 Persen	0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Yang difasilitasi pemilihan kepala desa Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Desa Desa Desa Desa		Desa Desa Desa Desa	4 Desa 18 Desa 18 Desa 18 Desa	2,465,000						4 Desa 18 Desa 18 Desa 18 Desa	0	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				18 Dokumen	2,465,000	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	18 Dokumen	0	KECAMATAN KALIGONDANG
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa"				4 dokumen	0	Kab. Purbalingga, Kaligondang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Kaligondang	4 dokumen	0	KECAMATAN KALIGONDANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						10,265,571,000							10,265,295,542	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketersediaan Laporan Kinerja	persen		persen	100 persen	10,184,635,000						100 persen	10,184,141,000	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKJIP, Laporan bulanan, Laporan Pengendalian, Renja, SPIP dan RB) yang tersusun Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	dokumen dokumen		dokumen dokumen	3 dokumen 1 dokumen	1,610,000						3 dokumen 1 dokumen	1,610,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1,100,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	1 Dokumen	1,100,000	KECAMATAN PURBALINGGA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	510,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	6 Laporan	510,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan terbayar tepat waktu Jumlah Kunjungan lapangan/Survey/Koordinasi/Undangan/SPPD dalam dan luar daerah Tersusunnya SPM, LRA laporan Keuangan	org kegiatan dokumen	org kegiatan dokumen	84 org 150 kegiatan 3 dokumen		9,989,305,000						84 org 150 kegiatan 3 dokumen	9,989,305,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				92 Orang/bulan	9,974,642,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	92 Orang/bulan	9,974,642,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100 Dokumen	1,620,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	100 Dokumen	1,620,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	13,043,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	12 Dokumen	13,043,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya Honor Pejabat pengadaan, PPHP, PPKom, Pengurus barang	laporan laporan bulan	laporan laporan bulan	2 laporan 2 laporan 12 bulan		1,050,000						2 laporan 2 laporan 12 bulan	1,050,000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1,050,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	12 Laporan	1,050,000	KECAMATAN PURBALINGGA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Honor Operator SIMDA dan SIM ASET Tersedianya jamuan rapat Tersedianya Jamuan Tamu Tersedianya Perlengkapan Listrik Tersedianya surat kabar dan majalah	bulan bulan kegiatan orang bulan bulan		bulan bulan kegiatan orang bulan bulan	12 bulan 12 bulan 12 kegiatan 50 orang 12 bulan 12 bulan	10,307,000						12 bulan 12 bulan 12 kegiatan 50 orang 12 bulan 12 bulan	9,813,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	582,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	7 Paket	582,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	5,375,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	12 Paket	4,881,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	12 Dokumen	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	400,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	50 Laporan	400,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	1,050,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	30 Laporan	1,050,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	2,900,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	12 Dokumen	2,900,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya Tersedianya sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	unit unit		unit unit	6 unit 1 unit	0						6 unit 1 unit	0	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	0 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	0 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Peralatan Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan bulan bulan		bulan bulan bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	143,288,000						12 bulan 12 bulan 12 bulan	143,288,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40,500,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	12 Laporan	40,500,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	260,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	12 Laporan	260,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	102,528,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	12 Laporan	102,528,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/lapangan dan Jasa pengemudi	unit unit bulan		unit unit bulan	25 unit 1 unit 12 bulan	39,075,000						25 unit 1 unit 12 bulan	39,075,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	29,184,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	9 Unit	29,184,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	3,400,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	2 Unit	3,400,000	KECAMATAN PURBALINGGA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6,491,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	1 Unit	6,491,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	persen		persen	2,5 persen	18,238,000						2,5 persen	18,456,542	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	15,438,000						2 kegiatan	15,438,000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 Dokumen	15,438,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	100 Dokumen	15,438,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	dokumen		dokumen	12 dokumen	2,800,000						12 dokumen	3,018,542	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				100 Dokumen	2,800,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	100 Dokumen	3,018,542	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan lembaga desa	persen		persen	100 persen	21,591,000						100 persen	21,591,000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbangdes/Muskel Tepat Waktu Jumlah Kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	des kegiatan		des kegiatan	2 des 17 kegiatan	21,591,000						2 des 17 kegiatan	21,591,000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				13 Lembaga Kemasyarakatan	7,516,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Prosentase Desa yang Meningkatkan Status IDMnya	13 Lembaga Kemasyarakatan	7,516,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				17 Laporan	14,075,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Prosentase Desa yang Meningkatkan Status IDMnya	17 Laporan	14,075,000	KECAMATAN PURBALINGGA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	dokumen		dokumen	12 dokumen	19,453,000						12 dokumen	19,453,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan bersama tokoh agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan	6 kegiatan 12 kegiatan	19,453,000						6 kegiatan 12 kegiatan	19,453,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12,112,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan		12 Laporan	12,112,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	7,341,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan		12 Laporan	7,341,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi Konflik yang dilaporkan	kasus		kasus	2 kasus	21,254,000						2 kasus	21,254,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	21,254,000						12 kegiatan	21,254,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				50 Orang	21,254,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Prosentase Laporan Potensi Konflik yang ditindaklanjuti		50 Orang	21,254,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	persen		persen	100 persen	400,000						100 persen	400,000	
7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	400,000						2 kegiatan	400,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	400,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Prosentase yang meningkatnya status IDMnya	2 Dokumen	400,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persen Persen		persen Persen	100 persen 100 Persen	88,512,000						100 persen 100 Persen	508,342,387	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	20,380,000						100 persen	20,380,000	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	9,780,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Bojong	10 Dokumen	9,780,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	10,600,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Bojong	2 Dokumen	10,600,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	1,200,000						100 Persen	1,200,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	1,200,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang oprasional kantor Tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya honor operator simda, sim aset dan SIPD Tersedianya jamuan rapat Tersedianya Jamuan Tamu Tersedianya komponen instalasi listrik	bulan Bulan Bulan Pack Pack Paket		bulan Bulan Bulan Pack Pack Paket	12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 120 Pack 50 Pack 0 Paket	18,348,000						12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 120 Pack 50 Pack 0 Paket	22,060,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Bojong	0 Paket	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Bojong	1 Paket	4,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9,760,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Bojong	12 Paket	9,760,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1,700,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Bojong	1 Laporan	1,700,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	4,200,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Bojong	10 Laporan	4,200,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2,688,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Bojong	1 Dokumen	2,400,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikas Tersedianya honor petugas kebersihan penjaga malam	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	33,792,000						12 Bulan 12 Bulan	33,792,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	14,460,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kelurahan Bojong	4 Laporan	14,460,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	19,332,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kelurahan Bojong	1 Laporan	19,332,000	KECAMATAN PURBALINGGA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit Jenis		Unit Unit Jenis	4 Unit 5 Unit 2 Jenis	14,792,000						4 Unit 5 Unit 2 Jenis	430,910,387	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	9,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kelurahan Bojong	5 Unit	9,000,387	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	5,792,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kelurahan Bojong	2 Unit	1,910,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kelurahan Bojong	4 Unit	420,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas 5 Pokmas/Ormas	400,000,000						5 Pokmas/Ormas 5 Pokmas/Ormas	400,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pokmas/Ormas Unit		Pokmas/Ormas Unit	5 Pokmas/Ormas 2 Unit	400,000,000						5 Pokmas/Ormas 2 Unit	400,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	211,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	2 Unit	211,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	189,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong	Pajak Daerah		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	5 Pokmas / Ormas	189,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	3,350,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		160 Laporan	3,350,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				36 Dokumen	2,240,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		36 Dokumen	2,240,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						37,932,000						37,932,000		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	18,600,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		36 Laporan	18,600,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19,332,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	19,332,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						16,245,000						16,245,000		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	8,475,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan, Purbalingga, Kedungmenjangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Unit	8,475,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1,270,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 Unit	1,270,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6,500,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	6,500,000	KECAMATAN PURBALINGGA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						400,000,000						400,000,000		
7 01 03	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						400,000,000						400,000,000		
7 01 03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		7 Unit	200,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Pokmas / Ormas	200,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						489,255,000						795,227,000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	89,255,000					100 Persen	345,227,000		
7 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kunjungan lapangan/Survey/Koordinasi/Undangan/SPPD dalam dan luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kali Dokumen		Kali Dokumen	368 Kali 12 Dokumen	20,079,000					368 Kali 12 Dokumen	37,600,000		
7 01 01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	5,229,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Bancar	0 Dokumen	12,600,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						14,850,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Bancar		25,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Honor Pejabat pengadaan, PPHP, PPKom, Pengurus barang	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,500,000						12 Bulan	1,800,000	
7 01 01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1,500,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah	0 Laporan	1,800,000	KECAMATAN PURBALINGGA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Honor Operator SIMDA dan SIM ASET Tersedianya jamuan rapat Tersedianya Jamuan Tamu Tersedianya Perlengkapan Listrik Tersedianya surat kabar dan majalah	Bulan Bulan Orang Kali Bulan Bulan		Bulan Bulan Orang Kali Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 462 Orang 175 Kali 12 Bulan 12 Bulan	13,847,000						12 Bulan 12 Bulan 462 Orang 175 Kali 12 Bulan 12 Bulan	32,295,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	700,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN dan Pelayanan Masyarakat	0 Paket	2,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	4,762,000		Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN dan Pelayanan Masyarakat	0 Paket	11,475,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN dan Pelayanan Masyarakat	0 Dokumen	1,320,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1,348,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN dan Pelayanan Masyarakat		5,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3,287,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik ASN dan Pelayanan Masyarakat		8,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	3,750,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik ASN dan Pelayanan Masyarakat	0 Dokumen	4,500,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Unit		Unit	6 Unit	0					6 Unit	26,713,000		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 0	0 Unit	26,713,000	KECAMATAN PURBALINGGA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Peralatan Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan Bulan Bulan		Bulan Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	40,197,000						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	39,232,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18,960,000		Lain-lain PAD Yang Sah		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat di Kelurahan		18,700,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	705,000		Lain-lain PAD Yang Sah		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat di Kelurahan	0 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	20,532,000		Lain-lain PAD Yang Sah		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat di Kelurahan	0 Laporan	20,532,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/lapangan dan Jasa pengemudi	Jenis Unit Unit		Jenis Unit Unit	3 Jenis 1 Unit 5 Unit	13,632,000						3 Jenis 1 Unit 5 Unit	207,587,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	8,087,000		Lain-lain PAD Yang Sah		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Aset Milik Daerah	0 Unit	18,700,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	4,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Aset Milik Daerah	0 Unit	5,100,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	675,000		Lain-lain PAD Yang Sah		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Aset Milik Daerah	0 Unit	183,787,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan Kecamatan Purbalingga	Persen		Persen	100 Persen	400,000,000						100 Persen	450,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan PEMBERDAYAAN Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan	5 Kegiatan 9 Kegiatan	400,000,000						5 Kegiatan 9 Kegiatan	450,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	200,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat di Kelurahan	0 Unit	200,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	200,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Penguatan Desa	Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	250,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					499,123,000							680,264,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	99,123,000						100 persen	180,264,000	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen dokumen		dokumen dokumen	126 dokumen 12 dokumen	22,490,000						126 dokumen 12 dokumen	35,000,000	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				126 Dokumen	7,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Purbalingga Wetan	126 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 Dokumen	14,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Purbalingga Wetan	10 Dokumen	25,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD" Tersedianya Honor Pejabat pengadaan, PPHP, PPKom, Pengurus barang	laporan bulan		laporan bulan	12 laporan 12 bulan	1,500,000						12 laporan 12 bulan	1,800,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kelurahan Purbalingga Wetan	10 Laporan	1,800,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Honor Operator SIMDA dan SIM ASET Tersedianya Jamuan Tamu Tersedianya Jamuan Tamu Tersedianya Perlengkapan Listrik Tersedianya surat kabar dan majalah	bulan bulan orang orang jenis bulan		bulan bulan orang orang jenis bulan	12 bulan 12 bulan 55 orang 142 orang 3 jenis 12 bulan	14,602,000						12 bulan 12 bulan 55 orang 142 orang 3 jenis 12 bulan	34,125,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	739,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat Purbalingga Wetan	3 Paket	5,450,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	5,303,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat Purbalingga Wetan	12 Bulan	14,405,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat Purbalingga Wetan	12 Dokumen	1,320,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				55 Laporan	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat Purbalingga Wetan	55 Laporan	2,550,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	2,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat Purbalingga Wetan	120 Laporan	5,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10 Dokumen	4,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat Purbalingga Wetan	10 Dokumen	5,400,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	unit		unit	2 unit	0						2 unit	10,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kelurahan Purbalingga Wetan	0 Unit	10,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Peralatan Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Perangko, materai, jasa pos dan jasa pengiriman	bulan bulan bulan bulan		bulan bulan bulan bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 0 bulan	44,182,000						12 bulan 12 bulan 12 bulan 0 bulan	53,364,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat Kelurahan Purbalingga Wetan	0 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat Kelurahan Purbalingga Wetan	12 Laporan	11,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	518,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat Kelurahan Purbalingga Wetan	12 Laporan	2,500,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	32,664,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN dan Masyarakat Kelurahan Purbalingga Wetan	12 Laporan	39,864,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/lapangan dan Jasa pengemudi	jenis unit unit		jenis unit unit	3 jenis 1 unit 4 unit	16,349,000						3 jenis 1 unit 4 unit	45,975,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	6,410,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	13,342,000	KECAMATAN PURBALINGGA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	1,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	2,030,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	8,519,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	30,603,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Kelurahan	persen		persen	100 persen	400,000,000						100 persen	500,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan sarpras kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan	3 kegiatan 11 kegiatan	400,000,000						3 kegiatan 11 kegiatan	500,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Warga Kelurahan Purbalingga Wetan	4 Unit	300,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Warga Kelurahan Purbalingga Wetan	5 Pokmas / Ormas	200,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						513,930,000							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						113,930,000							0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14,500,000							0	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	1,250,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Dokumen	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	13,250,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	0	KECAMATAN PURBALINGGA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,500,000						0		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				4 Laporan	1,500,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						15,531,000						0		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	996,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Paket	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	10,785,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		25 Paket	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Dokumen	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0				5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	3,750,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59,784,000						0		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19,920,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	39,864,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22,615,000							0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	10,130,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 4 Unit	1,800,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit 4 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit 0 Unit	10,685,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit 0 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						400,000,000							0	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						400,000,000							0	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	204,370,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 pokmas/ormas	195,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		8 pokmas/ormas	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							523,478,000						588,961,623	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						123,478,000						188,961,623		
7 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23,980,000						23,980,000		
7 01 01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	5,855,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Dokumen	5,855,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	18,125,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Dokumen	18,125,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,500,000						1,500,000		
7 01 01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,500,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Laporan	1,500,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah						19,566,000						15,049,623		
7 01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1,640,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Paket	1,640,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Paket	2,415,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Paket	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	9,073,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Paket	2,424,623	KECAMATAN PURBALINGGA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	1,320,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Dokumen	1,320,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	2,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan	2,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1,033,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Laporan	750,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	4,500,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Dokumen	4,500,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							70,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Unit	50,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Unit	20,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52,692,000							52,692,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	10,560,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan	10,560,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	42,132,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul			5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Laporan	42,132,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25,740,000							25,740,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	6,300,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit	6,300,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	4,090,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		10 Unit	4,090,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	15,350,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 Unit	15,350,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						400,000,000							400,000,000		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						400,000,000							400,000,000		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan 4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan		3 Unit	200,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul			5. Peningkatan Pelayanan Publik		7 Pokmas / Ormas	200,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN							504,715,000							0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							104,715,000							0	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							21,125,000							0	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	7,875,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	0	KECAMATAN PURBALINGGA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	13,250,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,350,000							0	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1,350,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12,180,000							0	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	562,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Paket	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	6,743,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		10 Paket	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				365 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		365 Dokumen	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	300,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	525,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	4,050,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35,532,000							0	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				13 Laporan	15,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		13 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	20,532,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		100 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						34,528,000							0	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional				0 Unit 5 unit	14,300,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit 5 unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	1,760,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	18,468,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						400,000,000							0	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						400,000,000							0	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN PURBALINGGA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN															
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	122,662,000						100 persen	0		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kunjungan lapangan/Survey/Koordinasi Bidang dalam dan luar daerah			persen	100 persen	20,720,000						100 persen	0		
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	3,320,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Dokumen	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	17,400,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Dokumen	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						900,000							0		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	900,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						14,336,000							0		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	649,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Paket	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	7,928,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Paket	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	547,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Dokumen	0	KECAMATAN PURBALINGGA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	1,660,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	2,058,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	1,494,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Dokumen	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				34 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		34 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						53,756,000							0	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	415,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	12,600,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1,141,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	39,600,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32,950,000							0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	6,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	1,950,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	25,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						400,000,000							0	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						400,000,000							0	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN PURBALINGGA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							487,444,000						487,285,415	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							87,444,000						87,285,415	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							16,932,000						17,043,415	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya perjalanan dinas biasa dan dalam kota				60 kali	6,182,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		60 kali	6,293,415	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan				12 Bulan	10,750,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Bulan	10,750,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							900,000						900,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Honor Pengurus Barang				12 Bulan	900,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Bulan	900,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						21,280,000						21,010,000		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Listrik				2 Jenis	970,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	2 Jenis	700,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	12,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Bulan	12,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya koran Radar Banyumas				12 Bulan	960,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Bulan	960,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Jamuan Tamu				30 orang	2,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	30 orang	2,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Jamuan Rapat				40 Orang	4,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	40 Orang	4,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1,350,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	1,350,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						33,332,000						33,332,000		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		20,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan				12 Bulan	13,332,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Bulan	13,332,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15,000,000						15,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas (Ganti oli, Ganti Suku Cadang dll)				4 Unit	8,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Unit	8,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				2 Jenis	3,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Jenis	3,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor (Rehab Ruang Pelayanan)				1 Unit	4,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	4,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						400,000,000							400,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						400,000,000							400,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				3 kegiatan	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 kegiatan	200,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Kegiatan	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Kegiatan	200,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	111,075,000						100 persen	110,787,012	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	23,850,000						100 persen	23,850,000	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				115 Dokumen	4,600,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		115 Dokumen	4,600,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	19,250,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	19,250,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,500,000							1,500,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1,500,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Laporan	1,500,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12,506,000						12,218,012		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 Paket	658,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Paket	370,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	3,138,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 Paket	3,138,012	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				12 Dokumen	960,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	960,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	1,250,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Laporan	1,250,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	2,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		8 Laporan	2,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	4,500,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 Dokumen	4,500,000	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit	0	KECAMATAN PURBALINGGA	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						54,234,000						54,234,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,920,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	10,920,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	1,050,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 Laporan	1,050,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	42,264,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Laporan	42,264,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18,985,000							18,985,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	6,600,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Unit	6,600,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	850,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Unit	850,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11,535,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	11,535,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						400,000,000							400,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						400,000,000							400,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		10 Unit	200,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		10 Pokmas / Ormas	200,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediannya JAmuan Tamu				60 Orang	544,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		60 Orang	660,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersediannya jamuan rapat				400 Orang	1,660,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		400 Orang	4,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersediannya honorarium operator simda, sim aset, dan SIPD				12 Bulan	4,500,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Bulan	5,400,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							13,700,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya				4 Jenis	0	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Jenis	13,700,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50,000,000							51,064,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				12 Bulan	8,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Bulan	8,800,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Honorarium Operator Komputer dan Honorarium Petugas Kebersihan				12 Bulan	42,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Bulan	42,264,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18,098,000							69,000,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas				4 Unit	6,888,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Unit	16,200,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				4 Jenis	5,560,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Jenis	12,300,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,650,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	40,500,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						400,000,000							500,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						400,000,000						500,000,000		
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Kegiatan	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Kegiatan	260,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan				8 Kegiatan	200,000,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		8 Kegiatan	240,000,000	KECAMATAN PURBALINGGA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						3,584,939,000						5,231,598,500		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan	%		%	100 %	3,474,421,000						100 %	4,982,713,500	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen	1,851,000						2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen	4,906,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	1,228,000	Kab. Purbalingga, Kalimananah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASB	0 Dokumen 2 Dokumen	3,256,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	623,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASB	4 Laporan	1,650,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah kunjungan lapangan/servey/koordinasi/undangan/sppd dalam dan luar daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	bulan orang bulan		bulan orang bulan	12 bulan 30 orang 12 bulan	3,266,344,000						12 bulan 30 orang 12 bulan	4,078,360,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3,229,726,000	Kab. Purbalingga, Kalimananah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	29 Orang/bulan	3,999,792,500	KECAMATAN KALIMANAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	10,967,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Dokumen	29,067,500	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	25,651,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Dokumen	49,500,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan		laporan	2 laporan	747,000						2 laporan	1,980,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	747,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Laporan	1,980,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang		orang	8 orang	0						8 orang	5,170,000	
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	3 Orang	5,170,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persen bulan bulan bulan bulan bulan		Persen bulan bulan bulan bulan bulan	100 Persen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	35,780,000						100 Persen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	71,225,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				26 Paket	1,452,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	26 Paket	3,850,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	28,626,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	40 Paket	45,661,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	548,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Dokumen	1,452,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Laporan	6,600,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2,075,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	1 Laporan	5,500,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	3,079,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Dokumen	8,162,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang yang disediakan	bulan		bulan	12 bulan	0						12 bulan	27,500,000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	5 Unit	27,500,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air	bulan		bulan	12 bulan	126,494,000						12 bulan	152,971,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Laporan	2,915,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Laporan	25,300,000	KECAMATAN KALIMANAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,494,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Laporan	5,500,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	102,000,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Laporan	119,256,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit unit		unit unit	2 unit 6 unit	43,205,000						2 unit 6 unit	640,601,500	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	40,632,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Unit	82,901,500	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 20 Unit	2,573,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	0 Unit 20 Unit	7,700,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	3 Unit	550,000,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	9,475,000						100 %	31,448,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan di Tingkat Kecamatan	dokumen		dokumen	2 dokumen	7,815,000						2 dokumen	29,788,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	7,815,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Dokumen	29,788,000	KECAMATAN KALIMANAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1,660,000						1,660,000		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1,660,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Dokumen	1,660,000	KECAMATAN KALIMANAH	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	44,429,000					100 %	49,500,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Berpartisipasi Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	desa bulan		desa bulan	17 desa 12 bulan	44,429,000					17 desa 12 bulan	49,500,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						16,585,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat	49,500,000	KECAMATAN KALIMANAH	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 12 Laporan	27,844,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat	0 Laporan 12 Laporan	0 0	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	41,510,000					100 %	102,300,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kegiatan Sinergitas dengan POLRI dan TNI	bulan		bulan	12 bulan	30,865,000					12 bulan	57,200,000		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	30,865,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Laporan	57,200,000	KECAMATAN KALIMANAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	dokumen		dokumen	12 dokumen	10,645,000						12 dokumen	45,100,000	
7 01 04 7.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	10,645,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Laporan	45,100,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	15,104,000						100 %	44,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	dokumen		dokumen	2 dokumen	15,104,000						2 dokumen	44,000,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				12 Orang	15,104,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Orang	44,000,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	%		%	100 %	0						100 %	21,637,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	desa		desa	17 desa	0						17 desa	21,637,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Desa/Kelurahan	12 Dokumen	21,637,000	KECAMATAN KALIMANAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						509,046,000						508,875,200		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	109,046,000						100 %	108,875,200	
7 01 01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah kunjungan lapangan/servey/koordinasi/undangan/sppd dalam dan luar daerah Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	bulan		orang bulan	87 orang 12 bulan	15,810,000						87 orang 12 bulan	15,010,000	
7 01 01	2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				87 dokumen	3,210,000	Kab. Purbalingga, Kalimananah, Mewek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	87 dokumen	3,210,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01	2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				60 dokumen	12,600,000	Kab. Purbalingga, Kalimananah, Mewek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	60 dokumen	11,800,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan		laporan	2 laporan	1,500,000						2 laporan	1,800,000	
7 01 01	2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 dokumen	1,500,000	Kab. Purbalingga, Kalimananah, Mewek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	2 dokumen	1,800,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan orang bulan jenis orang jenis orang		bulan orang bulan jenis orang jenis orang	12 bulan 100 orang 12 bulan 15 jenis 40 orang 3 jenis 100 orang	20,680,000						12 bulan 100 orang 12 bulan 15 jenis 40 orang 3 jenis 100 orang	21,008,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 paket	885,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	6 paket	594,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 paket	9,945,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	15 paket	9,814,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 dokumen	1,200,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 dokumen	1,200,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				40 dokumen	1,400,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	40 dokumen	1,400,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3,500,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	3 Laporan	3,500,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				30 dokumen	3,750,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	30 dokumen	4,500,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Prosentase Pengadaan barang milik daerah	bulan Persen		bulan Persen	12 bulan 100 Persen	0						12 bulan 100 Persen	0	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	0 Unit	0	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan bulan Persen bulan		bulan bulan Persen bulan	12 bulan 12 bulan 100 Persen 12 bulan	51,784,000						12 bulan 12 bulan 100 Persen 12 bulan	51,784,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,020,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	12 Laporan	10,020,000	KECAMATAN KALIMANAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	700,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	5 Laporan	700,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	41,064,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	24 Laporan	41,064,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Ilnnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persen jenis jenis unit		Persen jenis jenis unit	100 Persen 1 jenis 1 jenis 5 unit	19,272,000						100 Persen 1 jenis 1 jenis 5 unit	19,273,200	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 unit	11,210,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	5 unit	11,210,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	730,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	3 Unit	730,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7,332,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Mewek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN	1 Unit	7,333,200	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Kelurahan Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	400,000,000						100 % 100 % 100 %	400,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jenis Pokmas		Jenis Pokmas	2 Jenis 6 Pokmas	400,000,000						2 Jenis 6 Pokmas	400,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200,000,000	Kab. Purbalingga, Kalimananah, Mewek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Unit	200,000,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas/Ormas	200,000,000	Kab. Purbalingga, Kalimananah, Mewek	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat	6 Pokmas/Ormas	200,000,000	KECAMATAN KALIMANAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN														
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase temuan pengelolaan anggaran yang di tindaklanjuti	%		%	100 %	98,871,000						100 %	98,677,900	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	18,850,000						12 Dokumen 12 Dokumen	20,400,000	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN				0 Dokumen 12 Dokumen	5,600,000	Kab. Purbalingga, Kalimananah, Karangmanyar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangmanyar	0 Dokumen 12 Dokumen	5,600,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen 0 Dokumen	13,250,000	Kab. Purbalingga, Kalimananah, Karangmanyar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangmanyar	12 Dokumen 0 Dokumen	14,800,000	KECAMATAN KALIMANAH

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	bulan		bulan	12 bulan	1,500,000						12 bulan	1,800,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	1,500,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangmanyar	12 laporan	1,800,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						14,129,000							13,915,900	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	688,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Paket	360,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Gunakan				1 Paket	5,741,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Paket	6,755,900	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan				360 Dokumen	960,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		360 Dokumen	960,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				10 dokumen	840,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		10 dokumen	840,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 dokumen	1,400,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar			5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 dokumen	1,400,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	4,500,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	3,600,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	35,212,000						12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	34,412,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan 12 Dokumen	13,800,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangmanyar	0 Laporan 12 Dokumen	13,800,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DIsediakan				12 dokumen	2,080,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangmanyar	12 dokumen	1,280,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Dokumen	19,332,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangmanyar	12 Dokumen	19,332,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sarana Pokmas		Sarana Pokmas	3 Sarana 1 Pokmas	29,180,000						3 Sarana 1 Pokmas	28,150,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	7,030,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangmanyar	3 Unit	10,000,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit 0 Unit	7,150,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangmanyar	5 Unit 0 Unit	3,150,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang tersedia				1 unit	15,000,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Karangmanyar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kelurahan Karangmanyar	1 unit	15,000,000	KECAMATAN KALIMANAH
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						400,000,000							400,000,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						400,000,000							400,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	220,000,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Karangmanyar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	5 Unit	220,000,000	KECAMATAN KALIMANAH	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	180,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	1 Pokmas / Ormas	180,000,000	KECAMATAN KALIMANAH	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						490,590,000						488,820,652		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				180 Dokumen	4,500,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	180 Dokumen	4,500,000	KECAMATAN KALIMANAH	
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				9 Dokumen	11,925,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	9 Dokumen	11,925,000	KECAMATAN KALIMANAH	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				4 Laporan	1,350,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	4 Laporan	1,350,000	KECAMATAN KALIMANAH	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1,100,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	2 Paket	1,100,000	KECAMATAN KALIMANAH	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	7,783,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	6 Paket	7,783,000	KECAMATAN KALIMANAH	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				224 Dokumen	1,200,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	224 Dokumen	1,200,000	KECAMATAN KALIMANAH	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2,450,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Laporan	2,450,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2,450,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Laporan	2,450,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				9 Dokumen	4,050,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		9 Dokumen	2,450,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	0	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	0	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						33,425,000							33,137,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11,000,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	11,000,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	693,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Laporan	405,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	21,732,000	Kab. Purbalingga, Kalimantan, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Laporan	21,732,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20,357,000							20,475,652	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	7,160,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Unit	11,000,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	760,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	760,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12,437,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	8,715,652	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						400,000,000							400,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						400,000,000							400,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Kegiatan	200,000,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Kegiatan	200,000,000	KECAMATAN KALIMANAH
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	200,000,000	Kab. Purbalingga, Kalimanah, Kalikabong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		8 Pokmas / Ormas	200,000,000	KECAMATAN KALIMANAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,664,914,000						1,664,392,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	tahun		tahun	1 tahun	1,586,083,000						1 tahun	1,585,561,000	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu	dokumen		dokumen	12 dokumen	1,295,000						12 dokumen	1,295,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				1 dokumen	690,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Keamatan Kutasari	1 dokumen	690,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	605,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Keamatan Kutasari	5 Laporan	605,000	KECAMATAN KUTASARI

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	1,364,628,000						100 persen	1,364,628,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1,341,658,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11 Orang/bulan	1,341,658,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	2,970,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 dokumen	2,970,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	20,000,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	dokumen		dokumen	12 dokumen	1,800,000						12 dokumen	1,800,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1,800,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	2 Laporan	1,800,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	0						12 bulan	0	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	0	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	20 Paket	0	KECAMATAN KUTASARI
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum	persen		persen	100 persen	17,627,000						100 persen	17,105,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	744,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	6 Paket	744,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	8,883,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	10 Paket	8,361,000	KECAMATAN KUTASARI

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen 12 dokumen	0	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	0 Dokumen 12 dokumen	0	KECAMATAN KUTASARI
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 laporan	500,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	10 laporan	500,000	KECAMATAN KUTASARI
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	2,000,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	12 laporan	2,000,000	KECAMATAN KUTASARI
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				250 dokumen	5,500,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	250 dokumen	5,500,000	KECAMATAN KUTASARI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	bulan		bulan	12 bulan	0						12 bulan	0	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	1 Unit	0	KECAMATAN KUTASARI
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 unit	0	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	4 unit	0	KECAMATAN KUTASARI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan		bulan	12 bulan	149,003,000						12 bulan	149,003,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 laporan	180,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	5 laporan	180,000	KECAMATAN KUTASARI
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	23,556,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	12 laporan	23,556,000	KECAMATAN KUTASARI

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 paket	875,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	2 paket	875,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	124,392,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	12 laporan	124,392,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	51,730,000						12 bulan	51,730,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 unit	44,120,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	12 unit	44,120,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 unit	2,760,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	20 unit	2,760,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	4,850,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kutasari	5 Unit	4,850,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0		0	0 0	5,344,000						0 0	5,344,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen		dokumen	12 dokumen	4,322,000						12 dokumen	4,322,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan				12 kegiatan	4,322,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kutasari	12 kegiatan	4,322,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	jenis		jenis	6 jenis	1,022,000						6 jenis	1,022,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan				6 jenis	1,022,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kutasari	6 jenis	1,022,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	bulan		bulan	12 bulan	36,368,000						12 bulan	36,368,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan	kegiatan		kegiatan	14 kegiatan	36,368,000						14 kegiatan	36,368,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				14 lembaga 14 Lembaga Kemasyarakatan	17,999,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kutasari	14 lembaga 14 Lembaga Kemasyarakatan	17,999,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				14 laporan	18,369,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kutasari	14 laporan	18,369,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	bulan		bulan	12 bulan	21,749,000						12 bulan	21,749,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	dokumen		dokumen	12 dokumen	21,749,000						12 dokumen	21,749,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 laporan	18,986,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kutasari	12 laporan	18,986,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				11 laporan	2,763,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kutasari	11 laporan	2,763,000	KECAMATAN KUTASARI

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	bulan		bulan	12 bulan	15,370,000						12 bulan	15,370,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik	dokumen		dokumen	12 dokumen	15,370,000						12 dokumen	15,370,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 orang	15,370,000	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Terselenggaran ya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 orang	15,370,000	KECAMATAN KUTASARI
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	%		%	100 %	0						100 %	0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	kegiatan		kegiatan	14 kegiatan	0						14 kegiatan	0	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 dokumen	0	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kutasari	14 dokumen	0	KECAMATAN KUTASARI
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa2				0 Dokumen 2 dokumen	0	Kab. Purbalingga, Kutasari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kutasari	0 Dokumen 2 dokumen	0	KECAMATAN KUTASARI
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,795,713,000							1,951,144,027	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Laporan Disusun	persen		persen	100 persen	1,712,113,000						100 persen	1,868,089,027	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Disusun	persen		persen	100 persen	1,180,000						100 persen	1,180,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	370,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	1 Dokumen	370,000	KECAMATAN MREBET
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	810,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	6 Laporan	810,000	KECAMATAN MREBET
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Dokumen orang/bulan		Dokumen Dokumen orang/bulan	12 Dokumen 12 Dokumen 13 orang/bulan	1,526,671,000						12 Dokumen 12 Dokumen 13 orang/bulan	1,556,641,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1,505,971,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	13 Orang/bulan	1,505,971,000	KECAMATAN MREBET
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	12 Dokumen	750,000	KECAMATAN MREBET
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	19,950,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	12 Dokumen	49,920,000	KECAMATAN MREBET
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	900,000						12 Dokumen	900,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	900,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	2 Laporan	900,000	KECAMATAN MREBET

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Tersedianya Bahan Logistik Kantor	bulan Laporan paket Dokumen paket		bulan Laporan paket Dokumen paket	12 bulan 12 Laporan 4 paket 12 Dokumen 12 paket	14,619,000					12 bulan 12 Laporan 4 paket 12 Dokumen 12 paket	7,965,000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	240,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	1 Paket	240,000	KECAMATAN MREBET
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	9,914,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	2 Paket	3,260,000	KECAMATAN MREBET
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	540,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	12 Dokumen	540,000	KECAMATAN MREBET
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	625,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	12 Laporan	625,000	KECAMATAN MREBET
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	3,300,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	12 Dokumen	3,300,000	KECAMATAN MREBET
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit		unit	6 unit	0						6 unit	10,000,000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	6 Unit	10,000,000	KECAMATAN MREBET

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Pelayana Urusan kantor	bulan		bulan	12 bulan	127,893,000						12 bulan	127,893,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	0 Laporan	0	KECAMATAN MREBET
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	46,440,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	12 Laporan	46,440,000	KECAMATAN MREBET
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	525,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	12 Laporan	525,000	KECAMATAN MREBET
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	80,928,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	12 Laporan	80,928,000	KECAMATAN MREBET
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	40,850,000						100 persen	163,510,027	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	36,600,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	8 Unit	26,600,000	KECAMATAN MREBET
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	1,340,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	27 Unit	134,000,027	KECAMATAN MREBET
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	2,910,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	5 Unit	2,910,000	KECAMATAN MREBET
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Rekomendasi terkait Penyelenggaraan Kegiatan	dokumen		dokumen	10 dokumen	5,479,500						10 dokumen	4,934,500	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi terkait Penyelenggaraan Kegiatan	dokumen		dokumen	10 dokumen	4,470,000						10 dokumen	4,470,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	4,470,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	12 Dokumen	4,470,000	KECAMATAN MREBET
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah fasilitasi pelayanan kepada masyarakat	pelayanan		pelayanan	4560 pelayanan	1,009,500						4560 pelayanan	464,500	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	1,009,500	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	5 Dokumen	464,500	KECAMATAN MREBET
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Failitasi lembaga dan forum kemasyarakatan(Musrenbangdes	kegiatan		kegiatan	19 kegiatan	47,065,000						19 kegiatan	47,065,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Failitasi lembaga dan forum kemasyarakatan(Musrenbangdes)	Kegiatan		Kegiatan	19 Kegiatan	47,065,000						19 Kegiatan	47,065,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				527 Lembaga Kemasyarakatan	14,875,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	527 Lembaga Kemasyarakatan	14,875,000	KECAMATAN MREBET
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	32,190,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	12 Laporan	32,190,000	KECAMATAN MREBET
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	18,420,500						12 kegiatan	18,420,500	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	18,420,500						12 kegiatan	18,420,500	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	15,343,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	12 Laporan	15,343,000	KECAMATAN MREBET

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	3,077,500	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	12 Laporan	3,077,500	KECAMATAN MREBET
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	9,240,000						12 Dokumen	9,240,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik Jumlah Laporan Bulanan Potensi Konflik Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Terlaksananya Pembinaan Pesatuan dan Kesatuan Bangsa	dokumen Dokumen kegiatan orang dokumen orang		dokumen Dokumen kegiatan orang dokumen orang	12 dokumen 12 Dokumen 2 kegiatan 2 orang 12 dokumen 25 orang	9,240,000						12 dokumen 12 Dokumen 2 kegiatan 2 orang 12 dokumen 25 orang	9,240,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				25 Orang	9,240,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	25 Orang	9,240,000	KECAMATAN MREBET
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang difasilitasi oleh Kecamatan	Desa		Desa	19 Desa	3,395,000						19 Desa	3,395,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi oleh Kecamatan	desa		desa	19 desa	3,395,000						19 desa	3,395,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				19 Dokumen	3,395,000	Kab. Purbalingga, Mrebet, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Mrebet	19 Dokumen	3,395,000	KECAMATAN MREBET
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,519,589,000							131,820,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	1,452,589,000						1 dokumen	131,820,000	
7 01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen renstra dan renja	dokumen		dokumen	1 dokumen	1,500,000						1 dokumen	0	
7 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusnya Dokumen Renstra dan Renja			0 Dokumen 2 Dokumen	1,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen Evaluasi (LKPJ, LKD, Laporan bulanan, Laporan pengendalian Renja, sakip/lakip yang tersusun	0 Dokumen 2 Dokumen	0	KECAMATAN BOBOTSARI	
7 01 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Dokumen 0 Laporan	500,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen Evaluasi (LKPJ, LKD, Laporan bulanan, Laporan pengendalian Renja, sakip/lakip yang tersusun	6 Dokumen 0 Laporan	0	KECAMATAN BOBOTSARI	
7 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,253,172,000							0	
7 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 Orang 12 Orang/bulan	1,204,277,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Orang 12 Orang/bulan	0	KECAMATAN BOBOTSARI	
7 01 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Kunjungan Lapangan/Survey/koordinasi dalam dan Luar Daerah			0 Dokumen 150 Kegiatan	24,800,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Dokumen 150 Kegiatan	0	KECAMATAN BOBOTSARI	
7 01 01	2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD tersusnya SPM, LRA, laporan keuangan			0 Dokumen 12 Dokumen	24,095,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Dokumen 12 Dokumen	0	KECAMATAN BOBOTSARI	
7 01 01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersusnya dokumen renstra dan renja		dokumen	1 dokumen	3,600,000					1 dokumen	0		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya honor pejabat pengadaan, PPHP, Pkom, Pengurus barang				0 Laporan 2 Orang	3,600,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Laporan 2 Orang	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							5,000,000	
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia		2 Orang	5,000,000	KECAMATAN BOBOTSARI
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						22,800,000							2,020,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Paket	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor				0 Paket 12 Bulan	12,060,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Paket 12 Bulan	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Tersedianya surat kabar dan majalah				360 Dokumen 12 bulan	1,320,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		360 Dokumen 12 bulan	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		100 Laporan	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat				12 Kegiatan	1,500,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Kegiatan	2,020,000	KECAMATAN BOBOTSARI
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Tersedianya honor operator SIMDA, SIM ASET dan SIPD				0 Dokumen 12 bulan	7,420,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Dokumen 12 bulan	0	KECAMATAN BOBOTSARI

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersusunya dokumen renstra dan renja	dokumen		dokumen	1 dokumen	0					1 dokumen	0		
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Tersediannya kendaraan dinas operasional atau lapangan				2 Unit 2 unit	0	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	2 Unit 2 unit	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersediannya peralatan dan mesin lainnya				4 Unit 4 unit	0	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	4 Unit 4 unit	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						145,517,000						124,800,000		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersediannya peranko,materai,jasa pos dan jasa pengiriman				60 Laporan 12 bulan	300,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		60 Laporan 12 bulan	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersediannya jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik				0 Laporan 12 Bulan	18,425,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan 12 Bulan	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan terpeliharanya peralatan kantor				0 Laporan 12 Bulan	0	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan 12 Bulan	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72 Laporan	126,792,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		72 Laporan	124,800,000	KECAMATAN BOBOTSARI
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26,000,000						0		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/lapangan dan jasa pengemudi				0 Unit 9 unit	25,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Unit 9 unit	0	KECAMATAN BOBOTSARI	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya				0 Unit 25 unit	1,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Unit 25 unit	0	KECAMATAN BOBOTSARI	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	5 Unit	0	KECAMATAN BOBOTSARI	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						5,000,000						0		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						5,000,000						0		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa				0 Dokumen 11 Kegiatan	5,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Dokumen 11 Kegiatan	0	KECAMATAN BOBOTSARI	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0						0		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	0	KECAMATAN BOBOTSARI	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						20,000,000						0		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						20,000,000						0		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa atau Kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/ muskel tepat waktu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 desa 0 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		16 desa 0 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang di fasilitasi Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Kegiatan 0 Laporan	15,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		15 Kegiatan 0 Laporan	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						29,000,000							0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						29,000,000							0	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Kegiatan 0 Laporan	24,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Kegiatan 0 Laporan	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan bersama tokoh agama/ Tokoh masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Kegiatan 0 Laporan	5,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Kegiatan 0 Laporan	0	KECAMATAN BOBOTSARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						12,000,000							0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						12,000,000						0		
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				4 Kegiatan 0 Orang	12,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Kegiatan 0 Orang	0	KECAMATAN BOBOTSARI	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						1,000,000						0		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1,000,000						0		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa				0 Dokumen 16 Kegiatan 16 Kegiatan 1 Dokumen	1,000,000	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Dokumen 16 Kegiatan 16 Kegiatan 1 Dokumen	0	KECAMATAN BOBOTSARI	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kepala desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 desa 0 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Bobotsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 desa 0 Dokumen	0	KECAMATAN BOBOTSARI	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,590,384,000						2,075,342,435		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketersediaan laporan kinerja	%		%	100 %	1,522,248,000					100 %	1,855,705,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	dok laporan		dok laporan	1 dok 1 laporan	2,030,000						1 dok 1 laporan	5,508,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1,130,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Karangreja	2 Dokumen	4,346,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	900,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Karangreja	6 Laporan	1,162,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	1,369,533,000						100 %	1,493,081,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1,342,058,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Kecamatan Karangreja	12 Orang/bulan	1,453,481,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				200 dokumen	1,125,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Kecamatan Karangreja	200 dokumen	4,600,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	26,350,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kantor Kecamatan Karangreja	12 Dokumen	35,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	bulan		bulan	12 bulan	1,800,000						12 bulan	2,700,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1,800,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor Kec. Karangreja	12 Laporan	2,700,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							12,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	0	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		16 Paket	12,000,000	KECAMATAN KARANGREJA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya jamuan rapat	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	29,989,000						12 bulan 12 bulan	43,620,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1,320,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangreja	12 Paket	2,500,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	17,444,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangreja	12 Paket	25,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangreja	12 Dokumen	1,200,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				142 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangreja	142 Laporan	2,500,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	4,625,000				5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangreja	60 Laporan	5,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	6,600,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Karangreja	12 Dokumen	7,420,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							80,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Unit	40,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Unit	40,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya peralatan kantor Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	78,396,000						12 bulan 12 bulan	87,796,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	18,000,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Karangreja	36 Laporan	18,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Karangreja	36 Laporan	7,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	60,396,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Karangreja	36 Laporan	62,796,000	KECAMATAN KARANGREJA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan dan jasa pengemudi	bulan unit		bulan unit	12 bulan 9 unit	40,500,000						12 bulan 9 unit	131,000,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	30,000,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana Kantor Kec. Karangreja	12 Unit	75,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	2,500,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana Kantor Kec. Karangreja	12 Unit	6,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8,000,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana Kantor Kec. Karangreja	1 Unit	50,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi pelayanan publik Kecamatan Karangreja Nilai Evaluasi pelayanan publik Kecamatan Karangreja	angka angka		angka angka	3,5 angka 3.5 angka	3,800,000						3,5 angka 3.5 angka	13,272,435	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	keg		keg	11 keg	3,000,000						11 keg	12,500,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				26 Dokumen	3,000,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Karangreja	26 Dokumen	12,500,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						800,000							772,435	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Dokumen	772,435	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan desa maju mandiri	%		%	50 %	15,000,000						50 %	90,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	lembaga lembaga		lembaga lembaga	5 lembaga 5 lembaga	15,000,000						5 lembaga 5 lembaga	90,000,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						7,000,000	Semua Kab/Kota, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Karangreja		40,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	8,000,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Karangreja	7 Laporan	50,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen		dokumen	12 dokumen	35,000,000						12 dokumen	60,365,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	keg bulan		keg bulan	6 keg 12 bulan	35,000,000						6 keg 12 bulan	60,365,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	30,000,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Karangreja	12 Laporan	45,365,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	5,000,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Karangreja	12 Laporan	15,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	%		%	100 %	14,336,000						100 %	45,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	keg		keg	10 keg	14,336,000						10 keg	45,000,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	14,336,000	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Karangreja	100 Orang	45,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang melaksanakan tertib administrasi	%		%	50 %	0						50 %	11,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	desa		desa	7 desa	0						7 desa	11,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				70 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Karangreja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Desa se Kecamatan Karangreja	70 Dokumen	11,000,000	KECAMATAN KARANGREJA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,657,741,000						116,340,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,572,911,000							0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						31,092,000						0		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 paket 0 Paket	1,400,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 paket 0 Paket	0	KECAMATAN KARANGANYAR
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	12,782,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Paket	0	KECAMATAN KARANGANYAR
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				12 Dokumen 0 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen 0 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGANYAR
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Dokumen 0 Laporan	13,550,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		70 Dokumen 0 Laporan	0	KECAMATAN KARANGANYAR
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen 0 Dokumen	3,360,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen 0 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGANYAR
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan				0 Unit 6 unit	0	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit 6 unit	0	KECAMATAN KARANGANYAR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						104,225,000						0		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	90,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	0	KECAMATAN KARANGANYAR
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	19,282,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan	0	KECAMATAN KARANGANYAR
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	3,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan	0	KECAMATAN KARANGANYAR
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	81,353,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	0	KECAMATAN KARANGANYAR
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36,866,000						0		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya				0 Unit 12 Unit	34,756,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit 12 Unit	0	KECAMATAN KARANGANYAR
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 12 Unit	1,460,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit 12 Unit	0	KECAMATAN KARANGANYAR
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	650,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	0	KECAMATAN KARANGANYAR

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						12,690,000						0		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						11,495,000						0		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	11,495,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Dokumen	0 KECAMATAN KARANGANYAR	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1,195,000						0		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	1,195,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Dokumen	0 KECAMATAN KARANGANYAR	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						32,290,000						58,090,000		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						32,290,000						58,090,000		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	4,890,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Lembaga Kemasyarakatan	9,640,000 KECAMATAN KARANGANYAR	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	27,400,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan	48,450,000 KECAMATAN KARANGANYAR	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						25,100,000						35,250,000		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						25,100,000						35,250,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12,850,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Laporan	12,850,000	KECAMATAN KARANGANYAR	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	12,250,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Laporan	22,400,000	KECAMATAN KARANGANYAR	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						9,075,000						0		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						9,075,000						0		
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0 Orang	9,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0 Orang	0	KECAMATAN KARANGANYAR	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						5,675,000						23,000,000		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5,675,000						23,000,000		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				13 Dokumen	5,675,000	Kab. Purbalingga, Karanganyar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	13 Dokumen	23,000,000	KECAMATAN KARANGANYAR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN							1,645,033,000						0	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%		%	100 %	1,564,383,000					100 %	0		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renstra dan renja	persen		persen	100 persen	4,040,000					100 persen	0		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2,760,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGMONCOL
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,280,000	Kab. Purbalingga, Karangmonco, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0		0	KECAMATAN KARANGMONCOL
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	1,388,907,000						100 persen	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	1,298,677,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Orang/bulan	0	KECAMATAN KARANGMONCOL
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	48,910,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGMONCOL
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	41,320,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGMONCOL
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	2,700,000						100 persen	0	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0		0	KECAMATAN KARANGMONCOL
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian SKP	persen		persen	100 persen	0						100 persen	0	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Paket	0	KECAMATAN KARANGMONCOL
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Orang	0	KECAMATAN KARANGMONCOL
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	persen		persen	100 persen	32,956,000						100 persen	0	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1,320,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Paket	0	KECAMATAN KARANGMONCOL

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	7,686,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Paket	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	20,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Laporan	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	0					100 persen	0		
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Unit	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Unit	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Unit	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0			5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	1 Unit	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	71,353,000					100 persen	0		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Laporan	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0		0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	46,978,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Laporan	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan persen		bulan persen	12 bulan 100 persen	64,427,000					12 bulan 100 persen	0		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	58,015,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	0 Unit	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	6,412,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Unit	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Unit	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai evaluasi pelayanan publik	persen		persen	100 persen	3,800,000					100 persen	0		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa	persen		persen	100 persen	3,000,000					100 persen	0		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						800,000						0		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGMONCOL	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan lembaga desa	persen		persen	100 persen	31,850,000					100 persen	0		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	persen		persen	100 persen	31,850,000					100 persen	0		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	13,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN KARANGMONCOL
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	18,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Laporan	0	KECAMATAN KARANGMONCOL
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	persen		persen	100 persen	27,200,000						100 persen	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	27,200,000						100 persen 100 persen	0	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	22,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Laporan	0	KECAMATAN KARANGMONCOL
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Laporan	0	KECAMATAN KARANGMONCOL
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	persen		persen	100 persen	17,800,000						100 persen	0	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	persen		persen	100 persen	17,800,000						100 persen	0	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0 Orang	17,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Orang	0	KECAMATAN KARANGMONCOL

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	persen		persen	100 persen	0						100 persen	0	
7 01 06	2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	persen		persen	100 persen	0						100 persen	0	
7 01 06	2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Dokumen	0	0	KECAMATAN KARANGMONCOL
7		UNSUR KEWILAYAHAN													
7 01		KECAMATAN					1,894,774,000							2,143,848,880	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen		persen	100 persen	1,815,789,000						100 persen	1,987,500,000	
7 01 01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, KL, JIP, laporan bulanan, laporan pengendalian renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun "Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	6 Dokumen 1 Dokumen	2,020,000						6 Dokumen 1 Dokumen	4,040,000	
7 01 01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1,380,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	1 Dokumen	2,760,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 01	2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	640,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	4 Laporan	1,280,000	KECAMATAN REMBANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Dokumen ASN		Dokumen Dokumen ASN	12 Dokumen 3 Dokumen 12 ASN	1,597,987,000						12 Dokumen 3 Dokumen 12 ASN	1,498,119,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	1,576,539,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	13 Orang/bulan	1,460,399,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	3,598,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	1 Dokumen	7,000,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	17,850,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	12 Dokumen	30,720,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	1,800,000						12 Laporan	2,700,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1,800,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	12 Laporan	2,700,000	KECAMATAN REMBANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan "Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD" Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dokumen Dokumen Laporan Paket Paket		Dokumen Dokumen Laporan Paket Paket	12 Dokumen 6 Dokumen 60 Laporan 12 Paket 3 Paket	42,502,000						12 Dokumen 6 Dokumen 60 Laporan 12 Paket 3 Paket	76,979,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1,500,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	3 Paket	3,000,000	KECAMATAN REMBANG	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	20,822,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	14 Paket	36,003,000	KECAMATAN REMBANG	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1,080,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	12 Dokumen	1,320,000	KECAMATAN REMBANG	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	12 Laporan	6,000,000	KECAMATAN REMBANG	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	12,500,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	20 Laporan	23,236,000	KECAMATAN REMBANG	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	6,600,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	6 Dokumen	7,420,000	KECAMATAN REMBANG	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							106,100,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Unit	45,000,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		5 Unit	33,200,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 Unit	27,900,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	125,555,000						12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	148,032,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	600,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	2 Laporan	1,200,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21,960,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	12 Laporan	21,960,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,535,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	1 Laporan	1,680,000	KECAMATAN REMBANG

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	101,460,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	12 Laporan	123,192,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya "Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	1 Unit 10 Unit 2 Unit	45,925,000						1 Unit 10 Unit 2 Unit	151,530,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	36,950,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	10 Unit	72,975,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1,725,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	2 Unit	8,000,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	7,250,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan	8 Unit	70,555,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Persen		Persen	100 Persen	8,533,000						100 Persen	16,413,880	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	6,448,000						12 Dokumen	14,329,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	6,448,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat	2 Dokumen	14,329,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	2,085,000						12 Dokumen	2,084,880	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan				60 Dokumen	2,085,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat	60 Dokumen	2,084,880	KECAMATAN REMBANG
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	Persen		Persen	100 Persen	32,232,000						100 Persen	62,123,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						32,232,000							62,123,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						16,752,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat		27,799,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	15,480,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat	12 Laporan	34,324,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan Kecamatan Rembang	Persen		Persen	100 Persen	26,800,000						100 Persen	31,905,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan	26,800,000						12 Laporan 12 Laporan	31,905,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	22,200,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat	12 Laporan	22,705,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	4,600,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat	12 Laporan	9,200,000	KECAMATAN REMBANG

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang dilaporkan Kecamatan Rembang	Persen		Persen	100 Persen	11,420,000						100 Persen	25,247,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang		Orang	200 Orang	11,420,000						200 Orang	25,247,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				300 Orang	11,420,000	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat	300 Orang	25,247,000	KECAMATAN REMBANG
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0							20,660,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0							20,660,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Rembang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	20,660,000	KECAMATAN REMBANG
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,638,146,000							1,624,671,265	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen		persen	100 persen	1,570,046,000						100 persen	1,556,071,265	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Telaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	600,000						1 dokumen	600,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				1 dokumen	300,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	1 dokumen	300,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksanaanya evaluasi kinerja perangkat daerah				4 dokumen	300,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	4 dokumen	300,000	KECAMATAN BOJONGSARI

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Gaji dan Tunjangan Terbayar Tepat Waktu Jumlah Kunjungan Lapangan/survey/koordinasi/pengabdian/sppd dalam dan luar daerah Tersedianya dokumen SPM,LRA,LK,SKPD dan Honor Pengelola	ASN laporan ASN laporan		ASN laporan ASN laporan	10 ASN 17 laporan 6 laporan	1,310,440,000						10 ASN 17 laporan 6 laporan	1,310,440,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Gaji dan Tunjangan Terbayar Tepat Waktu				10 orang/bulan	1,285,115,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	10 orang/bulan	1,285,115,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				17 Dokumen	5,000,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	17 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	20,325,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	6 Dokumen	20,325,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Aset RKBMD, Pengurus Barang	dokumen		dokumen	12 dokumen	900,000						12 dokumen	900,000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	900,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	1 Laporan	900,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Jamuan Rapat Tersedianya Operator SIM ASET,SIMDA,SIPD Tersedianya Perlengkapan Listrik Tersedianya Surat Kabar dan Majalah	paket laporan paket laporan		paket laporan paket dokumen	12 paket 12 laporan 12 laporan 2 paket 12 dokumen	25,986,000						12 paket 12 laporan 12 laporan 2 paket 12 dokumen	12,011,265	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2 paket	945,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	2 paket	945,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	20,031,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	3 Paket	6,056,265	KECAMATAN BOJONGSARI

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	660,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	12 Dokumen	660,000	KECAMATAN BOJONGSARI	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	0 Laporan	0	KECAMATAN BOJONGSARI	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	1,050,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	2 Laporan	1,050,000	KECAMATAN BOJONGSARI	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Aistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen 3 dokumen	3,300,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	0 Dokumen 3 dokumen	3,300,000	KECAMATAN BOJONGSARI	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Unit	0	KECAMATAN BOJONGSARI	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan laporan		laporan laporan	12 laporan 12 laporan	205,200,000					12 laporan 12 laporan	205,200,000		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 0 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	0 Laporan 0 Laporan	0	KECAMATAN BOJONGSARI	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tesediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Laporan	34,800,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	3 Laporan	34,800,000	KECAMATAN BOJONGSARI	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Laporan 0 Laporan		Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	0 Laporan 0 Laporan	0	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	170,400,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	12 Laporan	170,400,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit unit unit		unit unit unit	3 unit 3 unit 10 unit	26,920,000						3 unit 3 unit 10 unit	26,920,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10 unit	20,000,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	10 unit	20,000,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2,070,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	3 Unit	2,070,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3 unit	4,850,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	3 unit	4,850,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Kecamatan Bojongsari	persen		persen	100 persen	12,000,000						100 persen	12,500,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen		dokumen	3 dokumen	11,500,000						3 dokumen	12,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 dokumen	11,500,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kecamatan Bojongsari	3 dokumen	12,000,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Pelayanan Paten bersifat non perizinan	dokumen		dokumen	5 dokumen	500,000						5 dokumen	500,000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	500,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	500,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keaktifan Lembaga desa dan Kelurahan Kecamatan Bojongsari	persen		persen	100 persen	20,000,000						100 persen	20,000,000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang/muskel tepat waktu Jumlah Kegiatan Kegiatan Kemasyarakatan Yang Difasilitasi	desa kegiatan		desa kegiatan	13 desa 13 kegiatan	20,000,000						13 desa 13 kegiatan	20,000,000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Bojongsari	0 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang Difasilitasi				13 Laporan	10,000,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Bojongsari	13 Laporan	10,000,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan Kecamatan Bojongsari	persen		persen	100 persen	23,100,000						100 persen	23,100,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Bersama Tokoh Agama/tokoh masyarakat Jumlah Kegiatan Sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan	12 kegiatan 12 kegiatan	23,100,000						12 kegiatan 12 kegiatan	23,100,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan				12 Laporan	11,100,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat dengan Kecamatan	12 Laporan	11,100,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12,000,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat dengan Kecamatan	12 Laporan	12,000,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang dilaporkan Kecamatan Bojongsari	persen		persen	100 persen	10,000,000						100 persen	10,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	10,000,000						2 kegiatan	10,000,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 orang	10,000,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan	100 orang	10,000,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan Bojongsari	persen		persen	100 persen	3,000,000						100 persen	3,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen		dokumen	13 dokumen	3,000,000						13 dokumen	3,000,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				13 Dokumen	3,000,000	Kab. Purbalingga, Bojongsari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN BOJONGSARI
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,593,359,000							4,034,833,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	dokumen		dokumen	4 dokumen	2,534,918,000						4 dokumen	3,864,323,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (>8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	ASN		ASN	22 ASN	1,325,000						22 ASN	4,040,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	925,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN PADAMARA	0 Dokumen	2,760,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	400,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN KECAMATAN PADAMARA	0 Laporan	1,280,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	ASN		ASN	22 ASN	2,301,381,000						22 ASN	2,400,623,000	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 orang	2,260,031,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	11 orang	2,328,948,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	4,100,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Kecamatan Padamara	1 Dokumen	16,000,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 dokumen	37,250,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	12 dokumen	55,675,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Honor Pengurus Barang	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,500,000						12 Bulan	2,700,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	1,500,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	4 Laporan	2,700,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum penunjang oprasional kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	0						12 Bulan	7,000,000	
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	0	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	20 Paket	7,000,000	KECAMATAN PADAMARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor	% Bulan		% Bulan	100 % 12 Bulan	25,445,000						100 % 12 Bulan	63,261,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1,000,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	1 paket	3,500,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	14,745,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	1 paket	33,721,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	450,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	24 Dokumen	1,320,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 laporan	1,750,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	12 laporan	8,000,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 dokumen	2,000,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	1 dokumen	9,300,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 dokumen	5,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	1 dokumen	7,420,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik Daerah	unit		unit	0 unit	0						0 unit	275,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	3 Unit	60,000,000	KECAMATAN PADAMARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	8 Unit	75,000,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 unit	0	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	7 unit	140,000,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	158,027,000						100 persen 100 persen	188,502,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 dokumen	300,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	1 dokumen	500,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 dokumen	25,800,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	12 dokumen	25,800,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1,400,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	1 paket	1,575,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 dokumen	130,527,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	1 dokumen	160,627,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	erpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	bulan		bulan	12 bulan	47,240,000						12 bulan	923,197,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 unit	46,190,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	7 unit	93,697,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 unit	1,050,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	1 unit	9,500,000	KECAMATAN PADAMARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"				7 unit	0	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	7 unit	820,000,000	KECAMATAN PADAMARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen		persen	100 persen	4,100,000						100 persen	23,570,000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persen		persen	100 persen	4,000,000						100 persen	23,330,000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 dokumen	4,000,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	1 dokumen	23,330,000	KECAMATAN PADAMARA
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan	pelayanan		pelayanan	16 pelayanan	100,000						16 pelayanan	240,000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 dokumen	100,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	1 dokumen	240,000	KECAMATAN PADAMARA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	14,591,000						5 kegiatan	55,675,000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	14,591,000						5 kegiatan	55,675,000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				14 kegiatan	3,500,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	14 kegiatan	22,675,000	KECAMATAN PADAMARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 1 Laporan	11,091,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	0 Laporan 1 Laporan	33,000,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	kegiatan		kegiatan	47700 kegiatan	13,950,000						47700 kegiatan	32,825,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	Kegiatan		Kegiatan	47700 Kegiatan	13,950,000						47700 Kegiatan	32,825,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	12,950,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	2 Laporan	16,825,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1,000,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	1 Laporan	16,000,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	25,800,000						4 Kegiatan	30,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	25,800,000						4 kegiatan	30,000,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				12 orang	25,800,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	12 orang	30,000,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	desa		desa	13 desa	0						13 desa	28,440,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan	desa		desa	13 desa	0						13 desa	28,440,000		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa" Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 unit 0 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	14 unit 0 Dokumen	13,520,000	KECAMATAN PADAMARA	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa"				14 unit	0	Kab. Purbalingga, Padamara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Padamara	14 unit	14,920,000	KECAMATAN PADAMARA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						490,595,000							497,897,067		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						90,595,000								97,897,067	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19,650,000								19,650,000	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	3,750,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	3,750,000	KECAMATAN PADAMARA	
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	15,900,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	15,900,000	KECAMATAN PADAMARA	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,350,000							1,800,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansiSKPD				12 Dokumen	1,350,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	1,800,000	KECAMATAN PADAMARA	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						8,552,000							11,807,000		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket 0 Paket	627,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Paket 0 Paket	347,000	KECAMATAN PADAMARA	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1,935,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Paket	4,150,000	KECAMATAN PADAMARA	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Dokumen	1,320,000	KECAMATAN PADAMARA	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	990,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Laporan	990,000	KECAMATAN PADAMARA	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	500,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Laporan	500,000	KECAMATAN PADAMARA	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	4,500,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	12 Dokumen	4,500,000	KECAMATAN PADAMARA	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Dokumen 8 unit 8 Unit	0	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	8 Dokumen 8 unit 8 Unit	0	KECAMATAN PADAMARA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 %	0	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		100 %	0	KECAMATAN PADAMARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35,423,000							36,020,067	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat				0 Laporan 12 laporan	0	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Laporan 12 laporan	0	KECAMATAN PADAMARA
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15,120,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	15,120,000	KECAMATAN PADAMARA
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	971,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Laporan	1,568,067	KECAMATAN PADAMARA
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 lapoara	19,332,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 lapoara	19,332,000	KECAMATAN PADAMARA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25,620,000							28,620,000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperlihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				0 Unit 5 unit	4,500,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit 5 unit	5,500,000	KECAMATAN PADAMARA
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara				0 Unit 5 unit	5,920,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit 5 unit	6,920,000	KECAMATAN PADAMARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /direhabilitasi				0 Unit 1 unit	15,200,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit 1 unit	16,200,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						400,000,000							400,000,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						400,000,000							400,000,000	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun				0 Unit 2 unit	200,000,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit 2 unit	175,840,000	KECAMATAN PADAMARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 pokmas/ormas	200,000,000	Kab. Purbalingga, Padamara, Karangsentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 pokmas/ormas	224,160,000	KECAMATAN PADAMARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						2,161,677,000							2,161,194,199	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja	%		%	100 %	2,086,928,000						100 %	2,085,511,500	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja	%		%	100 %	2,625,000						100 %	2,625,000	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	907,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Pengadegan	1 Dokumen	907,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	1,718,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Pengadegan	6 Laporan	1,718,000	KECAMATAN PENGADEGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	% %		% %	100 % 100 %	1,872,715,000						100 % 100 %	1,872,714,500	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1,862,890,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Pengadegan	16 Orang/bulan	1,862,889,500	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				17 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Pengadegan	17 Dokumen	0	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	9,825,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Pengadegan	12 Dokumen	9,825,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	2,250,000						100 %	2,250,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2,250,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	2 Laporan	2,250,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	22,954,000						100 %	21,538,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,270,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	1 Paket	1,270,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	9,684,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	6 Paket	8,268,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Paket	1,200,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	1 Paket	1,200,000	KECAMATAN PENGADEGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				48 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	48 Laporan	0	KECAMATAN PENGADEGAN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4,200,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	12 Laporan	4,200,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	6,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	0 Dokumen	6,600,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	0	KECAMATAN PENGADEGAN
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 Unit	0	KECAMATAN PENGADEGAN
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		2 Unit	0	KECAMATAN PENGADEGAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	140,592,000						100 %	140,592,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17,400,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	12 Laporan	17,400,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	123,192,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	12 Laporan	123,192,000	KECAMATAN PENGADEGAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	45,792,000						100 %	45,792,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	39,342,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	13 Unit	39,342,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 3 Unit	1,600,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	0 Unit 3 Unit	1,600,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	4,850,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	2 Unit	4,850,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Angka Angka		Angka Angka	3,5 Angka 3.5 Angka	11,791,000						3,5 Angka 3.5 Angka	12,725,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Angka		Angka	3.5 Angka	9,750,000						3.5 Angka	10,684,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	9,750,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	5 Dokumen	10,684,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Angka		Angka	3.5 Angka	2,041,000						3.5 Angka	2,041,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	2,041,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	12 Dokumen	2,041,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	32,214,000						100 %	32,214,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	32,214,000						100 %	32,214,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	18,168,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	0 Lembaga Kemasyarakatan	18,168,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan 0 Laporan	14,046,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	12 Laporan 0 Laporan	14,046,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dok		Dok	12 Dok	20,340,000						12 Dok	20,340,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dok		Dok	12 Dok	20,340,000						12 Dok	20,340,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 12 Laporan	15,300,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	0 Laporan 12 Laporan	15,300,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	5,040,000	Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	12 Laporan	5,040,000	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	%		%	100 %	5,700,000						100 %	5,700,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	%		%	100 %	5,700,000						100 %	5,700,000		
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	5,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	100 Orang	5,700,000	KECAMATAN PENGADEGAN	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	%		%	58 %	4,704,000						58 %	4,703,699		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	%		%	58 %	4,704,000						58 %	4,703,699		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	4,704,000		Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	8 Dokumen	4,703,699	KECAMATAN PENGADEGAN
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen 1 Dokumen	0		Kab. Purbalingga, Pengadegan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Pengadegan	0 Dokumen 1 Dokumen	0	KECAMATAN PENGADEGAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN						1,815,466,000						0			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Umum Yang Sesuai SOP	Persen		Persen	100 Persen	1,757,591,000						100 Persen	0		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Yang Disusun	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	2,030,000						4 Dokumen	0		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1,130,000		Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	900,000		Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	6 Laporan	0	KECAMATAN KARANGJAMBU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Orang Orang/Bulan Orang Orang/Bulan		Dokumen Orang Orang/Bulan Orang Orang/Bulan	12 Dokumen 13 Orang 13 Orang/Bulan 13 Orang 13 Orang/Bulan	1,547,665,000						12 Dokumen 13 Orang 13 Orang/Bulan 13 Orang 13 Orang/Bulan	0	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/Bulan	1,521,365,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	13 Orang/Bulan	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1,125,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	25,175,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,800,000						12 Bulan	0	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Bulan	1,800,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Bulan	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							0	
7 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit		Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				6 paket		Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 paket	0	KECAMATAN KARANGJAMBU

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		13 Orang	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		13 Orang	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		13 Orang	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dokumen Laporan Paket Paket		Dokumen Laporan Paket Paket	12 Dokumen 12 Laporan 12 Paket 1 Paket			29,991,000				12 Dokumen 12 Laporan 12 Paket 1 Paket	0	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket		Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Paket	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 paket		Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 paket	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket		Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	1 paket	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket		Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Paket	0	KECAMATAN KARANGJAMBU

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	2 paket	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Paket	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4,625,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	6,600,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		3 Unit	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		4 Unit	0	KECAMATAN KARANGJAMBU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 Unit	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan	123,660,000						12 Laporan 12 Laporan	0	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Laporan	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17,400,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	0 Laporan	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	106,260,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	2 Unit 1 Unit 12 Unit	52,445,000						2 Unit 1 Unit 12 Unit	0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	45,690,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Unit	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1,420,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	2 Unit	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,335,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	1 Unit	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Rekomendasi Terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokument		Dokument	4 Dokument	4,606,000						4 Dokument	0	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	3,800,000						4 Dokumen	0	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	3,800,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						806,000							0	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	806,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Peningkatan Pelayanan Publik		12 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa	Persen		Persen	100 Persen	14,069,000						100 Persen	0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan Lembaga		Laporan Lembaga	12 Laporan 6 Lembaga	14,069,000						12 Laporan 6 Lembaga	0	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6,819,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	6 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	7,250,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Laporan		Laporan	12 Laporan	30,250,000						12 Laporan	0	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	6 Laporan 12 Laporan	30,250,000						6 Laporan 12 Laporan	0	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	27,450,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6 Laporan	2,800,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	6 Laporan	0	KECAMATAN KARANGJAMBU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	n kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Persen		Persen	100 Persen	8,950,000						100 Persen	0	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang		Orang	10 Orang	8,950,000						10 Orang	0	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				10 Orang	8,950,000	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	0	10 Orang	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						0							0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						0							0	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				11 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		11 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				6 Dokumen	0	Kab. Purbalingga, Karangjambu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		6 Dokumen	0	KECAMATAN KARANGJAMBU
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7 01	KECAMATAN						1,540,089,000							819,898,000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%		%	10 %	1,470,672,000						10 %	615,948,000	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun	dokumen		dokumen	6 dokumen	500,000						6 dokumen	4,040,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	250,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	2,760,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah				0 Laporan 3 laporan	250,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	0 Laporan 3 laporan	1,280,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang digaji dan tunjangan terbayar tepat waktu Jumlah kunjungan lapangan/survei/koordinasi/undangan/sppd dalam dan luar daerah Tersusunnya SPM,LRA,Laporan Keuangan	orang orang Dokumen		orang orang Dokumen	10 orang 140 orang 3 Dokumen	1,307,677,000						10 orang 140 orang 3 Dokumen	63,370,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan 10 ASN	1,278,052,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	0 Orang/bulan 10 ASN	0	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen 226 dokumen	7,000,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	0 Dokumen 226 dokumen	16,900,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 Dokumen	22,625,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	10 Dokumen	46,470,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	%		%	100 %	1,800,000						100 %	2,700,000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				0 Laporan 2 laporan	1,800,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tersedianya Honor pejabat pengadaan, PPHP, PPKom, Pengurus Barang	0 Laporan 2 laporan	2,700,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							0	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 unit		Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 unit		KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket		Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Paket		KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0 orang		Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 orang		KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan				0 orang		Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 orang		KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan				0 orang		Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 orang		KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan logistik Kantor Tersedianya honor operator SIMDA, SIMASET dan SIPD Tersedianya Jamuan Rapat Tersedianya Jamuan Tamu Tersedianya perlengkapan listrik Tersedianya surat Kabar	bulan bulan orang orang buah bulan		bulan bulan orang orang buah bulan	12 bulan 6 bulan 200 orang 100 orang 8 buah 5 bulan	33,072,000						12 bulan 6 bulan 200 orang 100 orang 8 buah 5 bulan	72,979,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	1 Paket	2,000,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				0 PAKET		Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	0 PAKET		KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara			KECAMATAN KERTANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor				0 Paket 12 Paket	15,522,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	0 Paket 12 Paket	34,639,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				0 Paket 4 Paket	0	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	0 Paket 4 Paket	0	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 eksemplar	550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	5 eksemplar	1,320,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara		0	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu				5 Laporan 100 orang	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	5 Laporan 100 orang	10,000,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan 200 orang	7,000,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	12 Laporan 200 orang	17,600,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				6 Dokumen	5,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	6 Dokumen	7,420,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							80,713,000	
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit	0	KECAMATAN KERTANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 Unit	30,213,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 set 0 Unit 20 Unit	0	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		1 set 0 Unit 20 Unit	16,000,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik		0 Unit	34,500,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik			0	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik			0	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	bulan bulan		bulan bulan	7 bulan 12 bulan	83,596,000						7 bulan 12 bulan	89,021,000	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara		0	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	12 Laporan	22,025,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara		0	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Laporan 12 bulan	66,996,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	12 Laporan 12 bulan	66,996,000	KECAMATAN KERTANEGARA

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung KAntaor atau Bangunan lainnya	unit unit unit		unit unit unit	10 unit 13 unit 1 unit	44,027,000						10 unit 13 unit 1 unit	303,125,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	40,542,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Aset Kecamatan Kertanegaras	10 Unit	73,125,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Aset Kecamatan Kertanegaras	5 Unit	5,000,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 unit	1,455,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Aset Kecamatan Kertanegaras	1 unit	225,000,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	%		%	100 %	3,870,000						100 %	29,125,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Desa	kegiatan		kegiatan	11 kegiatan	3,500,000						11 kegiatan	27,025,000	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen 6 kegiatan	3,500,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	6 Dokumen 6 kegiatan	27,025,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait nonperizinan	dokumen		dokumen	12 dokumen	370,000						12 dokumen	2,100,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				120 Dokumen	370,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	120 Dokumen	2,100,000	KECAMATAN KERTANEGARA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0Persentase keaktifan lembaga desa	%		%	100 %	26,772,000						100 %	72,075,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Kelurahan yang melaksanakan Musrenbangdes/muskel tepat waktu Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang difasilitasi	desa kegiatan		desa kegiatan	11 desa 15 kegiatan	26,772,000						11 desa 15 kegiatan	72,075,000	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	4,480,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	6 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan 12 bulan	22,292,000		Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	12 Laporan 12 bulan	57,075,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen		dokumen	12 dokumen	18,800,000						12 dokumen	32,525,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat Jumlah Kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan	orang kegiatan		orang kegiatan	100 orang 8 kegiatan	18,800,000						100 orang 8 kegiatan	32,525,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan				0 Laporan 12 Laporan	14,800,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	0 Laporan 12 Laporan	22,525,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan 12 Laporan	4,000,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	0 Laporan 12 Laporan	10,000,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Potensi konflik yang dilaporkan	%		%	100 %	19,500,000						100 %	50,575,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan	19,500,000						1 kegiatan 1 kegiatan	50,575,000	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				200 Orang 100 persen	19,500,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	200 Orang 100 persen	50,575,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	%		%	65 %	475,000						65 %	19,650,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	kegiatan kegiatan dokumen		kegiatan kegiatan dokumen	11 kegiatan 11 kegiatan 2 dokumen	475,000					11 kegiatan 11 kegiatan 2 dokumen	19,650,000		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen 1 Dokumen	475,000	Kab. Purbalingga, Kertanegara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara	0 Dokumen 1 Dokumen	19,650,000	KECAMATAN KERTANEGARA
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kertanegara		0	KECAMATAN KERTANEGARA
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5,661,660,000						7,558,882,000		
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	1,918,112,000						100 persen	2,486,494,000	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	3,992,000						2 Dokumen 1 Dokumen	9,620,000	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2,332,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen Renja, Dokumen Evaluasi Kinerja (LKJ, LKJiP)	1 Dokumen	5,620,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat				4 Laporan	1,660,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen Renja, Dokumen Evaluasi Kinerja (LKJ, LKJiP)	4 Laporan	4,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya honor pengelola keuangan, pejabat pengadaan, pemeriksa hasil pekerjaan, honor operator dan PTT Tersedianya honor pengelola keuangan, pejabat pengadaan, pemeriksa hasil pekerjaan, honor operator dan PTT	Dokumen orang		Dokumen orang	12 Dokumen 12 orang	1,484,316,000						12 Dokumen 12 orang	1,763,574,000	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	1,417,999,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kesbangpol	35 Orang/bulan	1,418,574,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				180 Dokumen	25,458,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kesbangpol	180 Dokumen	195,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				350 Dokumen	40,859,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN Kesbangpol	350 Dokumen	150,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	3,320,000						12 Laporan	8,000,000	
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3,320,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Milik Daerah pada Kantor Kesbangpol	2 Laporan	8,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang		orang	2 orang	7,262,000						2 orang	20,000,000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	7,262,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Pelayanan Publik	ASN/THL Kantor Kesbangpol	5 Orang	20,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan listrik	bulan dokumen bulan bulan		bulan dokumen bulan bulan	12 bulan 12 dokumen 12 bulan 12 bulan	26,841,000						12 bulan 12 dokumen 12 bulan 12 bulan	74,600,000	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket 0 Paket	429,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	1 Paket 0 Paket	2,700,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,788,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	1 Paket	39,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	996,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	12 Dokumen	3,500,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4,980,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	12 Laporan	15,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 12 Laporan	1,660,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	0 Laporan 12 Laporan	7,200,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	2,988,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	12 Dokumen	7,200,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		unit	2 unit	20,751,000						2 unit	50,000,000	
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20,751,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Barang Penunjang Urusan Kantor	5 Unit	50,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya peralatan kantor tersedianya jasa kebersihan, penjaga malam, operator komputer, pengemudi, dan tenaga teknis lainnya tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya perangko, materai, jasa pos dan pengiriman	bulan bulan bulan bulan		bulan bulan bulan bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	312,697,000						12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	310,700,000	
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,037,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tata Usaha Kantor Kesbangpol	12 Laporan	2,500,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	90,782,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tata Usaha Kantor Kesbangpol	12 Laporan	75,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7,678,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tata Usaha Kantor Kesbangpol	12 Laporan	20,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	213,200,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Tata Usaha Kantor Kesbangpol	12 Laporan	213,200,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>Terpeliharanya peralatan dan mesinnya lainnya</p> <p>Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</p> <p>Tersedianya pemeliharaan dinas/lapangan dan jasa pengemudi</p>	<p>bulan</p> <p>bulan</p> <p>bulan</p>		<p>bulan</p> <p>bulan</p> <p>bulan</p>	<p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p>	58,933,000						<p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p>	250,000,000	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	49,803,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kesbangpol	21 Unit	200,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	4,150,000	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Kesbangpol	30 Unit	20,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,980,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	<p>5. Peningkatan Pelayanan Publik</p> <p>5. Peningkatan Pelayanan Publik</p> <p>5. Peningkatan Pelayanan Publik</p>	Kantor Kesbangpol	1 Unit	30,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	per 10000 orang penduduk		per 10000 orang penduduk	31,9 per 10000 orang penduduk	60,928,000						31,9 per 10000 orang penduduk	314,100,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Koordinasi di Bidang di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	kegiatan kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan kegiatan	4 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan	60,928,000					4 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan	314,100,000		
8 01 02 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Dokumen	26,976,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Penduduk Usia Produktif Kabupaten Purbalingga	12 Dokumen	285,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				102 Orang	31,877,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Penduduk Usia Produktif Kabupaten Purbalingga	102 Orang	21,600,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan				12 Laporan	2,075,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Penduduk Usia Produktif Kabupaten Purbalingga	12 Laporan	7,500,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	per 10.000 penduduk		per 10.000 penduduk	31,90 per 10.000 penduduk	1,778,770,000						31,90 per 10.000 penduduk	2,124,288,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Kordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	kegiatan kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan kegiatan	12 kegiatan 4 kegiatan 18 kegiatan	1,778,770,000					12 kegiatan 4 kegiatan 18 kegiatan	2,124,288,000		
		Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1000 orang	1,672,939,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Penduduk usia 17 s.d. 55 tahun	1000 orang	1,866,788,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1000 Orang	103,756,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Penduduk usia 17 s.d. 55 tahun	1000 Orang	250,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				18 Laporan	2,075,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Pelayanan Publik	Penduduk usia 17 s.d. 55 tahun	18 Laporan	7,500,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang terbina	persen		persen	23,9 persen	651,320,000						23,9 persen	727,500,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	kegiatan kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan kegiatan	10 kegiatan 18 kegiatan 12 kegiatan	651,320,000						10 kegiatan 18 kegiatan 12 kegiatan	727,500,000	
8 01 04 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	256,475,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Kemasyarakatan	12 Dokumen	270,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1000 orang	392,770,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Kemasyarakatan	1000 orang	450,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas				12 Laporan	2,075,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Organisasi Kemasyarakatan	12 Laporan	7,500,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya	per 10000 orang penduduk		per 10000 orang penduduk	31,9 per 10000 orang penduduk	150,809,000						31,9 per 10000 orang penduduk	369,500,000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	kegiatan kegiatan kegiatan		kegiatan kegiatan kegiatan	18 kegiatan 18 kegiatan 12 kegiatan	150,809,000						18 kegiatan 18 kegiatan 12 kegiatan	369,500,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 05 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	25,524,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Penduduk usia produktif	12 Dokumen	62,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				900 Orang	123,210,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Penduduk usia produktif	900 Orang	300,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Laporan	2,075,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Penduduk usia produktif	12 Laporan	7,500,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah potensi konflik sosial yang terpantau	potensi konflik		potensi konflik	60 potensi konflik	1,101,721,000						60 potensi konflik	1,537,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	kegiatan kegiatan kegiatan dokumen		kegiatan kegiatan kegiatan dokumen	12 kegiatan 4 kegiatan 18 kegiatan 12 dokumen	1,101,721,000					12 kegiatan 4 kegiatan 18 kegiatan 12 dokumen	1,537,000,000		

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	494,014,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Aparat Intelijen Daerah, Forkopimda, Instansi/Pihak Terkait (stakeholder)	12 Dokumen	587,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2880 orang	449,998,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Aparat Intelijen Daerah, Forkopimda, Instansi/Pihak Terkait (stakeholder)	2880 orang	550,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	39,427,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik	Aparat Intelijen Daerah, Forkopimda, Instansi/Pihak Terkait (stakeholder)	12 Laporan	100,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	118,282,000	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Peningkatan Pelayanan Publik	Aparat Intelijen Daerah, Forkopimda, Instansi/Pihak Terkait (stakeholder)	12 Dokumen	300,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL							2,054,148,545,000							2,257,447,741,893	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2023

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka ditetapkan target pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel VI. 1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target 2023	Sumber Indikator	Koordinator Penyedia Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	72	Tujuan RPJMD	Sekretariat Daerah
2	Nilai SAKIP	Angka	69	Sasaran RPJMD	Sekretariat Daerah
3	Angka konflik sosial dan kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,49	Tujuan, Sasaran RPJMD	Satpol PP / Kesbangpol
4	Angka Kemiskinan	Persen	14 -15	Tujuan RPJMD	Bappelitbangda, BPS
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	69,86	Tujuan RPJMD	Bappelitbangda, BPS
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	93	Sasaran RPJMD	DinsosdaldukKBP3A
7	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,5 - 5	Tujuan RPJMD	Bappelitbangda, BPS
8	Nilai PDRB per kapita	Rupiah /jiwa	27.154.253	Sasaran RPJMD	Bappelitbangda, BPS
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	< 5	Sasaran RPJMD	Dinnaker, BPS
10	Indeks Desa Membangun	Angka	0,76	Tujuan RPJMD	Dinpermasdes
11	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	80,775	Tujuan RPJMD	DPU-PR
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,43	Tujuan, Sasaran RPJMD	DLH

6.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kab. Purbalingga Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *ultimate outcome* yang menghubungkan kinerja program (*Intermediate outcome*) dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel VI. 2.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Sumber Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,10	Tujuan RENSTRA
		Persentase obyek pemajuan kebudayaan lestari (UU No 5 pasal 5 10 OPK tahun 2017 ttg pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (UU No 11 Tahun 2010)	Point	72,7	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINDIKBUD	Indeks	70,51	Sasaran RENSTRA
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun Dikdas (SD)	Angka	99,75	Sasaran RENSTRA
		Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun Dikdas (SMP)	Angka	95,77	Sasaran RENSTRA
		Angka Partisipasi Kasar PAUD	Angka	89	Sasaran RENSTRA
		Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai perbup no.430/400 tahun 2018 yang dilestarikan atau dikembangkan	Persen	70	Sasaran RENSTRA
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	15	Sasaran RENSTRA
2	Dinas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,3	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINKES	Indeks	73,00	Sasaran RENSTRA
		Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	74,32	Sasaran RENSTRA
		Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH	7,64	Sasaran RENSTRA
		Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	9,12	Sasaran RENSTRA
		Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,18	Sasaran RENSTRA
3		Indeks jalan Mantap	Persen	82,5	Tujuan RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Sumber Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase luas oncoran air irigasi	Persen	72	Tujuan RENSTRA
		Cakupan bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Persen	58	Tujuan RENSTRA
		Ketaatan pelaksanaan penataan ruang	Angka	89,5	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DPU-PR	Indeks	71,21	Sasaran RENSTRA
		Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang	Persen	82,5	Sasaran RENSTRA
		Cakupan Daerah Irigasi yang terlayani	Persen	72	Sasaran RENSTRA
		Persentase peningkatan bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Persen	3	Sasaran RENSTRA
		Persentase pertimbangan teknis pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Persen	89,5	Sasaran RENSTRA
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	Cakupan akses air minum layak	Persen	92,86	Tujuan RENSTRA
		Cakupan sanitasi layak	Persen	92,50	Tujuan RENSTRA
		Cakupan kawasan permukiman perkotaan tidak kumuh	Persen	99,19	Tujuan RENSTRA
		Cakupan Pemanfaatan Tanah Pemda	Persen	92,73	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINRUMKIM	Indeks	69,38	Sasaran RENSTRA
		Persentase peningkatan akses rumah tangga terhadap air minum	Persen	0,40	Sasaran RENSTRA
		Persentase rumah tangga mengakses sanitasi	Persen	0,12	Sasaran RENSTRA
		Persentase peningkatan kawasan tidak kumuh perkotaan	Persen	0,13	Sasaran RENSTRA
		Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang tepat waktu	Persen	100	Sasaran RENSTRA
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Angka penurunan pelanggaran Trantibum	Angka	21,90	Tujuan RENSTRA
		Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respons Time Rate</i>) penanganan kebakaran	Persen	41,67	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP SATPOL PP	Indeks	67	Sasaran RENSTRA
		Angka pelanggaran Trantibum	Per 10.000 penduduk	76,52	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Sumber Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
		Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	Sasaran RENSTRA
6	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,53	Tujuan RENSTRA
		Persentase IKD	Persen	1,92	Sasaran RENSTRA
		Nilai SAKIP Pelaksana BPBD	Indeks	63,32	Sasaran RENSTRA
7	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan PPKS yang mendapatkan program pemerintah	Persen	82,30	Tujuan RENSTRA
		Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,54	Tujuan RENSTRA
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	70,30	Tujuan RENSTRA
		Nilai Kabupaten Layak Anak	Point	610	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINSOSDALDUKKBP3A	Indeks	69,42	Sasaran RENSTRA
		Cakupan KPM Graduasi Sejahtera Mandiri	Persen	10,0	Sasaran RENSTRA
		Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR	Angka	2,02	Sasaran RENSTRA
		Cakupan OPD yang melaksanakan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	48,28	Sasaran RENSTRA
		Cakupan korban kekerasan perempuan yang memperoleh pelayanan komprehensif	Persen	92,86	Sasaran RENSTRA
		Cakupan korban kekerasan anak yang memperoleh pelayanan komprehensif	Persen	100	Sasaran RENSTRA
8	Dinas Tenaga Kerja	Tingkat kesempatan kerja	Persen	95	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINNAKER	Indeks	70,22	Sasaran RENSTRA
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Orang	6.885	Sasaran RENSTRA
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	81,5	Tujuan RENSTRA
		PDRB sektor perikanan	Rupiah	445.000.000.000	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DKPP	Indeks	67,98	Sasaran RENSTRA
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	87,7	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Sumber Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
		Nilai Produksi perikanan tangkap, hias, budidaya dan pengolahan	Rupiah	305.759.535.000	Sasaran RENSTRA
10	Dinas Lingkungan Hidup	Tingkat Kualitas Air dan Udara	Point	52,89	Tujuan RENSTRA
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	14,54	Tujuan RENSTRA
		Cakupan pengelolaan sampah	Persen	36,18	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DLH	Indeks	70,35	Sasaran RENSTRA
		Persentase peningkatan kualitas air dan udara	Persen	0,36	Sasaran RENSTRA
		Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	Persen	5,681	Sasaran RENSTRA
		Cakupan pengurangan sampah	Persen	14,33	Sasaran RENSTRA
		Cakupan penanganan sampah	Persen	21,85	Sasaran RENSTRA
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persen	88,07	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINDUKCAPIL	Indeks	69,50	Sasaran RENSTRA
		Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen	83,01	Sasaran RENSTRA
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persen	93,13	Sasaran RENSTRA
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa dengan kategori desa mandiri dan maju	Persen	44,64	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINPERMASDES	Indeks	67,88	Sasaran RENSTRA
		Jumlah desa naik statusnya	Angka	13	Sasaran RENSTRA
13	Dinas Perhubungan	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Persen	95	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINHUB	Indeks	69,35	Sasaran RENSTRA
		Persentase angkutan umum yang aktif	Persen	71,02	Sasaran RENSTRA
		Persentase sarpras perhubungan kondisi baik	Persen	73,93	Sasaran RENSTRA
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Point	3,05	Tujuan RENSTRA
		Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	Persen	40	Tujuan RENSTRA
		Tingkat Keamanan Informasi Daerah	Persen	63	Tujuan RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Sumber Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
		Nilai SAKIP DINKOMINFO	Indeks	68,62	Sasaran RENSTRA
		Indeks keterbukaan informasi publik	Point	97	Sasaran RENSTRA
		Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data Daerah	Persen	40	Sasaran RENSTRA
		Persentase Pengamanan Informasi Daerah	Persen	100	Sasaran RENSTRA
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase koperasi kategori sangat berkualitas dan berkualitas	Persen	5,69	Tujuan RENSTRA
		Kontribusi UMKM terhadap total PDRB	Persen	64,25	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINKOP UKM	Indeks	69,73	Sasaran RENSTRA
		Persentase koperasi sehat	Persen	57,61	Sasaran RENSTRA
		Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	UKM	28	Sasaran RENSTRA
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	11,44	Tujuan RENSTRA
		Nilai Sakip DPMPTSP	Indeks	71,37	Sasaran RENSTRA
		Realisasi Investasi	Rp. (Milyar)	906	Sasaran RENSTRA
17	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Pemuda berprestasi dalam berbagai sektor di tingkat nasional dan provinsi	Angka	7	Tujuan RENSTRA
		Prestasi olahraga tingkat nasional dan provinsi	Angka	15	Tujuan RENSTRA
		Nilai PDRB bidang pariwisata	Rupiah (juta)	547.087,36	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINPORAPAR	Indeks	71,47	Sasaran RENSTRA
		Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen	62,5	Sasaran RENSTRA
		Tingkat pasrtisipasi atlet dalam kejuaraan olahraga tingkat nasional dan provinsi	Atlet	350	Sasaran RENSTRA
		Angka kunjungan wisata	Orang	2.100.000	Sasaran RENSTRA
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Kearsipan	Point	76	Tujuan RENSTRA
		Indeks Pembangunan Literasi	Point	12	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINARPUS	Indeks	68,27	Sasaran RENSTRA
		Kenaikan persentase perangkat daerah yang mengelola Arsip secara baku	Persen	64	Sasaran RENSTRA
		Rasio perpustakaan aktif per 10.000 penduduk	Persen	4,08	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Sumber Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
19	Dinas Pertanian	PDRB sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Rupiah (000)	6.758.686.290	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP Dinas Pertanian	Indeks	69,30	Sasaran RENSTRA
		Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Rupiah (000)	2.716.657.082	Sasaran RENSTRA
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	5	Tujuan RENSTRA
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persen	4,5	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP DINPERINDAG	Indeks	68,27	Sasaran RENSTRA
		Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHB)	Rp. (juta)	7.896.585	Sasaran RENSTRA
		Nilai PDRB sektor perdagangan (ADHB)	Rp. (juta)	3.485.976	Sasaran RENSTRA
21	Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP	Angka	69	Tujuan RENSTRA
		Rata-rata nilai SAKIP OPD	Angka	72	Sasaran RENSTRA
		Rata-rata capaian kinerja utama OPD rumpun pemerintahan dan kesra	Persen	100	Sasaran RENSTRA
		Rata-rata capaian kinerja utama OPD rumpun ekonomi dan pembangunan	Persen	100	Sasaran RENSTRA
22	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Point	77	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Indeks	68,00	Sasaran RENSTRA
		Cakupan pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100	Sasaran RENSTRA
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Skor Perencanaan	Persen	22	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP BAPPELITBANGDA	Indeks	75,00	Sasaran RENSTRA
		Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	96	Sasaran RENSTRA
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	Persen	76	Sasaran RENSTRA

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Sumber Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
24	Badan Keuangan Daerah	Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Level	WTP	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP BAKEUDA	Indeks	70,77	Sasaran RENSTRA
		Persentase dokumen penganggaran dan dokumen pertanggungjawaban anggaran yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100	Sasaran RENSTRA
		Persentase kenaikan PAD	Persen	2	Sasaran RENSTRA
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Point	78	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP BKPPD	Indeks	69,27	Sasaran RENSTRA
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Point	0,39	Sasaran RENSTRA
26	Inspektorat Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Skala	3,0700	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Indeks	77,00	Sasaran RENSTRA
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	86,20	Sasaran RENSTRA
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase potensi konflik SARA yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	95	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP KESBANGPOL	Indeks	68,00	Sasaran RENSTRA
		Jumlah potensi konflik SARA yang dilaporkan	Potensi	45	Sasaran RENSTRA
		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)	Persen	0	Sasaran RENSTRA
28	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	87	Tujuan RENSTRA
		Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	64 – 65,99	Sasaran RENSTRA

6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai ukuran keberhasilan yang disepakati dalam mengukur tingkat pencapaian Visi Misi Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil kumulatif dan akumulasi pencapaian kinerja *outcome* dari setiap program pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan demikian, capaian kinerja pada akhir periode RPJMD dapat tergambarkan dan terukur tingkat keberhasilannya.

Di samping itu, penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga bertujuan untuk memberikan panduan dalam melakukan evaluasi tingkat pencapaian kinerja tahunan. Indikator kinerja ini menjadi indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci, yang dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap akhir tahun perencanaan, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi hasil evaluasi, guna perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun selanjutnya.

Secara teknis, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, dapat fokus dikelompokkan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila mendasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat sasaran (dampak/impact) pemerintah daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu : 1). Aspek Kesejahteraan Masyarakat; 2). Aspek Pelayanan Umum; dan 3). Aspek Daya Saing Daerah.

Indikator pada aspek Kesejahteraan Masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro, ekonomi dan sosial. Sedangkan Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir Indikator kinerja pada aspek Daya Saing Daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat Indikator Kinerja Kunci setiap di setiap urusan yang juga dimasukkan dalam penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023.

Penetapan indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel VI. 3.
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	1	Pertumbuhan PDRB (ADHK) - Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,5 - 5
2	2	PDRB per kapita	Rupiah /jiwa	27.154.253
3	3	Laju Inflasi	Persen	3±1
4	4	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,86
5	5	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,3
6	6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,10
7	7	Pengeluaran Per Kapita	Rp. (ribu)	10.509,08
8	8	Persentase penduduk miskin	Persen	14 - 15
9	9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	< 5
10	10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,4
11	11	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93
12	12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,54
13	13	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	87,7
14	14	Persentase Desa Rentan Pangan (Prioritas 1, 2 dan 3)	Persen	27
15	15	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	5
16	16	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	4,5
17	17	PDRB sektor pertanian	Rupiah (000)	6.758.686.290
B. Aspek Daya Saing				
18	1	Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	1,54
19	2	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Angka	80,775
20	3	Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	5
21	4	Rasio Ketergantungan	Angka	44,98
22	5	Lama Waktu Perijinan Investasi	Hari	4,2
23	6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan	Angka	87

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
C.	Aspek Pelayanan Umum			
1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (6 urusan bidang)				
1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan				
24	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 – 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	Angka	99,75
25	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	Angka	95,77
26	3	APM PAUD	Angka	76
27	4	Persentase PKBM yang terakreditasi	Persen	66,67
1.01.04. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
28	1	Persentase SD dan SMP dengan rasio guru : murid lebih dari 20	Persen	14,6
1.02. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
29	1	Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat	Persen	51,72
30	2	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Per 100.000	2,22
31	3	Prevalensi stunting (data EPPGM)	Persen	15
32	4	Angka morbiditas	Persen	18,6
1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
33	1	Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	56,52
1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				
34	1	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	Persen	49,43
35	2	Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Persen	34,00
1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
36	1	Persentase Desa/kelurahan Sehat Mandiri	Persen	27,20

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				
37	1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	47
38	2	Persentase bendung kondisi baik	Persen	48,5
1.03.03. Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
39	1	Persentase tambahan rumah tangga yang mendapat akses air minum tahun n	Persen	1,39
1.03.04. Program Pengembangan Sistem & Pengelolaan Persampahan Regional				
40	1	Persentase jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	Persen	2,5
1.03.05. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				
41	1	Persentase tambahan rumah tangga mengakses Sanitasi tahun n	Persen	1,44
1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung				
42	1	Jumlah bangunan pemerintah dalam kondisi baik	Persen	58
1.03.09. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya				
43	1	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	Persen	60
1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan				
44	1	Persentase penambahan jalan dalam kondisi baik dan sedang	Persen	1,4
1.03.11. Program Pengembangan Jasa Kontruksi				
45	1	Persentase jasa konstruksi yang terbina	Persen	69
1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				
46	1	Kawasan yang memiliki dokumen perencanaan tata ruang	kawasan	4
1.04. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.04.02. Program Pengembangan Perumahan				
47	1	Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan	Persen	100
1.04.03. Program Kawasan Permukiman				
48	1	Persentase Luas kawasan kumuh perkotaan tertangani	Persen	24,88

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
1.04.04. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				
49	1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	97,71
1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
50	1	Cakupan Lingkungan perumahan Yang Sehat dan Aman yang didukung PSU layak	Persen	79,25
1.04.06. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
51	1	Persentase fasilitasi permohonan yang tepat waktu	Persen	100
1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1.05.02. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
52	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	99,65
53	2	Presentase penegakkan perda	Persen	12,96
1.05.03. Program Penanggulangan Bencana				
54	1	Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan kebencanaan	Persen	53
1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
55	1	Persentase penanganan kejadian kebakaran	Persen	100
1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial				
56	1	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial	Persen	58,34
1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial				
57	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	45,36
1.06.05. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
58	1	Persentase fakir miskin mendapatkan penanganan sosial	Persen	86,87
1.06.06. Program Penanganan Bencana				
59	1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	94,94

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				
60	1	Persentase TMP dan makam leluhur yang difasilitasi pengelolaannya	Persen	100
2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (18 urusan bidang)				
2.07. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				
2.07.02. Program Perencanaan Tenaga Kerja				
61	1	Persentase ketersediaan dokumen rencana tenaga kerja	Persen	100
2.07.03. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				
62	1	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Persen	3,86
2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja				
63	1	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antarkerja lintas daerah	Persen	50,23
2.07.05. Program Hubungan Industrial				
64	1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	Persen	93,01
2.08. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
65	1	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Legislatif dan perempuan sebagai pengambilan keputusan di OPD	Persen	14,02
66	2	Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan rumah tangga	Persen	30,43
2.08.03. Program Perlindungan Perempuan				
67	1	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	2,43
2.08.05. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				
68	1	Persentase data gender dan anak yang disediakan	Persen	100
2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)				
69	1	Cakupan desa/kelurahan layak anak	Persen	31,38
2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak				
70	1	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus	Persen	26,49
71	2	Persentase anak yang menjadi korban kekerasan yang ditangani	Persen	100

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
2.09. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
2.09.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan				
72	1	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	Persen	54,87
2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
73	1	Persentase konsumsi pangan sesuai dengan AKG	Persen	94,5
2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan				
74	1	Persentase desa rentan pangan (Prioritas I,II dan III)	Angka	24,27
2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan				
75	1	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman	Persen	90
2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				
2.10.04. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				
76	1	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100
2.10.05. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan				
77	1	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	100
2.10.10. Program Penatagunaan Tanah				
78	1	Persentase peningkatan pemanfaatan tanah pemerintah daerah	Persen	0,27
2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
2.11.02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup				
79	1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup.	Persen	100
2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
80	1	Cakupan pemantauan kualitas air dan udara	Persen	100
2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				
81	1	Persentase peningkatan luas RTH	Persen	1,05
2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				
82	1	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	Persen	69,01
2.11.06. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
83	1	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	Persen	100
2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
84	1	Persentase bank sampah yang beroperasi	Persen	64,29
2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
85	1	Persentase sekolah adiwiyata	Persen	6,50
2.11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				
86	1	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan				
87	1	Cakupan area pelayanan sampah	Persen	61,11
2.12.. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk				
88	1	Cakupan kepemilikan KTP elektronik	Persen	99,02
89	2	Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	99,22
90	3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50
2.12.03. Program Pencatatan Sipil				
91	1	Cakupan kepemilikan akte kelahiran dan kematian	Persen	72,68
92	2	Cakupan kepemilikan akte perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak	Persen	100
2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
93	1	Persentase OPD/lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	38,46
2.12.05. Program Pengelolaan Profil Kependudukan				
94	1	Cakupan lembaga/instansi yang memanfaatkan profil data kependudukan dan agregatnya	Persen	96,37

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2.13.02. Program Penataan Desa				
95	1	Persentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa	Persen	100
2.13.03. Program Peningkatan Kerjasama Desa				
96	1	Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif (baik antar desa dan desa dengan pihak ketiga)	Persen	74,55
2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa				
97	1	Persentase Desa tertib administrasi Pemerintahan desa	Persen	48,15
2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				
98	1	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen	63,14
2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
2.14.02. Program Pengendalian Penduduk				
99	1	Persentase ketersediaan dokumen kebijakan pengendalian penduduk	Persen	100
2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
100	1	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need KB)	Persen	9,57
101	2	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	33,70
2.14.04. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
102	1	Cakupan keluarga yang mengikuti kelompok UPPKS	Persen	10,34
103	2	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB), BKR, BKL ber-KB	Persen	83,77
2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
104	1	Persentase layanan angkutan darat	Persen	43,87
105	2	Persentase Perlengkapan jalan kondisi baik	Persen	75

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				
2.16.02. Program Informasi dan Komunikasi Publik				
106	1	Persentase OPD yang memiliki Website aktif	Persen	70
2.16.03. Program Aplikasi Informatika				
107	1	Cakupan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi informatika	Persen	80
2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
2.17.03. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
108	1	Persentase koperasi aktif	Persen	75,1
2.17.04. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				
109	1	Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK	Persen	58
2.17.05. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				
110	1	Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian	Persen	55
2.17.06. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
111	1	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	10
2.17.07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)				
112	1	Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin	Persen	2,5
2.17.08. Program Pengembangan UMKM				
113	1	Persentase UMKM yang difasilitasi	Persen	4,42
2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
114	1	Score Iklim Usaha	Point	80
2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal				
115	1	Jumlah kepeminatan investasi	investor	3
2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal				
116	1	Indeks pelayanan publik bidang investasi	Poin	4
2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal				
117	1	Jumlah kepatuhan perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah	105

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
2.18.06. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				
118	1	Persentase Data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersaji secara update	Persen	34,68
2.19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				
2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				
119	1	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	Persen	29,2
2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				
120	1	Persentase Cabang olah raga yang berprestasi di tingkat regional dan nasional	Persen	45,45
2.19.04. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				
121	1	Persentase kelompok pramuka aktif	Persen	100
2.20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				
2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
122	1	Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar	Persen	80
2.21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				
2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				
123	1	Cakupan Informasi pemerintah daerah melalui santel yang tersampaikan kepada pihak terkait	Persen	100
2.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				
2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan				
124	1	Jumlah Obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	objek	7
2.22.04. Program Pembinaan Sejarah				
125	1	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	Persen	70
2.22.05. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				
126	1	Persentase Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen	15
2.22.06. Program Pengelolaan Permuseuman				
127	1	Persentase benda koleksi museum yang dikelola	Persen	100

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
2.23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan				
128	1	Persentase perpustakaan aktif	Persen	3,24
2.23.03. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno				
129	1	Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)	Persen	60
2.24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				
2.24.02. Program Pengelolaan Arsip				
130	1	Persentase SKPD/Ormas/BUMD/lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Persen	25,89
2.24.03. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				
131	1	Persentase jumlah arsip yang diselamatkan	Persen	100
3.25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				
3.25.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
132	1	Produksi perikanan tangkap	ton	272
3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
133	1	Produksi perikanan budidaya	ton	6634
3.25.06. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
134	1	Produksi olahan ikan	ton	2197
3.26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
135	1	Cakupan daya Tarik wisata yang dikembangkan	Persen	20,59
3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata				
136	1	Cakupan Daya Tarik Wisata Yang meningkat angka kunjungan wisatanya	Persen	55,88
3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
137	1	Jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	Orang	128
3.27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
138	1	Rata rata prosentase ketersediaan sarana pertanian (traktor, pompa air, combine harvester, power thresher, benih padi)	Persen	40

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
3.27.03. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
139	1	Luasan lahan pertanian yang diolah/dimanfaatkan	Persen	100
3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
140	1	Pravalensi penyakit hewan	Persen	19,80
141	2	Persentase daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)	Persen	82
3.27.05. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
142	1	Persentase penanggulangan bencana pertanian	Persen	62
3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian				
143	1	Persentase kelompok tani terbina (katagori madya dan utama)	Persen	11,83
3.30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				
3.30.02. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan				
144	1	Persentase usulan ijin usaha yang diterbitkan / mendapat rekomendasi	Persen	90
3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				
145	1	Persentase Pasar Rakyat Layak usaha	Persen	38,10
3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
146	1	Tingkat kestabilan harga bahan pokok dan penting	Persen	88,89
3.30.05. Program Pengembangan Ekspor				
147	1	Nilai Ekspor	miliar rupiah	2149
3.30.06. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
148	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	52,34
3.31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				
3.31.02. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri				
149	1	Jumlah kelompok IKM yang bersertifikat	Unit	250
3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota				
150	1	Persentase usulan ijin usaha industri yang mendapat rekomendasi	Persen	85

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				
151	1	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	industri	100
3.32. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi				
3.32.03. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi				
152	1	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	3
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (2 unsur)				
4.01. Unsur Sekretariat Daerah				
4.01.02. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
153	1	Rata-rata capaian kinerja program rumpun pemerintahan	Persen	100
154	2	Rata-rata capaian kinerja program rumpun kesra	Persen	100
155	3	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100
4.01.03. Program Perekonomian dan Pembangunan				
156	1	Persentase kenaikan deviden dari sektor BUMD	Persen	6,56
157	2	Capaian realisasi kegiatan rumpun ekonomi dan pembangunan	Persen	100
158	3	Tingkat maturitas kelembagaan UKPBJ	kriteria	7
x.xx.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
159	1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100
160	2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100
161	3	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100
162	4	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	Persen	100
163	5	Persentase pengadaan barang milik daerah	Persen	100
164	6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100
165	7	Persentase ketercapaian Administrasi Keuangan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dan kerumahtanggaan sekretaris daerah	Persen	100
166	8	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	Persen	100
167	9	Berita yang mendapat respon publik	Persen	100

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
168	10	Rata-rata nilai pelaporan dan pengukuran SAKIP OPD	Angka	67
4.02. Unsur Sekretariat DPRD				
x.xx.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
169	1	Cakupan layanan keuangan dan administrasi DPRD	Persen	100
4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				
170	1	Cakupan fasilitasi pelayanan persidangan dan perundang-undangan	Persen	100
171	2	Cakupan fasilitasi pelayanan penganggaran dan pengawasan	Persen	100
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (5 Unsur)				
5.01. Unsur Perencanaan				
5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
172	1	Tingkat keterisian data IKK, SDG's, indikator program	Persen	82,3
173	2	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Persen	100
174	3	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan	Persen	100
5.01.03. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
175	1	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	97,05
176	2	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi	Persen	95,12
177	3	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persen	94,74
5.02. Unsur Keuangan				
5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
178	1	Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Persen	100
179	2	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	Angka	88
180	3	Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	Angka	100

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
181	1	Rekomendasi kebijakan teknis keuangan bidang aset daerah	Dokumen	5
5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
182	1	Persentase pertumbuhan pajak daerah	Persen	4,5
183	2	Cakupan database wajib pajak yang valid	Persen	100
5.03. Unsur Kepegawaian				
5.03.02. Program Kepegawaian Daerah				
184	1	Indeks kualifikasi aspek perencanaan, pengadaan, dan sistem informasi	angka	0,1
185	2	Indeks kualifikasi aspek mutasi, rotasi, promosi	angka	0,04
186	3	Indeks Kinerja dan Disiplin	angka	0,12
187	4	Indeks Kompetensi	angka	0,13
5.04. Unsur Pendidikan dan Pelatihan				
5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
188	1	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pengembangan SDM	Persen	80
5.05. Unsur Penelitian dan Pengembangan				
5.05.02. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				
189	1	Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	Persen	35,71
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (1 unsur)				
6.01. Inspektorat Daerah				
6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan				
190	1	Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik	Persen	64
6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				
191	1	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Angka	2
192	2	Nilai MCP Korsubgah	Angka	75
7. Unsur Kewilayahan (1 unsur)				
7.01. Kecamatan				
7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
193	1	Nilai evaluasi pelayanan publik	Angka	3,1 – 5,00

No.	Indikator Kinerja Daerah		Satuan	Target 2023
7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
194	1	Persentase keaktifan Lembaga desa dan kelurahan	Persen	100
7.01.04. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
195	1	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen	12
7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
196	1	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Persen	100
7.01.06. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
197	1	Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	Persen	45 - 48
8. Unsur Pemerintahan Umum (1 unsur)				
8.01. Kesatuan Bangsa dan Politik				
8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
198	1	Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	per 10.000	31,90
8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				
199	1	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	per 10.000	31,90
8.01.04. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
200	1	Persentase ormas yang terbina	persen	20,96
8.01.05. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				
201	1	Cakupan masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi dan sosial budaya	per 10.000	31,90
8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				
202	1	Jumlah potensi konflik sosial yang terpantau	potensi	45

BAB VII

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan tahun ke-2 atau tahap kedua dalam pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Tahap kedua merupakan keberlanjutan dari tahap pertama dan tetap menjadi tahapan penting untuk menentukan langkah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target pembangunan jangka menengah RPJMD 2021-2026, dengan mendasarkan pada hasil evaluasi target dan capaian pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021.

Selanjutnya dokumen rancangan RKPD ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023, dan bagi Pemerintah Daerah pada akhirnya dokumen rancangan akhir ini akan disempurnakan serta di Perbupkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 setelah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui tahapan Musrenbang sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan serta akan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Adapun perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 pada RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2023 mengacu pada isu strategis dalam Rancangan RPJMD tahun 2021-2026 dengan fokus pada Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, dan mampu Berdaya Saing, Percepatan pemulihan ekonomi pasca *pandemic Covid-19* melalui Pengembangan Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi agar dapat mensejahterakan masyarakat, Pemenuhan Kebutuhan Dasar secara Berkelanjutan, Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah dengan juga melibatkan pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Selain itu juga Rancangan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 ini juga telah memasukkan 7 (tujuh) program kerja unggulan Kepala Daerah sebagaimana yang ada dalam Dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yaitu: 1) Program Bidang Pelayanan Publik; 2) Program Penurunan Pengangguran;

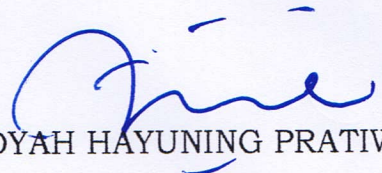
3) Program Penurunan Kemiskinan; 4) Program Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan; 5) Program Bidang Ekonomi; 6) Program Bidang Pembangunan Desa; dan 7) Program Bidang Infrastruktur.

Perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dalam rancangan akhir RKPD tahun 2023 ini juga telah disempurnakan dengan penyesuaian pada arah, kebijakan, prioritas pembangunan Nasional dan penyesuaian pada arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Mendasari pada evaluasi target dan capaian pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021, permasalahan yang ada serta perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, maka tema yang diangkat dalam penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah: **“Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Manusia Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang Didukung Penguatan Perekonomian Daerah, Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan serta Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Desa”**.

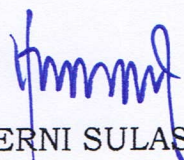
Selanjutnya, besar harapan untuk keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 guna mendukung tercapainya target kinerja tahunan dan terwujudnya Visi dan Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berahlak Mulia.

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG

RKPD TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022